



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH



PERDA RPJMD

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan penyusunannya dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Secara substansi, RPJMD ini adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai janji kampanye pada Pemilu Kepala Daerah Langsung Tahun 2020 yang lalu. Untuk memperkuat substansi Dokumen RPJMD ini, maka dirumuskan pula secara seksama sasaran, strategi, program prioritas, dan arah kebijakan umum.

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 didasarkan atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya tahapan dan substansi dokumen telah disusun secara sistematis mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta regulasi lain yang terkait.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka RPJMD ini sangat terbuka terhadap setiap bentuk saran/ pendapat dan kritik yang konstruktif, demi perbaikan dan penyempurnaan materi yang terdapat dalam dokumen ini. Terhadap setiap bentuk saran/ pendapat dan kritik yang konstruktif dimaksud, akan menjadi bahan untuk penyempurnaan implementasi dari strategi dan arah kebijakan RPJMD yang akan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan.

Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil'alamin, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyediakan data dan informasi yang sangat berguna dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah ini. Tanpa dukungan kontribusi dari para stakeholder, mustahil RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ini dapat tersusun dengan baik. Semoga dokumen ini akan menjadi salah satu sarana mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional.

Painan, 25 Agustus 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMAYUL ANWAR


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xx
 BAB I	
PENDAHULUAN	I -1
1.1. Latar Belakang	I -1
1.2. Landasan Hukum.....	I -3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I -6
1.4. Maksud dan Tujuan	I -8
1.5. Sistematika Penulisan	I -8
 BAB II	
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Kondisi Geografis	II-1
2.1.1.1. Kondisi Topografi	II-3
2.1.1.2. Kondisi Gelologi	II-5
2.1.1.3. Kondisi Hidrologi	II-8
2.1.1.4. Penggunaan Lahan	II-10
2.1.1.3.1. Kawasan Budidaya	II-10
2.1.1.3.2. Kawasan Lindung	II-11
2.1.1.4. Curah hujan	II-13
2.1.2. Kondisi Demografi	II-14
2.1.3. Profil Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-37
2.1.3.1. DDDTLH Berdasarkan Jasa Ekosistem	II-25
2.1.3.2. DDDTLH Supply dan Demand	
2.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah	II-24
2.1.4.1. Analisa Potensi Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah	II-27
2.1.4.2. Analisa Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah	II-34
2.1.5. Kawasan Rawan Bencana	II-44
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-53
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-53
2.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia	II-53
2.2.1.2. Ketimpangan Pendapatan	II-54
2.2.1.3. Kemiskinan	II-55
2.2.1.4. Ketenagakerjaan dan TPT	II-57
2.2.1.5. Produk Domestik Regional Bruto	II-58
2.2.1.6. PDRB Per Kapita	II-64
2.2.1.7. Laju Inflasi	II-65
2.2.2. Kesejahteraan Sosial	II-65
2.2.2.1. Pendidikan	II-65
2.2.2.2. Kesehatan	II-67
2.2.2.3. Indeks Pembangunan Gender	II-74
2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga	II-76
2.2.3.1. Seni dan Budaya	II-76
2.2.3.2. Kepemudaan dan Olahraga	II-76
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-77
2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-78
2.3.1.1. Urusan Pendidikan	II-78
2.3.1.2. Urusan Kesehatan	II-84
2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-89

2.3.1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-91
2.3.1.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-93
2.3.1.6. Urusan Sosial	II-96
2.3.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-97
2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja	II-97
2.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-99
2.3.2.3. Urusan Pangan	II-100
2.3.2.4. Urusan Pertanahan	II-102
2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup	II-103
2.3.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-105
2.3.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-106
2.3.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-107
2.3.2.9. Urusan Perhubungan	II-109
2.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika	II-110
2.3.2.11. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	II-111
2.3.2.12. Urusan Penanaman Modal	II-113
2.3.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	II-114
2.3.2.14. Urusan Statistik	II-115
2.3.2.15. Urusan Persandian	II-115
2.3.2.16. Urusan Kebudayaan	II-117
2.3.2.17. Urusan Perpustakaan	II-118
2.3.2.16. Urusan Kearsipan	II-119
2.3.3. Urusan Pilihan	II-119
2.3.3.1. Urusan Perikanan	II-119
2.3.3.2. Urusan Pariwisata	II-121
2.3.3.3. Urusan Pertanian	II-123
2.3.3.4. Urusan Perdagangan	II-129
2.3.3.5. Urusan Perindustrian	II-130
2.3.3.6. Urusan Transmigrasi	II-131
2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-132
2.3.4.1. Sekretariat Daerah	II-133
2.3.4.2. Sekretariat DPRD	II-133
2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-133
2.3.5.1. Perencanaan	II-133
2.3.5.2. Keuangan	II-134
2.3.5.3. Kepegawaian	II-135
2.3.5.4. Pendidikan dan Pelatihan	II-135
2.3.5.5. Penelitian dan Pengembangan	II-136
2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-136
2.3.6.1. Inspektorat Daerah	II-136
2.3. 7. Unsur Kewilayahan	II-137
2.3.7.1.Kecamatan	II-137
2.3. 7. Unsur Pemerintahan Umum	II-138
2.3.7.1.Kesatuan Bangsa dan Politik	II-138
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-138
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-139
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-142
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-147
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-149
2.5. Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	II-150

	2.6. Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II-154
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
	3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
	3.1.2. Neraca Daerah	III-33
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-35
	3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-37
	3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-37
	3.3. Kerangka Pendanaan	III-40
	3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah	III-41
	3.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah	III-43
	3.3.1.2. Pendapatan Transfer	III-44
	3.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-46
	3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah	III-46
	3.3.3. Proyeksi Pembiayaan	III-50
	3.3.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-53
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
	4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
	4.1.1. Permasalahan Permasalahan Pembangunan Secara Makro	IV-1
	4.1.2. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum	IV-5
	4.1.3. Permasalahan Aspek Daya Saing	IV-13
	4.2. Isu-Isu Strategis Daerah	IV-16
	4.2.1. Telaah Isu Strategis Lingkungan Global	IV-17
	4.2.2. Telaah Isu Strategis Berdasarkan RPJM Nasional tahun 2020 – 2024	IV-17
	4.2.3. Telaah Isu Strategis Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026	IV-22
	4.2.4. Telaah Isu Strategis berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-23
	4.2.5. Telaah Isu Strategis berdasarkan RTRW Pesisir Selatan	IV-25
	4.2.6. Telaah Isu Strategis berdasarkan RPJPD Pesisir Selatan	IV-29
	4.2.7. Isu Strategis Pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD Daerah bersepadan	IV-30
	4.2.8. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan	IV-31
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
	5.1. Visi RPJMD Tahun 2021-2026	V-1
	5.2. Misi RPJMD Tahun 2021-2026.....	V-2
	5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	V-6
	5.3.1. Tujuan Umum	V-6
	5.3.2. Tujuan Pembangunan Sesuai Misi	V-7
	5.3.3. Sasaran Pembangunan	V-10
	5.4. Penyelarasan Visi dan Misi RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat	V-28
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
	6.1. Strategi	VI-1
	6.2. Arah Kebijakan	VI-10

6.3. Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan	VI-25
6.3.1. Pengembangan Sistem Perkotaan	VI-25
6.3.2. Rencana Kawasan Lindung	VI-26
6.3.2.1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	VI-26
6.3.2.2. Kawasan Perlindungan Setempat	VI-27
6.3.3. Kawasan Konservasi	VI-28
6.3.4. Kawasan Lindung Geologi	VI-28
6.3.5. Kawasan Rawan Bencana	VI-29
6.3.6. Kawasan Cagar Budaya	VI-30
6.3.7. Kawasan Ekosistem Mangrove	VI-30
6.3.8. Rencana Kawasan Budidaya	VI-31
6.4. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tetangga	VI-36
6.5. Program Pembangunan Daerah	VI-43
6.6. Program Prioritas	VI-54
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1. Indikator Kinerja Utama	VIII-1
8.2. Indikator Kinerja Daerah	VIII-3
BAB IX PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Luas Kecamatan, Jumlah Nagari dan Kampung pada setiap kecamatan	II-2
Tabel	2.2.	Jenis Tanah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	II-7
Tabel	2.3.	Nama Sungai, Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	II-9
Tabel	2.4.	Penggunaan Lahan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	II-11
Tabel	2.5.	Persentase Kawasan Lindung Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	II-12
Tabel	2.6.	Jumlah Hari Hujan dan Jumlah Curah Hujan di Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	II-13
Tabel	2.7.	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten pesisir selatan Tahun 2020	II-14
Tabel	2.8.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	II-15
Tabel	2.9.	Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk/km ² Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.....	II-17
Tabel	2.10.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	II-17
Tabel	2.11.	Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan	II-20
Tabel	2.12.	Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan	II-21
Tabel	2.13.	Indeks Jasa Ekosistem Budaya di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan	II-23
Tabel	2.14.	Indeks Jasa Ekosistem Pendukung di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan	II-24
Tabel	2.15.	Kondisi Eksisting Daya Dukung Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	II-25
Tabel	2.16.	Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2030	II-26
Tabel	2.17.	Proyeksi Luas Lahan dengan Fungsi Lindung Kabupaten Pesisir Selatan	II-26
Tabel	2.18.	Sebaran, Luas dan Persentase Lahan Pertanian Perkecamatan Kabupaten Pesisir Selatan	II-30
Tabel	2.19.	Luas dan Lokasi Pengembangan Hortikultura Kabupaten Pesisir Selatan	II-31
Tabel	2.20.	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	II-32
Tabel	2.21.	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-33
Tabel	2.22.	Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-34
Tabel	2.23.	Perhitungan Koefisien LQ Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	II-36
Tabel	2.24.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020.....	II-37
Tabel	2.25.	Perhitungan Nilai Shift Share komponen Regional Share Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	II-38
Tabel	2.26.	Perhitungan Nilai Shift Share komponen Proportionally Shift	

	Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	II-39
Tabel 2.27.	Perhitungan Nilai Shift Share komponen Differential Shift Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	II-39
Tabel 2.28.	Perhitungan Nilai Shift Share komponen Nilai Tambah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	II-40
Tabel 2.29.	Perhitungan Nilai Shift Share Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020.....	II-40
Tabel 2.30.	Perhitungan dan Pengelompokan Sektor berdasarkan Tipologi Klassen Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	II-42
Tabel 2.31.	Jenis Bencana dan Jumlah Bencana di Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan	II-45
Tabel 2.32.	Perkembangan Indikator IPM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2020	II-54
Tabel 2.33.	Perkembangan PDRB (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016 – 2020	II-59
Tabel 2.34.	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK) Periode 2016 – 2020	II-62
Tabel 2.35.	Pengeluaran Konsumsi Terhadap PDRB Tahun 2016-2020	II-63
Tabel 2.36.	Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-65
Tabel 2.37.	Kinerja Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020.....	II-76.
Tabel 2.38.	Perkembangan Kinerja Pembangunan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 -2019	II-77
Tabel 2.39.	Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	II-79
Tabel 2.40.	Capaian Kinerja Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-80
Tabel 2.41.	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia, Tahun 2015 – 2019	II-84
Tabel 2.42.	Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-87
Tabel 2.43.	Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-91
Tabel 2.44.	Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-93
Tabel 2.45.	Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-93
Tabel 2.46.	Capaian Kinerja Urusan Kebencanaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-95
Tabel 2.47.	Kejadian Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2.48.	Capaian Kinerja Sosial Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-97
Tabel 2.49.	Capaian Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-98
Tabel 2.50.	Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-99
Tabel 2.51.	Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-102
Tabel 2.52.	Capaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-103

Tabel	2.53.	Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kaupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-104
Tabel	2.54.	Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-106
Tabel	2.55.	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-106
Tabel	2.56.	Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-108
Tabel	2.57.	Capaian Kinerja Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-110
Tabel	2.58.	Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-110
Tabel	2.59.	Capaian Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-112
Tabel	2.60.	Capaian Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-114
Tabel	2.61.	Capaian Kinerja Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-115
Tabel	2.62.	Capaian Kinerja Statistik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-116
Tabel	2.63.	Capaian Kinerja Persandian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-117
Tabel	2.64.	Capaian Kinerja Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-118
Tabel	2.65.	Capaian Kinerja Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-119
Tabel	2.66.	Capaian Kinerja Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-121
Tabel	2.67.	Capaian Kinerja Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-122
Tabel	2.68.	Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-125
Tabel	2.69.	Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Buah-Buahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-126
Tabel	2.70.	Produktivitas dan Pertumbuhan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-128
Tabel	2.71.	Produksi Daging Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-129
Tabel	2.72.	Capaian Kinerja Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-129
Tabel	2.73.	Capaian Kinerja Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	II-130
Tabel	2.74.	Capaian Kinerja Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	II-131
Tabel	2.75.	Capaian Kinerja Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-132
Tabel	2.76.	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-132
Tabel	2.77.	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-133
Tabel	2.78.	Capaian Kinerja Perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-134
Tabel	2.79.	Capaian Kinerja Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-134
Tabel	2.80.	Capaian Kinerja Kepegawaian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun	

		2016-2020	II-135
Tabel	2.81.	Capaian Indikator Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-136
Tabel	2.82.	Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-136
Tabel	2.83.	Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-136
Tabel	2.84.	Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-138
Tabel	2.85.	Wilayah Produktif Kabupaten Pesisir Selatan	II-143
Tabel	2.86.	Akses Penyediaan Layanan Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019	II-144
Tabel	2.87.	Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	II-144
Tabel	2.88.	Ketersediaan Aksesibilitas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-145
Tabel	2.89.	Ketersediaan Sarana Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-146
Tabel	2.90.	Ketersediaan Fasilitas Listrik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-146
Tabel	2.91.	Nilai Investasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	II-147
Tabel	2.92.	SOP dan Perda yang Mendukung Iklim Investasi	II-148
Tabel	2.93.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	II-150
Tabel	2.94.	Pencapaian SPM Tahun 2020	II-151
Tabel	2.95.	Pencapaian Indikator Berdasarkan 17 Goal's dari TPB	II-155
Tabel	2.96.	Pencapaian Indikator Berdasarkan Pilar TPB	II-156
Tabel	2.97.	Capaian Pelaksanaan TPB Kabupaten Pesisir Selatan menurut Kategori Urusan	II-157
Tabel	2.98.	Capaian Pelaksanaan TPB Kabupaten Pesisir Selatan Menurut SPM	II-157
Tabel	2.99.	Capaian Pelaksanaan TPB Kabupaten Pesisir Selatan Menurut OPD	II-158
Tabel	3.1.	Realisasi Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-4
Tabel	3.2.	Rata-Rata Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-6
Tabel	3.3.	Rata-Rata Proporsi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-9
Tabel	3.4.	Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-11
Tabel	3.5.	Rata-Rata Proporsi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-12
Tabel	3.6.	Realisasi Target Pajak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-13
Tabel	3.7.	Realisasi Target Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-15
Tabel	3.8.	Realisasi Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-16
Tabel	3.9.	Realisasi Target Lain-lain PAD Yang Sah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-17
Tabel	3.10.	Realisasi Target Dana Perimbangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-19
Tabel	3.11.	Rata-Rata Proporsi Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-20
Tabel	3.12.	Realisasi Target Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	III-21

		Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	
Tabel	3.13.	Realisasi Target Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-22
Tabel	3.14.	Realisasi Target Dana Alokasi Khusus Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-24
Tabel	3.15.	Realisasi Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-25
Tabel	3.16.	Realisasi Target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-27
Tabel	3.17.	Persentase Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-29
Tabel	3.18.	Rata-Rata Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-31
Tabel	3.19.	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 (Rp Juta)	III-33
Tabel	3.20.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 (RpJuta)	III-34
Tabel	3.21.	Realisasi Belanja Aparatur Tahun 2016-2020	III-36
Tabel	3.22.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab. Pesisir Selatan Tahun 2006-2020	III-37
Tabel	3.23.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	III-39
Tabel	3.24.	Perkembangan Realisasi SiLPA Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	III-40
Tabel	3.25.	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Pesisir Selatan	III-42
Tabel	3.26.	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026	III-48
Tabel	3.27.	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026	III-51
Tabel	3.28.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	III-53
Tabel	3.29.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	III-56
Tabel	5.1.	Proyeksi Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	V-7
Tabel	5.2.	Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	V-19
Tabel	5.3.	Tabel Sinding hasil Penyelarasan dan Dukungan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024	V-29
Tabel	5.4.	Tabel Sinding hasil Penyelarasan dan Dukungan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 Terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	V-33
Tabel	5.5.	Penyelarasan Target Perekonomian Makro Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan Target Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Target Nasional 2020-2024	V-34
Tabel	6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	VI-7
Tabel	6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan	VI-10
Tabel	6.3.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2026	VI-16
Tabel	6.4.	Sistem Perkotaan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan RTRW 2010-2030	VI-26
Tabel	6.5.	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif	VI-44

		Kabupaten Pesisir Selatan	
Tabel	6.6.	Pemetaan Rencana Aksi Program Pembangunan Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2020	VI-60
Tabel	7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan	VII-2
Tabel	7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pesisir Selatan	VII-3
Tabel	8.1.	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026	VIII-1
Tabel	8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026	VIII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1.	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya	I-7
Gambar	1.2.	Diagram Alur Penyusunan Dokumen RPJMD.....	I-13
Gambar	2.1.	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan	II-1
Gambar	2.2.	Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan	II-3
Gambar	2.3.	Peta Kelerengan Kabupaten Pesisir Selatan	II-4
Gambar	2.4.	Peta Ketinggian Kabupaten Pesisir Selatan	II-5
Gambar	2.5.	Peta Geologi Kabupaten Pesisir Selatan	II-6
Gambar	2.6.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Pesisir Selatan	II-8
Gambar	2.7.	Peta Hidrologi Kabupaten Pesisir Selatan	II-9
Gambar	2.8.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pesisir Selatan	II-12
Gambar	2.9.	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan	II-16
Gambar	2.10.	Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	II-18
Gambar	2.11.	Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan Kabupaten Pesisir Selatan	II-22
Gambar	2.12.	Indeks Jasa Ekosistem Pendukung di Kabupaten Pesisir Selatan ...	II-24
Gambar	2.13.	Peta Sebaran Daya Tarik Wisata di Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan	II-29
Gambar	2.14.	Peta Daerah Rawan Bencana Banjir Kabupaten Pesisir Selatan	II-46
Gambar	2.15.	Peta Zona Subduksi Provinsi Sumatera Barat	II-47
Gambar	2.16.	Peta Bahaya Gempa Bumi Patahan Sumatera, Provinsi Sumatera Barat	II-48
Gambar	2.17.	Peta Rawan Bencana Gempa Bumi	II-49
Gambar	2.18.	Peta Rawan Bencana Tsunami	II-50
Gambar	2.19.	Peta Rawan Bencana Gerakan Tanah	II-51
Gambar	2.20.	Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan	II-52
Gambar	2.21.	Perkembangan IPM Pesisir Selatan tahun 2016 – 2020	II-53
Gambar	2.22.	Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Pesisir Selatan periode 2016 – 2020	II-55
Gambar	2.23.	Perkembangan Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pesisir Selatan periode 2016 – 2020	II-56
Gambar	2.24.	Perkembangan P1 dan P2 di Kabupaten Pesisir Selatan periode 2016 – 2020	II-57
Gambar	2.25.	Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat periode 2016 – 2020	II-58
Gambar	2.26.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016 – 2020	II-60
Gambar	2.27.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Lapangan Usaha Periode 2016 – 2020.....	II-61
Gambar	2.28.	Perkembangan PDRB Pesisir Selatan Berdasarkan Sisi Pengeluaran	II-63
Gambar	2.29.	Perbandingan Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Rata-Rata Kabupaten/Kota Periode 2016 – 2020	II-64
Gambar	2.30.	Perkembangan Inflasi Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016 – 2020 yang Direpresentasikan oleh Inflasi Gabungan Kota Padang dan Bukittinggi	II-65
Gambar	2.31.	Perbandingan angka HLS Pesisir Selatan dan Sumatera Barat	II-66

		Tahun 2016 – 2020	
Gambar	2.32.	Perbandingan angka RLS Pesisir Selatan dan Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	II-67
Gambar	2.33.	Perbandingan angka UHH Pesisir Selatan dan Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	II-68
Gambar	2.34.	Perbandingan Usia Harapan Hidup Pesisir Selatan dan Kabupaten/Kota Serta Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II-69
Gambar	2.35.	Perbandingan Angka Stunting Pesisir Selatan, Rata-Rata Kabupaten dan Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	II-71
Gambar	2.36.	Perbandingan angka kesakitan Pesisir Selatan, Rata-Rata Kabupaten dan Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020	II-72
Gambar	2.37.	Indek Pembangunn Gender (IPG) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, Tahun 2016 – 2020 ...	II-75
Gambar	2.38.	Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, Tahun 2016 – 2020	II-75
Gambar	2.39.	Capaian APK PAUD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020.....	II-82
Gambar	2.40.	Capaian APM Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	II-83
Gambar	2.41.	Capaian APK Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	II-83
Gambar	2.42.	Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2016 – 2020	II-86
Gambar	2.43.	Perkembangan Angka Kematian Bayi Dan Angka Kematian Balita Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2016 – 2020	II-86
Gambar	2.44.	Garfik Kejadian Bencana Kebakaran , Banjir dan Longsor Tahun 2011 - 2020	II-96
Gambar	2.45.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Perkapita di Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	II-140
Gambar	2.46.	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Sektor Makanan Tahun 2016-2020	II-141
Gambar	2.47.	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Sektor Non Makanan Tahun 2016-2020	II-142
Gambar	2.48.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2020	II-150
Gambar	2.49.	Pencapaian Indikator TPB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020	II-155
Gambar	3.1.	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020	III-
Gambar	3.2.	Realisasi Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-4
Gambar	3.3.	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 (Rp Juta)	III-7
Gambar	3.4.	Rata-rata Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-8
Gambar	3.5.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-11
Gambar	3.6.	Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-13
Gambar	3.7.	Pertumbuhan Pajak Daerah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-14

Gambar	3.8.	Pertumbuhan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-16
Gambar	3.9.	Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-17
Gambar	3.10.	Pertumbuhan Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-18
Gambar	3.11.	Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-20
Gambar	3.12.	Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-21
Gambar	3.13.	Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-22
Gambar	3.14.	Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-23
Gambar	3.15.	Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-24
Gambar	3.16.	Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-25
Gambar	3.17.	Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-27
Gambar	3.18.	Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020	III-32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang wajib disusun oleh seluruh Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, dimana di Kabupaten Pesisir Selatan Bupati terpilih adalah, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., dan Wakil Bupati adalah Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si. sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tanggal 25 Februari 2021, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, yang telah di lantik tanggal 27 Februari 2021 di Padang.

Kemudian daripada itu, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 640/16/SJ bahwa penulisan RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026, sesuai dengan amanat ayat (7) Pasal 201 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dokumen RPJMD ini memuat: tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Agar rencana pembangunan yang disusun dapat menyelesaikan permasalahan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat, maka RPJMD harus disusun dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta secara *top-down planning* dan *bottom-up planning*, secara seimbang.

Pendekatan teknokratis yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif mensyaratkan proses penyusunannya dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/Nagari, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Tahapan penyusunan RPJMD merupakan proses yang berkesinambungan, dimana setiap tahapan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah. Agar Dokumen RPJMD yang disusun berkualitas, hendaknya proses penyusunan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Dokumen RPJMD yang berkualitas hendaknya berorientasi pada pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/ atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RPJMD.
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD.
3. Penyusunan Rancangan RPJMD.
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
5. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD.
6. Penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025. Sehingga penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini dilakukan dengan berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD ini diawali dengan penyusunan RPJMD Teknokratik.

Selanjutnya, RPJMD Teknokratik yang disusun, diintegrasikan dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih, menjadi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Selanjutnya melalui beberapa tahapan sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka RPJMD ini dibahas Bersama DPRD untuk disepakati Bersama dan selanjutnya dievaluasi oleh Gubernur Sumatera barat hingga menjadi Peraturan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 mengacu kepada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah juncto Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera junto Undang-Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses

- perencanaan dan Penganggaran;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan penyaluran Bantuan Sosial dan/atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD memiliki nilai strategis dalam pembangunan suatu daerah. Sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun, Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

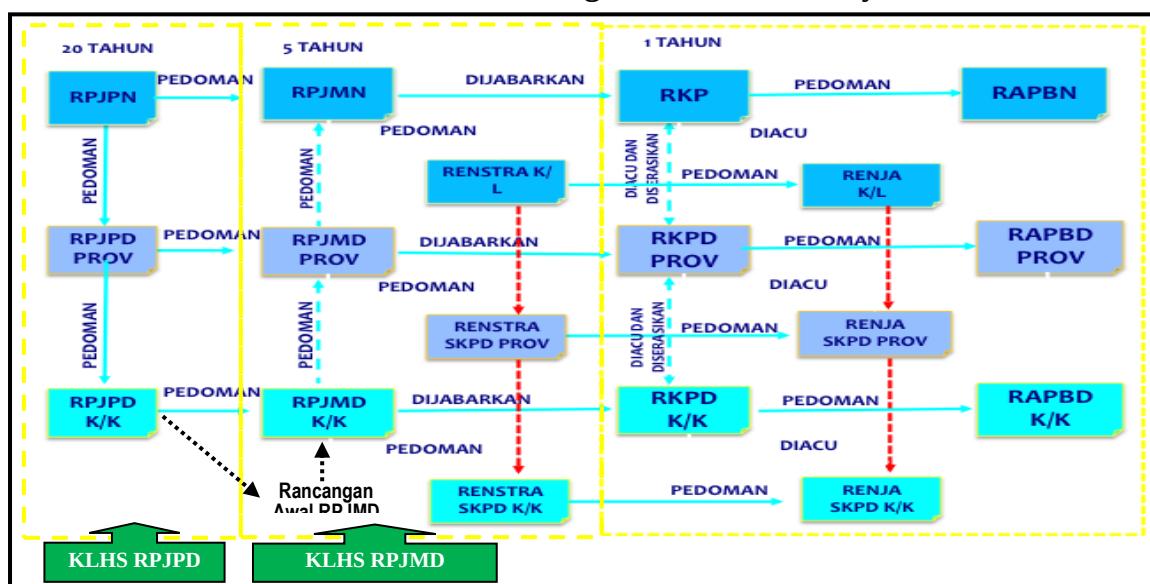
1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta mempertimbangkan asas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.
 3. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMD Daerah bersepadan yaitu Kota Padang, RPJMD Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
 4. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah mengintegrasikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 dan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera serta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 5. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lainnya.
 6. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
 7. Selain itu, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah divalidasi.
 8. Periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026 meskipun masa jabatan Kepala

daerah adalah Tahun 2021-2024. Hal ini sesuai dengan arahan yang terdapat dalam diktum Nomor (3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 640/16/SJ bahwa penulisan RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

Hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diilustrasikan seperti Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Pesisir Selatan dan menjabarkannya ke dalam dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yaitu sebagai pedoman dalam menyusun RKPD dan Renstra PD Tahun 2021- 2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari 9 (sembilan) Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pengantar atau pendahuluan terdiri dari beberapa subbagian yang menjelaskan dasar-dasar penyusunan dokumen RPJMD, kaitannya dengan latar belakang dokumen perencanaan, dasar-dasar hukum atau peraturan dan perundang-undangan yang dipakai landasan dan acuan. Demikian juga di jelaskan keterkaitan antar satu dokumen perencanaan dengan dokumnn perencanaan lainnya, baik dari pemangku kepentingan, segi urusan pembagunan, tahapan dan periodesasinya secara nasional, provinsi ataupun dalam kabupaten.

Pada bagian pendahuluan menjelaskan bahwa dokumen RPJD ini juga memberikan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Pesisir Selatan dan menjabarkannya ke dalam dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan lima tahun ke depan.

Sistematika penulisan juga sudah disampaikan dalam pendahuluan untuk membantu menjelaskan secara singkat isi dan bagian-bagian dalam RPJMD kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 secara menyuruh, sehingga akan memudahkan dalam mendalami Dokumen RPJMD ini.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kondisi daerah merupakan cara untuk memberikan gambaran potensi dan permasalahan daerah yang timbul. Aspek geografis atau kondisi alam yang sudah ada secara alami (topografi dan bentang lahan) dan penggunaan lahan (pengaruh usaha manusia/masyarakatnya) dan kondisi kependudukan atau demografi yang memberikan gambaran umum kaitannya dengan populasi penduduk, gender, permukiman, kawasan, , dalam melihat kesejahteraan masyarakatnya dapat juga di tinjau dari aspek-aspek pelayanan umum. Kemudian juga memberikan gambaran aspek daya saing daerah untuk pengembangan di masa mendatang. Masing masing gambaran dan kondisi tersebut di uraikan dalam sub-sub bagian.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah merupakan gambaran kinerja pemerintahan yang sudah berlalu dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Merupakan hasil dari kebijakan pengelollan keuangan daerah yang dilaksanakan dalam periode tersebut. Kondisi fiskal Kabupaten Pesisir Selatan ini sangat tergantung dan terpengaruh akan dana pemeritah pusat, pendapatan asl daerah, kondisi perekonomian daerah, nasional maupun

internasional. Kerangka pendanaan juga dapat digambarkan sesuai dengan kebutuhan belanja dan pembelanjaan yang terjadi dalam tahun-tahun yang sudah berlangsung.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap* atau perbedaan antara kinerja daerah atau kondisi masyarakat dengan kondisi ideal. Sementara itu, analisis isu strategis merupakan pemahaman terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Isu strategis yang merupakan bagian dari tantangan ataupun peluang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan mengingat begitu besarnya dampak yang ditimbulkan pada masa yang akan datang.

Identifikasi permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis akan menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak diinginkan di masa depan. Sebagian ini merupakan jawaban/hasil analisa dari gambaran umum kondisi daerah dan gambaran keuangan yang menghasilkan permasalahan dan isu-isu strategis terhadap berbagai urusan pemerintahan daerah. Dari seluruh permasalahan dan isu strategis ini memunculkan urusan yang akan menjadi prioritas penanganan sesuai dengan kondisi yang ada dan keadaan fiskal yang sedang berjalan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026 dari Bupati terpilih Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Wakil Bupati terpilih Apt. Rudy Hariansyah, S.Si masa bakti 2021-2024 . Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah yang akan diharapkan terwujud pada akhir tahun 2026.

Visi yang disampaikan ada satu dengan beberapa penekanan pada kesejahteraan, kemajuan, bermartabat, akuntabel dan profesional. Sedangkan misi menjadi enam terdiri dari,

- a. memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat,

- b. memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah,
- c. mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan,
- d. mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing,
- e. mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Masing masing misi tersebut memiliki tujuan dan sasaran masing masing dan tetap mempertimbangkan RPJMD Provinsi dan RPJMN. Semua tujuan dan sasaran dengan program dan kegiatan dengan indikator yang jelas dan terukur, sehingga akan mewujudkan misi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif yang berisikan program-program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya dijabarkan dengan serangkaian arah kebijakan.

Selanjutnya disusun tabulasi berkaitan dengan program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif pada setiap strategi dalam sasaran, tujuan dan misi yang diambil. Semua program harus memiliki outcome dengan indikator kinerja atau tolok ukur yang jelas dan terukur. Capaian kinerja program prioritas awal yang jelas, demikianpun dengan capaian kinerja tahunan yang logis untuk mencapai tujuan akhir RPJMD 2021-2026. Ini akan menjadi tugas bagi perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan daerah baik secara sendiri-sendiri, maupun lintas perangkat dan lintas urusan (*cross cutting*). Program prioritas merupakan kepentingan setiap perangkat daerah yang ada dan para pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program harus memiliki indikator dan target kinerja secara jelas dan terukur pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama perangkat daerah. Pada target kinerja diperkirakan *outcome* yang akan dihasilkan dari program-program, sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta perangkat daerah penanggungjawab urusan pemerintahan daerah.

Secara operasional program-program tersebut harus dijabarkan. Penjabaran program/kegiatan/sub-kegiatan sesuai urusan-urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2021-2026 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Banyak sekali IKU yang dapat digunakan dalam menentukan capaian dari sebuah program kegiatan, akan tetapi dalam RPJMD ini dipilih beberapa puluhan indikator saja yang berkaitan erat dengan prioritas pembangunan daerah.

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. IKD lebih menggambarkan tujuan akhir otonomi daerah yang digunakan untuk mengevaluasi apakah aspek-aspek pengukuran kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan IKD arahkan pada sumbangsih capaian kinerja penyelenggara urusan yaitu Perangkat Daerah terhadap (1) aspek kesejahteraan masyarakat; (2) aspek daya saing daerah; dan (3) aspek pelayanan umum.

BAB IX PENUTUP

Penyusunan RPJMD dengan maksud untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Pesisir Selatan dan menjabarkannya ke dalam dokumen perencanaan

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan lima tahun ke depan secara benar sesuai tahapan dan regulasi yang berlaku, secara aspiratif dan terarah agar untuk mencapai tujuan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026.

Sistematika RPJMD tersebut, adalah satu kesatuan yang saling terkait dan seharusnya selaras. Data kondisi daerah pada Bab II, hendaknya menjadi bahan bagi perumusan permasalahan dan isu-isu strategis daerah pada Bab IV. Selanjutnya permasalahan dan isu strategis inilah yang akan dijadikan alat analisi untuk merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program prioritas pada Bab V dan Bab VI untuk menjawab visi dan misi pembangunan yang diusung oleh kepala daerah.

Program prioritas pada Bab VI, dijadikan rujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan setiap program pada masing-masing urusan pemerintahan yang harus disinkronkan dengan kemampuan keuangan daerah yang sebelumnya telah dihitung dan dianalisis pada Bab III. Pada Gambar di bawah ini diilustrasikan keterkaitan antar Bab penyusun RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Gambar 1.2 Diagram Alur Penyusunan Dokumen RPJMD



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Letak Kabupaten Pesisir Selatan di sisi Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sisi Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Di sisi Utara berbatasan dengan Kota Padang, serta di sisi Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Painan sebagai Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan, berjarak 78 kilometer dari Kota Padang, atau sejauh 102 kilometer dari Bandara Internasional Minangkabau. Jarak tempuh Painan ke Bandara BIM dapat ditempuh dengan perjalanan darat dalam waktu kurang dari 3 jam.

Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah kecamatan dan 182 wilayah nagari. Jumlah nagari (nama lain dari desa) yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan, adalah yang terbanyak diantara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Gambaran terhadap luas masing-masing kecamatan dan jumlah nagari serta kampung dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas Kecamatan, Jumlah Nagari dan Kampung pada Setiap Kecamatan Tahun 2020

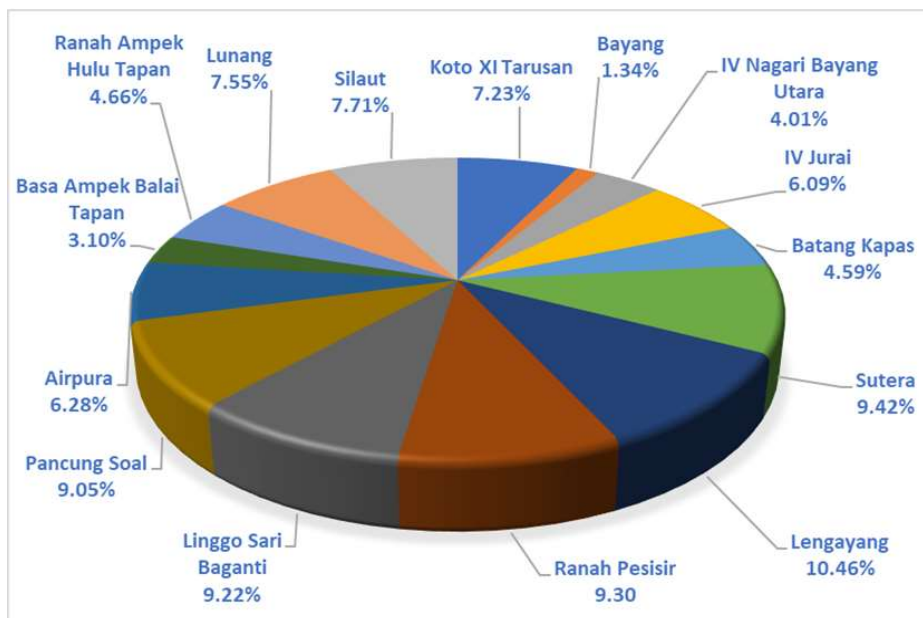
No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Nagari	Jumlah Kampung
A.	Wilayah Darat	6.049,33	182	480
1.	Koto XI Tarusan	437,37	23	51
2.	Bayang	80,92	17	45
3.	IV Nagari Bayang Utara	242,33	6	17
4.	IV Jurai	368,19	20	52
5.	Batang Kapas	277,54	9	29
6.	Sutera	569,81	12	32
7.	Lengayang	632,96	9	45
8.	Ranah Pesisir	562,44	10	27
9.	Linggo Sari Baganti	557,66	16	43
10.	Pancung Soal	547,41	10	24
11.	Airpura	380,10	10	20
12.	Basa Ampek Balai Tapan	187,46	10	20
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	281,96	10	20
14.	Lunang	456,73	28	27
15.	Silaut	466,45	10	28
B.	Wilayah Laut	84,312	84,312	84,312

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Kecamatan terluas di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kecamatan Lengayang, yakni seluas 632,96 km² atau 10,46 % dari total luas keseluruhan Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bayang yakni 80,92 Km² setara

1,34 % dari luas total Kabupaten Pesisir Selatan. Secara lengkap persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Gambar 2.2

Gambar 2.2
Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan



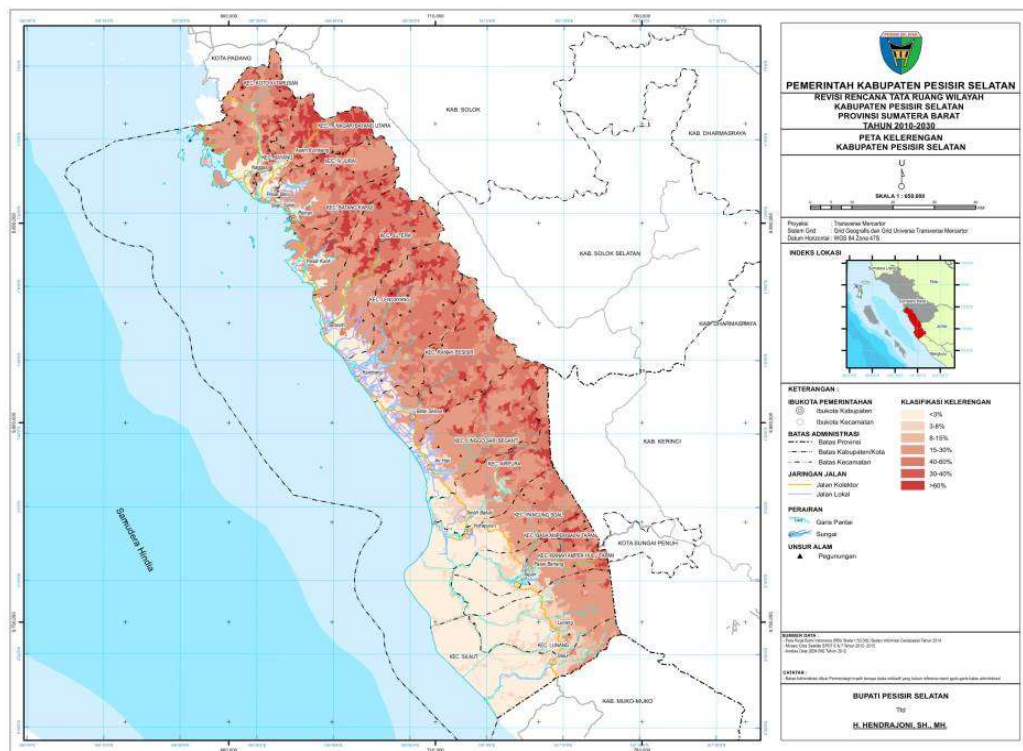
Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

2.1.1.1. Kondisi Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lahan dengan kemiringan $> 40\%$, yakni setara dengan 52,91 % dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Umumnya wilayah dengan kemiringan yang bisa dikatakan curam ini berada di wilayah Utara, wilayah Timur, sampai ke wilayah tengah Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi wilayah dengan kemiringan lereng yang besar ini bisa dimaklumi, sebab di bagian timur Kabupaten Pesisir Selatan membentang jejeran pegunungan Bukit Barisan. Jejeran pegunungan Bukit Barisan ini membentang sejauh 1.650 km, membelah Pulau Sumatera dari Aceh sampai ke Lampung.

Wilayah dengan kemiringan lereng relatif datar ($< 3\% - 8\%$) berjumlah 32 % dari luas wilayah, umumnya berada di wilayah bagian Barat dan bagian Selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 2.3 ditampilkan peta kelerengan yang dapat menggambarkan kondisi kelerengan secara visual.

Gambar 2.3
Peta Kelerengan Kabupaten Pesisir Selatan



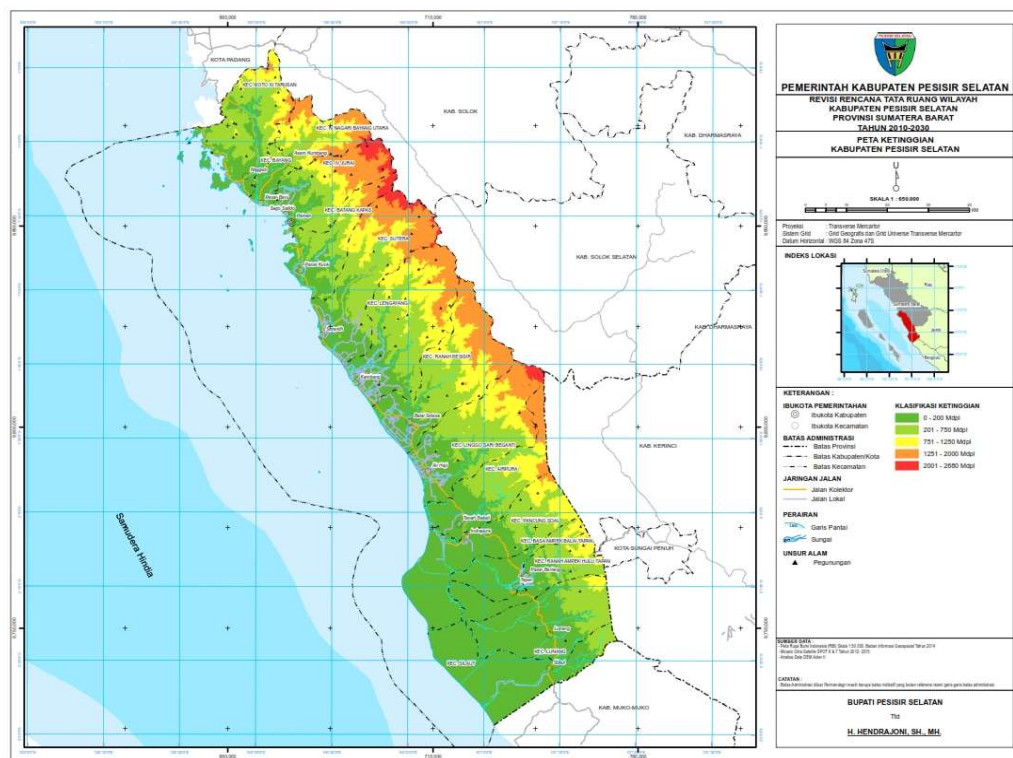
Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Secara topografi ketinggian wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan dibedakan menjadi :

1. 0 – 200 meter dari permukaan laut meliputi 43 % dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
2. > 200 mdpl - 750 mdpl meliputi 28 % dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan topografi berbukit dan bergelombang.
3. >750 mdpl - 1250 mdpl meliputi 15 % dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan topografi berbukit dan bergelombang.
4. >1250 mdpl - 2000 mdpl meliputi 12 % dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan topografi bergunung dan terjal.
5. >2000 mdpl meliputi 2 % dari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan topografi terjal dan curam.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan termasuk kepada dataran rendah dan sedang. Adapun gambaran terhadap kondisi ketinggian wilayah ini dapat dilihat pada Gambar 2.4

Gambar 2.4
Peta Ketinggian Kabupaten Pesisir Selatan



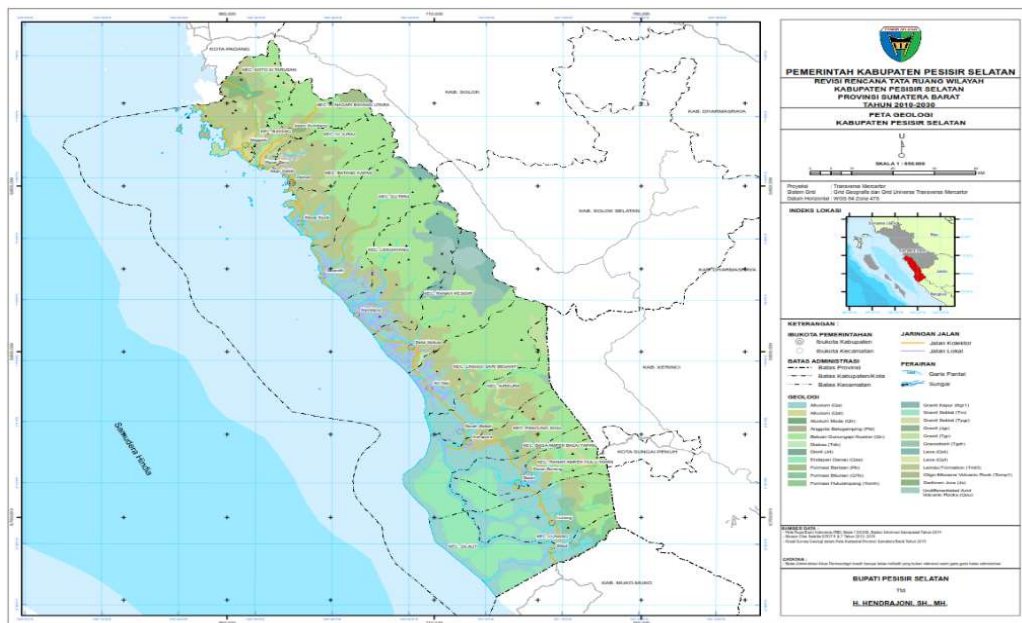
Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

2.1.1.2. Kondisi Geologi

Berdasarkan peta geologi lembar Painan oleh Kastowo dan Gerhard W. Leo (1972) skala 1: 250.000, terbitan Direktorat Geologi Bandung, daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki batuan berupa (Tomp) Batuan gunung api oligi-miosen; Batuan gunung api dengan sejumlah kecil batuan sediment; Batuan gunung api terdiri dari lava, breksi, breksituff, tuf, hablur, ignimbrid dan tuf sela, kebanyakan bersusunan andesitan dan dasitan.

Tuf sela ini terdiri dari rombakan. Pecahan andesit, lempung pasir, gelas dan rijang, dengan perekat gelas, kalsit lembut, kuarsa dan feldspar. Tuf hablur mengandung banyak feldspar dan kuarsa dengan masa dasar serisit, mineral lempung dan gelas, termasuk arkosa, serpih bituminan, batubara serpihan, batupasir tufan, serpih tufan, tuf andesitan dan breksi tuf.

Gambar 2.5
Peta Geologi Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Materi Teknis Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Jenis tanah di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari tanah organosol, alluvial, regosol, andosol, podsolit, dan latosol. Jenis tanah organosol disebut juga sebagai tanah gambut, tersusun dari timbunan bahan organik dengan ketebalan sangat bervariasi, mulai dari 50 cm sampai 5 meter diatas tanah mineral. Tekstur tanahnya bervariasi, tanpa struktur, konsistensi tanah lepas, pH tanah sangat masam dan tergenang air sepanjang tahun. Tanah ini tidak begitu potensial bagi pertanian karena sifat kimia dan fisiknya sangat jelek.

Jenis tanah alluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh tanah endapan, kandungan bahan organik rendah, reaksi tanah masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisik kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi.

Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang agak tebal, yaitu 90-180 cm,tektur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organik kurang dari 5% kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (PH) sangat rendah sampai rendah yaitu antara 4 – 4,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia yang kurang baik, sifat fisika tidak

mantap karena stabilitas agregatnya kurang, sehingga mudah terkena erosi. Produktifitas tanah ini rendah sampai sedang tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena tanah yang bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Tanah dengan tekstur kasar menyerap air sangat tinggi, tetapi daya simpan air sangat rendah, sehingga kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering

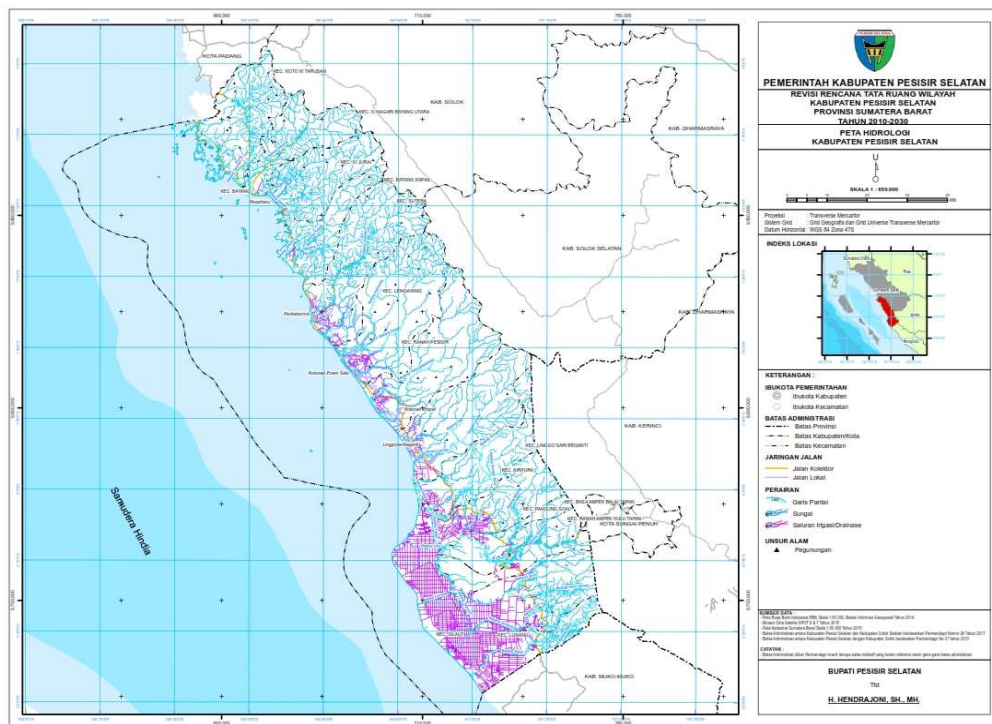
Tabel 2.2
Jenis Tanah di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Jenis Tanah (Ha)					
		Organosol	Kambisol	Regosol	Andosol	Podsolik	Glei Humus
1.	Koto XI Tarusan	2.290	22.357	4.097	5.363	-	9.630
2.	Bayang	-	1.661	722	2.867	-	2.842
3.	IV Nagari Bayang Utara	-	7.170	-	-	491	16.572
4.	IV Jurai	-	8.971	568	4.585	275	22.422
5.	Batang Kapas	-	9.330	1.231	2.983	-	14.211
6.	Sutera	2.219	9.356	2.682	3.023	399	39.301
7.	Lengayang	3.153	23.916	2.520	-	1.797	31.910
8.	Ranah Pesisir	426	14.102	673	5.751	3.454	31.838
9.	Linggo Sari Baganti	1.654	16.149	216	8.291	3.411	26.044
10.	Air Pura	1.589	21.431	115	2.017	7.119	5.739
11.	Pancung Soal	6.449	25.013	-	-	18.146	5.133
12.	Basa IV Balai Tapan	-	14.430	-	-	3.271	1.045
13.	Ranah IV Hulu	-	16.827	-	-	9.427	1.942
14.	Lunang	-	32.751	-	2.923	8.309	1.689
15.	Silaut	7.947	22.001	-	7.261	3.691	5.745
	TOTAL	572.665	591.887	567.039	550.976	571.476	588.259

Sumber Data : Materi Teknis Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Jenis tanah yang paling dominan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah tanah kambisol, yaitu seluas 591.887 Ha, yang banyak terdapat di Kecamatan Lunang yakni seluas 32.751 Ha dan tanah glei humus seluas 588.259 Ha yang dominan berada di Kecamatan Sutera seluas 39.301 Ha dan sisanya tersebar hampir diseluruh Kecamatan. Jenis tanah regosol seluas 567.039 Ha tersebar di sembilan kecamatan yaitu Kecamatan XI Koto Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Air Pura. Jenis tanah Organosol seluas 572.665 Ha tersebar hampir diseluruh kecamatan dan paling dominan di Kecamatan Silaut seluas 7.947 Ha.

Gambar 2.7
Peta Hidrologi Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Dari puluhan sungai dan anak sungai yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Batang Silaut, Batang Tapan dan Batang Inderapura adalah tiga sungai dengan aliran terpanjang. Panjang pendeknya alur sungai yang ada perlu dikelola dengan baik. Sungai dengan alur yang pendek dapat mengirim sumber daya air ke daerah hilir dengan cepat. Untuk itu, agar sumberdaya air ini tidak menjadi ancaman banjir maka kelestarian daerah hulu harus tetap dijaga dengan baik. Pada Tabel 2.3 dapat dilihat Nama Sungai, lokasi beserta panjang alirannya.

Tabel 2.3
Nama Sungai, Lokasi dan Panjang Sungai di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	Batang Siguntur	Koto XI Tarusan	25
2	Batang Lundang	Koto XI Tarusan	35
3	Batang Tarusan	Koto XI Tarusan	30
4	Batang Bayang	Bayang Utara / Bayang	46
5	Batang Bayang Gadang	Bayang Utara	10
6	Batang Bayang Abu	Bayang Utara	9
7	Batang Bayang Nyalo	Bayang Utara	14

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
8	Batang Bayang Janiah	Bayang Utara	10
9	Batang Puluik-Puluik	Bayang Utara	7
10	Batang Bayang Bungo	Bayang	12
11	Batang Bayang Sani	Bayang	15
12	Batang Lumpo	IV Jurai	47,5
13	Batang Salido	IV Jurai	29
14	Batang Painan	IV Jurai	13
15	Batang Jalamu	Batang Kapas	85
16	Batang Taratak Tapatiah	Batang Kapas	71
17	Batang Koto Gunuang	Batang Kapas	85
18	Batang Surantiah	Sutera	171
19	Batang Amping Parak	Sutera	85
20	Batang Kambang	Lengayang	59
21	Batang Lengayang	Lengayang	48
22	Batang Lakitan	Lengayang	70
23	Batang Pelangai	Ranah Pesisir	12
24	Batang Pelangai Kecil	Ranah Pesisir	25,2
25	Batang Pelangai Gadang	Ranah Pesisir	27,25
26	Batang Punggasan	Linggo Sari Baganti	58,3
27	Batang Air Haji	Linggo Sari Baganti	62,9
28	Batang Bantaian	Air pura	46,6
29	Batang Indrapura	Pancung Soal / Air Pura	174,4
30	Batang Betung	Basa IV Balai / Ranah IV Hulu Tapan	115
31	Batang Tapan	Basa IV Balai / Ranah IV Hulu Tapan	175
32	Batang Lunang	Lunang	133,4
33	Batang Sindang	Lunang	71
34	Batang Silaut	Silaut	200

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2021.

2.1.1.4. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan dibagi atas 2 (dua) kawasan peruntukan yaitu kawasan budidaya dan kawasan hutan:

2.1.1.4.1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN sebagaimana diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN). Peruntukan lahan budidaya di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 288.142 hektar atau setara dengan 47,63% dari total luas wilayah. Dari luasan

kawasan budidaya yang disebutkan tersebut pemanfaatan terluas dimanfaatkan untuk kawasan perkebunan, hutan produksi dan kawasan pertanian. Pada Tabel 2.4 digambarkan kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Existing (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Produksi Konversi	31.299	5,17
2	Hutan Produksi Terbatas	43.302	7,16
3	Hutan Produksi Tetap	3.993	0,66
4	Hutan Rakyat	20.412	3,37
5	Perkebunan	84.802	14,02
6	Permukiman Perkotaan	2.721	0,45
7	Permukiman Perdesaan	12.674	2,10
8	Tanaman Pangan	45.291	7,49
9	Hortikultura	33.053	5,46
10	Pariwisata	805	0,13
11	Kawasan Pertambangan Batubara	8.490	1,40
12	Kawasan Pertambangan Mineral Logam (Emas)	1.300	0,21
13	Perikanan		
Total		288.142	47,63

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

2.1.1.4.2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN sebagaimana diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN). Kawasan lindung memiliki luas 316.791 hektar, setara dengan 52,37 % dari total luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Porsi Taman Nasional Kerinci Seblat adalah yang terbesar 259.660 Hektar, atau 42,92 % dari luas Kabupaten Pesisir Selatan.

Disamping kawasan hutan, kawasan lindung di Kabupaten Pesisir Selatan, juga terdiri dari hutan mangrove, kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai. Khusus untuk sempadan pantai dan sempadan sungai, fungsi lindungnya ada pada kawasan setempat dimana aliran sungai dan pantai tersebut berada. Keberadaan sempadan pantai dan sungai yang terpelihara akan sangat membantu melindungi pemukiman dan infrastruktur publik disekitarnya. Sedangkan untuk kawasan mangrove dijadikan kawasan lindung karena fungsinya yang sangat penting bagi lingkungan perairan serta

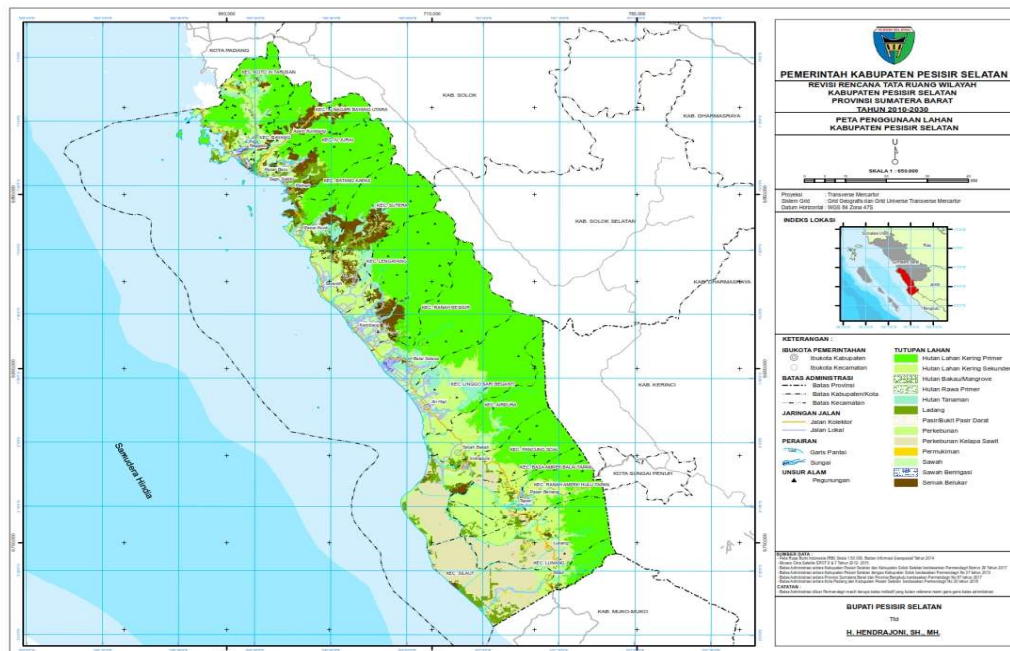
kemampuan daya serap emisi karbon yang sangat tinggi. Pada Tabel 2.5 digambarkan luasan dari masing-masing kawasan lindung tersebut dan pada Gambar 2.8 dapat dilihat peta penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.5
Persentase Kawasan Lindung Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Existing (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	22.674	3,72
2	Taman Nasional	259.660	42,92
3	Suaka Margasatwa	20.634	3,41
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	392	0,06
5	Sempadan Pantai	1.852	0,31
6	Sempadan Sungai	11.564	1,91
7	Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	15	0,01
Total		316.791	52,37

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Gambar 2.8
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

2.1.1.5. Curah Hujan

Keadaan iklim di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya sama dengan keadaan iklim wilayah lain di Provinsi Sumatera Barat dan di Indonesia, yakni mengenal 2 macam musim; Musim Penghujan (November-April) dan Musim Kemarau (Mei-Oktober). Namun secara umum batasan musim kemarau dan hujan di Pesisir Selatan tidak ekstrim seperti daerah lain di Indonesia.

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah wilayah dengan curah hujan tertinggi yakni rata-rata 461,5 milimeter setiap bulannya, dengan rata-rata 17 hari hujan setiap bulannya. Sedangkan Kecamatan Lengayang merupakan wilayah dengan curah hujan terendah, yakni 267 milimeter dan jumlah rata-rata hari hujan 11,5 hari setiap bulan. Secara lengkap kondisi ini di tampilkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Jumlah Hari Hujan dan Jumlah Curah Hujan di Kecamatan-Kecamatan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Hari Hujan	Curah Hujan (Mm)
1	Koto XI Tarusan	12,8	386,3
2	Bayang	12,1	284,8
3	IV Nagari Bayang Utara	18,4	307,1
4	IV Jurai	17,4	356,6
5	Batang Kapas	16,9	329,8
6	Sutera	*	*
7	Lengayang	11,8	267,0
8	Ranah Pesisir	12,2	318,2
9	Linggo Sari Baganti	12,3	270,2
10	Pancung Soal	18,7	406,1
11	Airpura	**	**
12	Basa Ampek Balai Tapan	17,0	461,5
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	**	**
14	Lunang	19,7	451,3
15	Silaut	**	**
Rata-rata		15,38	348,99

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2021

Curah hujan rata-rata di tahun 2020 sebesar 3747 mm/tahun. Hingga bulan Januari dan Desember seluruh wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan sudah memasuki musim penghujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur semua wilayah dengan intensitas ringan hingga lebat.

Rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2020 terjadi di bulan Januari–Maret, namun curah hujan tertinggi terjadi di Maret, yaitu sebesar 519,5 mm sedangkan curah hujan terendah terjadi di bulan Desember. Rata-rata jumlah hari hujan di tahun 2020 adalah 14 hari. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi di bulan November, yaitu 20 hari sedangkan pada bulan Agustus hanya memiliki jumlah hari hujan 7 hari. Di sisi lain, musim kemarau terasa di bulan Juni hingga Agustus 2020. Pada periode tersebut curah hujan cukup rendah, yaitu di angka 270 mm dan jumlah hari hujan cukup sedikit yakni 13 hari per bulannya. Tinggi rendahnya curah hujan setiap bulan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Bulan	Banyaknya Hari Hujan	Curah Hujan
1	Januari	16,18	519,55
2	Februari	11,75	256,25
3	Maret	14,75	347,25
4	April	16,50	301,25
5	Mei	13,00	296,50
6	Juni	11,25	144,13
7	Juli	16,90	403,50
8	Agustus	7,75	77,25
9	September	18,00	473,36
10	Oktober	16,64	368,91
11	Nopember	20,89	413,78
12	Desember	11,11	146,00

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2021

2.1.2. Kondisi Demografi

Konsep penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Republik Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun (PSDA 2021, BPS:74).

Berdasarkan konsep tersebut dan berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2020, maka diketahui jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 sebesar 504.418 jiwa, yakni setara dengan 9,11 % dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Bila dibandingkan dengan penduduk kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, maka jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menempati posisi ketiga terbanyak, setelah

Kota Padang dan Kabupaten Agam (SBDA 2021, BPS:137).

Selanjutnya bila berdasarkan jumlah sebaran penduduk, maka Kecamatan Lengayang adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 60.994 jiwa setara dengan 12,09 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yakni 8.286 jiwa, atau setara dengan 1,64% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Gambaran terhadap jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010-2020
1	Koto XI Tarusan	52.870	0,96
2	Bayang	42.181	1,36
3	IV Nagari Bayang Utara	8.286	1,27
4	IV Jurai	50.894	1,58
5	Batang Kapas	36.422	1,63
6	Sutera	56.091	1,93
7	Lengayang	60.994	1,63
8	Ranah Pesisir	33.760	1,12
9	Linggo Sari Baganti	49.169	1,46
10	Pancung Soal	26.570	1,39
11	Airpura	18.180	2,58
12	Basa Ampek Balai Tapan	15.487	1,99
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	15.499	1,64
14	Lunang	22.423	1,96
15	Silaut	15.592	2,48
	Pesisir Selatan	504.418	1,57

Sumber Data : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021, BPS:2021

Bila dianalisis dari laju pertumbuhan penduduk, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Airpura dan Kecamatan Silaut adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, sedangkan Kecamatan Koto XI Tarusan adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah. Besar kecilnya laju pertumbuhan penduduk pada kecamatan tertentu ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pengambilan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

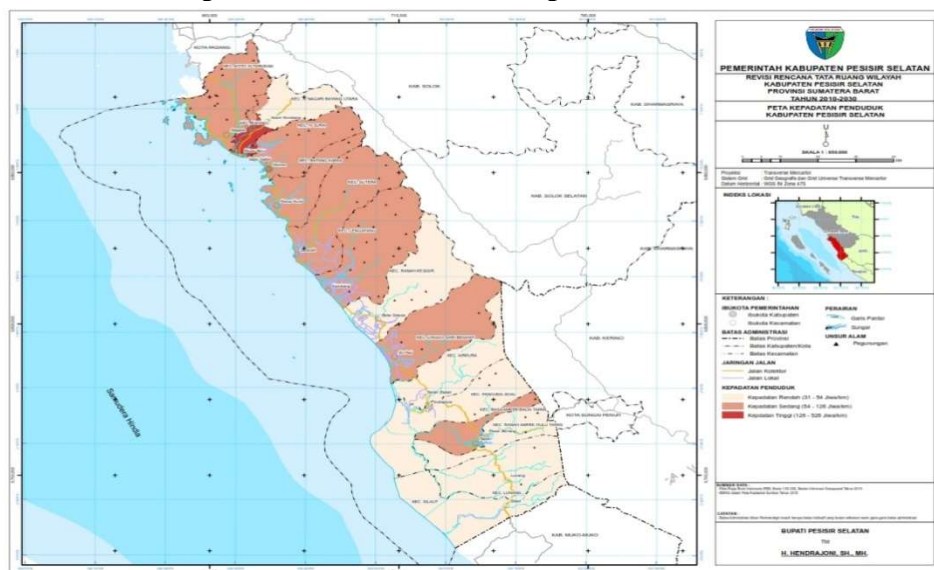
Angka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tersebut meningkat cukup signifikan bila dibandingkan dengan data sensus penduduk sebelumnya, yakni dari 0,92 di tahun 2010 menjadi 1,57 di tahun 2020. Jika sebelumnya laju pertumbuhan

penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berada di urutan 14 namun, maka pada tahun 2020 berada pada urutan ke 7 (tujuh) di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini, perlu dilakukan evaluasi agar pertambahan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terkontrol dengan baik.

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, maka jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 masih berada pada peringkat 3 di Sumatera Barat yakni sebesar 504.418 jiwa. Walaupun dari sisi urutan jumlah penduduk ini belum mengalami pergeseran akan tetapi dengan peningkatan laju pertumbuhan yang cukup signifikan, hal ini perlu menjadi perhatian kebijakan pengendalian penduduk dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan kepadatan penduduk per kilometer persegi di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kecamatan Bayang adalah yang terpadat, yakni 521 jiwa/km². Adapun Kecamatan Silaut adalah wilayah dengan kepadatan penduduk terendah, yakni 33 jiwa/km². Padatnya jumlah penduduk Kecamatan Bayang dibandingkan dengan kecamatan lain tidak terlepas dari luas wilayah Kecamatan Bayang yang hanya 1% atau terkecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sedangkan jumlah penduduknya urutan ke-6 enam terbanyak 8,36%. Hal tersebut dapat dilihat pada peta kepadatan penduduk Gambar 2.9 dan pada Tabel 2.9.

Gambar 2.9.
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Tabel 2.9
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk/km²
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Koto XI Tarusan	10,48	121
2	Bayang	8,36	521
3	IV Nagari Bayang Utara	1,64	34
4	IV Jurai	10,09	138
5	Batang Kapas	7,22	131
6	Sutera	11,12	98
7	Lengayang	12,09	96
8	Ranah Pesisir	6,69	60
9	Linggo Sari Baganti	9,75	88
10	Pancung Soal	5,27	49
11	Airpura	3,60	48
12	Basa Ampek Balai Tapan	3,07	83
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	3,07	55
14	Lunang	4,45	49
15	Silaut	3,09	33
	Pesisir Selatan	100,00	83

Sumber Data : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021, BPS:2021

Selanjutnya kondisi kependudukan berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari 253.854 orang laki-laki setara dengan 50,33% dan 250.564 orang perempuan, setara dengan 49,67%. Besaran rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesisir Selatan adalah 101, yang berarti dalam 100 persen jumlah perempuan terdapat 101 persen jumlah laki-laki. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terbesar adalah Kecamatan Silaut, yakni 106. Sedangkan kecamatan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terkecil adalah Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yakni 98. Kondisi rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin ini pada setiap kecamatan digambarkan melalui Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

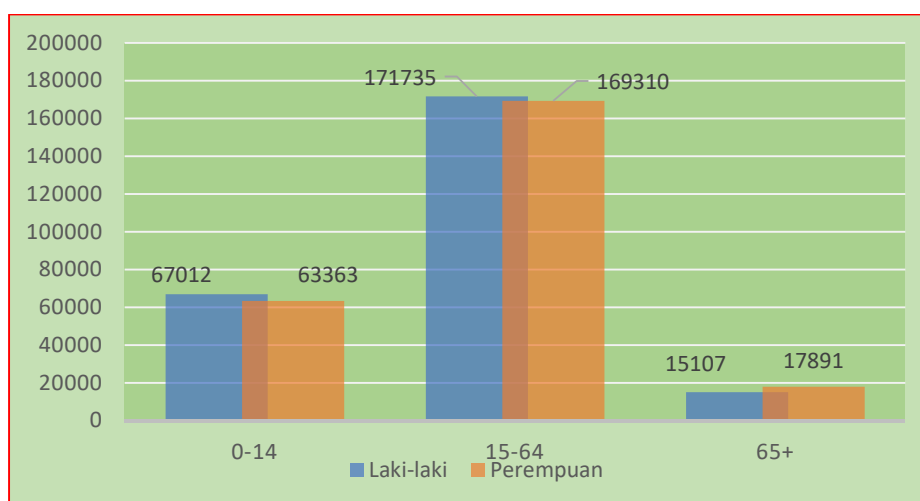
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)		Rasio Jenis Kelamin Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Koto XI Tarusan	26,567	26,303	101
2	Bayang	20,985	21,196	99
3	IV Nagari Bayang Utara	4,101	4,185	98
4	IV Jurai	25,574	25,320	101
5	Batang Kapas	18,211	18,211	100
6	Sutera	28,185	27,906	101

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)		Rasio Jenis Kelamin Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
7	Lengayang	30,649	30,345	101
8	Ranah Pesisir	16,709	17,051	98
9	Linggo Sari Baganti	24,828	24,341	102
10	Pancung Soal	13,417	13,153	102
11	Airpura	9,312	8,868	105
12	Basa Ampek Balai Tapan	7,782	7,705	101
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	7,939	7,560	105
14	Lunang	11,431	10,992	104
15	Silaut	8,023	7,569	106
	Pesisir Selatan	504.418		101

Sumber Data : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021, BPS:2021

Dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin maka diketahui bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Pesisir Selatan lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan yaitu 171.735 jiwa penduduk laki-laki, dan 169.310 jiwa penduduk perempuan. Pada kelompok usia 65+ tahun menunjukkan komposisi penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan penduduk perempuan yaitu 15.107 jiwa penduduk laki-laki dan 17.891 jiwa penduduk perempuan. Hal ini bisa menggambarkan bahwa umur perempuan lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi bisa akibat pola hidup perempuan yang relatif sehat dibandingkan dengan laki-laki. Sementara untuk kelompok umur 0-14 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu 67.012 jiwa penduduk laki-laki dan 63.363 jiwa penduduk perempuan. Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan kelompok ini dapat dilihat secara lengkap pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber Data : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2021

Dilihat dari angka ketergantungan penduduk, maka Kabupaten Pesisir Selatan memiliki angka ketergantungan sebesar 48%. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 48 orang penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Dari data tersebut dapat disimpulkan, bahwa Kabupaten Pesisir Selatan masih dalam kondisi bonus demografi, dengan angka ketergantungan yang relatif baik. Namun angka ketergantungan ini perlu lebih ditekan, agar jumlah penduduk tidak produktif yang ditanggung oleh penduduk produktif semakin menurun.

2.1.3. Profil Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Profil Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari Penyediaan jasa ekosistem serta Supply dan Demand. Penyediaan jasa ekosistem terdiri atas 20 jasa ekosistem yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok jasa, yaitu jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya dan jasa pendukung. Sementara supply dan demand terdiri dari ; daya dukung pangan, daya dukung air dan daya dukung fungsi lindung.

2.1.3.1 DDDTLH Berdasarkan Jasa Ekosistem

A. Jasa Ekosistem Penyediaan

Jasa ekosistem penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Secara keseluruhan daya dukung wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyediakan jasa penyediaan adalah 0,525, lebih dari 0,5 yang berarti daya dukung atas jasa penyediaan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah tinggi. Indeks jasa ekosistem penyediaan, menurut ekoregion di Kabupaten Pesisir Selatan, tertinggi adalah pada ekoregion pegunungan lipatan. Sementara yang terendah adalah pada ekoregion lahan gambut. Jasa penyediaan serat memiliki indeks yang tertinggi diantara jasa penyediaan yang lainnya yang disebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tutupan lahannya adalah berupa hutan primer, hutan sekunder, kebun campuran yang dapat memberikan hasil berupa serat untuk berbagai keperluan guna menopang kehidupan masyarakat. Sementara indeks yang paling rendah adalah jasa penyediaan pangan.

Kabupaten ini memiliki daya dukung yang tinggi atas jasa penyediaan, sehingga secara keseluruhan terlihat ada sebanyak 3 (tiga) jenis jasa ekosistem yang nilai indeks kompositnya di atas 0,5. Ketiga jenis jasa tersebut adalah jasa penyediaan serat, bahan bakar kayu dan fosil serta jasa penyediaan sumberdaya genetik. Indeks komposit jasa

penyediaan serat adalah yang tertinggi yakni 0,702. Sementara itu yang terendah adalah jasa penyediaan pangan, 0,293. Pada tabel di bawah dapat dilihat daya dukung jasa penyediaan Kabupaten Pesisir Selatan yang dikategorikan tinggi dan sangat tinggi menurut kecamatan.

Data Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan di Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Kecamatan tersaji pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel. 2.11
Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan di Kabupaten Pesisir Selatan
Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Indeks Jasa Ekosistem Penyediaan					Indeks Komposit
		Pangan	Air Bersih	Serat	Energi	Sumber Daya Genetik	
1	Koto XI Tarusan	0.263	0.311	0.750	0.635	0.698	0.531
2	Bayang	0.287	0.287	0.521	0.387	0.460	0.388
3	IV Nagari Bayang Utara	0.224	0.303	0.780	0.697	0.770	0.555
4	IV Jurai	0.242	0.303	0.763	0.640	0.735	0.536
5	Batang Kapas	0.267	0.308	0.711	0.574	0.660	0.504
6	Sutera	0.274	0.309	0.695	0.624	0.661	0.512
7	Lengayang	0.271	0.328	0.791	0.692	0.774	0.571
8	Ranah Pesisir	0.282	0.340	0.835	0.713	0.793	0.593
9	Linggo Sari Baganti	0.275	0.322	0.783	0.670	0.715	0.553
10	Pancung Soal	0.314	0.300	0.603	0.627	0.575	0.484
11	Airpura	0.321	0.367	0.753	0.641	0.728	0.562
12	Basa Ampek Balai Tapan	0.418	0.419	0.590	0.668	0.606	0.540
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	0.347	0.370	0.640	0.628	0.644	0.526
14	Lunang	0.345	0.339	0.610	0.608	0.561	0.493
15	Silaut	0.318	0.257	0.464	0.567	0.415	0.404
	Pesisir Selatan	0.293	0.322	0.702	0.640	0.667	0.525

Sumber Data : DDDTLH Kabupaten Pesisir Selatan, 2017

B. Jasa Ekosistem Pengaturan (Regulasi)

Jasa ekosistem pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem melalui pengaturan yang dilakukan oleh ekosistem. Siklus kehidupan dalam ekosistem menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan manusia. Jasa pengaturan Kabupaten Pesisir Selatan bervariasi dari 8 jenis jasa, seperti terlihat pada Tabel 2.12 di bawah. Ada tiga jenis jasa ekosistem yang daya tampungnya relatif rendah, dilihat dari persentase daya tampung yang sangat tinggi, tinggi dan rendah, yaitu jasa pengaturan tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pengolahan dan

penguraian limbah. Sementara lima jenis jasa ekosistem lainnya adalah memiliki daya tampung yang sangat tinggi dan tinggi sebagian besarnya.

Jasa ekosistem yang memiliki indeks di atas 0,5 adalah jasa ekosistem yang didukung oleh ekoregion pegunungan patahan dan dengan tutupan lahan dominan adalah hutan lahan kering primer. Sebagian besar daya tampung sangat tinggi dan tinggi atas jasa-jasa tersebut berada pada bagian Timur wilayah Pesisir Selatan dan membentang dari Utara hingga ke Selatan dalam jajaran Bukit Barisan.

Bila diamati pula menurut kecamatan, indeks jasa ekosistem pengaturan bervariasi menurut jenis jasa ekosistem, indeks jasa ekosistem pengaturan iklim berkisar antara yang paling rendah, 0,376, di kecamatan Bayang dan tertinggi, 0,826, di kecamatan Bayang Utara. Indeks jasa ekosistem tata aliran air dan banjir tertinggi adalah di kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebesar 0,535, dan terendah di kecamatan Bayang 0,317. Data lengkapnya seperti pada Tabel 2.12 di bawah ini.

Tabel 2.12
Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan di Kabupaten Pesisir Selatan
menurut Kecamatan

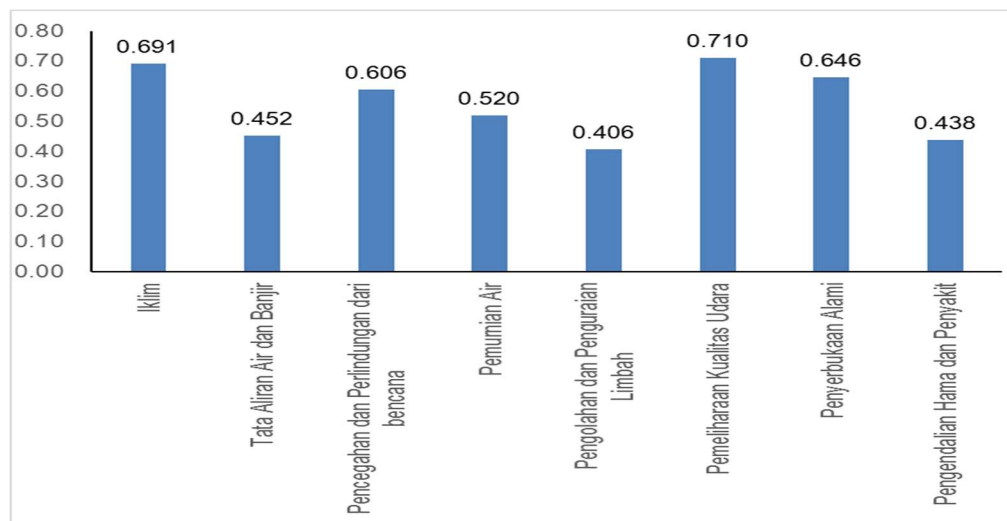
No	Kecamatan	Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan								Indeks Komposit
		Iklim	Tata Aliran Air dan Banjir	Pencegahan dan Perlindungan dari bencana	Pemurnian Air	Pengolahan dan penguraian Limbah	Pemeliharaan Kualitas Udara	Penyerbukan Alami	Pengendalian Hama dan Penyakit	
1	Koto XI Tarusan	0.370	0.431	0.669	0.513	0.409	0.756	0.665	0.414	0.573
2	Bayang	0.376	0.317	0.524	0.407	0.351	0.430	0.389	0.307	0.388
3	IV Nagari Bayang Utara	0.826	0.439	0.728	0.546	0.435	0.841	0.728	0.421	0.621
4	IV Jurai	0.778	0.433	0.686	0.527	0.421	0.795	0.691	0.409	0.592
5	Batang Kapas	0.654	0.418	0.632	0.492	0.398	0.691	0.614	0.400	0.537
6	Sutera	0.692	0.416	0.612	0.494	0.391	0.707	0.638	0.402	0.544
7	Lengayang	0.832	0.465	0.701	0.562	0.444	0.843	0.738	0.446	0.629
8	Ranah Pesisir	0.854	0.475	0.721	0.576	0.457	0.868	0.755	0.455	0.645
9	Lingo Sari Baganti	0.765	0.443	0.652	0.532	0.417	0.781	0.684	0.427	0.588
10	Pancung Soal	0.612	0.456	0.497	0.496	0.369	0.621	0.583	0.437	0.509
11	Airpura	0.372	0.471	0.648	0.557	0.436	0.758	0.698	0.484	0.598
12	Basa Ampek Balai Tapan	0.587	0.535	0.504	0.562	0.433	0.571	0.627	0.529	0.543
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	0.631	0.505	0.550	0.533	0.420	0.639	0.637	0.496	0.551
14	Lunang	0.507	0.474	0.509	0.495	0.389	0.553	0.555	0.475	0.495
15	Silaut	0.430	0.435	0.353	0.435	0.301	0.451	0.453	0.419	0.410
Pesisir Selatan		0.691	0.452	0.606	0.520	0.406	0.710	0.646	0.438	0.559

Sumber Data : DDDTLH Kabupaten Pesisir Selatan, 2017.

Ada 5 jenis jasa ekosistem memiliki indeks diatas 0,5, yang berarti daya tampung jasa ekosistem tersebut sebagian besar adalah sangat tinggi dan tinggi. Jasa ekosistem tersebut adalah pertama jasa pengaturan kualitas udara, yang memberikan indeks jasa

ekosistem tertinggi diantara 8 jenis jasa ekosistem pengaturan yakni 0,710. Kedua adalah jasa ekosistem pengaturan iklim yang memiliki indeks sebesar 0,691, diikuti oleh jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana, 0,606, jasa ekosistem penyerbukan alami dan jasa ekosistem pemurnian air. Sementara itu, ada pula jenis jasa ekosistem yang memiliki indeks di bawah 0,5 yang mengindikasikan daya tampungnya tidak tinggi di Pesisir Selatan yaitu jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah dan jasa ekosistem pengendalian hama dan penyakit, diikuti oleh jasa ekosistem tata aliran air dan banjir. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan grafik pada Gambar 2.11 di bawah ini.

Gambar 2.11
Indeks Jasa Ekosistem Pengaturan Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : DDDTLH Kabupaten Pesisir Selatan, 2017.

C. Jasa Ekosistem Budaya

Jasa ekosistem budaya adalah jasa yang dihasilkan oleh lingkungan hidup yang dapat mendukung manusia dalam menopang kehidupan sosial dan budaya. Jasa ini berupa jasa non-material melalui pengayaan budaya, perkembangan kognitif, refleksi, rekreasi dan estetika. Lingkungan hidup memiliki daya dukung bagi manusia dalam memanfaatkan jasa ekosistem bagi tujuan sosial budaya tersebut, dan pada saat yang bersamaan juga menyerap limbah dari kegiatan sosial dan budaya tersebut. Jasa ekosistem budaya ini memberikan daya dukung dan sekaligus juga daya tampung.

Sesuai dengan sebaran ekoregion dan tutupan lahan di atas, maka sebaran indeks jasa ekosistem menurut kecamatan juga pada prinsipnya mengikuti sebaran ekoregion dan tutupan lahan dimaksud. Kecamatan-kecamatan yang indeks jasa ekosistem budaya yang tinggi adalah kecamatan yang memiliki ekoregion dan tutupan lahan yang tinggi

pula indeks jasa ekosistemnya. Tabel 2.13 di bawah ini merangkumkan indeks jasa ekosistem budaya kabupaten Pesisir Selatan. Terlihat bahwa kecamatan Bayang Utara memiliki indeks jasa tempat tinggal dan ruang hidup yang paling rendah. Kecamatan Bayang Utara memiliki ekoregion dominan pegunungan patahan dengan kemiringan yang tinggi. Tentunya ekoregion yang demikian memiliki daya dukung yang rendah atas jasa tempat tinggal dan ruang hidup.

Tabel 2.13
Indeks Jasa Ekosistem Budaya di Kabupaten Pesisir Selatan
menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Indeks Jasa Ekosistem Budaya			Indeks Komposit
		Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	Rekreasi dan Ecotourism	Estetika	
1	Koto XI Tarusan	0.230	0.632	0.644	0.502
2	Bayang	0.253	0.387	0.458	0.366
3	IV Nagari Bayang Utara	0.182	0.742	0.721	0.549
4	IV Jurai	0.214	0.683	0.682	0.526
5	Batang Kapas	0.245	0.569	0.598	0.471
6	Sutera	0.230	0.595	0.595	0.4723
7	Lengayang	0.215	0.728	0.715	0.553
8	Ranah Pesisir	0.220	0.754	0.740	0.572
9	Linggo Sari Baganti	0.229	0.663	0.656	0.516
10	Pancung Soal	0.275	0.476	0.486	0.412
11	Airpura	0.267	0.612	0.617	0.499
12	Basa Ampek Balai Tapan	0.381	0.443	0.463	0.429
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	0.312	0.512	0.537	0.454
14	Lunang	0.331	0.395	0.447	0.391
15	Silaut	0.230	0.595	0.595	0.473
	Pesisir Selatan	0.254	0.582	0.590	0.475

Sumber Data : DDDTLH Kabupaten Pesisir Selatan, 2017

D. Jasa Ekosistem Pendukung

Jasa Ekosistem Pendukung adalah jasa ekosistem yang diperlukan untuk menghasilkan jasa ekosistem lainnya. Ada empat jenis jasa ekosistem dalam kelompok jasa ekosistem pendukung ini yaitu jasa pembentukan tanah dan pemeliharaan kesuburan, jasa siklus hara, jasa produksi primer dan jasa biodiversitas. Empat jenis jasa ini mendukung dalam menghasilkan jasa-jasa ekosistem dari tiga kelompok di atas, seperti pada Tabel 2.14 di bawah ini.

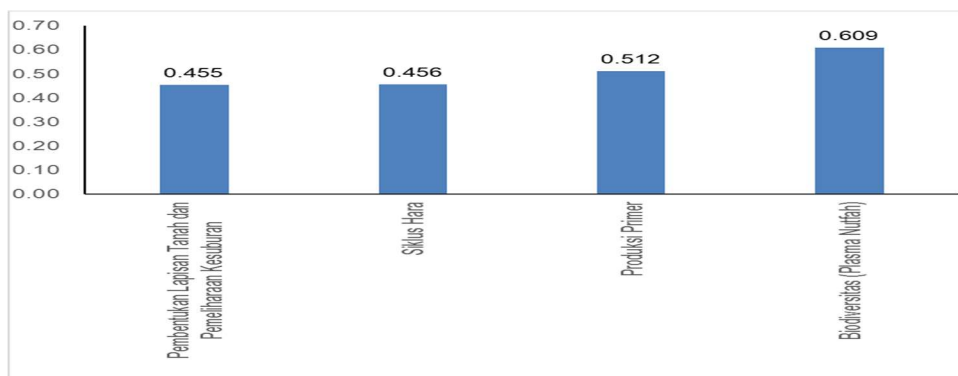
Tabel 2.14
Indeks Jasa Ekosistem Pendukung di Kabupaten Pesisir Selatan
menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Indeks Jasa Ekosistem Pendukung				Indeks Komposit
		Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan	Siklus Hara	Produksi Primer	Biodiversitas (Plasma Nutfah)	
1	Koto XI Tarusan	0.441	0.429	0.562	0.683	0.556
2	Bayang	0.322	0.295	0.355	0.418	0.348
3	IV Nagari Bayang Utara	0.463	0.446	0.546	0.692	0.537
4	IV Jurai	0.451	0.436	0.524	0.663	0.518
5	Batang Kapas	0.424	0.416	0.479	0.603	0.481
6	Sutera	0.423	0.407	0.488	0.593	0.478
7	Lengayang	0.489	0.472	0.566	0.700	0.557
8	Ranah Pesisir	0.504	0.494	0.584	0.716	0.574
9	Linggo Sari Baganti	0.464	0.446	0.536	0.645	0.523
10	Pancung Soal	0.430	0.467	0.478	0.525	0.475
11	Airpura	0.499	0.479	0.562	0.683	0.556
12	Basa Ampek Balai Tapan	0.513	0.475	0.544	0.556	0.522
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	0.500	0.457	0.524	0.598	0.520
14	Lunang	0.458	0.504	0.475	0.543	0.495
15	Silaut	0.367	0.474	0.397	0.391	0.407
	Pesisir Selatan	0.455	0.456	0.512	0.609	0.508

Sumber Data : DDDTLH Kabupaten Pesisir Selatan, 2017

Diantara empat jasa ekosistem pendukung di kabupaten Pesisir Selatan, jasa biodiversitas memiliki indeks jasa ekosistem tertinggi, yakni 0,609, dibanding dengan tiga jenis jasa ekosistem lainnya. Jasa ekosistem produksi primer berada di urutan kedua, 0,512, dan yang terendah adalah indeks jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan, 0,455. Untuk lebih jelas dapat melihat data seperti tersaji pada Gambar 2.12 di bawah ini

Gambar 2.12
Indeks Jasa Ekosistem Pendukung di Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber: DDDTLH Kabupaten Pesisir Selatan, 2017.

2.1.3.2 DDDTLH Supply dan Demand

A. Daya Dukung Pangan

Kondisi eksisting daya dukung pangan (padi) Kabupaten Pesisir Selatan dengan metode ketersediaan dan kebutuhan pangan adalah surplus, artinya produksi lebih besar dari pada konsumsi. Secara umum, daya dukung pangan Kabupaten Pesisir Selatan saat ini dapat dikategorikan tinggi karena mampu menyediakan pangan untuk kebutuhan domestik.

Konsumsi beras Kabupaten Pesisir Selatan eksisting pada tahun 2020 diperkirakan 62.981,63 ton dan meningkat menjadi 73.739,75 ton pada tahun 2030, sedangkan produksi beras diperkirakan meningkat dari 240.195,80 ton menjadi 269.278,52 ton. Oleh karena itu dapat disimpulkan pada tahun 2030 diperkirakan masih terjadi surplus pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kondisi eksisting daya dukung pangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15
Kondisi Eksisting Daya Dukung Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Rata-Rata Produksi Padi (ton) ^(*)	Rata-Rata Produksi Beras (ton) ^(**)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Beras (Ton) ^(***)	Daya Dukung Pangan	Evaluasi
1	Koto XI Tarusan	19.317,22	12.119,62	52.870	6.601,35	1,84	Surplus
2	IV Nagari Bayang Utara	11.147,53	6.993,96	8.286	1.034,59	6,76	Surplus
3	Bayang	36.024,88	22.602,01	42.181	5.266,72	4,29	Surplus
4	IV Jurai	20.775,50	13.034,55	50.894	6.354,62	2,05	Surplus
5	Batang Kapas	23.781,92	14.920,78	36.422	4.547,65	3,28	Surplus
6	Sutera	42.436,75	26.624,82	56.091	7.003,52	3,80	Surplus
7	Lengayang	52.649,32	33.032,19	60.994	7.615,71	4,34	Surplus
8	Ranah Pesisir	38.932,87	24.426,48	33.760	4.215,27	5,79	Surplus
9	Linggo Sari Baganti	45.713,69	28.680,77	49.169	6.139,24	4,67	Surplus
10	Airpura	20.152,77	12.643,85	18.180	2.269,95	5,57	Surplus
11	Pancung Soal	24.945,14	15.650,58	26.570	3.317,53	4,72	Surplus
12	Ranah Ampek Hulu Tapan	13.822,49	8.672,23	15.499	1.935,21	4,48	Surplus
13	Basa Ampek Balai Tapan	11.162,09	7.003,09	15.487	1.933,71	3,62	Surplus
14	Lunang	21.980,98	13.790,87	22.423	2.799,74	4,93	Surplus
15	Silaut	0,00	0,00	15.592	1.946,82	0,00	Defisit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, 2021.

B. Daya Dukung Air

Proyeksi kebutuhan air Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2030 dapat dilihat pada tabel 2.16 di bawah ini. Diperkirakan kebutuhan air untuk kebutuhan domestik mencapai 994,9 juta m³/tahun, untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan adalah 930,9 m³/tahun, jadi proyeksi total kebutuhan air Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2030 adalah 2,6 milyar m³/tahun.

Tabel 2.16
Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2030

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan Air (m ³ /org/tahun)	m ³ /tahun
Jumlah Penduduk	590.579	orang	1.600	944.927.126
Uraian	Besaran Luas Lahan (Alokasi RTRW)	Satuan	Kebutuhan Air (m ³ /org/tahun)	m ³ /tahun
Kawasn Perkebunan	83.045,81	Ha	0,3	785.679.811
Kawasan Pertanian Lahan Basah	45.979,83	Ha	1	1.450.019.775
Kawasan Pertanian Lahan Kering	39.679,13	Ha	0,3	375.396.344
Total				3.556.023.56

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

C. Daya Dukung Fungsi Lindung

Dari total luas lahan di Kabupaten Pesisir Selatan 6.049,34. KM2, sekitar 440.928,32 Ha yang mempunyai fungsi lindung seperti pada Tabel 2.17 di bawah. Fungsi lindung terluas terdapat pada rencana pola ruang KSA/KPA (275.095,08Ha). Daya dukung lahan Kabupaten Pesisir Selatan dihitung berdasarkan rasio kawasan dengan fungsi lindung dengan total peruntukan lahan pada dokumen RTRW Kabupaten Pesisir Selatan. Daya dukung lahan Kabupaten Pesisir Selatan adalah 0,73. Nilai ini menunjukkan bahwa daya dukung fungsi lindung Kabupaten Pesisir Selatan termasuk kategori baik.

Tabel 2.17
Proyeksi Luas Lahan dengan Fungsi Lindung Kabupaten Pesisir Selatan

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Koefisien Lindung	Luas lahan dengan fungsi lindung
1	Ekosistem Pulau-Pulau Kecil	806,26	0,98	790,13
2	Hutan Lindung	22.652,94	0,98	22.199,88
3	Hutan Produksi Konversi	31.251,57	0,46	14.375,72
4	Hutan Produksi Terbatas	44.844,46	0,46	20.628,45
5	Hutan Produksi Tetap	4.518,96	0,46	2.078,72
6	Hutan Rakyat	22.386,32	0,46	10.297,70
7	KSA/KPA	280.709,27	0,98	275.095,08
8	Pantai Berhutan Bakau	490,19	0,98	480,39
9	Perkebunan Komoditi	83.045,81	0,46	38.201,07
10	Permukiman Pedesaan	12.506,04	0,46	5.752,78
11	Permukiman Perkotaan	2.400,98	0,18	432,18
12	Pertanian Lahan Basah	45.979,83	0,46	21.150,72

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Koefisien Lindung	Luas lahan dengan fungsi lindung
13	Pertanian Lahan Kering	39.679,13	0,46	18.252,40
14	Sempadan Pantai	1.868,43	0,98	1.831,06
15	Sempadan Sungai	9.553,08	0,98	9.362,02
	Kabupaten Pesisir Selatan	602.693,27		440.928,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

2.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.4.1 Analisa Potensi Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah

A. Potensi Wisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Kabupaten Pesisir Selatan – khususnya Kawasan Mandeh, termasuk kedalam satu dari tujuh wilayah Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jenis destinasi pariwisata yang akan dikembangkan adalah pariwisata pantai dan pulau

Beragam jenis Daya Tarik Wisata (DTW) dapat ditemukan di Kabupaten Pesisir Selatan, mulai dari DTW perbukitan berupa lokasi sungai dan air terjun, DTW pantai dan pulau, DTW bawah air, DTW budaya dan wisata kuliner. DTW ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, beragam DTW Pesisir Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Daya Tarik Wisata Perbukitan dan Sungai:

1. Air Terjun Bayang Sani di Bayang.
2. Wisata Sungai Jembatan Akar di IV Nagari Bayang Utara.
3. Rumah Pohon Pancuang Taba di IV Nagari Bayang Utara.
4. Negeri diatas Awan di IV Nagari Bayang Utara.
5. Bukit Bendera Bayang.
6. Air Terjun Timbulun di IV Jurai.
7. Pemandian PLTA Salido Ketek.
8. Pemandian Batu Kunik Lumpo.
9. Air Terjun Talun 7 Bidadari Inderapura Selatan.
10. Air Terjun 7 Tingkat Sungai Sirah Air Haji.
11. Air Terjun Palano Lakitan Tengah.
12. Air Terjun Palangai Gadang.

b. Daya Tarik Wisata Pantai dan Pulau

1. Mandeh Area di Kecamatan Koto XI Tarusan
2. Pulau Sutan Kecamatan Koto XI Tarusan
3. Pulau Cubadak Kecamatan Koto XI Tarusan
4. Palau Kapo-Kapo Kecamatan Koto XI Tarusan
5. Spot Diving di Teluk Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan
6. Pantai Batu Kalang Kecamatan Koto XI Tarusan
7. Paralayang Bukit Langkisau di Kecamatan IV Jurai
8. Pantai Api-Api Kecamatan Bayang
9. Pantai Sago/Salido Kecamatan IV Jurai
10. Pantai Carocok Area Kecamatan IV Jurai
11. Pantai Tan Sri Dano Kecamatan Batang Kapas
12. Pantai Batu Tembak Area Kecamatan IV Jurai
13. Pantai Labung Baruak Kecamatan Batang Kapas
14. Pantai Pasir Putih Kecamatan Lengayang
15. Pantai Sambungo Kecamatan Silaut

Sebagai wilayah pantai, Kabupaten Pesisir menawarkan potensi berlimpah di bidang wisata bahari. Wisata bahari memanfaatkan potensi bentang darat pantai dan bentang laut. Bentang darat pantai ini antara lain pasir putih, ombak, biota pantai (kerang), dan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan antara lain kegiatan rekreasi olahraga susur pantai, dan bola voli pantai. Selain itu wisata ini juga menawarkan potensi bentang laut yaitu ombak, angin, arus laut, dan lain-lain dengan kegiatan berenang (*swimming*), memancing (*fishing*), bersampan yang meliputi mendayung (*boating*), sea kayaking dan berlayar (*sailing*), berelancar (*surfing*), dan parasailing.

Keragaman terumbu karang dan biota laut menjadi daya tarik untuk zona wisata alam bawah laut. Berbagai aktivitas wisata bawah laut yang dapat dilakukan wisatawan terdiri atas kegiatan menyelam (*diving*), snorkeling, dan coral viewing. Alokasi ruang untuk sub zona ini memerlukan analisis kesesuaian perairan untuk aktivitas wisata bawah laut yaitu snorkeling dan selam (*diving*).

Selanjutnya di Kabupaten Pesisir Selatan juga menyimpan potensi wisata olahraga air. Olah raga air merupakan area wisata bahari yang memanfaatkan potensi bentang laut untuk kegiatan permainan dan olahraga air. Wisata jenis ini memanfaatkan potensi ombak, angin, arus laut, dan lain-lain dengan kegiatan berenang (*swimming*),

B. Potensi Pertanian

Lahan pertanian adalah bagian dari lahan fungsi budidaya yang berguna untuk menyediakan keperluan pangan dan non pangan. Sektor ini juga merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja, terutama di nagari-nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Secara umum, bentuk pertanian dibedakan menjadi; Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir peruntukan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan mencapai 45.291 hektar. Lahan pertanian ini, sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian padi sehingga Pesisir Selatan berhasil menjadi salah satu daerah lumbung beras di Provinsi Sumatera Barat. Luas lahan pertanian per kecamatan cukup variatif. Sutura dan Lengayang menjadi kecamatan dengan luas pertanian terbesar, hal ini didukung oleh kondisi kawasan yang relatif datar, sedangkan Bayang Utara menjadi Kecamatan dengan luas lahan tanaman pangan terkecil. Hal ini disebabkan kondisi topografi Kecamatan Utara yang berbukit dengan kemiringan yang tinggi. Secara lengkap luas masing-masing lahan pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Sebaran, Luas dan Persentase Lahan Pertanian
Perkecamatan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Koto XI Tarusan	3.723	8,22
2.	Bayang	2.445	5,40
3.	IV Nagari Bayang Utara	486	1,07
4.	IV Jurai	1.129	2,49
5.	Batang Kapas	2.578	5,69
6.	Sutura	6.952	15,35
7.	Lengayang	6.589	14,55
8.	Ranah Pesisir	4.223	9,32
9.	Linggo Sari Baganti	5.824	12,86
10.	Pancung Soal	1.747	3,86
11.	Airpura	6.126	13,52
12.	Basa Ampek Balai Tapan	975	2,15
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	1.036	2,29
14.	Lunang	1.459	3,22
	Total	45.291	100

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Mengingat besarnya potensi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan, maka pemerintah daerah berupaya keras, agar potensi ini bisa terus dijaga, bahkan terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

adalah dengan menetapkan area tertentu menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pada tahun 2020 telah diajukan rancangan peraturan daerah untuk menetapkan lahan LP2B di Kabupaten Pesisir Selatan seluas 18.956 hektar. Lahan LP2B tersebut tersebar di seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sampai saat penyusunan RPJMD, dokumen LP2B Kabupaten Pesisir Selatan masih dalam tahap evaluasi provinsi. Diperkirakan dari sisi luasan LP2B Pesisir Selatan ini relatif tidak akan mengalami perubahan yang signifikan.

Pada tanaman Hortikultura, di Kabupaten Pesisir Selatan akan dikembangkan seluas 33.053 hektar, tersebar di 7 (tujuh) kecamatan; Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, dan Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, dan Kecamatan Lengayang. Potensi pengembangan hortikultura tersebut tercantum di Tabel 2.19 di bawah ini:

Tabel 2.19
Luas dan Lokasi Pengembangan Hortikultura
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Koto XI Tarusan	7.549	22,84
2.	Bayang	1.891	5,72
3.	IV Nagari Bayang Utara	4.191	12,68
4.	IV Jurai	5.449	16,49
5.	Batang Kapas	4.466	13,51
6.	Sutera	9.137	27,64
7.	Lengayang	369	1,12
	Total	33.053	100

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030

Selain tujuh kecamatan tersebut, dalam satu tahun belakangan berkembang juga tumbuh sentra pengembangan baru hortikultura. Sentra baru tersebut adalah Kecamatan Air Pura. Pemerintah kecamatan bersama-sama dengan 10 (sepuluh) nagari yang ada di wilayahnya, sepakat menyediakan lahan minimal 1 (satu) hektar tiap nagari untuk penanaman bawang merah. Walaupun dari data saat ini Kecamatan Air Pura masih belum memiliki catatan luasan pertanian hortikultura, namun kedepannya dengan dukungan kebijakan dan komitmen stakeholder yang ingin menjadikan Kecamatan Airpura sebagai Kecamatan Mandiri Hortikultura maka diharapkan pertanian Hortikultura akan segera berkembang. Bukan tidak mungkin, gerakan permintah Kecamatan Air Pura ini akan diikuti oleh kecamatan lain yang ada disekitarnya, seperti Kecamatan Basa IV Balai

Tapan, Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.

Potensi selanjutnya dari sektor pertanian adalah subsektor perkebunan. Di RTRW Kabupaten Pesisir Selatan dialokasikan lahan seluas 84.802 hektar untuk pengembangan perkebunan. Di tahun 2021 pusat-pusat perkebunan tersebar di Kecamatan Airpura, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Lunang, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan, Kecamatan Silaut, Kecamatan Ranah Pesisir, dan Kecamatan Sutera.

Beragam komoditas perkebunan dikembangkan, antara lain Kopi, Kakao, Kelapa, Cengkeh, Pinang, Karet, Sawit, Durian, Manggis, dan sebagainya.

C. Potensi Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sangatlah besar. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi perikanan tangkap di Kabupaten Pesisir Selatan $\pm$ 100.000 ton/tahun. Dari potensi tersebut, baru bisa direalisasikan kurang dari setengahnya, yakni 35.372,38 ton (Dinas Perikanan, 2021). Berikut dalam Tabel 2.20 disajikan data Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Tabel 2.20
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Produksi (Ton)	Nilai (Juta)
1	Koto XI Tarusan	7.031,22	186 034,24
2	Bayang	1.335,70	35 340,39
3	IV Nagari Bayang Utara	0,00	-
4	IV Jurai	1.478,70	39 123,91
5	Batang kapas	2.774,30	73 403,24
6	Sutera	7.381,65	195 306,06
7	Lengayang	6.546,16	173 200,50
8	Ranah Pesisir	2.035,20	53 847,97
9	Linggo Sari Baganti	5.018,60	132 783,72
10	Pancung Soal	40,65	1 075,53
11	Airpura	1.661,10	43 949,91
12	Basa Ampek Balai Tapan	0,00	-
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	0,00	-
14	Lunang	0,00	-
15	Silaut	69,10	1 828,27
Jumlah		35 372,38	935 893,74

Sumber Data : Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, 2021.

Produksi perikanan tangkap terbesar ada di 4 (empat) kecamatan yaitu Sutera, Koto XI Tarusan, Lengayang dan Linggo Sari Baganti. Alat tangkap yang dominan dan berkembang di Kecamatan Lengayang adalah pancing tonda, sedangkan tiga Kecamatan lainnya alat tangkap bagan. Kecuali Kecamatan Linggo Sari Baganti, tiga kecamatan lainnya telah memiliki pelabuhan perikanan. Secara keseluruhan produksi perikanan tangkap pada masing-masing Kecamatan digambarkan melalui Tabel 2.21.

Selanjutnya, bila hasil perikanan tangkap digabung dengan hasil perikanan budidaya, maka pada tahun 2021 total produksi perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 61.203 ton. Jumlah produksi perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ketahun, terus menunjukkan tren peningkatan.

Tabel 2.21
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan (ton)	46.650	50.371	53.945	57.606	61.203
2	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	23.660	24.011	25.636	27.261	28.000

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan, 2021

Adapun Jenis ikan yang banyak ditemui di perairan Kabupaten Pesisir Selatan meliputi ikan pelangis besar, ikan pelangis kecil, ikan damersal, ikan tuna dan udang-udangan (kkji.kp3k.kkp.go.id).

D. Potensi Peternakan

Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki potensi peternakan yang cukup besar. Daerah ini sudah lama dikenal memiliki sapi lokal yang berkualitas, yang dinamakan dengan “Sapi Pasisia”. Peternakan sapi dikembangkan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama di daerah yang telah ditetapkan menjadi kawasan Agropolitan. Kecamatan agropolitan tersebut antara lain Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti. Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan, di tahun 2020 tercatat populasi sapi di kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 86 ribu ekor.

Selain sapi, Kabupaten Pesisir Selatan juga dikenal sebagai penghasil itik yang berkualitas, yang dinamakan itik bayang. Itik bayang merupakan jenis itik lokal yang wilayah sebarannya berada di Kecamatan Bayang. Itik ini merupakan persilangan dari

Itik Jawa dan itik lokal yang ada di Kecamatan Bayang, sehingga menghasilkan jenis baru yang berbeda dari jenis awal. Ciri khas dari Itik bayang adalah bertubuh ramping dan agak tegak, serta adaptasi yang baik terhadap lingkungan yang terbatas. Produktifitas telur dari Itik bayang cukup baik, yakni 184 butir/tahun sampai dengan 215 butir/tahun, selain itu Itik Bayang ini merupakan plasma nutfah yang potensi di kembangkan di Pesisir Selatan. Dengan keunggulan yang demikian, maka banyak pembudidaya ternak itik yang berasal dari luar kabupaten yang “memburu” Itik Bayang untuk dibawa dan dikembangkan di daerah mereka.

Selain potensi sapi dan itik, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki potensi peternakan lainnya seperti: kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.22 di bawah ini.

Tabel 2.22
Populasi Ternak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Jenis	Populasi Ternak (Ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	80.976	81.786	82.615	83.687	85.031
2	Kerbau	8.430	8.506	9.353	7.983	7.998
3	Kambing	40.451	40.856	41.264	32.862	28.653
4	Ayam Buras	780.056	787.857	792.648	733.730	752.650
5	Ayam Ras Pedaging	1.671.600	1.734.200	1.718.000	1.998.400	2.460.300
6	Ayam Ras Petelur	90.400	97.500	107.000	105.950	86.800
7	Itik/Itik Manila	154.050	157.266	163.994	174.177	179.445

Sumber Data : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pessel, Tahun 2021

2.1.4.2 Analisa Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten pesisir Selatan analisis dilakukan berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki oleh setiap wilayah. Untuk mengukur potensi ekonomi di suatu wilayah dapat dilakukan melalui tiga metode yaitu:

1. *Regional Account (Income – Expenditure) Approach* yang mengukur nilai ekonomi dari suatu wilayah berdasarkan produk atau kegiatan ekonomi pada setiap sektor di suatu wilayah.
2. *Input – Output Approach* yang mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah dari nilai pemanfaatan faktor produksi atau input baik yang tersedia di wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain untuk menghasilkan output tertentu.

3. *Economic Base Approach* yang mengukur nilai produksi, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi sehingga menghasilkan kelompok struktur perekonomian daerah menjadi sector unggulan dan bukan unggulan

Dalam penyusunan RPJMD ini analisa terhadap sektor-sektor unggulan daerah dilakukan melalui pendekatan *economic base*. Konsep dasar *economic base* terletak pada asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah ditentukan oleh pertumbuhan ekspor dari wilayah yang mampu mendatangkan pendapatan dari luar wilayah. Sektor-sektor yang kinerja ekspornya baik dan tumbuh pesat dikategorikan sebagai *base activities/sectors* (sektor unggulan). Sebaliknya, kategori lapangan usaha yang tidak memiliki performa ekspor yang tinggi dapat dikategorikan sebagai *non-base sectors* (sektor bukan unggulan). Analisis dari sektor unggulan dan bukan unggulan didasarkan pada nilai tambah atau lapangan pekerjaan yang diciptakan (jumlah tenaga kerja yang terserap).

Untuk mendapatkan sektor/kategori unggulan di suatu wilayah dengan menggunakan pendekatan *economic base* terdapat beberapa metode pengukuran yang umum digunakan, antara lain: *Location Quotient* (LQ), Analisis Growth, Analisis *Shift-Share*, dan Tipologi Klassen

A. Analisis Location Quotient (LQ)

Dalam melakukan analisis terhadap kondisi umum daerah dan perumusan strategi pembangunan yang tepat dan terarah, maka penting untuk diketahui potensi pembangunan utama yang dimiliki oleh daerah. Analisis kondisi umum daerah harus memunculkan analisis potensi utama ekonomi daerah secara sektoral bahkan sampai ke tingkat komoditi.

Potensi utama daerah dapat dilihat dari sudut pandang Keuntungan Komparatif (*Comparative Advantage*) dari sektor/lapangan usaha secara relatif terhadap daerah regional dengan menggunakan Koefisien Lokasi (*Location Quotient*) atau dapat disingkat dengan LQ. Berikut pada Tabel 2.23 disajikan hasil perhitungan LQ Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020.

Tabel 2.23
Perhitungan Koefisien LQ
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	LQ				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	1.67	1.67	1.66	1.67	1.64
B	Pertambangan dan Penggalian	0.90	0.92	0.90	0.90	0.88
C	Industri Pengolahan	0.81	0.80	0.83	0.81	0.78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.71	0.71	0.71	0.70	0.69
F	Konstruksi	1.10	1.12	1.13	1.13	1.09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.80	0.81	0.80	0.81	0.82
H	Transportasi dan Pergudangan	0.33	0.33	0.34	0.35	0.37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.97	0.99	0.99	0.99	1.02
J	Informasi dan Komunikasi	1.03	1.04	1.05	1.05	1.02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.74	0.73	0.73	0.73	0.72
L	Real Estate	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72
M, N	Jasa Perusahaan	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	1.06	1.06	1.07	1.06	1.05
P	Jasa Pendidikan	0.78	0.76	0.75	0.75	0.74
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	0.95	0.94	0.94	0.94	0.92
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0.61	0.62	0.62	0.64	0.62

Sumber Data : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020

Keunggulan komparatif dilihat dari nilai koefisien LQ. Apabila nilai $LQ > 1$ mengindikasikan terdapat suatu keuntungan komparatif dari sebuah sektor lapangan usaha. Berdasarkan Tabel 2.22 hasil perhitungan koefisien Lokasi (LQ) dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 4 (empat) sektor/lapangan usaha yang merupakan keunggulan komparatif selama tahun 2016-2020 di Provinsi Sumatera Barat. Keempat sektor unggulan tersebut adalah 1) sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; 2) Konstruksi; 3) Informasi dan komunikasi; dan 4) Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun fenomena unik terjadi untuk tahun 2020 disaat isu pandemi global melanda dunia tak terkecuali Pesisir Selatan, yakni terdapat penambahan satu sektor keunggulan komparatif yaitu sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini ditenggarai sebagai akibat terjadi peningkatan usaha masyarakat di bidang makanan dan minuman. Kenaikan produktifitas sektor ini lebih kepada sektor makanan dan minuman, sebagaimana diketahui sektor akomodasi (penginapan dan hotel) mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Satu sisi dengan kondisi pandemi covid-19 mengharuskan masyarakat untuk selalu berada di rumah, di lain sisi untuk pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman aktifitas jual beli banyak dilakukan masyarakat melalui online. Hal demikian ini yang menyebabkan nilai sektor makan minum mengalami peningkatan.

B. Analisis Growth

Analisis *Growth* digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dari sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya. Berikut pada Tabel 2.24 disajikan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

Tabel 2.24
Pertumbuhan PDRB
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	Growth (%)				
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
A	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	2.21	3.16	3.39	2.78	-0.07
B	Pertambangan dan Penggalian	5.72	2.97	4.24	6.21	-3.51
C	Industri Pengolahan	6.69	1.83	3.11	-5.32	-3.08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.16	5.36	5.42	3.22	-4.98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.18	4.37	2.58	3.30	-1.22
F	Konstruksi	7.75	9.48	7.74	8.79	-5.84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.99	8.02	7.06	8.37	-0.39
H	Transportasi dan Pergudangan	8.69	8.67	8.09	8.13	-11.15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.94	10.78	8.11	8.04	-13.02
J	Informasi dan Komunikasi	9.76	10.73	9.18	8.89	7.21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.63	2.00	0.50	2.70	0.29
L	Real Estate	5.82	5.21	4.57	5.42	0.05
M, N	Jasa Perusahaan	5.19	5.17	5.56	6.28	-4.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	5.19	5.14	7.04	5.24	-0.69
P	Jasa Pendidikan	9.17	6.97	6.27	7.61	4.20
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	5.53	7.90	7.57	7.52	6.53
R, S, T, U	Jasa Lainnya	11.99	8.81	8.79	10.90	-13.35
		5.33	5.41	5.32	4.78	-1.11

Sumber Data : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020

Berdasarkan perhitungan analisis growth di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sektor lapangan usaha di Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2016-2019 mengalami pertumbuhan atau positive growth. Namun tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan hingga -1,11%, pertumbuhan negatif ini seiring dengan perekonomian nasional dan provinsi sebagai dampak pandemi.

Dimasa pandemi Covid-19 ini ada 5 sektor yang masih tumbuh positif yaitu, informasi dan komunikasi, dengan digalakkanya work from home, maka penggunaan jaringan telekomunikasi meningkat pesat, sehingga tidak mengherankan sektor ini tumbuh paling tinggi. Selanjutnya diikuti dengan sektor kesehatan, pendidikan, jasa keuangan dan asuransi serta real estate. Sektor yang mengalami kontraksi yang paling tinggi adalah jasa lainnya, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan keuangan. Hal ini diduga akibat terpukul hebatnya sektor pariwisata.

C. Analisis Shift Share

Analisis Shift Share bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi tersebut dapat berasal dari luar daerah maupun dari dalam daerah. Faktor luar daerah dapat berasal dari perkembangan kegiatan ekonomi daerah lain karena terdapatnya hubungan ekonomi yang cukup erat antar daerah/wilayah. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam daerah biasanya timbul dari struktur perekonomian daerah serta potensi khusus yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Berikut pada Tabel 2.25 s/d 2.29 disajikan hasil perhitungan nilai shift share Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020.

Tabel 2.25
Perhitungan Nilai Shift Share komponen Regional Share
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	Regional Share	Regional Share	Regional Share	Regional Share	Regional Share
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	164,217.84	168,811.17	168,791.66	170,257.64	- 55,878.64
B	Pertambangan dan Penggalian	15,629.98	16,619.22	16,586.14	16,867.52	- 5,721.01
C	Industri Pengolahan	35,899.49	38,521.88	38,020.43	38,245.31	- 11,563.32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	133.84	148.38	151.52	155.84	- 51.36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	295.07	315.31	318.96	319.19	- 105.29
F	Konstruksi	39,245.42	42,529.23	45,129.59	47,433.70	- 16,479.45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	49,612.54	53,383.85	55,893.73	58,378.40	- 20,202.20
H	Transportasi dan Pergudangan	15,491.93	16,935.06	17,837.34	18,809.73	- 6,495.00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,997.20	4,459.91	4,788.57	5,050.44	- 1,742.40
J	Informasi dan Komunikasi	27,182.15	30,005.33	32,204.09	34,302.77	- 11,928.47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,143.09	9,804.82	9,693.23	9,504.08	- 3,116.93
L	Real Estate	5,832.99	6,208.16	6,330.49	6,457.98	- 2,174.12
M, N	Jasa Perusahaan	222.89	235.82	240.38	247.54	- 84.01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	24,359.44	25,771.16	26,262.42	27,425.88	- 9,217.02
P	Jasa Pendidikan	11,389.87	12,505.36	12,965.56	13,442.11	- 4,619.31
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	5,225.98	5,546.28	5,800.42	6,087.18	- 2,089.95
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,970.33	4,471.57	4,715.64	5,004.84	- 1,772.48

Sumber Data : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020

Tabel 2.26
Perhitungan Nilai Shift Share komponen Proportionally Shift
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	Proportionally Shift	Proportionally Shift	Proportionally Shift	Proportionally Shift	Proportionally Shift
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	- 101,434.07	- 59,706.20	- 53,207.46	- 85,122.50	97,442.76
B	Pertambangan dan Penggalian	- 9,690.73	- 13,083.61	2,100.56	4,058.03	1,054.63
C	Industri Pengolahan	- 2,513.17	- 22,040.15	- 42,315.62	- 53,383.39	7,670.89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	144.12	- 34.60	- 30.79	- 25.08	- 167.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	63.09	- 79.91	- 180.10	69.27	21.14
F	Konstruksi	9,851.80	15,493.70	16,367.77	32,716.62	- 13,634.60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,339.93	12,118.51	20,179.37	26,539.24	5,838.66
H	Transportasi dan Pergudangan	7,068.29	5,978.86	4,510.12	- 967.76	- 58,844.23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,303.13	2,911.95	2,884.79	3,125.52	- 15,625.34
J	Informasi dan Komunikasi	21,321.36	19,483.79	21,227.23	25,448.10	84,668.86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,784.01	- 5,902.85	- 7,830.02	- 5,169.96	5,728.53
L	Real Estate	107.08	- 946.15	- 577.10	2,273.93	2,472.03
M, N	Jasa Perusahaan	- 13.80	- 5.02	14.86	58.95	- 124.97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	- 1,429.81	- 3,933.36	4,252.65	10,691.32	5,249.75
P	Jasa Pendidikan	5,586.81	10,941.62	5,181.53	7,853.97	19,137.90
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	203.78	3,435.80	2,421.29	3,071.82	13,624.46
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3,078.38	2,235.44	2,496.62	2,481.20	- 9,420.54

Sumber Data : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020

Tabel 2.27
Perhitungan Nilai Shift Share komponen Differential Shift
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	Differential Shift	Differential Shift	Differential Shift	Differential Shift	Differential Shift
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	6,166.22	- 8,374.97	- 4,054.20	9,174.85	- 43,924.12
B	Pertambangan dan Penggalian	11,040.75	5,774.39	- 4,986.70	- 15.55	- 7,893.61
C	Industri Pengolahan	12,223.68	- 3,171.73	27,315.19	- 25,471.92	- 18,377.57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	- 17.96	36.22	39.27	- 30.76	58.45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	- 8.16	24.60	21.14	- 178.46	4.15
F	Konstruksi	8,632.78	18,077.07	6,482.64	3,099.68	- 30,005.95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,857.53	15,337.65	756.90	12,562.35	9,423.54
H	Transportasi dan Pergudangan	2,999.78	4,796.07	5,752.54	12,678.03	20,069.23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	999.67	1,698.14	- 113.36	- 75.96	3,187.74
J	Informasi dan Komunikasi	1,836.49	11,290.88	4,148.68	1,139.12	- 18,990.39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	- 2,427.10	- 201.97	- 913.20	785.88	- 2,051.60
L	Real Estate	509.93	837.99	- 123.39	- 1,741.92	- 227.91
M, N	Jasa Perusahaan	10.91	- 0.80	4.76	3.51	- 1.02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	1,080.37	3,162.19	5,504.94	- 9,437.21	- 2.73
P	Jasa Pendidikan	2,843.32	- 6,996.98	- 2,317.09	- 876.08	- 2,398.59
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	50.24	- 712.08	328.29	- 29.00	- 3,004.50
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,981.29	722.99	857.74	3,403.97	- 3,596.98

Sumber Data : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020

Tabel 2.28
Perhitungan Nilai Shift Share komponen Nilai Tambah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	Δ Nilai tambah	Δ Nilai tambah	Δ Nilai tambah	Δ Nilai tambah	Δ Nilai tambah
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	68,950.00	100,730.00	111,530.00	94,310.00	- 2,360.00
B	Pertambangan dan Penggalian	16,980.00	9,310.00	13,700.00	20,910.00	- 12,560.00
C	Industri Pengolahan	45,610.00	13,310.00	23,020.00	- 40,610.00	- 22,270.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	260.00	150.00	160.00	100.00	- 160.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	350.00	260.00	160.00	210.00	- 80.00
F	Konstruksi	57,730.00	76,100.00	67,980.00	83,250.00	- 60,120.00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	65,810.00	80,840.00	76,830.00	97,480.00	- 4,940.00
H	Transportasi dan Pergudangan	25,560.00	27,710.00	28,100.00	30,520.00	- 45,270.00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,300.00	9,070.00	7,560.00	8,100.00	- 14,180.00
J	Informasi dan Komunikasi	50,340.00	60,780.00	57,580.00	60,890.00	53,750.00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,500.00	3,700.00	950.00	5,120.00	560.00
L	Real Estate	6,450.00	6,100.00	5,630.00	6,990.00	70.00
M, N	Jasa Perusahaan	220.00	230.00	260.00	310.00	- 210.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	24,010.00	25,000.00	36,020.00	28,680.00	- 3,970.00
P	Jasa Pendidikan	19,820.00	16,450.00	15,830.00	20,420.00	12,120.00
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	5,480.00	8,270.00	8,550.00	9,130.00	8,530.00
R, S, T, U	Jasa Lainnya	9,030.00	7,430.00	8,070.00	10,890.00	- 14,790.00

Sumber Data : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020

Tabel 2.29
Perhitungan Nilai Shift Share
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Regional Share	411,850.05	436,272.52	445,730.17	457,990.15	- 153,240.98
	98.91	97.94	96.49	104.88	144.73
Proportionally Shift	- 58,229.79	- 33,132.18	- 22,504.31	- 26,280.69	145,092.83
	-13.98	-7.44	-4.87	-6.02	-137.04
Differential Shift	62,779.74	42,299.66	38704.14	4,990.55	- 97,731.85
	15.08	9.50	8.38	1.14	92.30
Δ Nilai tambah	416,400.00	445,440.00	461,930.00	436,700.00	- 105,880.00
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber Data : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020

Hasil analisis Shift-share menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2019, nilai PDRB sektoral Kabupaten Pesisir Selatan mengalami pertumbuhan (*positif growth*). Sedangkan untuk tahun 2020 PDRB sektoral Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kontraksi (*negative growth*) dengan Nilai PDRB tersebut turun sebesar 105.880 juta rupiah atau sebesar - 1,11%. Sedangkan perekonomian Propinsi Sumatera Barat turun mencapai 2.755.677,07 juta rupiah atau sebesar -1.60%. Perkembangan tersebut

dipengaruhi oleh komponen *Regional Share*, *Proportionally Shift (Mixed Shift)*, *Differential shift (Competitive Shift)*.

Menurut perhitungan komponen *Regional Share*, pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan, hal ini dapat dilihat dari kenaikan tingkat ketergantungan Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Propinsi Sumatera Barat mencapai 144.73% pada tahun 2020 dengan penurunan mencapai 153.240,98 juta rupiah. Namun, sebenarnya perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan turun sebesar 105.880 juta rupiah. Hal ini dikarenakan masih ada dua komponen lain yang memberikan pengaruh yaitu *Proportionally Shift (Mixed Shift)*, *Differential shift (Competitive Shift)*.

Komponen *Proportionally Shift (Mixed Shift)* menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah akibat adanya *Proportionally Shift (Mixed Shift)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa *Proportionally Shift (Mixed Shift)* memberikan pengaruh yang negatif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mencapai -137,04 % dengan kenaikan mencapai 145.092,83 juta rupiah. Dapat dilihat nilai negatif pada komposisi sektor PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016-2019 pertumbuhan ekonomi nya mulai cepat walaupun masih terhitung relatif lambat, tetapi pada tahun 2020 terkontraksi mencapai -137,04 % yang mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun tersebut cenderung mengarah pada perekonomian yang pertumbuhan sangat lambat.

Perhitungan komponen *Differential shift (Competitive Shift)* menghasilkan nilai keunggulan *Differential shift (Competitive Shift)* pada Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 201-2020 cenderung terjadi penurunan nilai keunggulan terhadap Propinsi Sumatera Barat sebesar 62.779,79 juta rupiah atau 15,08 % pada tahun 2016 menjadi penurunan mencapai 97.731.85 juta rupiah atau 92,30 %. Nilai ini mengindikasikan bahwa keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan menambah perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga dapat dilihat bahwa perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan cukup kompetitif pada tahun 2016-2019 walaupun terjadi penurunan dan menjadi kurang kompetitif pada tahun 2020.

Dari perhitungan shift share diatas dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan sangat dipengaruhi perekonomian Nasional maupun Propinsi

Sumatera Barat, sehingga dengan adanya pandemic covid 19 ini sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen mendasarkan pengelompokan suatu sektor, subsektor, usaha atau komoditi daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan dan membandingkan pangsa sektor, subsektor, usaha atau komoditi suatu daerah dengan nilai rata-ratanya daerah acuannya. Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan pangsa sektor, subsektor, usaha atau komoditi pembentuk variabel regional suatu daerah. Berikut pada Tabel 2.30 disajikan perhitungan dan pengelompokan sektor berdasarkan Tipologi Klassen Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.30
Perhitungan dan Pengelompokan Sektor berdasarkan Tipologi Klassen
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	Tipologi Klassen				
		Kuadran 2016	Kuadran 2017	Kuadran 2018	Kuadran 2019	Kuadran 2020
A	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	1	2	2	1	2
B	Pertambangan dan Penggalian	3	3	4	4	4
C	Industri Pengolahan	3	4	3	4	4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4	3	3	4	3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4	3	3	4	4
F	Konstruksi	1	1	1	1	2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3	3	3	3	3
H	Transportasi dan Pergudangan	3	3	3	3	3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3	3	4	4	1
J	Informasi dan Komunikasi	1	1	1	1	2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4	4	4	3	4
L	Real Estate	4	3	4	4	4
M, N	Jasa Perusahaan	3	4	3	3	4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	1	1	1	2	2
P	Jasa Pendidikan	3	4	4	4	4
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	4	4	3	4	4
R, S, T, U	Jasa Lainnya	3	3	3	3	4

Sumber Data : Dihitung dan diolah dari Data BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2020

Tipologi Klassen ini dibagi atas 4 kuadran yaitu :

- a. Kuadran 1 dikelompokkan pada sektor maju dan tumbuh pesat
- b. Kuadran 2 dikelompokkan pada sektor maju tapi tertekan

- c. Kuadran 3 dikelompokkan pada sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat
- d. Kuadran 4 dikelompokkan pada sektor relatif tertinggal

Berdasarkan hasil perhitungan tipologi Klassen untuk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2020, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib bergerak pada kuadran 1 dan kuadran 2.
2. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang bergerak antara kuadran 3 dan 4 pada tahun 2016-2019, untuk tahun 2020 bergerak ke kuadran 1 diakibatkan pandemic Covid-19.
3. Sektor Perdagangan Besar dan Enceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Perdagangan selalu berada pada kuadran 3.
4. Sektor Pertambangan & Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan ; Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya bergerak pada kuadran 3 dan 4.

Dapat disimpulkan dari Analisa Tipologi Klassen ini bahwa banyak sektor/lapangan usaha Kabupaten Pesisir Selatan cenderung tertinggal terutama pada tahun 2020 walaupun sektor tersebut potensial untuk berkembang lebih cepat.

Dari Analisa LQ, Growth, Shift Share dan Tipologi Klassen dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi potensi pendorong ekonomi di Pesisir Selatan, hal ini dapat dilihat pada Analisa LQ yang menerangkan bahwa sector ini masih menjadi keunggulan komparatif di Provinsi Sumatera Barat, walaupun pertumbuhan sektor ini terkontraksi tidak terlalu dalam pada tahun 2020, dan menjadikan sektor ini menjadi sektor yang maju tetapi tertekan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemic covid 19, dalam perhitungan shift share sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilihat regional share dari Provinsi Sumatera Barat tidak terlalu mempengaruhi Kabupaten Pesisir Selatan walaupun hampir seluruh sektor terpengaruh 1,30% s/d 1,35%, hal ini menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada sector ini dan menurunkan nilai keunggulan sektor ini di Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu sektor pendorong potensi ekonomi Pesisir Selatan adalah sektor Informasi dan Komunikasi dimana dari Analisa LQ dapat diketahui sektor ini masih salah

satu keunggulan komparatif bagi Provinsi Sumatera Barat ini, hal ini juga dilihat sektor ini masih mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2020 walaupun pertumbuhan hampir keseluruhan sektor di Kabupaten pesisir Selatan mengalami kontraksi yang menyebabkan sector ini menjadi sektor yang maju tetapi tertekan diakibatkan pandemic covid 19, tetapi didalam perhitungan shift share sector ini cukup terpengaruh, hal ini dapat dilihat dari pengaruh Provinsi Sumatera Barat terhadap Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 1,35%, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan nilai keunggulan sector ini bagi kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat.

Hal yang menarik ditemui dari analisa diatas adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi salah satu pendorong potensi ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan saat ini, dimana dari Analisa LQ dapat dilihat bahwa sector ini menjadi salah satu menjadi keunggulan komparatif bagi Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera, walaupun pertumbuhan sektor ini terkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 hal ini disebabkan selama ini Kabupaten Pesisir Selatan terkenal dengan daerah Pariwisata terdampak cukup parah akibat pandemic covid 19, tetapi yang menariknya menjadikan sektor ini menjadi sektor yang maju dan tumbuh pesat, yang menjadi pendorong sektor ini menjadi maju dan tumbuh pesat pada subsektor makan minum dimana pada masa pandemic covid 19, masyarakat Pesisir Selatan cenderung menjaga imunitas tubuh dengan menjaga pola makan yang sehat sehingga subsector makan minum juga meningkat, didalam perhitungan shift share pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada regional share dari Provinsi Sumatera Barat juga tidak terlalu mempengaruhi Kabupaten Pesisir Selatan, sektor ini juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat walaupun hampir seluruh sektor mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi di Pesisir Selatan dan hal ini meningkatkan nilai keunggulan sektor ini di Provinsi Sumatera Barat dan menjadi lebih kompetitif.

2.1.5. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan daerah yang diindikasikan sering terjadi bencana alam. Di Kabupaten Pesisir Selatan kawasan rawan bencana diklasifikasi dalam bentuk kawasan rawan longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan bencana kebakaran hutan, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gempa, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan bencana tsunami, dan kawasan abrasi pantai. Bencana-

bencana yang terjadi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan hilangnya nyawa manusia. Sedemikian lengkapnya jenis-jenis bencana yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperlukan antisipasi terhadap segala jenis bencana, berupa upaya pendeteksian dini banjir, peringatan dini tsunami, pelestarian wilayah-wilayah rawan longsor dan gerakan tanah, pencegahan kebakaran hutan serta pencegahan abrasi pantai dan gelombang pasang.

Pada tahun 2020 bencana yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan terlihat sebagaimana Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31
Jenis Bencana dan Jumlah Bencana di Tahun 2020
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian Bencana
1	Banjir	17
2	Banjir Bandang	2
3	Banjir dan Longsor	3
4	Longsor	4
5	Longsor dan Hujan Deras	4
6	Longsor, Hujan dan Angin Kencang	2
7	Longsor dan Pohon Tumbang	5
8	Hujan Deras dan Angin Kencang	2
9	Pohon Tumbang	25
10	Pohon Tumbang Dan Angin Kencang	1
11	Pohon Tumbang, Angin Kencang dan Hujan	10
12	Angin Puting Beliung	2
13	Karhutla	2
14	Orang Hilang	14
15	Orang Hanyut	13
16	Orang Tersesat	1
TOTAL		107

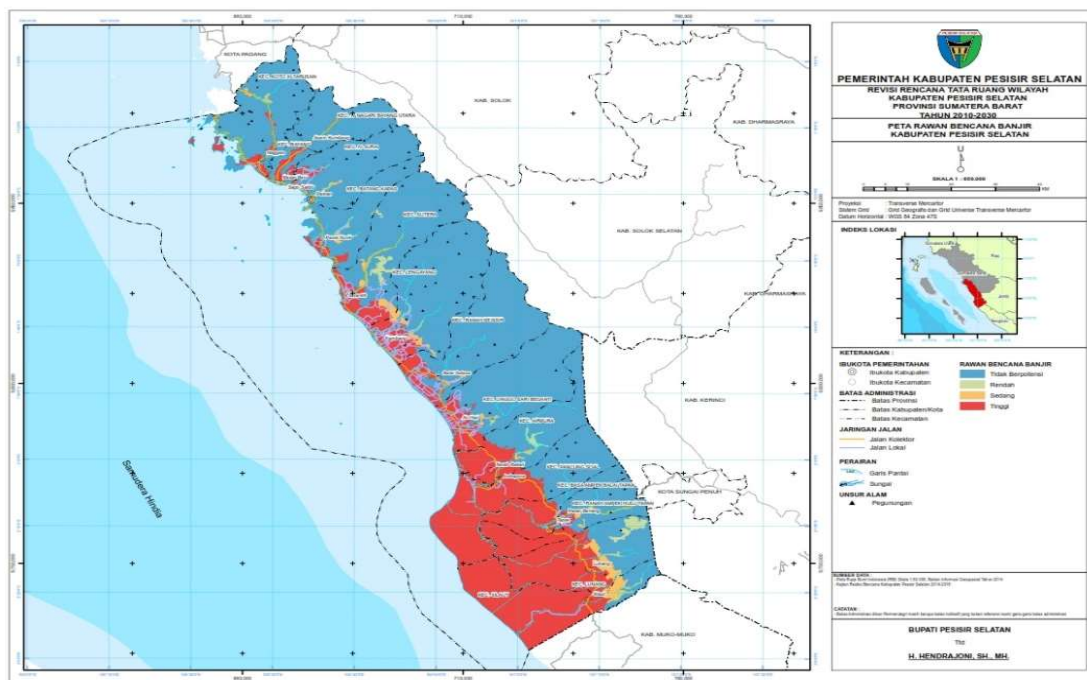
Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2021.

A. Kawasan Rawan Bencana Banjir.

Banjir adalah suatu kondisi dimana tidak tertampungnya air dalam saluran pembuangan (palung sungai) atau terhambatnya aliran air di dalam saluran pembuangan, sehingga meluap menggenangi daerah (dataran banjir) sekitarnya (Suripin, 2003, Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan). Banyak penyebab suatu daerah mengalami banjir, diantaranya disebabkan oleh penggundulan hutan di daerah hulu/tangkapan air, dan kondisi topografi wilayah. 52,91% dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari kelerengan > 40%. Kelerengan wilayah yang besar, alur sungai dari hulu ke hilir

yang relatif pendek dan kerusakan tangkapan air di daerah hulu, adalah pembentuk sempurna dari kerentanan banjir di sebagian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun potensi bencana banjir di Kabupaten Pesisir Selatan dilihat pada Gambar 2.13.

Gambar 2.13
Peta Daerah Rawan Bencana Banjir Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Secara umum, daerah yang memiliki potensi terbesar dalam luasan wilayah genangan banjir adalah daerah Barung-Baruang Balantai, Duku, Pasar Tarusan, Pasar Baru, Gurun Panjang, Salido, Painan, Lumpo, Jalamu, Pasar Kuok, Surantih, Kambang, Air Haji, Tapan, Lunang dan Silaut (Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW KAB. Pessel 2010-2030). Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2020 terjadi 17 kejadian banjir dengan korban 1 orang luka-luka dan 335 orang mengungsi di Kabupaten Pesisir Selatan.

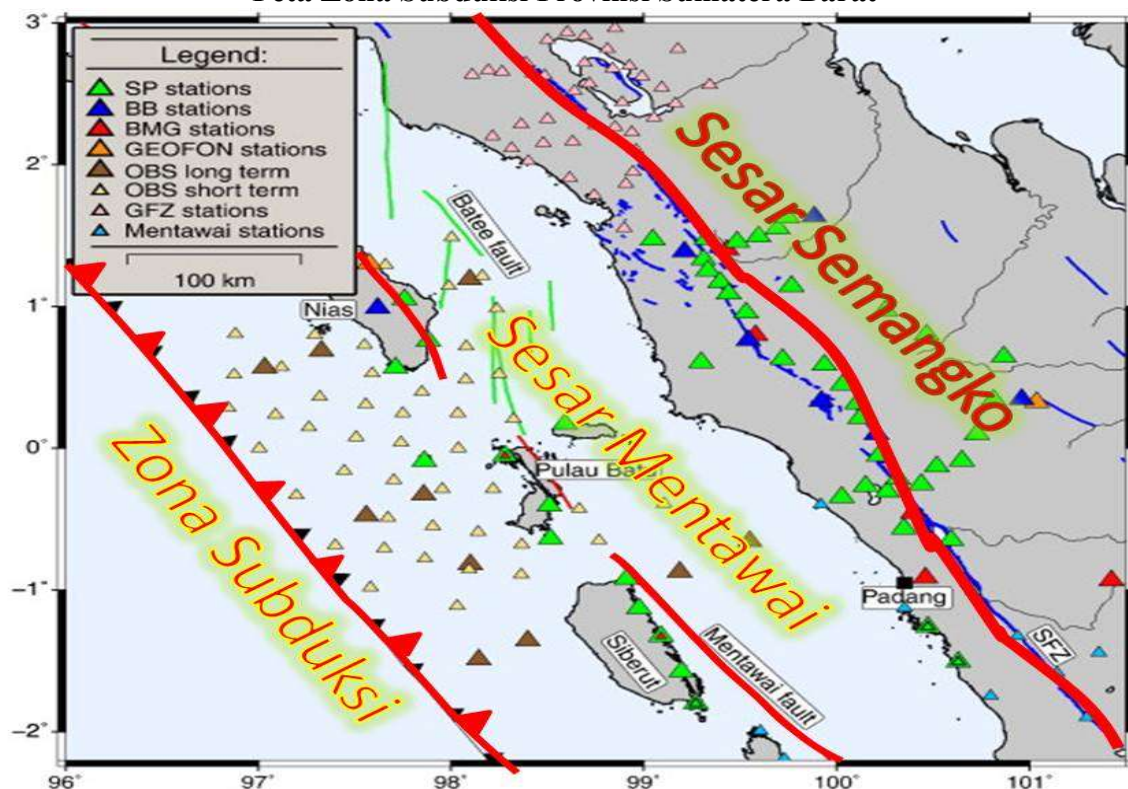
B. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari wilayah Sumatera Barat yang memiliki resiko gempa tektonik yang cukup tinggi. Tercatat di wilayah ini terdapat 3 (tiga) sistem subduksi besar (*Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (sumbarprov.go.id)*): pertama Mentawai Megathrust yaitu lokasi

pertemuan lempeng India-Australia dengan lempeng Eurasia, kedua Mentawai Fault System yakni sesar mendatar yang disebabkan adanya proses penunjaman miring disekitar Pulau Sumatera.

Sesar Mentawai berada di laut, memanjang di sekitar pulau-pulau Mentawai dari Selatan hingga ke Utara sampai di sekitar Pulau Nias. Kondisi zona subduksi dimaksud dapat dilihat pada Gambar 2.15.

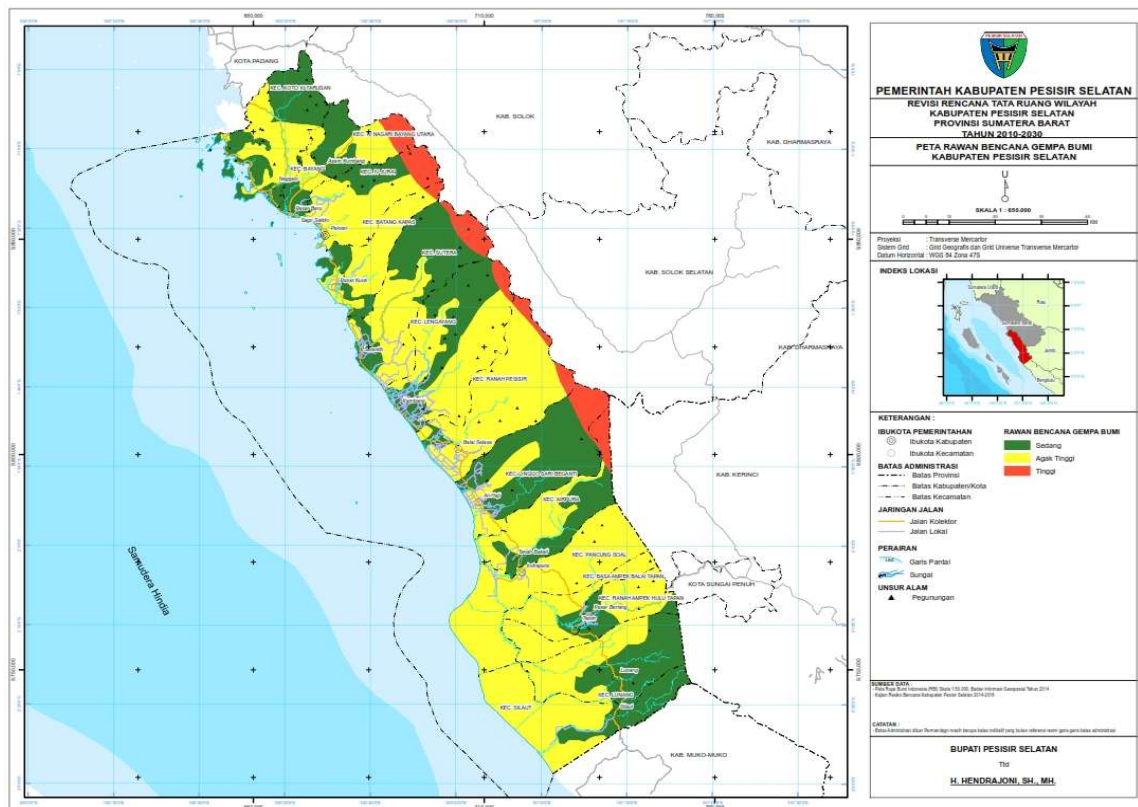
Gambar 2.15
Peta Zona Subduksi Provinsi Sumatera Barat



Sumber Data : www.newsroom.act.id

Ketiga Sesar Sumatera/Patahan Semangko yang membelah Pulau Sumatera mulai dari Lampung sampai Banda Aceh, terus ke Laut Andaman hingga ke Burma. Khusus pada Patahan Semangko, pengamatan paling mudah terhadap keberadaan aktifitasnya adalah pada Segmen Sianok, yakni pada wilayah Ngarai Sianok dan Lembah Anai. Besar pergeseran lempeng bumi pada wilayah tersebut ± 23 mm/tahun. Gambaran terhadap potensi patahan Semangko ini dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Gambar 2.17
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

C. Kawasan Rawan Bencana Tsunami.

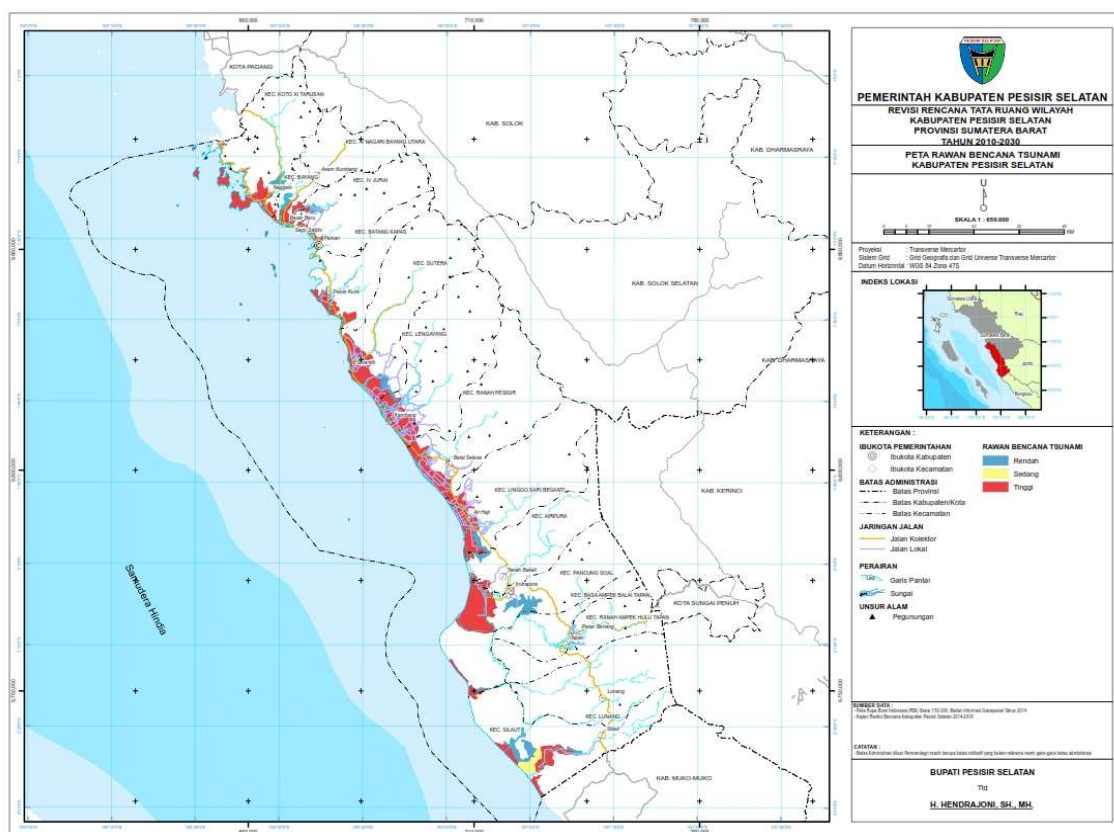
Berdasarkan hasil penelitian sejarah tsunami di Indonesia antara tahun 1612 sampai dengan 2000 yang pernah dilakukan oleh Latief et al. (2000), kemudian dilengkapi dengan kejadian tsunami 10 tahun terakhir didapatkan bahwa, tidak kurang dari 118 kejadian tsunami pernah terjadi di perairan Indonesia, 90% tsunami dibangkitkan oleh aktivitas tektonik, sedangkan 9% akibat vulkanik dan 1% oleh tanah longsor (*Mitigasi Tsunami di Pulau Sumatra/Geomagz/Majalah Geologi Populer/esdm.go.id*). Data tersebut bila difokuskan kepada wilayah Pulau Sumatra khususnya wilayah Pantai Barat Pulau Sumatra, maka potensi besar penyebab tsunami adalah akibat aktivitas tektonik. Tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2006 dan Tsunami Mentawai yang terjadi tanggal 25 Oktober 2010, adalah contoh dari bencana tsunami yang disebabkan oleh aktifitas tektonik.

Berdasarkan kajian dari Natawidjaya, 2011 (*Mitigasi Tsunami di Pulau Sumatra/Geomagz/Majalah Geologi Populer/esdm.go.id*), di Pulau Sumatra, terdapat

dua zona gempa utama, yaitu zona gempa di wilayah bawah perairan barat Sumatera dan zona gempa di wilayah darat Sumatera. Pada zona gempa wilayah bawah perairan, terdapat dua sumber, yakni Mentawai *Mega Thrust* dan *Mentawai Fault System*.

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang langsung berhadapan dengan dua sumber gempa dan berpotensi menjadi tsunami tersebut, tentu termasuk ke dalam zona beresiko tinggi terjadinya bencana tsunami. Berdasarkan pemodelan topografi dan perkiraan ketinggian gelombang bila terjadi tsunami yang ditampilkan pada Gambar 2.18, maka diketahui 43.713 hektar atau 7,25% dari total wilayah yang tersebar pada 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan berpotensi dilanda tsunami. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta rawan bencana tsunami pada Gambar 2.18 berikut.

Gambar 2.18
Peta Rawan Bencana Tsunami



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030

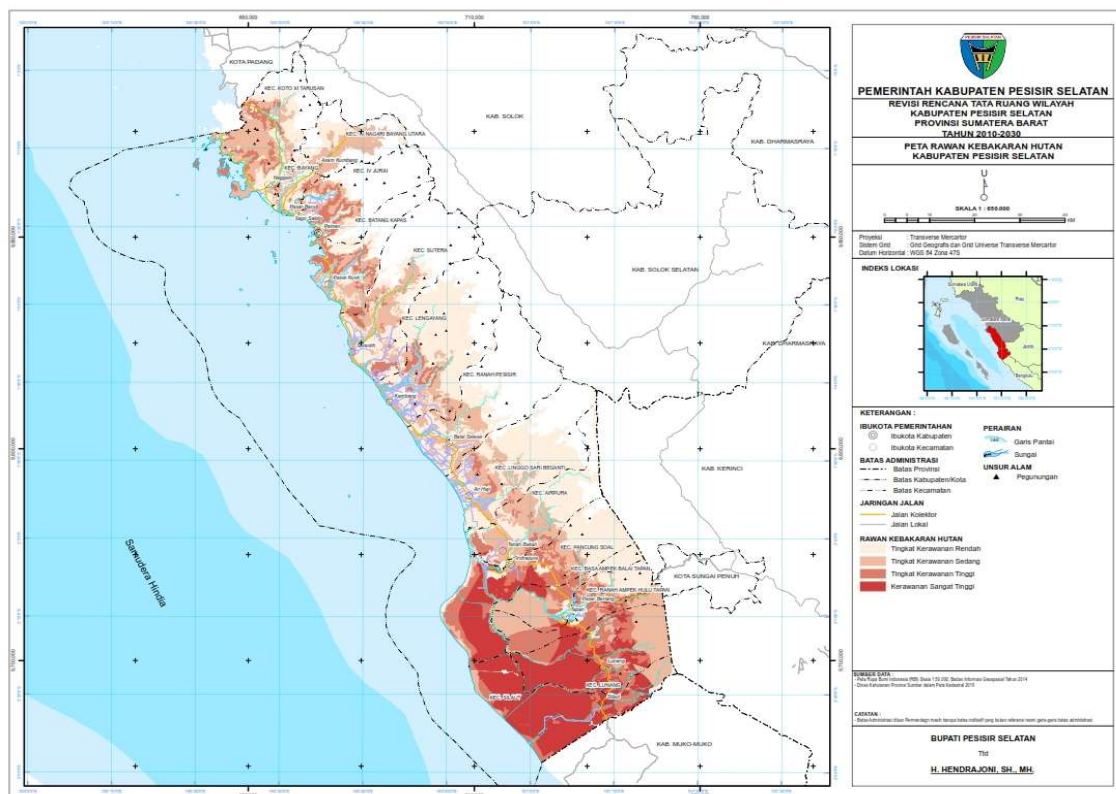
D. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah.

Sebagian besar daerah ini rawan terhadap terjadinya Gerakan tanah, terkait dengan struktur dan jenis batuan pembentuknya. Berdasarkan Gambar 2.15 Kecamatan yang rawan akan bencana gerakan tanah adalah di wilayah Utara meliputi Kecamatan

Karakteristik wilayah yang berpotensi besar terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan biasanya didominasi oleh lahan gambut. Pada wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, wilayah gambut tersebar di wilayah tengah dan wilayah Selatan. Pada wilayah tengah, lahan gambut berada di Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, dan Kecamatan Linggo Sari Baganti. Pada wilayah Selatan, lahan gambut berada di hampir semua wilayah kecamatan, seperti di Kecamatan Air Pura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Renah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.

Berdasarkan Gambar 2.20, maka potensi bencana kebakaran hutan terbesar dapat terjadi pada Kecamatan Air Pura, Pancung Soal, Basa IV Balai Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Luanang dan Silaut. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Pada tahun 2020 terjadi 2 (dua) kali kejadian kebakaran lahan gambut.

Gambar 2.20
Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

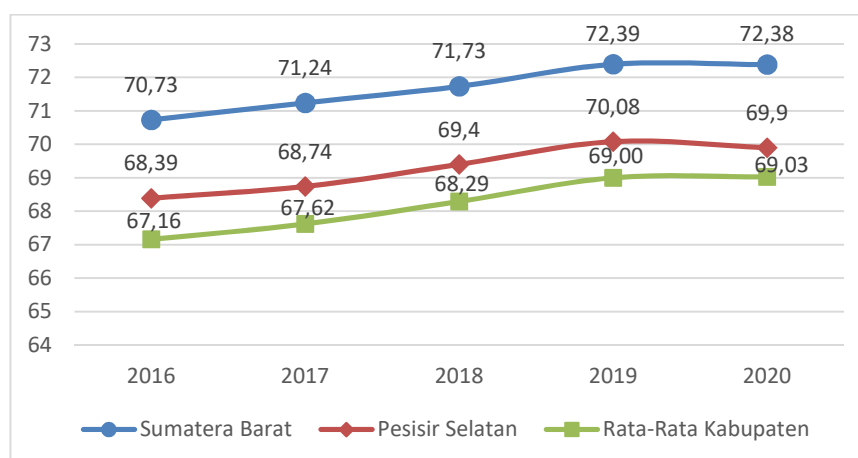
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Bahkan pembangunan manusia dapat dikatakan sebagai inti dari pembangunan daerah. Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pencapaian IPM Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat secara rinci pada Gambar 2.19. IPM Kabupaten Pesisir Selatan terus meningkat selama lima tahun terakhir meskipun terjadi sedikit penurunan tahun 2020. Peningkatan ini searah dengan peningkatan indikator penyusun IPM seperti angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Dari semua indikator tersebut, pengeluaran perkapita dan harapan lama sekolah merupakan pendorong utama peningkatan IPM Pesisir Selatan secara keseluruhan. Kedua indikator ini berhasil tumbuh sebesar 2,94 % dan 0,52 % masing-masingnya secara rata-rata. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten, IPM kabupaten Pesisir Selatan selalu berada di atas rata-rata IPM kabupaten yang ada di Sumatera Barat selama tahun 2016 – 2020. Pada tahun 2020 IPM Pesisir Selatan sebesar 69,90 lebih tinggi dari rata-rata IPM kabupaten sebesar 69,03. Gambar 2.21 berikut menyajikan perkembangan IPM Pesisir Selatan tahun 2016 – 2020.

Gambar 2.21
Perkembangan IPM Pesisir Selatan tahun 2016 – 2020



Sumber Data : BPS, 2021

Dalam hal pengeluaran perkapita penduduk, meskipun Pesisir Selatan masih berada dibawah rata-rata kabupaten, perkembangan pengeluaran perkapita terus meningkat dengan pertumbuhan yang lebih cepat dari rata-rata Kabupaten dalam periode 2016-2020. Dari sisi pengeluaran, hal ini mencerminkan terjadinya peningkatan kesejahteraan penduduk Pesisir Selatan yang lebih cepat dari rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. Tabel 2.32 berikut menjelaskan perkembangan indikator IPM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2020.

Tabel. 2.32
Perkembangan Indikator IPM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2020

Indikator		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata tahun 2016 – 2020	Tumbuh Rata-Rata Per Tahun
UHH (tahun)	Pesisir Selatan	70,11	70,23	70,45	70,73	70,86	70,48	0,3%
	Rata-rata Kabupaten	67,94	68,06	68,30	68,62	68,80	68,34	0,3%
HLS (tahun)	Pesisir Selatan	13,05	13,06	13,30	13,31	13,32	13,21	0,5%
	Rata-rata Kabupaten	12,86	12,97	13,06	13,15	13,19	13,05	0,9%
RLS (tahun)	Pesisir Selatan	8,12	8,13	8,14	8,25	8,26	8,18	0,4%
	Rata-rata Kabupaten	7,72	7,80	7,94	8,08	8,15	7,94	1,4%
Pengeluaran (rupiah)	Pesisir Selatan	8.605,00	8.819,00	9.089,00	9.444,00	9.212,00	9.033,80	2,9%
	Rata-rata Kabupaten	9.115,58	9.286,83	9.545,17	9.815,08	9.660,67	9.484,67	2,4%

Sumber Data : BPS, 2021

Pertumbuhan pengeluaran perkapita Kabupaten Pesisir Selatan perlu didorong lebih tinggi lagi, agar dapat berada diatas rata-rata Kabupaten di Sumatera Barat. Untuk itu, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan program 5 tahun mendatang. Keberhasilan dalam meningkatkan pengeluaran perkapita ini akan mendorong peningkatan IPM yang lebih tinggi dimasa mendatang.

2.2.1.2. Ketimpangan Pendapatan

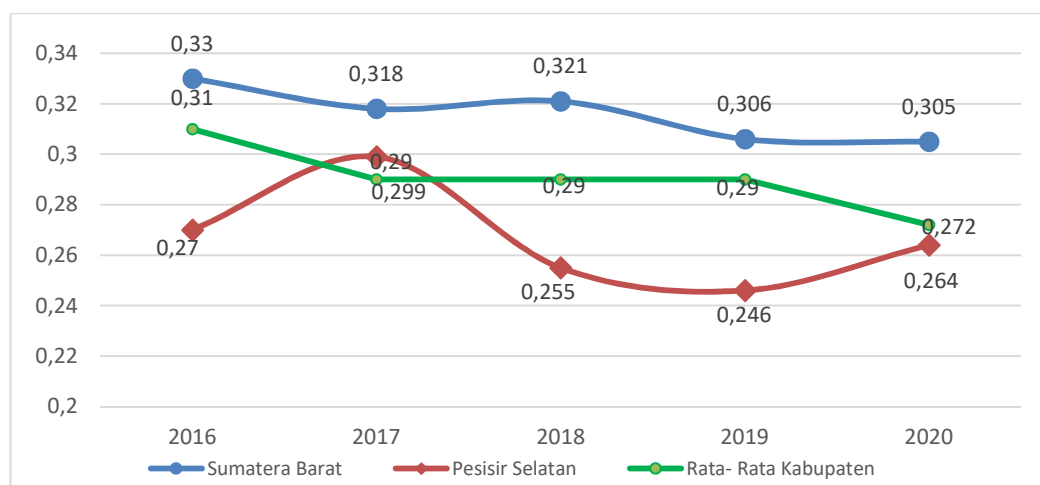
Pemerataan pendapatan merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah atau negara. Pemerataan pendapatan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif (*Inclusive Economics Growth*). Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang didirungi oleh pemerataan. Sebaliknya, ketimpangan pendapatan merupakan masalah utama dalam

pembangunan. Gini rasio merupakan salah indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat.

Selama tahun 2016 – 2020 gini rasio kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif ringan. Gini rasio kabupaten Pesisir Selatan turun dari 0,27 pada tahun 2016 menjadi 0,264 pada tahun 2020. Kinerja gini rasio kabupaten Pesisir Selatan juga lebih baik dibandingkan provinsi Sumatera Barat. Secara rata-rata pada periode 2015 – 2019 capaian gini rasio Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 0,266 lebih rendah dibanding provinsi Sumatera Barat sebesar 0,316. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan di kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam kategori rendah.

Selain itu, ketimpangan pendapatan di Pesisir Selatan juga lebih rendah dibanding rata-rata ketimpangan pendapatan kabupaten di Sumatera Barat. Pada tahun 2020 ketimpangan pendapatan di Pesisir Selatan sebesar 0,264 lebih rendah dibanding rata-rata ketimpangan pendapatan kabupaten sebesar 0,272. Kondisi ini membuktikan bahwa telah terjadi pemerataan pendapatan yang baik di Pesisir Selatan selama tahun 2016 – 2020. perkembangan gini rasio Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016 – 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.22 berikut.

Gambar 2.22
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Pesisir Selatan
Periode 2016 – 2020



Sumber Data : BPS, 2021

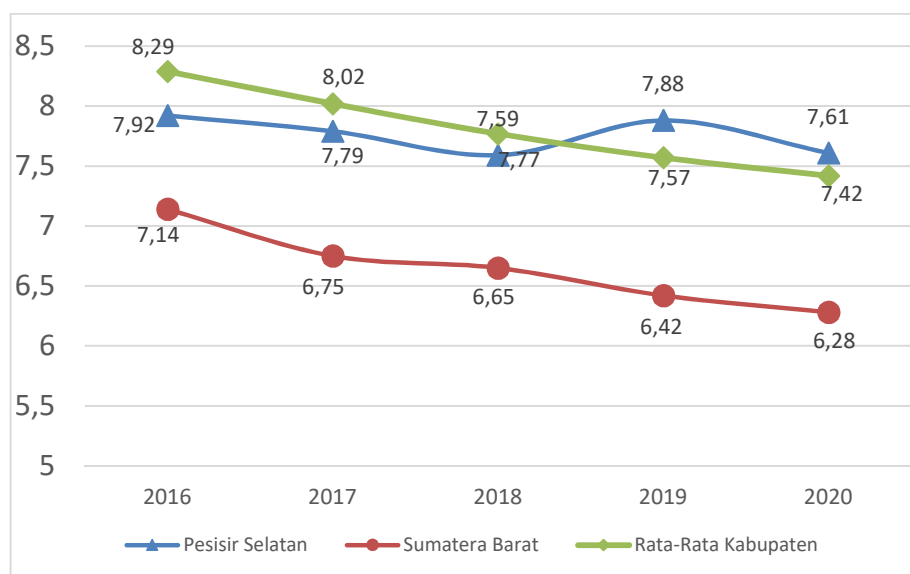
2.2.1.3. Kemiskinan

Salah satu prioritas pembangunan Pesisir Selatan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tahun 2015 – 2020 adalah penurunan tingkat kemiskinan. Prioritas ini diarahkan untuk mengentaskan angka kemiskinan di kabupaten Pesisir Selatan baik

secara secara absolut maupun relatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama 5 (lima) tahun terakhir kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan relatif berhasil ditekan. Pada tahun 2016 angka kemiskinan tercatat 7,92 % dan turun menjadi 7,61 % pada tahun 2020 (Gambar 2.21). Walaupun dengan tren yang menurun, capaian penurunan penduduk miskin di kabupaten Pesisir Selatan masih lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020, pemerintah provinsi Sumatera Barat telah berhasil menekan persentase penduduk miskin hingga 6,28 % lebih rendah dibanding Pesisir Selatan yang mencapai 7,61 %. Capaian penurunan penduduk miskin Kabupaten Pesisir Selatan juga masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata penduduk miskin kabupaten lain di Sumatera Barat sebesar 7,42 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data seperti tersaji pada Gambar berikut.

Gambar 2.23
Perkembangan Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Pesisir Selatan periode 2016 – 2020

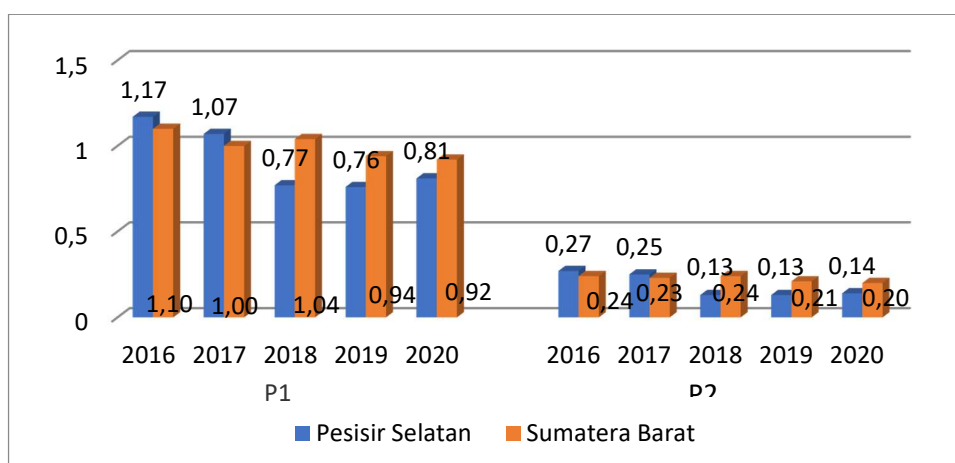


Sumber Data : BPS, 2021

Gambaran tentang penduduk miskin Pesisir Selatan juga dapat dijelaskan melalui analisis tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang dapat dilihat pada Gambar 2.24. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) menjelaskan tentang seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. P1 kabupaten Pesisir Selatan berfluktuasi selama tahun 2016 – 2020. Namun demikian terdapat kecenderungan penurunan angka P1 di kabupaten ini. Disisi lain, kinerja

pemerintah dalam menurunkan P1 di kabupaten Pesisir Selatan lebih baik dibanding capaian P1 Sumatera Barat. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh capaian P2. Selama kurun waktu 2016 – 2020 capaian penurunan P2 kabupaten Pesisir Selatan lebih baik dibanding capaian Sumatera Barat. Pada tahun 2020 nilai P1 kabupaten Pesisir Selatan adalah 0,81, artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada pada kisaran 0,81 % dari garis kemiskinan. Sedangkan nilai P2 kabupaten pesisir selatan adalah sebesar 0,14 yang mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan antara penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 14 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data seperti tersaji pada tabel berikut.

Gambar 2.24
Perkembangan P1 dan P2 di Kabupaten Pesisir Selatan
periode 2016 – 2020

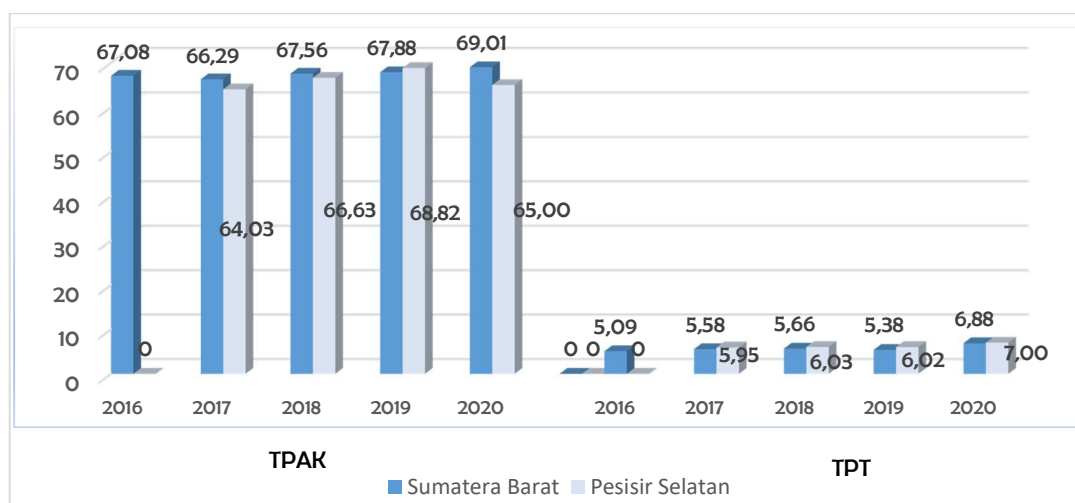


Sumber Data : BPS, 2020

2.2.1.4. Ketenagakerjaan dan TPT

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kabupaten Pesisir Selatan memiliki kecenderungan meningkat selama tahun 2016 – 2019. Namun kenaikan TPAK kabupaten Pesisir Selatan belum sejalan dengan kecenderungan peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kenaikan TPAK pada kisaran rata-rata 2 % secara nyata berdampak pada kenaikan TPT 0,04 % seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.25. Hal ini disebabkan banyak angkatan kerja yang bersifat sementara dan berada berada pada sektor informal. Apabila dibandingkan dengan capaian TPAK dan TPT provinsi Sumatera Barat, maka capaian kinerja Kabupaten Pesisir Selatan masih lebih rendah. Dengan kondisi tersebut diatas, pemerintah perlu merumuskan program-program yang tepat terkait dengan pengurangan pengangguran dan pembukaan lapangan kerja baru.

Gambar 2.25
Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat
periode 2016 – 2020



Sumber Data : SBDA, 2021

2.2.1.5. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur perkembangan kegiatan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan peningkatan kapasitas produktif, kesempatan kerja, daya beli, dan peran pemerintah terhadap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang disertai oleh pemerataan dan menurunnya tingkat kemiskinan. Selain itu, perlu juga diperhatikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (*sustainable economics growth*). Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dapat dijaga melalui penggunaan sumber daya secara bijaksana. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur perkembangan ekonomi daerah adalah dengan menghitung pertumbuhan PDRB.

PDRB berdasarkan harga konstan Kabupaten Pesisir Selatan terus meningkat selama periode 2016 – 2020. Pada tahun 2016 PDRB kabupaten Pesisir Selatan mencapai 8,23 triliun rupiah dan meningkat menjadi 9,47 triliun rupiah pada tahun 2020. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang PDRB terbesar bagi Pesisir Selatan yaitu mencapai 3,12 triliun pada tahun 2016 dan naik hingga 3,49 triliun pada tahun 2020. Sementara itu sektor dengan penyumbang PDRB terkecil adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas. PDRB sektor ini pada tahun 2016 hanya sebesar 2,8 miliar rupiah yang kemudian bertambah menjadi 3,04 miliar pada tahun 2020. Secara lebih lengkap perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Perkembangan PDRB (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan
Periode 2016 – 2020

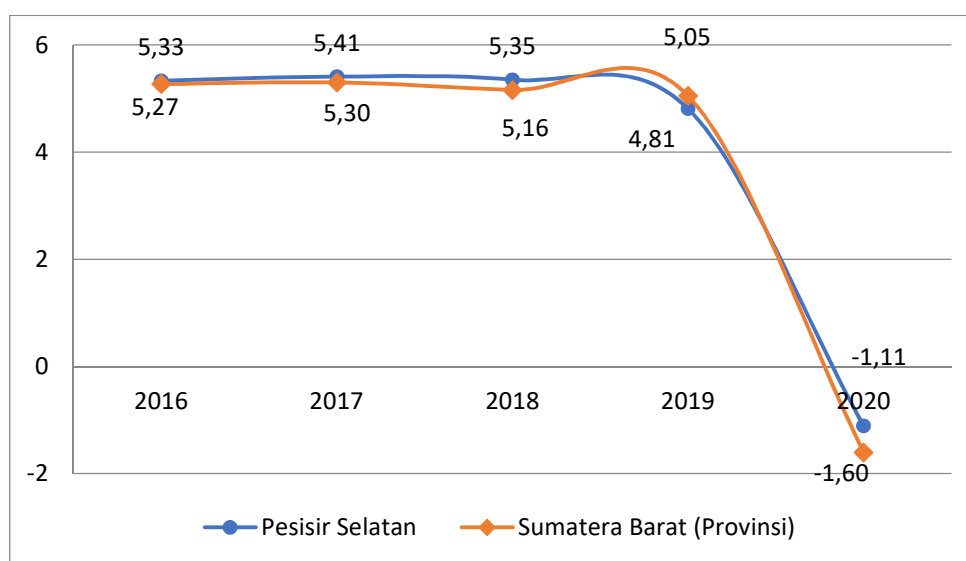
Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,185,518.28	3,286,249.91	3,399,052.01	3,494,885.72	3,489,730.00
B.	Pertambangan dan Penggalian	313,606.68	322,921.69	336,620.10	357,531.08	344,973.57
C.	Industri Pengolahan	726,922.47	740,234.30	763,429.46	722,933.30	700,366.28
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	2,802.07	2,950.74	3,113.32	3,214.04	3,046.59
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,953.65	6,205.73	6,365.91	6,584.12	6,497.28
F.	Konstruksi	802,541.38	878,642.87	946,934.90	1,030,645.96	969,752.54
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,007,368.42	1,088,207.23	1,165,322.34	1,263,417.43	1,257,576.26
H.	Transportasi dan Pergudangan	319,568.07	347,284.58	375,574.51	406,247.91	360,631.49
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	84,164.00	93,233.07	100,790.35	108,892.45	94,708.10
J.	Informasi dan Komunikasi	566,213.72	626,992.59	684,900.50	746,142.82	799,209.01
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	185,015.85	188,723.74	189,666.02	194,792.06	195,346.43
L.	Real Estate	117,146.74	123,254.97	128,884.75	135,872.35	135,940.26
M, N.	Jasa Perusahaan	4,446.97	4,679.40	4,939.73	5,245.41	5,036.61
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	486,309.52	511,309.66	547,509.17	576,430.55	572,041.34
P.	Jasa Pendidikan	235,976.92	252,425.19	268,259.23	288,682.15	300,800.84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	104,660.31	112,926.32	121,454.51	130,576.58	139,142.94
R,S,T,U.	Jasa lainnya	84,377.56	91,811.27	99,880.38	110,773.76	95,980.36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		8,232,592.61	8,678,053.24	9,142,697.20	9,582,867.69	9,470,783.59

Sumber Data : BPS, 2021

Selama periode 2016 – 2020 rata – rata pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan sebesar 5,33 % lebih tinggi dibanding rata – rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada periode yang sama sebesar 5,26 %. Namun demikian, sejak tahun 2016 hingga 2020 terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi Pesisir selatan seperti hal juga pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dengan kecenderungan yang melambat. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (termasuk Pesisir Selatan) terjadi sejak tahun 2016 hingga sekarang adalah dampak dari penurunan sektor primer yang dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas internasional seperti karet dan CPO.

Pada Gambar 2.26 dapat dilihat perkembangan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam 5 tahun terakhir yang mana ditahun terakhir menurun drastis akibat wabah Covid-19. Hantaman pandemi Covid-19 yang melanda dunia diawal 2020 sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global dan nasional, tak terkecuali Provinsi Sumatera Barat khususnya Pesisir Selatan. Ekonomi Pesisir Selatan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,11 %. Namun angka ini masih lebih baik dibandingkan provinsi pada angka -1,60 %. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat yakni melakukan pemulihan ekonomi di segala sektor.

Gambar 2.26
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016 – 2020



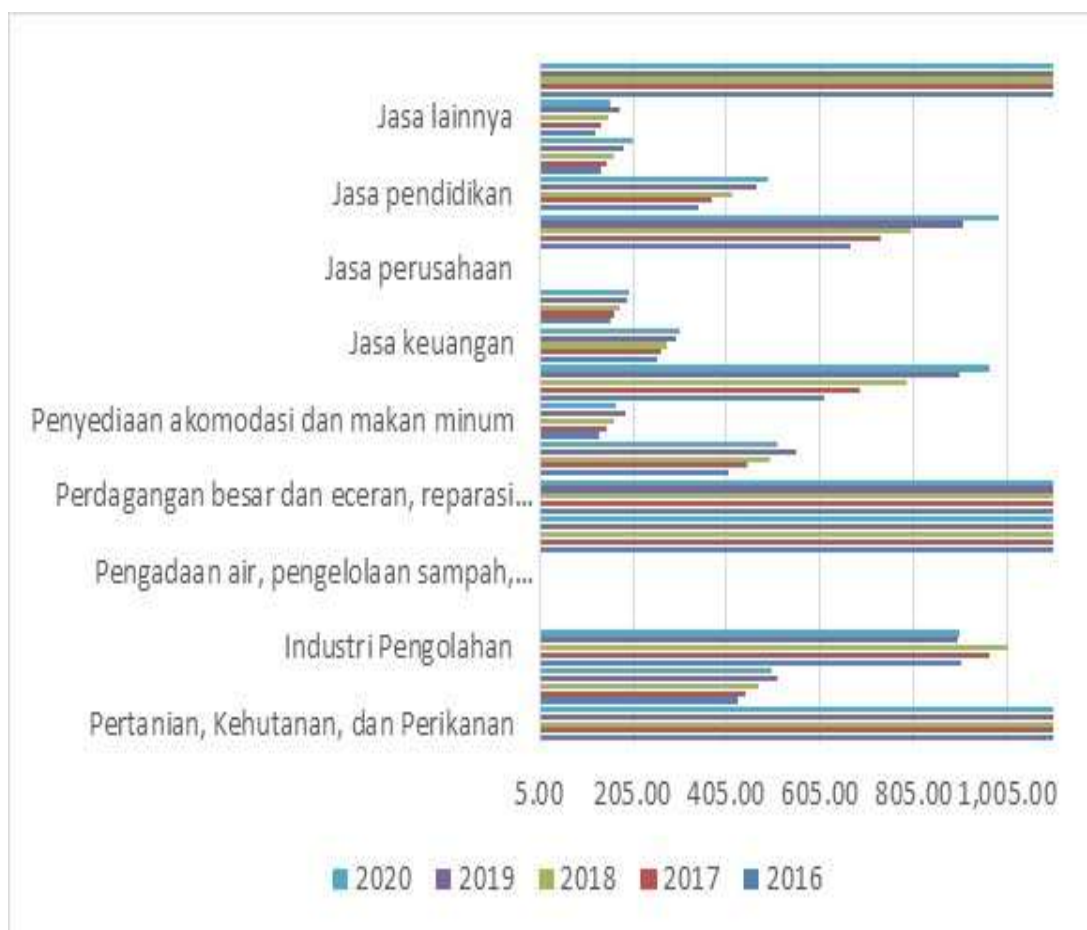
Sumber Data : BPS, 2020

Dari sisi produksi, perlambatan perekonomian Pesisir Selatan selama lima tahun terakhir terkonfirmasi oleh perlambatan di beberapa sektor ekonomi, terutama sektor primer. Sektor-sektor ekonomi yang mengalami perlambatan adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Laju pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menurun dari 2,21 % pada tahun 2016 menjadi hanya 2,82 % pada tahun 2019. Perlambatan ini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah disebabkan oleh turunnya nilai ekspor untuk produk pertanian dan perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan yang dipengaruhi oleh penurunan harga komoditi internasional. Perlambatan sektor primer selanjutnya juga berdampak kepada sektor Industri Pengolahan yang mengalami kontraksi sebesar 5,30% pada tahun 2019. Namun tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, rata-rata semua sektor

terkontraksi di Pesisir Selatan kecuali sektor Informasi dan komunikasi, Jasa Keuangan, Perumahan Jasa pendidikan, serta Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Lapangan Usaha Periode 2016 – 2020 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.27
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Lapangan Usaha Periode 2016 – 2020



Sumber Data : BPS, 2020

Struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Secara rata-rata selama tahun 2016 – 2020 kontribusi sektor ini mencapai 39,27 %. Namun demikian, kontribusi sektor ini terus menurun setiap tahunnya. Secara rata-rata kontribusi sektor ini menurun sebesar 2,34 % selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menyiratkan bahwa telah terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan

Fakta menarik lainnya dari struktur PDRB Kabupaten Pesisir Selatan adalah mulai berkembangnya sektor tersier yaitu sektor jasa-jasa dan pariwisata. Walaupun dengan kontribusi yang masih sangat kecil yaitu sekitar 1,1 %, pertumbuhan kontribusi sektor

penyedia makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 1,24 % selama lima tahun terakhir. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh sektor Jasa Lainnya.

Data perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (Atas Dasar Harga Berlaku) dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tersaji pada Tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.34
Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan (ADHK)
Periode 2016 – 2020

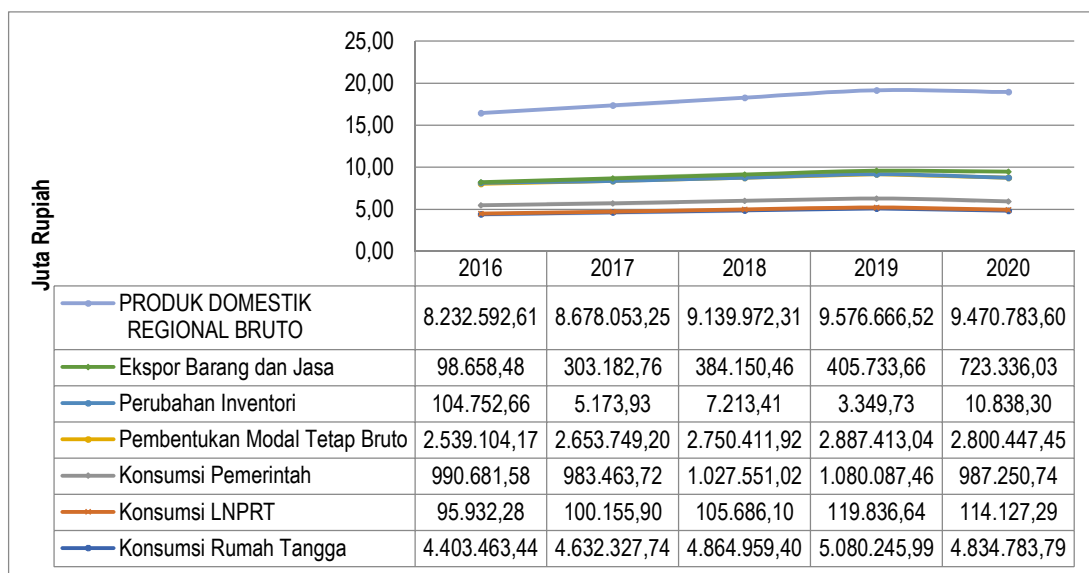
Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha		Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata kontribusi	Rata-rata pertumbuhan kontribusi
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41.18	40.20	39.28	28.26	37.45	39.27	-2.34
B	Pertambangan dan Penggalian	3.8	3.71	3.64	3.67	3.59	3.68	-1.41
C	Industri Pengolahan	8.07	8.03	7.73	6.40	6.47	7.34	-5.37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	-3.78
F	Konstruksi	9.90	10.26	10.88	11.55	11.51	10.82	3.84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.68	11.81	11.94	12.29	12.25	11.99	1.19
H	Transportasi dan Pergudangan	3.63	3.74	3.82	3.96	3.69	3.77	0.41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.17	1.23	1.25	1.34	1.20	1.24	0.63
J	Informasi dan Komunikasi	5.44	5.71	6.06	6.44	6.91	6.11	6.16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.28	2.21	2.12	2.12	2.19	2.18	-1.00
L	Real Estate	1.38	1.37	1.35	1.37	1.39	1.37	0.18
M,N	Jasa Perusahaan	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.94	6.11	6.13	6.49	7.07	6.35	4.45
P	Jasa Pendidikan	3.05	3.09	3.20	3.36	3.53	3.25	3.72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.21	1.23	1.27	1.33	1.46	1.3	4.81
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.10	1.13	1.16	1.25	1.12	1.15	0.45
TOTAL		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

Sumber Data : BPS, 2021

Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi Pesisir Selatan pada tahun 2019 dan kontraksi ekonomi tahun 2020 diprediksi terjadi akibat dari adanya penurunan kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah. Pada tahun 2019, Konsumsi Rumah Tangga telah mencapai nilai Rp.5,08 trilyun namun turun menjadi Rp.4,834 Trilyun di tahun 2020. Demikian pula dengan Konsumsi Pemerintah, di tahun 2019 kerjanya yang telah mencapai Rp.1,08 trilyun, turun menjadi Rp.987,25 Milyar di tahun

2020. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan data Perkembangan PDRB Pesisir Selatan Berdasarkan Sisi Pengeluaran, sebagaimana tersaji pada Gambar 2.28 berikut.

Gambar 2.28
Perkembangan PDRB Pesisir Selatan Berdasarkan Sisi Pengeluaran
Tahun 2016-2020



Sumber Data : Dihitung dan diolah dari data BPS 2021

Perlambatan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah akan berdampak langsung pada perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Pesisir Selatan. Kondisi ini disebabkan komponen ini mendominasi PDRB Pesisir Selatan. Komponen konsumsi rumah tangga mendominasi lebih dari 50% PDRB Pesisir Selatan. Mengingat besarnya dominasi komponen ini dalam perekonomian Pesisir Selatan, maka jika terjadi perlambatan pertumbuhan pada komponen ini akan berakibat langsung pada laju pertumbuhan agregat Pesisir Selatan. Kontribusi pengeluaran konsumsi masing-masing komponen pembentuk PDRB kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35
Pengeluaran Konsumsi Terhadap PDRB Tahun 2016-2020

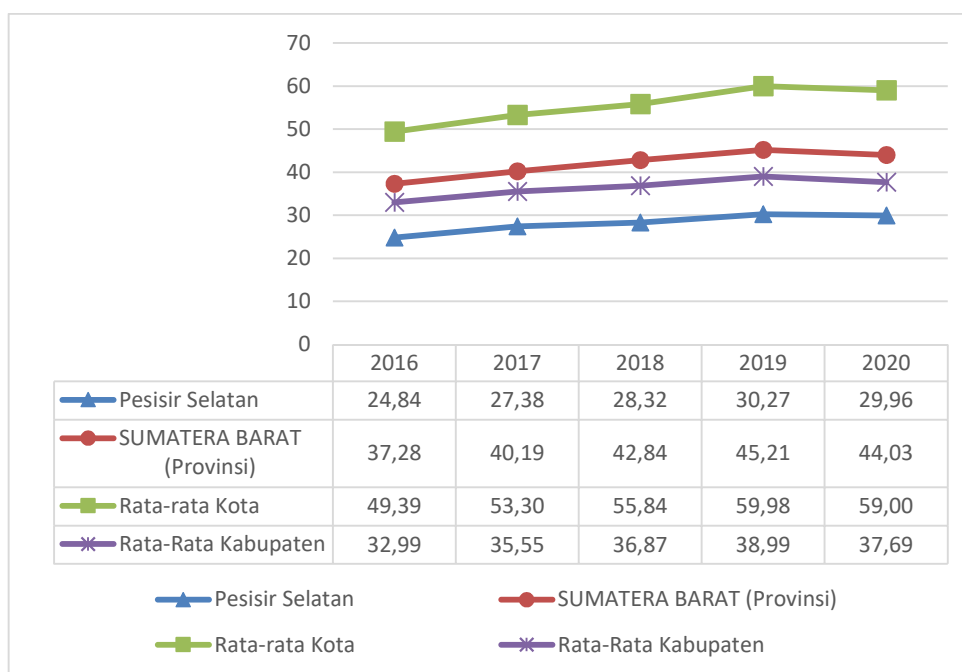
Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53.49	53.38	53.23	53.02	51.05
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.17	1.15	1.16	1.25	1.21
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12.03	11.33	11.24	11.28	10.42
Pembentukan Modal Tetap Bruto	30.84	30.58	30.04	30.15	29.57
Perubahan Inventori	1.27	0.06	0.08	0.03	0.11
Ekspor Barang dan Jasa	1.20	3.49	4.20	4.24	7.64
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber Data : BPS, Tahun 2020

2.2.1.6. PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah ukuran dari output ekonomi suatu negara atau daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduknya. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi total PDRB daerah tersebut dengan total populasi. PDRB perkapita menjadi ukuran yang baik dari standar hidup suatu daerah. PDRB perkapita memberikan penjelasan tentang seberapa sejahtera kehidupan masyarakat di suatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten Pesisir Selatan relatif membaik selama tahun 2016 – 2020. PDRB perkapita Pesisir Selatan naik secara konsisten dari semula 24,84 juta pada tahun 2016 menjadi 29,96 juta pada tahun 2020. Seperti halnya sebagian besar daerah Kabupaten di Sumatera Barat, PDRB perkapita Pesisir Selatan lebih rendah dibanding dengan PDRB perkapita Sumatera Barat yang mencapai 44,03 juta pada tahun 2020. Secara umum di Sumatera Barat, PDRB perkapita wilayah Kota memang jauh lebih tinggi dari PDRB perkapita wilayah Kabupaten. Pada Gambar 2.29 berikut disajikan perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 beserta perbandingannya dengan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.29
Perbandingan Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Selatan
dengan Provinsi Sumatera Barat dan Rata-Rata Kabupaten/Kota
Periode 2016 – 2020

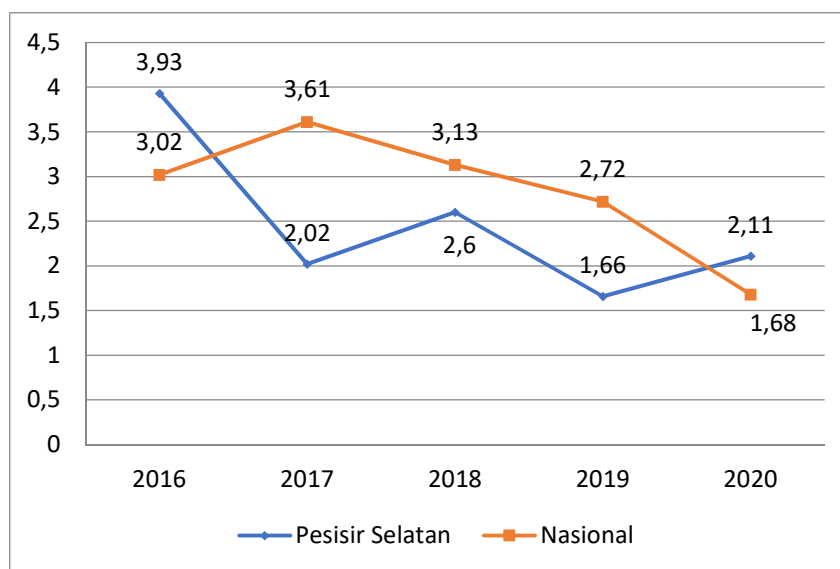


Sumber Data : BPS, 2020

2.2.1.7. Laju Inflasi

Inflasi di Sumatera Barat di representasikan oleh kinerja inflasi di dua kota yaitu Padang dan Bukittinggi. Kinerja penurunan inflasi di Sumatera Barat termasuk yang terbaik di Indonesia. Menurut laporan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menempati urutan kelima dari semua kota yang mengalami deflasi di Sumatera dan urutan ke 9 dari 70 kota yang mengalami deflasi di Indonesia. Selain itu Kota Bukittinggi berada pada urutan ke 4 dari semua kota yang mengalami inflasi di Sumatera dan urutan kesembilan dari 70 kota yang mengalami inflasi secara nasional. Baiknya kinerja penurunan inflasi di kedua kota dan Sumatera Barat secara umum, merupakan salah satu bentuk keberhasilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat dalam mengendalikan inflasi. Berikut pada Gambar 2.30 disajikan perkembangan Inflasi Kota Padang dan Bukittinggi untuk merepresentasikan inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 2.30
Perkembangan Inflasi Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016 – 2020 yang Direpresentasikan oleh Inflasi Gabungan Kota Padang dan Bukittinggi



Sumber Data : BPS, 2021

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

Tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat merupakan dua indikator yang dapat menjelaskan tingkat kesejahteraan sosial. Semakin membaiknya tingkat pendidikan masyarakat yang ditandai oleh baiknya akses terhadap pendidikan berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat secara sosial. Hal yang sama berlaku pula untuk

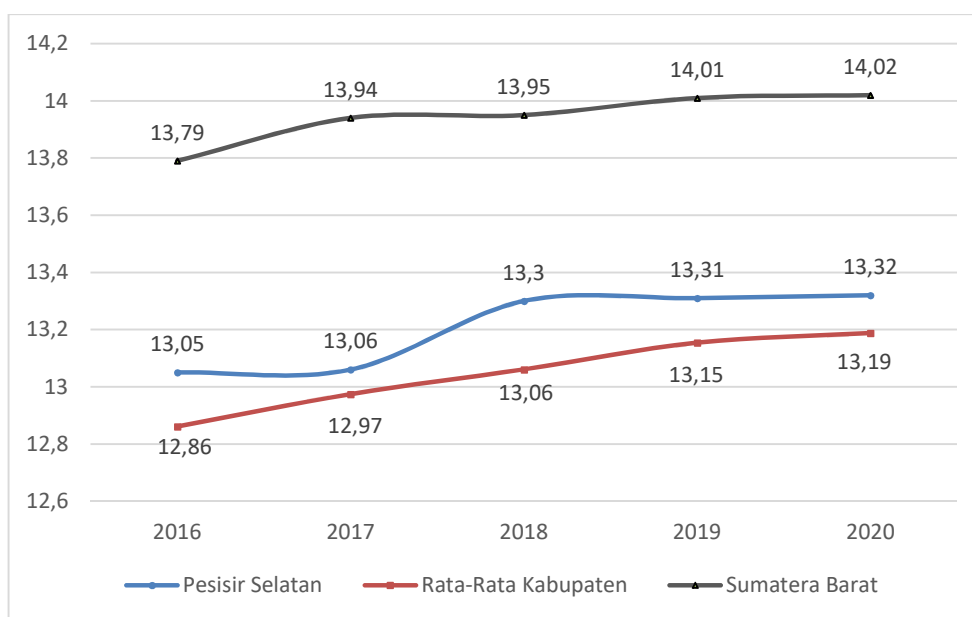
hubungan antara derajat kesehatan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial. Bagian ini akan menjelaskan perkembangan kesejahteraan sosial kabupaten Pesisir Selatan periode 2016 – 2020 berdasarkan capaian pendidikan dan kesehatan.

2.2.2.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akses, pemerataan, kualitas dan daya saing pendidikan. Keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Melek Huruf (AMH).

HLS kabupaten Pesisir Selatan memiliki kinerja yang baik selama periode 2016-2020. HLS Pesisir Selatan naik dari 13,05 pada tahun 2016 menjadi 13,32 tahun pada tahun 2020. Bahkan pada periode 2017 dan 2018, kenaikan HLS Pesisir Selatan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Selain itu HLS Pesisir Selatan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata kabupaten se-Sumbar, meskipun masih berada dibawah capaian HLS provinsi. Namun demikian secara rata-rata selama rentang waktu 2016 – 2020 HLS Pesisir Selatan telah mencapai 13,19 tahun. Berikut pada Gambar 2.31 disajikan perbandingan angka HLS Pesisir Selatan dan Sumatera Barat Tahun 2016-2020.

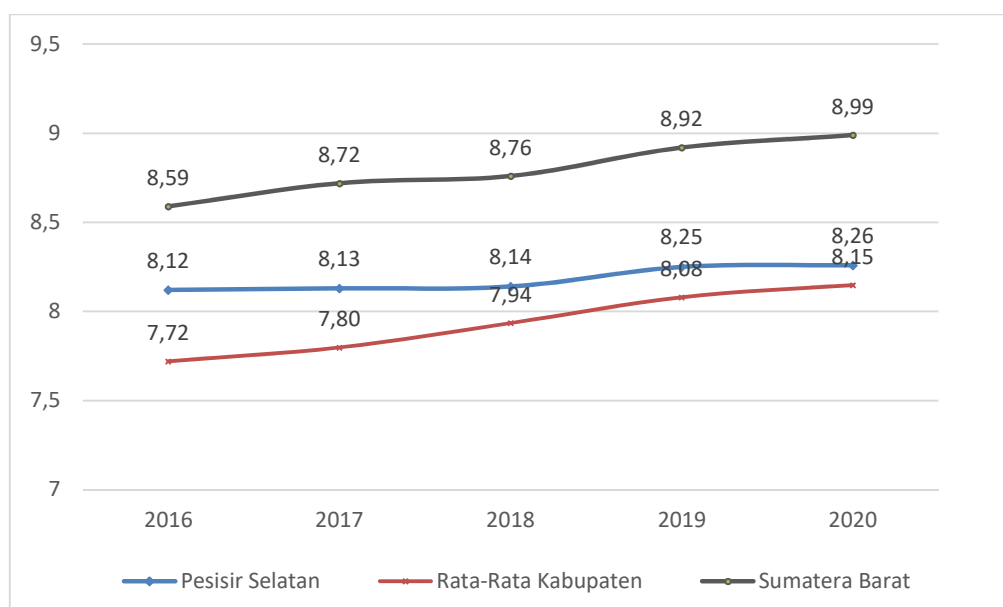
Gambar 2.31
Perbandingan angka HLS Pesisir Selatan dan Sumatera Barat
Tahun 2016 – 2020



Sumber Data : BPS, 2021

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2016 – 2020 juga terus mengalami peningkatan. Secara rata-rata sepanjang periode tersebut RLS di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 8,18 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Pesisir Selatan yang telah berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,18 tahun. Capaian ini cukup baik jika dibandingkan dengan capaian rata-rata RLS kabupaten se Sumatera Barat yang masih sebesar 7,93 tahun. Namun apabila dibandingkan dengan provinsi, capaian RLS Pesisir Selatan masih berada di bawahnya. Berikut pada Gambar 2.32 disajikan perbandingan angka RLS Pesisir Selatan dan Sumatera Barat Tahun 2016-2020.

Gambar 2.32
Perbandingan angka RLS Pesisir Selatan dan
Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020



Sumber Data : BPS, 2021

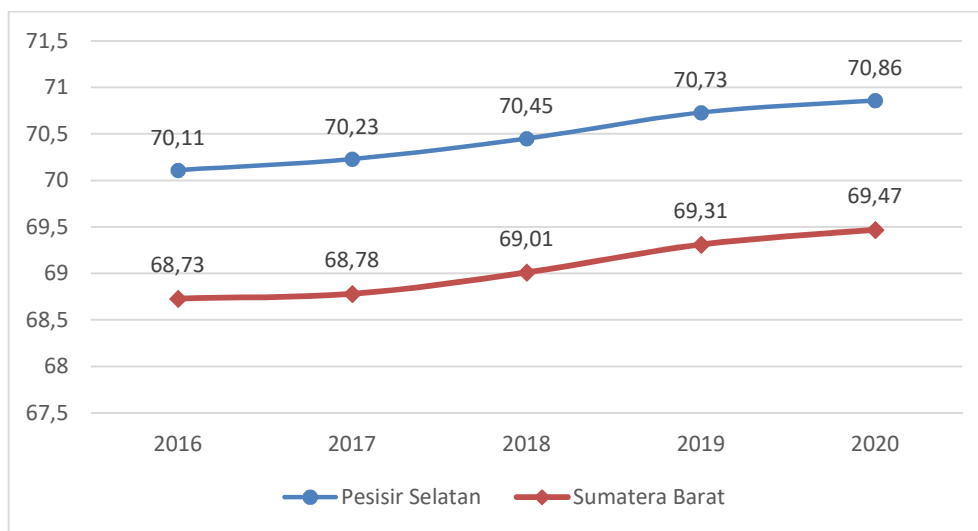
2.2.2.2. Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan merupakan faktor penting lainnya dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Penduduk yang sehat cenderung lebih produktif. Penduduk yang lebih produktif memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi yang pada akhirnya berdampak positif pada tingkat kesejahteraan. Bagian ini akan menguraikan perkembangan kesehatan Pesisir Selatan melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH), *stunting* dan angka kesakitan.

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 UHH Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 70,11 tahun dan naik hingga mencapai 70,86 tahun pada tahun 2020. Tren UHH Pesisir Selatan selama periode 2016 – 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.33, sementara. Perbandingan Usia Harapan Hidup Pesisir Selatan dan Kabupaten/ Kota serta Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.34.

Gambar 2.33
Perbandingan angka UHH Pesisir Selatan dan
Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020



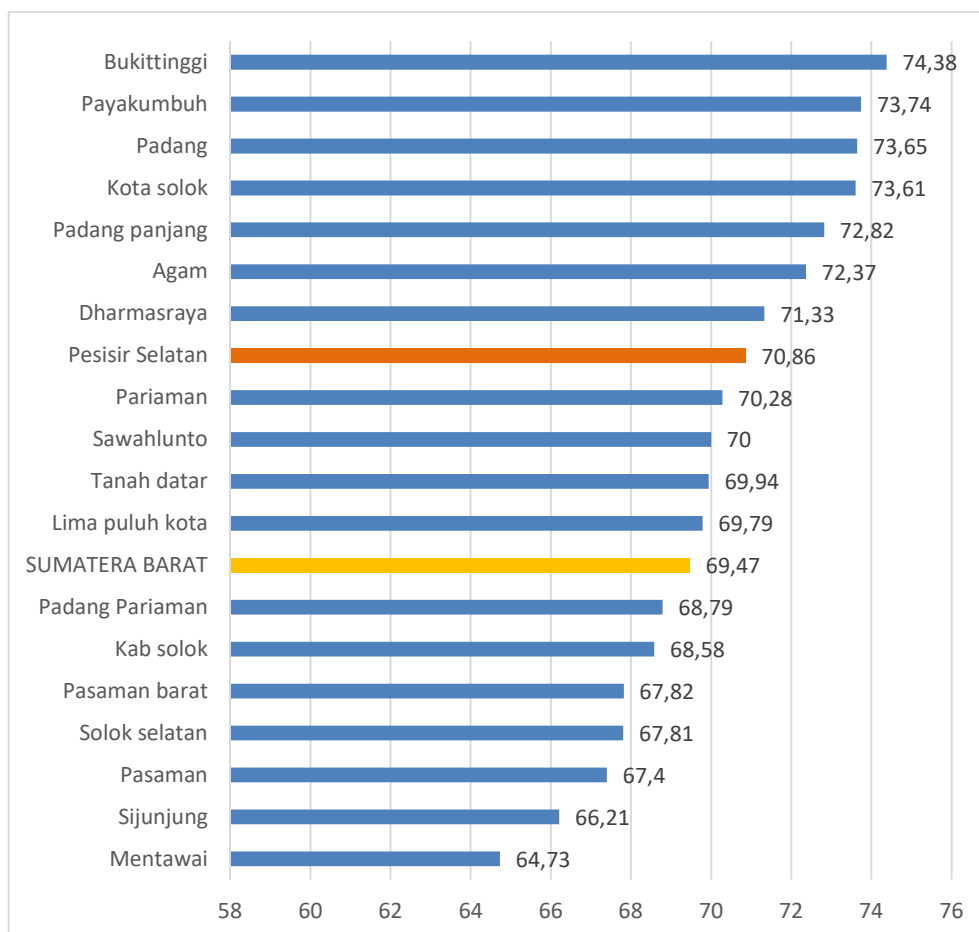
Sumber Data : BPS, 2021

Dari grafik di atas, keberhasilan pembangunan kesehatan di Pesisir Selatan juga terlihat dari relatif baiknya capaian UHH Pesisir Selatan dibanding capaian UHH Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata UHH Pesisir Selatan selama rentang waktu 2016 – 2020 sebesar 70,48 tahun lebih tinggi dibanding UHH Sumatera Barat sebesar 69,06 tahun. Kinerja UHH Pesisir Selatan juga menempati urutan ke delapan diantara 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan kinerja UHH Pesisir Selatan relatif lebih baik dibanding beberapa kabupaten/kota lain di Sumatera Barat.

Program peningkatan UHH yang dilaksanakan pemerintah semestinya diiringi oleh peningkatan kualitas UHH atau lebih dikenal dengan angka harapan hidup sehat. Kedepannya, pemerintah tidak hanya fokus pada bagaimana meningkatkan harapan lama hidup penduduk, namun juga memastikan agar lansia yang bisa berumur 70 tahun atau

lebih tetap dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, kedepannya diperlukan program-program untuk menjamin agar penduduk yang berumur lanjut memiliki kesehatan yang memadai.

Gambar 2.34
Perbandingan Usia Harapan Hidup Pesisir Selatan dan Kabupaten/ Kota serta Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020



Sumber Data : BPS, 2021

B. Stunting

Stunting atau kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (Balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Dalam jangka panjang stunting akan berdampak terhadap potensi kerugian 2-3% dari GDP per tahun (World Bank, 2016) sebagai akibat menurunnya produktivitas. Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan program dan kegiatan ke depan.

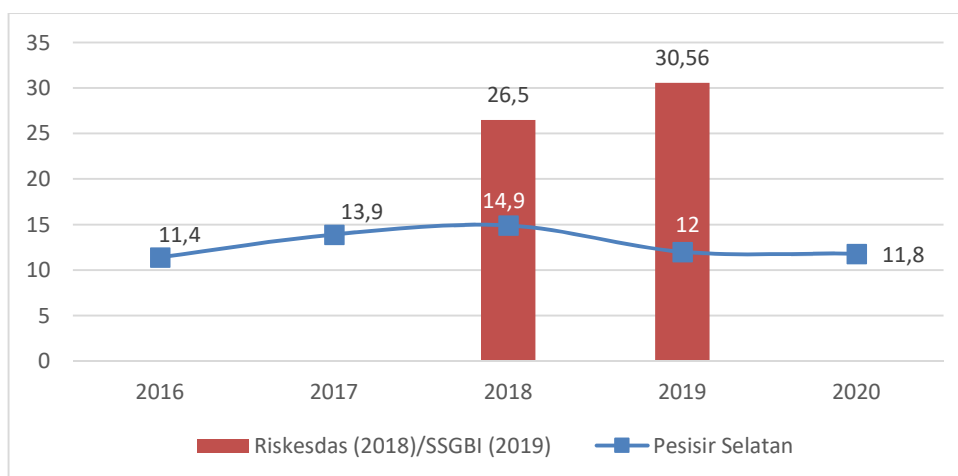
Perhitungan data stunting dilakukan melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang merupakan riset kesehatan berbasis komunitas berskala nasional dan tingkat kabupaten/kota yang dilakukan setiap 5-6 tahun sekali. Terkait stunting ini, riset dilakukan melalui penilaian status gizi. Namun seiring dengan keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans gizi, pentingnya pemenuhan informasi status gizi berdasarkan individu, maka pemantauan dan pelaporan status gizi individu telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Melalui kegiatan ini pelaksanaan pemantauan status gizi yang dilakukan dengan *by name by address* akan memudahkan untuk kebutuhan intervensi dalam penguatan surveilans gizi.

Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan surveilans gizi melalui Pemantauan Status Gizi (PSG) dengan menggunakan metoda sampling. Seiring dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi, maka pencatatan dan pelaporan status gizi mulai tahun 2019 sudah dilakukan secara elektronik sesuai arahan dari pusat melalui aplikasi e-PPGBM. Melalui e-PPGBM ini dapat dilakukan pengamatan keadaan gizi secara terus menerus, tepat waktu dan teratur, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk tindakan segera, dasar perumusan kebijakan, perencanaan program, monitoring dan evaluasi proram gizi masyarakat. hal paling penting dari pengamatan ini bahwasanya informasi status gizi individu *by name by address* baik balita maupun ibu hamil dapat diperoleh serta mengetahui determinan masalah gizinya. Data pencapaian prevalensi stunting berdasarkan e-PPGBM memiliki kecenderungan penurunan selama 5 tahun terakhir. Gambar 2.33 menunjukkan tahun 2016 angka stunting 11,4% meningkat menjadi 14,9% tahun 2018. Bersamaan dengan itu pada tahun 2018 tersebut keluar hasil Riskesdas yang menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 26,5%, kondisi ini berdasarkan kategori masalah kesehatan masyarakat prevalensi stunting menurut WHO berada pada status sedang (prevalensi antara 20-29,9%). Kemudian tahun 2019 berdasarkan hasil e-PPGBM capaian prevalensi stunting sebesar 12%, namun sesuai hasil SSGBI (Studi Status Gizi Balita Indonesia) yang dirilis pada tahun yang sama menyatakan bahwa prevalensi stunting Pesisir Selatan 30,56% dan berada pada kategori tinggi (30-39,9%). Terjadinya perbedaan hasil ini dapat dipahami bahwa data Riskesdas maupun SSGBI berdasarkan hasil survei sampel dengan menggunakan timbangan digital dan alat ukur dengan tingkat ketelitian masing-

masingnya 0,1 kg dan 0,1 cm. Sementara pencatatan yang dilakukan dengan e-PPGBM dikoleksi berdasarkan jumlah individu dan dihitung secara rata-rata kabupaten, jenis timbangan yang digunakan adalah timbangan Digital dan jenis Dacin. Meskipun demikian untuk mensiasati keakuratan pencatatan ini Dinas Kesehatan telah melakukan kalibrasi rutin terhadap alat timbang dan alat ukur yang digunakan. Dengan adanya keterbatasan ketersediaan data yang lebih valid, untuk konsistensi penanganan terkait dengan stunting ini Kabupaten Pesisir Selatan ke depan tetap menggunakan data berdasarkan e-PPGBM.

Pada Gambar 2.35 disajikan tren Angka Stunting Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020. Dari pergerakan tren data stunting pada grafik tersebut, Pemerintah Daerah perlu terus meningkatkan upaya pencegahan stunting mengingat target tahun 2024 prevalensi stunting dapat diturunkan di bawah 14 persen.

Gambar 2.35
Angka Stunting Pesisir Selatan Berdasarkan EPPGMB 2016-2020,
Riskesdas 2018 dan SSGBI 2019



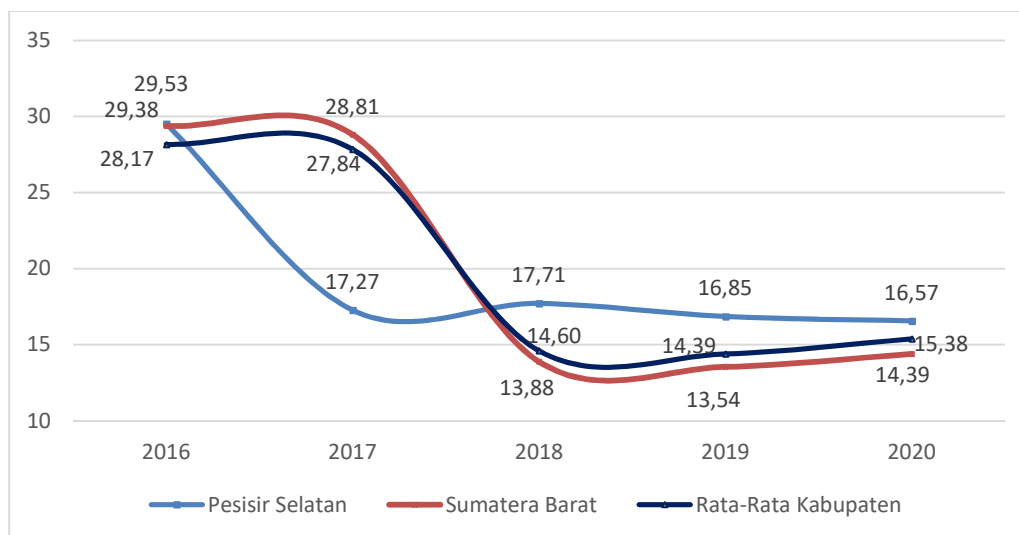
Sumber Data : Dinas Kesehatan, 2021 dan Riskesdas/SSGBI, 2018;2019

C. Angka Kesakitan

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui angka kesakitan yang merupakan adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Angka kesakitan dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan agar masyarakat dapat mudah, murah dan merata mendapatkan pelayanan kesehatan. Gambar 2.36 berikut menjelaskan bahwa angka kesakitan Kabupaten Pesisir Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan propinsi dan rata-

rata kabupaten dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kondisi ini perlu jadi perhatian ke depan dalam menyusun perencanaan kerja daerah

Gambar 2.36
Perbandingan Angka Kesakitan Pesisir Selatan, Rata-Rata Kabupaten dan Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020



Sumber Data : BPS, 2021

Peningkatan angka kesakitan di Pesisir Selatan terjadi pada tahun 2017 dari 17,27% menjadi 17,71%. Meskipun terjadi penurunan setelahnya, namun apabila dibandingkan dengan angka kesakitan provinsi dan rata-rata kabupaten maka angka kesakitan Pessel lebih buruk tahun 2018 hingga 2020. Tahun 2018 angka kesakitan Pessel berada pada 17,71% sementara provinsi dan rata-rata kabupaten pada 13,88% dan 14,60%. Demikian dengan tahun 2020 angka kesakitan Pessel masih diatas provinsi dan rata-rata kabupaten.

Penyakit TB Paru menurut Sustainable Development Goals (SDGs) masih merupakan suatu penyakit yang menjadi target untuk diturunkan, selain malaria dan HIV & AIDS. Pada level nasional, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikannya melalui program *Directly Observed Treatment Shortcourse Chemotherapy* (DOTS). Penyakit menular seperti TB masih ditemukan di Kabupaten Pesisir Selatan dimana pada tahun 2020 tingkat prevalensi Tuberkolisis 157,15 per 100.000 penduduk dengan tingkat kematian karena tuberkolisis 3,9 per 100.000 penduduk. Sedangkan proporsi kasus tuberkolisis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 83,59 %. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan masalah penyakit menular seperti TB ini masih perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyakit yang paling banyak di derita oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun terakhir 2016 hingga 2020 adalah penyakit ISPA atau penyakit Infeksi saluran pernapasan akut dimana pada tahun 2016 ditemukan sebanyak 73.232 kasus hingga 2020 turun menjadi 57.710 kasus. Selanjutnya penyakit Gastritis, dan hipertensi. Pada tahun 2016 penyakit gastritis atau penyakit yang diakibatkan oleh peradangan pada dinding lambung ditemukan sebanyak 31.825 kasus hingga tahun 2020 meningkat menjadi 39.897 kasus, dan penyakit Hipertensi pada tahun 2016 ditemukan sebanyak 25.514 kasus hingga tahun 2020 meningkat menjadi 33.931 kasus.

Penyakit ISPA, Gastritis dan hipertensi biasanya penyakit terkait dengan pola hidup yang ada di tengah masyarakat itu sendiri karena ketiga jenis penyakit ini disebabkan oleh pola hidup yang kurang memperhatikan kesehatan, sehingga diperlukan upaya promotif dan preventif untuk permasalahan ini. Penularan virus atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Virus atau bakteri dalam percikan liur akan menyebar melalui udara, masuk ke hidung atau mulut orang lain. Selain kontak langsung dengan percikan liur penderita, virus juga dapat menyebar melalui sentuhan dengan benda yang terkontaminasi, atau berjabat tangan dengan penderita. Beberapa penyakit yang termasuk ke dalam ISPA adalah common cold, sinusitis, radang tenggorokan akut, laringitis akut, pneumonia, dan Covid-19. Berikut pada Tabel 2.36 disajikan perkembangan jumlah kasus 10 penyakit terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020.

Tabel 2.36
Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

NO.	JENIS PENYAKIT	JUMLAH KASUS				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	ISPA	73,232 (1)	73,099 (1)	84,131 (1)	96,767	57,710
2	GASTRITIS	31,825 (2)	32,549 (2)	15,686 (6)	53,914	39,897
3	HIPERTENSI	25,514 (4)	24,526 (4)	8,761 (8)	43,728	33,931
4	REMATIK	26,283 (3)	26,063 (3)	42,197 (2)	42,622	29,646
5	FEBRIS/DEMAM	11,034 (8)			23,787	14,494
6	INFLUENZA	13,237 (6)			16,917	11,896
7	COMMON COLD				14,242	7,238
8	DIARE	11,127 (7)	10,823 (7)	5,460 (9)	10,529	10,683
9	DM / Diabetes Melitus				9,423	4,926
10	ASMA	4,771 (10)	4,341 (8)	13,794 (7)	6,012	4,640
11	P. Kulit Karena Alergi	17,182 (5)	16,688 (5)	35,729 (3)		
12	P. Kulit Karena Inspeksi	10,360 (9)	11,105 (6)	30,306 (4)		
13	STOMATITIS		1,580 (10)	23,957 (5)		
14	BROWN CHITIS		1,948 (9)	4,192 (10)		

Sumber Data: BPS Sumbar, Tahun 2021

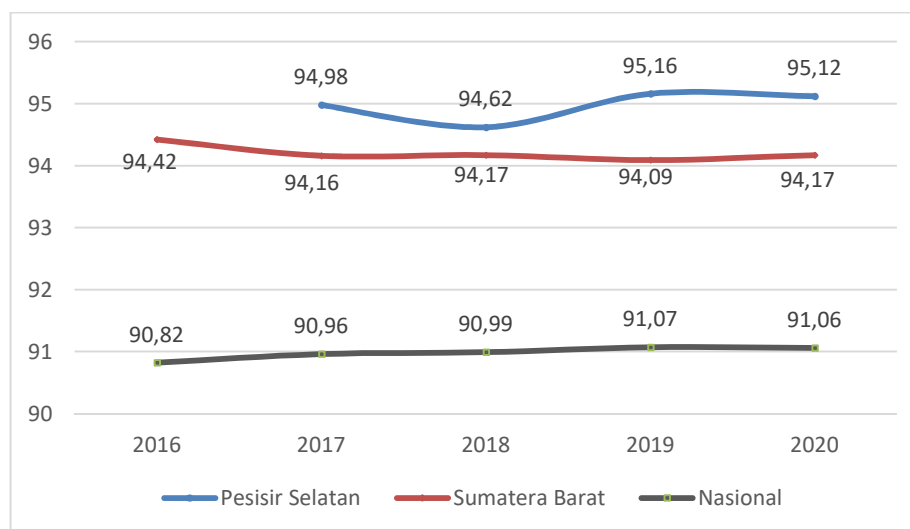
2.2.2.3. Indeks Pembangunan Gender

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender saat ini telah menjadi isu global yang telah menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan global (SDG's). Dalam SDG's menyebutkan tujuan ke-5 adalah, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial gender.

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kedua indeks tersebut, mempunyai hubungan yang erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPG lebih difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level pembangunan. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati angka 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen dan dalam pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, IDG menjadi alat ukur untuk melihat kesetaraan gender disuatu Negara/wilayah. Jika IDG mendekati angka 100, maka semakin tinggi kesetaraan gender dalam proses pembangunan.

Perkembangan data pembangunan berbasis gender di Kabupaten Pesisir Selatan cukup membaik selama 5 tahun terakhir. Meskipun terjadi penurunan 94,62% pada 2018 dari 94,98%, namun terus meningkat hingga 2020 mencapai 95,12%. Selain itu capaian pembangunan gender Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Pesisir Selatan sudah mulai membaik dan hal ini menunjukkan bahwa program - program kegiatan yang dilaksanakan sudah menunjukkan kemajuan yang berarti. Perkembangan IPG Kabupaten Pesisir Selatan tergambar pada Gambar 2.37 di bawah ini.

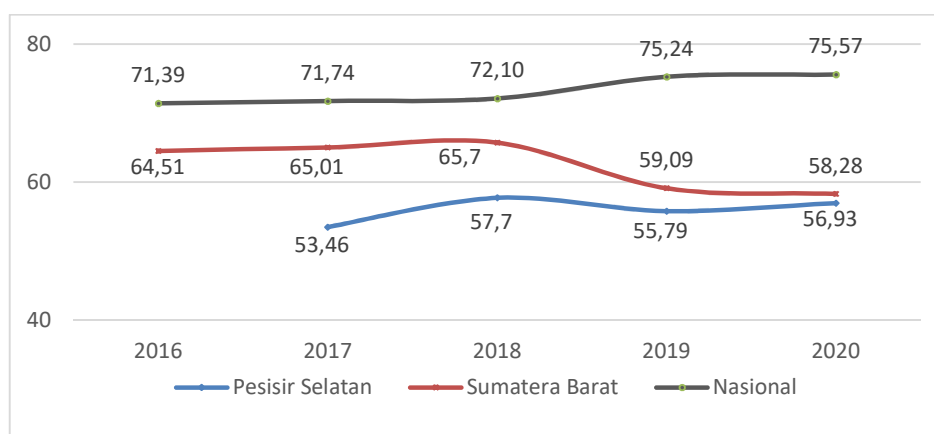
Gambar 2.37
Indek Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, Tahun 2016 - 2020



Sumber Data: BPS Sumbar, Tahun 2021

Berkebalikan dengan IPG, dalam hal capaian tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi malah lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Sumatera Barat dan Nasional. Capaian IDG Pesisir Selatan tahun 2020 sebesar 56,93% lebih rendah dari propinsi dan nasional secara berturut-turut 58,28% dan 75,57%. Meskipun kecenderungan meningkat setiap tahun namun memiliki pertumbuhan melambat. Kondisi ini mencerminkan kesetaraan gender dalam proses pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan masih tertinggal dengan daerah lain. Perkembangan IDG Kabupaten Pesisir Selatan dan posisi relatifnya terhadap rata-rata provinsi Sumatera Barat dan nasional tahun 2016-2020, dapat dilihat pada grafik Gambar 2.38 di bawah ini.

Gambar 2.38
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, Tahun 2016 - 2020



Sumber Data: BPS Sumbar, Tahun 2021

2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Kebudayaan menunjukkan peradaban sebuah bangsa. Masyarakat yang berbudaya cenderung memiliki peradaban yang tinggi. Kondisi ini juga berlaku untuk kabupaten Pesisir Selatan. Perwujudan budaya Pesisir Selatan dapat dilihat dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang dianut, adat istiadat serta ragam kesenian lokal yang berkembang. Selain dari sisi kebudayaan, kemajuan kehidupan sosial juga tercermin dari perilaku generasi muda. Karena itu sangat diharapkan berkembang generasi muda yang gemar berperilaku hidup sehat, gemar berolah raga dan berprestasi.

2.3.1.1. Seni dan Budaya

Sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau, termasuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terkenal dengan budaya minang yang memiliki keragaman budaya lokal yang khas. Beberapa hasil kreasi budaya Pesisir Selatan yang terkenal antara lain Tradisi Balimau Paga, Tari Benten, Tari Rampak, serta Seni Rabab Pasisie (Babiola). Kinerja Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.37 di bawah ini.

Tabel. 2.37
Kinerja Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Grup Kesenian	66	67	84	89	92
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	3	0
3	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (jumlah)	1	1	1	1	0
4	Benda, Situs dan kawasan cagar Budaya yang diletarikan (%)	15	17	18	18	55,18
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	0	1	2	2	185
6	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	4	4	4	102

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kab. Pessel 2021

2.3.1.2. Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan prestasi generasi muda Kabupaten Pesisir Selatan baik dalam bidang organisasi serta bidang olah raga dari tahun ke tahun terlihat semakin meningkat. Pemuda Pesisir Selatan selalu aktif dalam pemilihan Pemuda Pelopor, Pemuda Maritim serta pemilihan Duta Wisata. Dalam bidang olah raga, beberapa cabang olah raga sangat

identik dengan Pesisir Selatan diantaranya paralayang, sepak takraw, sepak bola, bersepeda dan lain-lain.

Pada Tabel 2.38 di bawah ini, disajikan data perkembangan kinerja pembangunan pemuda dan olah raga Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2015-2019.

Tabel 2.38
Perkembangan Kinerja Pembangunan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 -2019

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	183	183	183	183	183
2	Jumlah Wirausaha Muda					
	a. Jumlah Wirausaha Muda	-	-	5	6	9
	b. Jumlah Seluruh Wirausaha	-	-	175	180	192
3	Cakupan Pembinaan Olahraga					
	a. Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	27	31	34	35	37
	b. Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang ada/terdaftar	27	31	34	37	37
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikat					
	a. Jumlah Pelatih yang bersertifikat	26	38	40	47	52
	b. Jumlah Seluruh Pelatih	37	106	112	118	121
5	Cakupan Pembinaan Atlit Muda					
	a. Jumlah Atlit Pelajar yang dibina	312	356	349	476	525
	b. Jumlah Seluruh Atlit Pelajar	312	356	349	476	525
6	Jumlah Atlit Berprestasi	20	25	3	26	25
7	Jumlah Prestasi Olahraga	5	6	8	12	38
8	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	-	-	3	4	4
9	Jumlah Kegiatan Olahraga	3	3	3	2	2
10	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	5	5	8	10	11
11	Jumlah Klub Olahraga	22	30	42	51	61
12	Jumlah Lapangan Olahraga	132	214	327	398	401

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kab. Pessel

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah, baik Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Analisis kinerja pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum dilakukan terhadap beberapa indikator pelayanan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang.

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peranan pendidikan menjadi sangat penting. Pasal 31 UUD 1945 bahkan mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dan negara wajib membiayainya. Tanggung jawab terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan ini berada di pundak pemerintah.

Tujuan pendidikan pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan pembangunan yang sebenarnya yakni pembangunan manusia seutuhnya. Kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang dilaksanakan oleh suatu daerah secara umum dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendidikan merupakan komponen penting dalam pembentukan indeks tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi angka IPM-nya dan semakin berkualitas sumber daya manusianya.

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian dari NKRI telah menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Baik berupa peningkatan pelayanan pendidikan, infrastruktur dan mutu pendidikan. Melalui berbagai usaha tersebut diharapkan akan terwujud: 1) peningkatan angka partisipasi pendidikan diantaranya, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah, 2) menerapkan wajib belajar 9 tahun, 3) peningkatan kapasitas tenaga pendidik, 4) meningkatnya kualitas layanan pendidikan, 5) meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan, 6) meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, 7) terwujudnya pendidikan berkarakter.

Jumlah sekolah pada berbagai tingkatan di Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami peningkatan selama periode 2016 – 2020. Tahun 2020 telah tersedia 421 unit sekolah setingkat SD, 110 unit sekolah setingkat SMP, dan 59 unit sekolah setingkat SMA. Penyelenggara pendidikan bukan hanya dari pemerintah saja melainkan juga dari pihak swasta. Peranan swasta terlihat lebih besar pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah (sekolah setingkat SD), Madrasah Tsanawiyah (sekolah setingkat SMP), Madrasah

Aliyah (sekolah setingkat SMA), dan SMK. Besarnya andil swasta dalam memberikan layanan pendidikan ini perlu terus didorong namun kualitas dan standar mutu pendidikan tetap harus diperhatikan dan dikontrol oleh pemerintah. Tabel 2.39 berikut memperlihatkan data jumlah sekolah pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.39
Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020

Tingkat Pendidikan	Negeri / Swasta	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
SD	Negeri	385	384	384	384	384
	Swasta	3	6	7	14	14
	Jumlah	388	390	391	398	398
MI	Negeri	13	13	13	13	13
	Swasta	8	9	10	10	10
	Jumlah	21	22	23	23	23
Total SD / MI		409	412	414	421	421
SMP	Negeri	72	74	74	74	74
	Swasta	1	1	1	3	4
	Jumlah	73	75	75	77	78
MTs	Negeri	13	13	13	13	13
	Swasta	18	18	18	19	19
	Jumlah	31	31	31	32	32
Total SMP / MTs		104	106	106	109	110
SMA	Negeri	23	23	23	25	25
	Swasta	0	0	0	0	0
	Jumlah	23	23	23	25	25
MA	Negeri	4	4	4	4	4
	Swasta	12	12	13	13	13
	Jumlah	16	16	17	17	17
SMK	Negeri	8	8	8	9	9
	Swasta	8	8	8	8	8
	Jumlah	16	16	16	17	17
Total SMA / MA / SMK		55	55	56	59	59

Sumber Data : BPS, Kabupaten Pesisir Selatan Dalam angka 2019, 2020, 2021

Bila dikaitkan dengan jumlah kecamatan, jumlah nagari, dan jumlah jorong di Kabupaten Pesisir Selatan yakni ada 15 kecamatan, 182 nagari, dan 480 kampung maka dapat dikatakan bahwa setiap 2 buah kampung tersedia 1 unit sekolah setingkat SD, setiap 2 buah nagari tersedia 1 unit sekolah setingkat SMP, dan setiap 1 kecamatan tersedia 2

unit sekolah setingkat SMA. Terjadinya pengurangan jumlah SD pada tahun 2017 disebabkan adanya penggabungan 2 sekolah yaitu SD 11 dan SD 12 Sungai Liku di Kecamatan Ranah Pesisir. Jarak antara kedua sekolah ini berdekatan sehingga jumlah murid pada SD 11 sangat sedikit. Namun demikian secara keseluruhan angka-angka ini secara umum memperlihatkan bahwa ketersediaan fasilitas sekolah pada berbagai tingkatan di Kabupaten Pesisir Selatan sudah cukup memadai. Pembangunan pendidikan pada pembangunan periode berikutnya bisa lebih diarahkan kepada peningkatan kualitas sekolah dan optimalisasi penggunaannya. Namun demikian penambahan unit sekolah tetap dapat dilakukan pada daerah-daerah yang terpencil.

Capaian utama pembangunan pendidikan ditandai dengan meningkatnya beberapa indikator kinerja pembangunan bidang pendidikan diantaranya adalah Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Angka Melek Huruf mengalami peningkatan dari 98.12 tahun 2016 menjadi 98.92 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang masih buta aksara hanya tersisa sebanyak 1,08% saja. Sementara itu rata-rata lama sekolah 8.12 menjelaskan rata-rata penduduk Pesisir Selatan usia diatas 25 tahun telah menamatkan kelas VIII. Capaian-capaian indikator kinerja urusan Pendidikan lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu lima tahun cukup baik dapat dilihat dalam Tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	8.12	8.13	8.14	8.25	8,26
2.	Harapan lama sekolah (Tahun)	13.05	13.06	13.30	13.31	13,32
3.	Angka Melek Huruf	99.92	99.22	99.61	99.39	99.16
4.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	45.29	45.38	53.93	53.93	62.30
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	- SD/MI/Paket A (%)	108.13	112.09	108.39	113.14	111.64
	- SMP/MTs/Paket B (%)	96.44	88.81	85.88	84.82	84.78
	- SMA/SMK/MA/Paket C (%)	89.89	90.34	95.68	100.90	101.45
6.	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	- SD/MI/Paket A (%)	97.50	100.00	99.66	99.29	99.43
	- SMP/MTs/Paket B (%)	81.91	81.01	78.08	79.22	78.85
	- SMA/SMK/MA/Paket C (%)	70.04	72.55	73.68	74.40	75.27
7.	Angka Pendidikan yang di Tamatkan (%)					
	- APT SD/MI/Paket A (%)	0,022	0,022	0,022	0,020	0.020
	- APT SMP/MTs/Paket B (%)	0,021	0,021	0,021	0,019	0.019
	- APT SMA/SMK/MA/Paket C (%)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8.	Angka Partisipasi Sekolah - APS 7-12 tahun - APS 13-15 tahun	100.00 96.86	100.00 96.15	99.66 99.66	99.57 97.03	99.72 96.85
9.	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah (SD,SMP) - Rasio Guru Terhadap Murid - Rasio Guru Terhadap Murid per kelas Rata-Rata	56 618,79 0.36	57 633.41 0.36	57 555.95 0.33	58 555.42 0.35	61 434.34 0.90
10.	Pendidikan Menengah - APS 16-18 Tahun - Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah - Rasio Guru Terhadap Murid - Rasio Guru Terhadap Murid per kelas Rata-Rata - Penduduk yang berusia <15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	79.35 23.61 454.90 0.98 98.28	84.90 23.65 455.81 0.98 98.47	81.32 23.70 455.86 0.99 98.52	83.00 23.7 455.86 0.99 99.01	81.64 19.72 434.34 0.90 98.92
11.	Fasilitas Pendidikan - Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik - Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik	94.71 87.68	94.90 87.85	95.10 95.01	89.00 90.31	99.30 96.16
12.	Angka Putus Sekolah - Angka Putus Sekolah SD / MI (%) - Angka Putus Sekolah SMP / MTs (%) - Angka Putus Sekolah SMA / SMK / MA (%)	0.07 0.12 0.16	0.07 0.12 0.16	0.02 0.03 0.12	0.17 1.63 3.12	0.01 0.02 0.03
13.	Angka Melanjutkan - Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs - Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96.91 92.32	97.11 92.51	97.90 93.05	97.9 93.05	97.90 93.05
14.	Angka Kelulusan - Angka Kelulusan SD/MI (%) - Angka Kelulusan SMP/MTs (%) - Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	100.00 99.25 100.00	100.00 99.45 100.00	99.78 99.58 100.00	99.68 98.04 100.00	100 99.26 100
15.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90.43	90.61	94.07	92.60	86.76

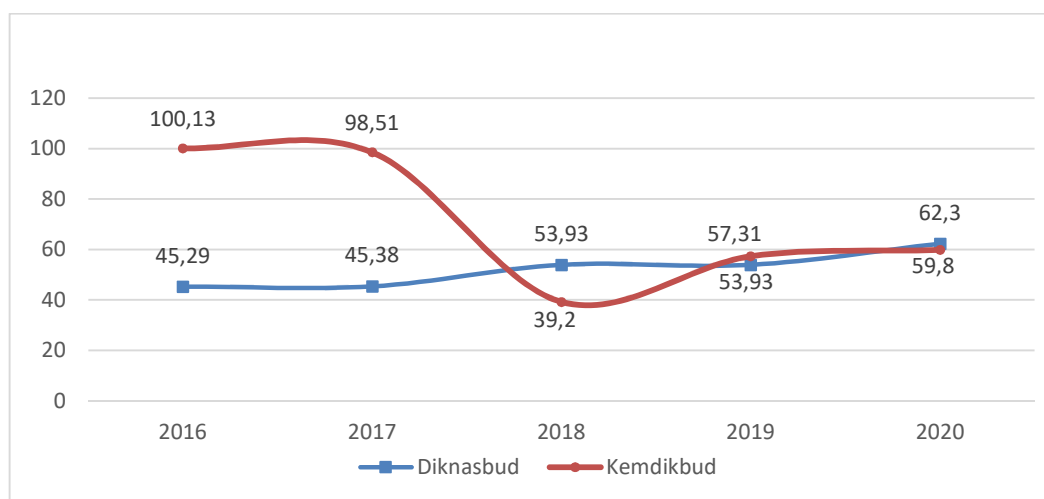
Sumber Data : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel, Tahun 2021

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan paling mendasar yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Selain sebagai salah satu komponen penting dalam SPM pendidikan, PAUD juga menjadi salah satu komponen dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting dan komponen dalam verifikasi DAK bidang pendidikan. Indikator yang digunakan untuk melihat kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD ini adalah melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. APK PAUD adalah persentase jumlah anak yang berada pada jenjang pendidikan PAUD terhadap jumlah anak kelompok usia 3-6 tahun. Terdapat perbedaan data capaian APK PAUD yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan. Perbedaan ini terjadi karena data jumlah penduduk yang digunakan dalam perhitungannya. Kemdikbud menggunakan data jumlah penduduk yang dirilis oleh BPS, sementara Diknasbud menggunakan data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pesisir Selatan. Tentu saja perbedaan ini tidak mempengaruhi kinerja layanan pendidikan, namun bisa menjadi bahan komparasi terhadap capaian kinerja.

Capaian APK PAUD Pesisir Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan menunjukkan capaian tahun 2016 sebesar 45.29% meningkat menjadi 62,3% pada tahun 2020. Artinya sekitar 62,3% anak kelompok usia 3-6 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan telah mendapatkan layanan pendidikan usia dini. Namun apabila dilihat berdasarkan data Kemdikbud, tahun 2016 seluruh anak usia jenjang PAUD sudah dapat mengakses layanan pendidikan usia dini. Akan tetapi tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan akses yang sangat signifikan hingga mencapai 59,8% di tahun 2020. Data lebih lengkap seperti yang tersaji pada Gambar 2.39 berikut:

Gambar 2.39
Capaian APK PAUD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 – 2020

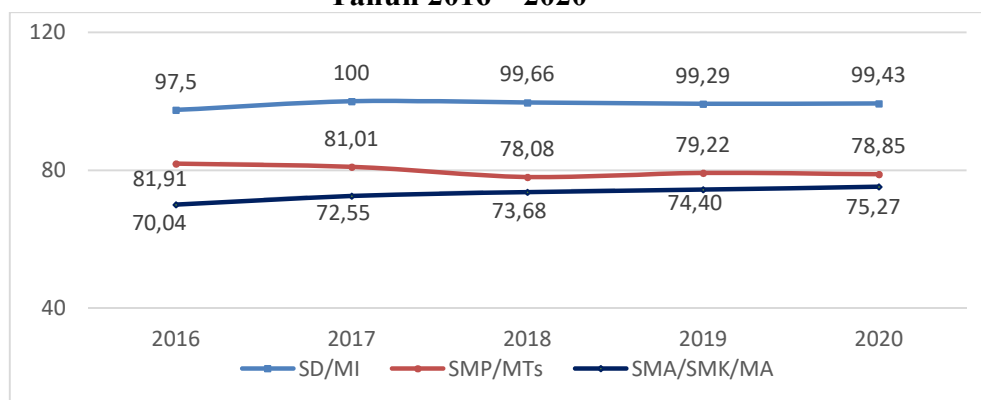


Sumber Data : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel, Tahun 2021, Kemdikbud, 2016-2021

Meskipun terjadi perbaikan setiap tahun, capaian ini masih perlu ditingkatkan mengingat masa emas ini bagi anak hanya ada sekali dalam kehidupannya. Selain itu yang lebih penting pendidikan usia dini berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan otak untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Tingkat partisipasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat dilihat melalui indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Capaian APM pada tingkat Sekolah Dasar dan SMP lebih tinggi dibandingkan tingkat SMA. Hal ini merupakan dampak dari program wajib belajar 9 tahun yang selama ini telah dijalankan. Capaian APM Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik seperti Gambar 3.40.

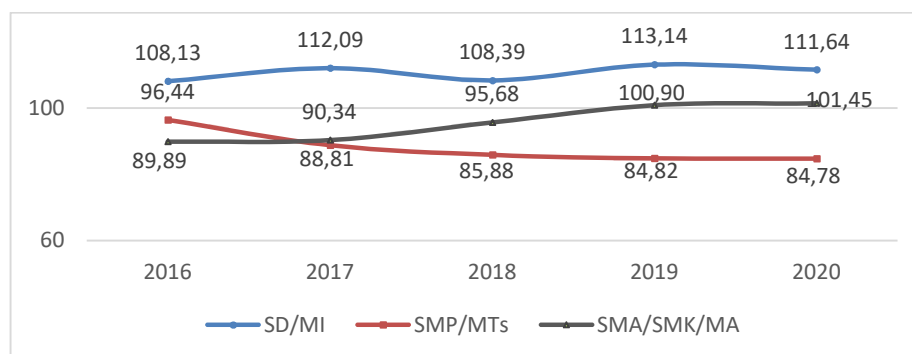
Gambar 2.40
Capaian APM Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020



Sumber Data : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel, Tahun 2021

Sejalan dengan APM, capaian APK tingkat SD paling tinggi dibandingkan tingkatan SMP dan SMA. Namun pada tingkat SMP capaian APK di tahun 2017 hingga 2020 lebih rendah dibandingkan tingkat SMA. Hal ini berkemungkinan terjadi karena banyak anak-anak Pesisir Selatan yang melanjutkan pendidikan SMP di luar kabupaten misalnya sekolah berasrama (*boarding school*) tingkatan SMP. Data perkembangan APK Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3.41 berikut.

Gambar 2.41
Capaian APK Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020



Sumber Data : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel, Tahun 2021

Untuk melihat capaian indikator pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat maupun Nasional digunakan dua variabel yang menjadi komponen pembentuk IPM yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Data 2020 memperlihatkan capaian indikator RLS Kabupaten Pesisir Selatan dimana capainnya masih berada di bawah rata provinsi maupun nasional. Sedangkan untuk variable HLS, capaian Kabupaten Pesisir Selatan sudah diatas Nasional namun masih di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Angka RLS daerah Kabupaten yang relatif rendah dari daerah Kota adalah fenomena umum di Indonesia, karena banyaknya Perguruan Tinggi di perkotaan. Di sisi lain fakta tersebut dapat menjadi pendorong bagi Kabupaten Pesisir Selatan untuk lebih meningkatkan upaya dalam pembangunan bidang pendidikan ini, terutama mendorong tumbuhnya Perguruan Tinggi khususnya yang kejuruan di daerah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan Indonesia, Tahun 2015 – 2019

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (HLS)					Harapan Lama Sekolah				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Pesisir Selatan	8.12	8.13	8.14	8.25	8.26	13.05	13.06	13.30	13.31	13.32
Provinsi Sumatera Barat	8.59	8.72	8.76	8.92	8.99	13.79	13.94	13.95	14.01	14.02
Indonesia	7.95	8.1	8.17	8.34	8.48	12.72	12.85	12.91	12.95	12.98

Sumber Data : BPS, Sumatera Barat, 2021

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian masyarakat dari waktu ke waktu. Disamping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Peristiwa kematian pada dasarnya merupakan proses akumulasi akhir dari berbagai penyebab kematian langsung maupun tidak langsung. Secara umum kejadian kematian pada manusia berhubungan erat dengan permasalahan kesehatan sebagai akibat dari gangguan penyakit atau akibat dari proses interaksi berbagai faktor yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengakibatkan kematian dalam masyarakat.

Salah satu alat untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan adalah melihat perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Usia Harapan Hidup (UHH). Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Angka kematian ibu mengalami peningkatan dari 66 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 meningkat 105 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Kasus kematian ibu di Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan oleh pendaraan, hipertensi dalam kehamilan, mengalami gangguan Sistem Peredaran darah serta Sirosis Hepatis, CA Mame, Nifas, Emboli dan Infeksi Paru. Dalam target *Sustainable Development Goals* (SDGs) angka kematian ibu maksimal yang ditetapkan 70 per 100.000 kelahiran hidup sampai Tahun 2030, maka pencapaian AKI kabupaten Pesisir selatan harus mendapatkan perhatian dalam pelayanan kesehatan Ibu karena angkanya melebihi dari target SDGs.

Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2016-2020 tersaji pada Gambar 2.42 berikut.

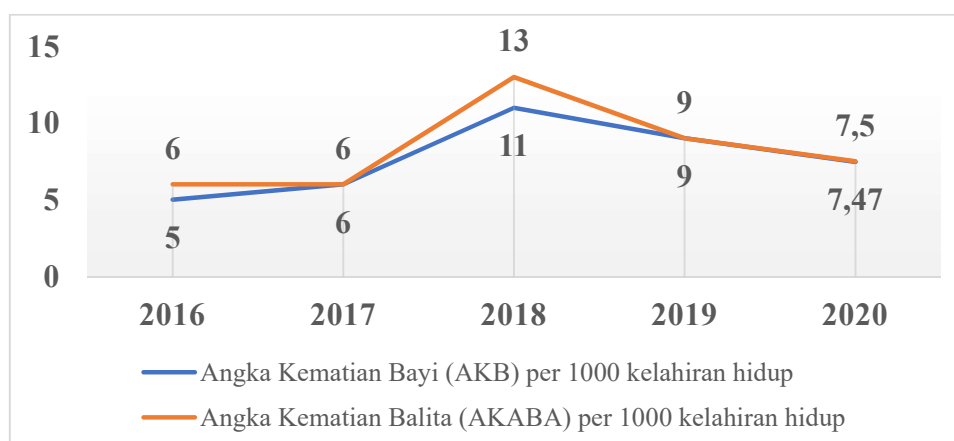
Gambar 2.42
Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Pesisir Selatan,
Tahun 2016 - 2020



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Indikator berikutnya adalah Angka Kematian Bayi (AKB) yakni angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi pada tahun 2020 turun menjadi 7,47 per 1.000 kelahiran hidup dari 9 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, dalam target SDGs angka kematian bayi maksimal 12 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. Sama halnya dengan angka kematian balita pada tahun 2020 juga turun 7,5 per 1.000 kelahiran hidup dari 9 per kelahiran hidup pada tahun 2019 dan tidak melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh SDGs maksimal 25 per 1,000 kelahiran hidup. Maka pada dasarnya capaian indikator AKB dan AKABA kabupaten Pesisir Selatan dapat dikatakan baik. Perkembangan kinerja Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.43.

Gambar 2.43
Perkembangan Angka Kematian Bayi Dan Angka Kematian Balita Kabupaten
Pesisir Selatan, Tahun 2016 - 2020



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Berikut pada Tabel 2.42 disajikan data capaian kinerja urusan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu tahun 2016 - 2020.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usia Harapan Hidup	70,11	70,23	70,45	70,73	70,86
2.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,065	0,061	0,071	0,068	5,51
3.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	0,668	0,657	0,879	1,5	7,29
4.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5	6	11	9	7,47
5.	Angka Kelangsungan hidup bayi	NA	NA	NA	NA	NA
6.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	6	6	13	9	7,5
7.	Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	4	5	10	8	5,48
8.	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	63	89	92	66	105
9.	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 70	1 : 69	1: 67	1: 67	1 : 53
10.	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,24	0,24	0,24	0,25	0,20
11.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0067	0,0066	0,0066	0,0086	0,0079
12.	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,088	0,085	0,086	0,116	0,095
13.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,17	0,18	0,18	0,23	0,206
14.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	77,06	79,83	90,6	102,99	107,13
15.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	92.54	87.9	89.9	93.1	89,90
16.	Cakupan desa / kelurahan universal child immunization (UCI)	97	95	91	86	73
17.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
18.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	91	90	91	90	85
19.	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	2.9	2.9	2.1	10.02	5,01
20.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	106,30%	108,80 %	92,90%	79,53 %	52,49 %
21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	64,4	64,9	49,7	37,04	14,25
22.	Tingkat prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	183,6	184,3	205,7	260	157,15
23.	Tingkat Kematian karena Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	3,5	3,5	4,1	3	3,9

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
24.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	114,6	109,6	103,6	79,9	48,64
25.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	67	53	54	N/a	83,59
26.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
27.	Penderita diare yang ditangani (%)	175	113	116	126	84,70
28.	Angka kejadian malaria	0,1	0,1	0,001	0,001	0
29.	Tingkat Kematian Akibat Malaria	0	0	0	0	0
30.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0	0	0	0
31.	Proporsi Anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0	0	0	0
32.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0004	0,003	0,007	0,006	0,006
33.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	65	67	73	90	85
34.	Cakupan kunjungan bayi	100	95	117	104,2	105,7
35.	Cakupan Puskesmas	120	133,3	133,3	133,3	133,3
36.	Cakupan Pembantu Puskesmas	50	50	50	43,41	43,96
37.	Cakupan kunjungan ibu hamil k4	90	88,3	87,6	88,7	84,8
38.	Cakupan pelayanan nifas	90	85,7	85,4	90,5	86,2
39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	42,4	44,4	66	75,7	85,0
40.	Cakupan pelayanan anak balita	51,8	52,5	52,4	65,7	72,3
41.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	93,8	97,6	98	94,3	84,2
42.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	65	67	73	90	85
43.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	67%	67%	50%	100%	100
44.	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Untuk lebih meningkatkan akses pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan baik pada pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Berdasarkan capaian tahun 2020

kabupaten Pesisir Selatan terdapat 20 Puskesmas yang telah terakreditasi yang tersebar di 15 Kecamatan yang terdiri dari 12 Puskesmas rawat inap dan 8 Puskesmas non rawat inap, dan didukung dengan adanya 81 Puskesmas pembantu. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal Puskesmas terhadap Kecamatan yaitu minimal 1 Puskesmas di 1 Kecamatan, secara nasional sudah terpenuhi, tetapi perlu diperhatikan adalah distribusi dari Puskesmas tersebut memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, aspek yang ditentukan sebagai standar, yaitu: (1) Lokasi, (2) Bangunan, (3) Prasarana, (4) Peralatan, (5) Ketenagaan, (6) Perizinan dan registrasi, dan (7) Penyelenggaraan. Untuk memenuhi pelayanan sesuai standar harus terpenuhi standar input dan standar proses. Standar tersebut diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan Puskesmas yang bermutu mudah di akses dan terjangkau oleh masyarakat.

Sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain dilakukan upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. Jika dilihat dari capaian jumlah Rumah Sakit di kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 terdapat 3 rumah sakit umum dan 1 rumah sakit bersalin. Untuk mewujudkan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dilakukan melalui akreditasi sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah sakit. Pada tahun 2020 pencapaian akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yakni akreditasi tingkat utama, sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan belum terakreditasi. Pencapaian akreditasi rumah sakit khusus ibu dan anak permata hati yakni akreditasi tingkat madya, dan Rumah sakit umum BKM yakni akreditasi lulus perdana. Rumah sakit yang belum mencapai akreditasi dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia, terbatasnya tenaga kesehatan serta terbatasnya melakukan pertemuan untuk pendampingan akreditasi dan penilaian akreditasi oleh surveyor akibat efek pandemi COVID-19.

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan

pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari : a). Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, b). Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa, c). Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, dan d). Jalan strategis kabupaten. Total panjang jalan kabupaten di Pesisir Selatan adalah 2.333,18 km dengan kondisi jalan baik baru mencapai 29,55% pada tahun 2020. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 4,65% dibanding tahun 2016. Walaupun meningkat, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, capaian ini masih sangat rendah atau baru mencapai 68,40%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 1). keterbatasan anggaran, 2). kondisi daerah rawan bencana, dan 3). beban kendaraan melebihi beban angkut maksimum yang diizinkan.

Di sektor sumber daya air, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah 47,14% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan capaian 57,05%. Capaian ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 56,55%. Keberhasilan pencapaian target ini turut didukung oleh pemerintah pusat melalui program IPDMIP berupa rehabilitasi jaringan irigasi dan pemberdayaan masyarakat petani.

Salah satu infrastruktur pelayanan dasar yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah penyediaan akses air minum dan sanitasi. Hal ini sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu “mencapai *universal access* dalam sektor air minum dan sanitasi” yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Dan ditegaskan kembali melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan perlunya sinergi SDGs dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah. Persentase rumah tinggal bersanitasi layak di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 mencapai 75,27% atau meningkat jika dibandingkan tahun 2016 dengan capaian 63,76%. Capaian ini juga telah melebihi target RPJMD sebelumnya

sebesar 74,38%. Keberhasilan ini turut didukung oleh pemerintah pusat melalui Program Air Limbah Setempat, Hibah IPAL Komunal, Hibah Pembangunan sanitasi sAIIIG.

Sedangkan persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2020 sudah mencapai 95,59% atau meningkat cukup tinggi dibanding tahun 2016 dengan capaian 85,37%. Namun capaian ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Dari 95,59% akses air minum yang dicapai, hanya 87,80% yang memiliki akses air minum layak, dan sisanya 7,79% belum layak. Hal yang menghambat pencapaian target ini diantaranya adalah tidak tersedianya sumber air bersih dan layak serta ketergantungan pendanaan pembangunan SPAM yang berasal dari pemerintah pusat.

Berikut pada Tabel 2.43 disajikan capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	24,90	27,00	27,90	28,23	29,55
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	47,14	49,13	51,64	54,34	57,05
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi layak (%)	63,76	64,01	73,17	75,13	75,27
4	Persentase Penduduk berakses Air Minum (%)	85,37	87,86	91,22	94,88	95,59
5	Persentase Penduduk berakses Air Minum Layak (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	87,8

Sumber Data : Dinas PUTR dan Dinas PSDA Kab. Pessel Tahun 2021

2.3.1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Permendagri Nomor 85 Tahun 2017 memformulasikan indikator di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa persentase rumah layak huni yang diperoleh dengan cara membagi jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Makna indikator ini adalah semakin tinggi angka rasio rumah layak huni semakin baik

kualitas perumahan di daerah tersebut. Asumsi setiap rumah terdiri dari 4 (empat) orang, maka angka maksimal dari rasio rumah layak huni adalah 0,25. Pada tahun 2020, rasio rumah layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan sudah mencapai 0,246 atau meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 0,213.

Indikator selanjutnya adalah rasio permukiman layak huni, yaitu dengan membagi luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman seluruhnya. Pada tahun 2020, luas permukiman layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 14.433,39 hektar, sedangkan luas wilayah permukiman adalah 14.907 hektar¹, sehingga didapat rasio permukiman layak huni sebesar 0,968095. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang mencapai 0,967633 dimana angka ini sudah mendekati nilai ideal (nilai ideal=1).

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/2019/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/448/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penetapan Lokasi Penanganan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan, menetapkan bahwa terdapat 260 hektar Kawasan kumuh perdesaan dan 229 hektar Kawasan kumuh perkotaan. Penanganan kawasan permukiman kumuh dapat dihitung dengan menggunakan indikator persentase lingkungan permukiman kumuh, yang diperoleh dengan membagi luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah. Capaian indikator ini pada tahun 2020 adalah 0,838% atau meningkat tipis dari tahun 2017 sebesar 0,0850%. Luas penanganan permukiman kumuh sejak tahun 2018 baru mencapai 6,885 hektar. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji pada tabel 2.44 berikut.

¹ Luasan wilayah permukiman ini belum memperhitungkan luasan wilayah permukiman yang berada dalam kawasan hutan.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Rumah Layak Huni (SPM)	n/a	0,213	0,240	0,245	0,246
2	Rasio Permukiman Layak Huni	n/a	0,967633	0,967901	0,968086	0,968095
3	Persentase Lingkungan Permukiman kumuh (%)	n/a	0,0850	0,0843	0,0839	0,0838

n/a: (not available) belum ada data

Rasio Rumah Layak Huni = (Jumlah Rumah Layak Huni): (Jumlah Penduduk)

Sumber Data: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

2.3.1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka mensukseskan pembangunan secara berkesinambungan dan perlunya upaya peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban, Indikator kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, petugas perlindungan masyarakat (linmas), tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), Cakupan pelayanan bencana kebakaran, Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dan Persentase Penegakan PERDA. Berikut pada Tabel 2.45 di bawah ini, disajikan data secara lengkap mengenai capaian indikator kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu tahun 2016 - 2020.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,0124	0,0113	0,0113	0,0113	0,0116
2.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	n/a	n/a	26,19	67,15	53,81
3.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	n/a	n/a	84,30	93	83,33
4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota (%)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
5.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	38,3	33,8	85	31	33
6.	Persentase Penegak PERDA (%)	0,74	0,88	0,59	0,43	0,67

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara, menjalankan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah (PERDA). Capaian indikator rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk mengalami penurunan pada tahun 2016 dari 0,0124 menurun pada tahun 2017 Menjadi 0,0113. Peningkatan rasio jumlah polisi pamong praja terjadi pada tahun 2019 dari 0,0113 meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,0116, hal ini terjadi karena adanya penambahan personil Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi rasio jumlah polisi pamong praja yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penegakan PERDA.

Penegakan Peraturan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran PERDA yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan oknum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran PERDA yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Penyelesaian pelanggaran perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Data capaian indikator Persentase Penegak PERDA mengalami penurunan selama periode 2016 - 2020. Pada tahun 2016 baru mencapai 0,74 persen mengalami penurunan Pada tahun 2020 sebesar 0,67 persen, hal ini kemungkinan terjadi karena semakin berkurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

Pada sub bidang kebencanaan, pencapaian kinerja urusan kebencanaan menunjukkan peningkatan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada Tabel 2.46. Faktor penghambat yang ditemui untuk penanganan bencana diantaranya adalah masih diperlukan peningkatan sumberdaya kebencanaan yang lebih profesional dan terlatih, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana alam dan menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel. 2.46
Capaian Kinerja Urusan Kebencanaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Lokasi Rawan Bencana yang Siap menghadapi bencana	51%	52%	53%	54%	53%
2.	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar Kapasitas Bencana	72%	74%	76%	64%	66%

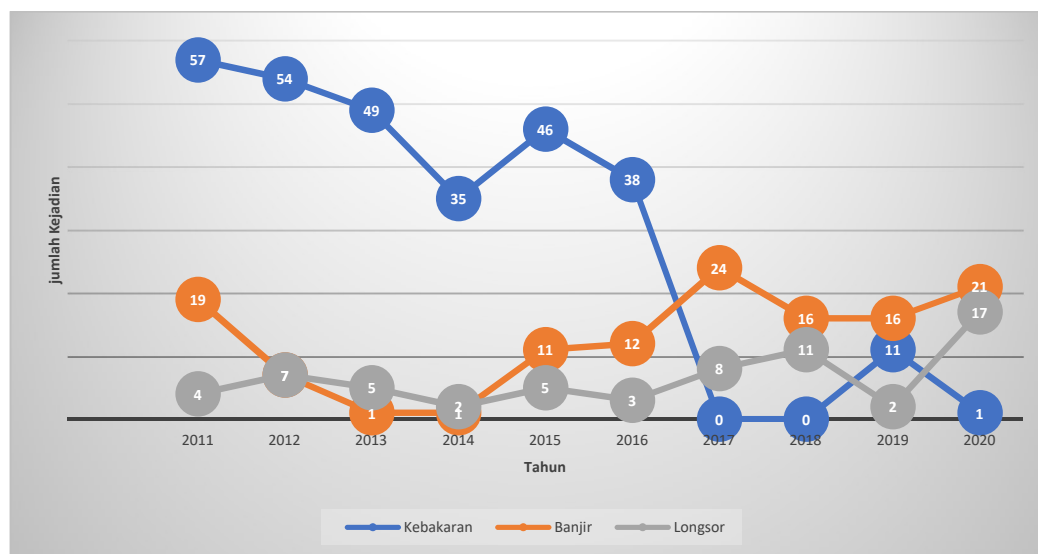
Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Kejadian bencana kebakaran pada awalnya merupakan kejadian bencana yang paling tinggi. Ada 57 (lima puluh tujuh) kejadian pada tahun 2011 seiring dengan ditanganinya pencegahan dan kesadaran warga, maka secara nyata dapat menurun, bahkan pada tahun 2017 dan 2018 dapat berhasil *zero accident* akan kejadian kebakaran ini. Namun di sisi lain kebencanaan yang berkaitan dengan faktor meteorologi dan kondisi lahan berkecenderungan semakin naik dalam sepuluh tahun terakhir.

Sementara itu untuk mencapai target indikator yang ditetapkan seperti yang telah diterangkan di atas maka diperlukan langkah - langkah operasional berupa Program dan Kegiatan beserta rencana pendanaannya dengan indikator kinerja program / kegiatan setiap tahunnya dengan perumusan target sehingga dapat untuk mewujudkan target indikator kinerja strategis / utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Terutama pendanaan untuk mempersiapkan potensi ancaman bencana yang sudah diprediksi yaitu tsunami dan bencana tahunan sesuai kondisi geografis dan meteorologi, yaitu banjir dan longsor.

Penguatan urusan kebencanaan sudah memiliki faktor pendukung yaitu dari segi kelembagaan penanganan bencana kabupaten sudah mendapatkan posisi yang memadai, ada tiga perangkat daerah secara aktif menangani bencana baik dari segi, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, dengan dikoordinatori oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dipimpin oleh eselon II.a sebagai amanat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Gambar 2.46
Grafik Kejadian Bencana Kebakaran, Banjir dan Longsor
Tahun 2011-2020



Sumber Data : : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2020

Tabel 2.47
Kejadian Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Disambar Petir	0	0	0	0	0
2	Kebakaran	38	0	0	11	1
3	Banjir	12	24	16	16	21
4	Longsor	3	8	11	2	17
5	Pantai Abrasi	1	1	2	1	0
6	Puting Beliung	5	0	2	23	2
7	Angin Badai	4	3	22	0	15
8	Orang Hilang/Hanyut	13	6	17	8	30
9	Diserang Hewan	1	0	0	0	0
10	Keracunan Makanan/ Diserang Penyakit	0	1	0	0	0
11	Gempa	2	0	0	0	0
12	Tertimpa Pohon	22	0	0	0	0
Total Kejadian		101	43	70	61	107
Korban Jiwa		14	7	17	6	32

Sumber Data : : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

2.3.1.6. Urusan Sosial

Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial), pemberdayaan warga miskin dan PPKS, peningkatan bantuan sosial, peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan lain-lain.

Penanganan PPKS di Kabupaten Pesisir Selatan telah dilakukan dengan sangat serius, terbukti dengan capaian beberapa indikator kinerja urusan sosial berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang cukup baik seperti tersaji dalam Tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Sosial
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan (%)	45,90	47,50	48,95	50,40	51,90
2.	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	45,98	48,15	49,12	50,85	51,93
3.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100	100	100
4.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	60	62	70	90	100
5.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	60	70	100	100	100
6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	8.42	3.32	3.25	1.06	3,57

Sumber Data : Dinas Sosial Tahun 2021

Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial, peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan lain-lain. Semua capaian indikator kinerja urusan sosial telah tercapai cukup baik.

2.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan utama yang menggambarkan kondisi

ketenagakerjaan, TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi tingkat TPAK menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Pada Tabel 2.49 di bawah ini dapat dilihat kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020. Dari tabel terlihat bahwa dari waktu ke waktu terjadi peningkatan TPAK yang berarti jumlah pasokan tenaga kerja semakin meningkat di daerah ini, disisi lain angka TPT menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini memperlihatkan bahwa ketersediaan lapangan kerja di daerah ini juga terus meningkat, namun demikian upaya penciptaan lapangan kerja dan usaha harus terus ditingkatkan agar tingkat pengangguran dapat semakin ditekan guna mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7.95	5.95	5.85	5.76	5.81
2	Angka sengketa pengusaha dengan pekerja per tahun (kasus)	2	2	2	3	3
3	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	59.45	64.03	66.60	69.10	70.8
4	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (orang)					261
5	Persentase penduduk yang bekerja (%)	88.75	94.05	94.15	94.24	94.19
6	Persentase kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas (%)	52.76	60.22	62.70	65.12	94.19
7	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (%)	51,00	50.85	77.08	80.14	80.52

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021

Secara umum, perkembangan indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2016-2020 memperlihatkan adanya tren perbaikan, bahkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang bergerak pada kisaran 3-4 % menjadi 17,11 %. Meskipun angka pengangguran terbuka memperlihatkan kenaikan, hal ini memperlihatkan adanya penciptaan lapangan kerja yang tercatat secara lebih baik. Di sisi lain, ada peningkatan angka sengketa pengusaha pekerja pada tahun 2020. Hal ini

perlu upaya dari pihak terkait untuk semakin meningkatkan tata hubungan kerja, agar tercipta suasana kerja yang kondusif guna mendorong kenyamanan kerja dan produktivitas para pekerja.

2.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Salah satu indikator pada urusan pemberdayaan perempuan ini adalah dilihat dari tingkat partisipasi kaum perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta.

Selanjutnya peningkatan upaya yang sistematis dan terencana sangat dibutuhkan agar kaum perempuan mampu meningkatkan kontribusinya dalam keluarga maupun masyarakat luas, yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan peran mereka dalam pembangunan.

Pada aspek Pelindungan Anak Kabupaten di Pesisir Selatan terlihat bahwa anak-anak tidak ada yang dipekerjakan di wilayah ini. Hal ini merupakan perwujudan dari usaha pemerintah dan masyarakat untuk berupaya memenuhi hak-hak anak dalam mewujudkan Pesisir Selatan sebagai kabupaten ramah anak pada 2020. Secara umum, pada Tabel 2.50 berikut, tersaji perkembangan capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	25,12	26,35	27,75	28,38	30,20
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	52,28	55,45	60,16	65,85	69,80
3.	Rasio KDRT (%)	0,009	0,0085	0,0083	0,0080	0,0072
4.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	0.14	0.22	0,032	0	0
5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	4,12	4,42	5,01	5,35	6,05
6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (kasus)	86	87	162	44	109
7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)	-	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Sosial, PPr & PA Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan advokasi kasus kekerasan terhadap anak dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan perwujudan Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak menuju Kabupaten

Layak Anak. Sampai dengan Tahun 2020 telah terdapat 72 buah Sekolah Ramah Anak, 20 Puskesmas Ramah Anak dan 7 Nagari Layak Anak.

Upaya perlindungan khusus anak ini juga merupakan salah satu dari upaya Pemenuhan Hak Anak. Dalam upaya pemenuhan hak anak sangat mengedepankan sarana dan prasarana seperti Taman Bermain Ramah Anak.

Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih mendominasi adalah tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut dikarenakan perasaan malu ditengah keluarga dan masyarakat.

Indikator untuk mengakomodir pemenuhan Hak Anak adalah Prediket Kabupaten Layak Anak yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam Format penilaian Kabupaten Layak Anak terdapat 24 indikator mulai dari indikator pemenuhan hak sipil anak, pengasuhan anak dan lingkungan sosialnya, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus. Kabupaten Pesisir Selatan telah mendapatkan penghargaan “Inisiator Kabupaten Pesisir Selatan menuju Kabupaten Layak Anak pada Tahun 2017.” Prediket Kabupaten Layak Anak masih dalam upaya pencapaiannya sampai saat ini dengan terus memenuhi indikator penilaiannya.

2.3.2.3. Urusan Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan didefinisikan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Berdasarkan definisi tersebut dapat dimaklumi, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling penting bagi manusia, sebab selama manusia masih hidup tidak akan pernah terlepas dari hal-hal tersebut.

Pada hakekatnya upaya pemenuhan kebutuhan pangan diserahkan kepada masyarakat. Peran pemerintah lebih banyak dalam hal regulator sehingga tidak ada monopoli oleh pihak manapun untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menghindari rawan pangan. Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui

produksi, distribusi, dan pertukaran. Produksi pangan ditentukan oleh berbagai jenis faktor, termasuk kepemilikan lahan dan penggunaannya; jenis dan manajemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan manajemen tanaman pertanian; pemuliaan dan manajemen hewan ternak; dan pemanenan.

Selanjutnya bila dianalisis dari sisi pemerintahan, maka salah satu tugas utama pemerintah adalah menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, yang nantinya akan secara bertahap diharapkan akan menuju terciptanya ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan terakhir bermuara pada kedaulatan pangan.

Demikian juga halnya dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, telah melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan. Selanjutnya adalah dengan mengupayakan penyelesaian Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tahun 2021. Diharapkan dengan adanya dua regulasi tersebut, maka ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan lebih terjamin, juga meminimalisir kemungkinan alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lain.

Berdasarkan data capaian kinerja bidang pangan tahun 2016-2020, terlihat bahwa ketersediaan pangan utama menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Demikian juga halnya dengan dengan indikator-indikator kinerja lainnya, juga menunjukkan tren meningkat. Hal ini dapat diartikan, bahwa pengurusan bidang pangan di Kabupaten Pesisir Selatan telah berada di jalan yang benar. Selengkapnya mengenai capaian indikator kinerja urusan pangan dapat dilihat pada tabel 2.51 berikut ini:

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Regulasi Ketahanan Pangan	0	0	0	1 Perda	0
2	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/thn)	132,13	142,93	143,02	153,67	148,73
3	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	3.678	4.051	3.974	5.193	5.321
4	ketersediaan protein (gram/kap/hari)	67,64	77,17	86,10	69,92	83,45
5	Skor pola pangan harapan (%)	72,9	76,5	80,5	84,0	
6	Tingkat Kecukupan konsumsi pangan					
	- Konsumsi energi (kkal/kap/hari)	2.319,4	2.377,4	2.325,6	2.327	2.249,66
	- Konsumsi protein (gram/kap/hari)	59,9	63,0	61,7	61,86	60,29
7	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen					
	- Harga gabah (Kg/Rp)	4.000	5.900	5.200	5.475	5.458
	- Harga beras (Kg/Rp)	9.000	11.990	12.612	12.300	12.500
8	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen (%)	5,38	3,06	5,8	5,0	5,0
9	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat (%)	81,83	83	78,33	80,90	91,66

Sumber Data : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

2.3.2.4. Urusan Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan ini diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan di daerah.

Lebih dari 70% tanah di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kawasan hutan (BPS, 2019), di mana kepemilikan tanah di daerah ini masih didominasi oleh tanah ulayat. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik dengan para pemangku adat agar ketika pemerintah daerah membutuhkan lahan untuk melakukan aktivitas pembangunan dapat dilakukan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penggunaan tanah oleh pemerintah pada umumnya untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan sebagainya.

Persentase luas lahan bersertifikasi diperoleh dengan membagi luas lahan bersertifikat dengan total luas wilayah. Adapun capaiannya adalah sebesar 60,87% pada tahun 2020 atau meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 52,36%. Hal tersebut menunjukkan mulai meningkatnya tertib administrasi pertanahan yang menunjang kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase luas lahan bersertifikasi (%)	n/a	52,36	57,09	56,89	60,87

Sumber Data: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021

2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada tahun 2019 menerima tiga penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tiga penghargaan ini adalah yakni Adipura untuk kategori kota kecil dan dua penghargaan *Green Leadership*. Hal ini memperlihatkan prestasi dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Prestasi serupa juga diperlihatkan oleh generasi milenial dimana ada 3 (tiga) sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan yang mendapat penghargaan Adiwiyata Nasional.

Upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kabupaten Pesisir Selatan, dihadapkan pada tiga isu utama yaitu: bencana alam, meningkatnya timbulan sampah domestik, serta fenomena penurunan kualitas air permukaan. Berbagai upaya dan kebijakan pelestarian lingkungan terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui program/ kegiatan setiap tahunnya diantaranya program pengelolaan persampahan, program peningkatan tutupan lahan, program pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah serta program lainnya terkait dengan pelestarian lingkungan.

Tantangan ke depan penanganan lingkungan hidup/ pencapaian target indikator kinerja adalah meningkat jumlah penduduk, jumlah industri dan jumlah transportasi, berkurangnya tutupan lahan, menurunnya kepedulian masyarakat menjaga lingkungan hidup serta pola hidup masyarakat cenderung berpotensi menghasilkan limbah/sampah. Namun beberapa faktor pendorong dalam melestarikan lingkungan hidup adalah sudah

adanya regulasi daerah terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RRPLH) sebagai acuan dalam pembangunan serta kemajuan teknologi yang memepmudah informasi terkait lingkungan dan keterlibatan/ partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pengawasan.

Hasil capaian indikator urusan lingkungan hidup secara umum menunjukan ke arah lebih baik, diantaranya indeks kualitas lingkungan hidup, indek kualitas air, indeks kualitas udara, indek kualitas tutupan lahan. Nilai indeks ini menggambarkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan berjalan dengan baik. Nilai indeks ini dicapai dari pelaksanaan berbagai program lingkungan hidup serta komitmen semua *Stakeholder* mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan. Namun beberapa indikator kinerja lingkungan hidup perlu menjadi perhatian ke depannya seperti pembinaan dan pengawasan masih 50%, hal ini akan berdampak terhadap tingkat pencemaran lingkungan hidup. Indikator lain yaitu peningkatan timbulan dan penanganan sampah yang menunjukan peningkatan tiap tahunnya, hal ini menunjukan belum optimalnya peran masyarakat dalam memilah dan memanfaatkan sampah daur ulang di tingkat rumah tangga. Tahun 2019 hasil penilaian adipura tidak diumumkan oleh kementrian terkait, hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian. Hasil capaian indikator urusan lingkungan hidup secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup
Kaupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kualitas lingkungan hidup	79,94	80,46	86,60	86,70	86,74
2	Indeks kualitas air	66,6	67,5	83,75	83,93	83,93
3	Indeks kualitas tutupan lahan	70.279	70.559	71.25	73.19	71,78
4	Indeks kualitas Udara	78	78,28	78	85	91,81
5	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditertibkan oleh pemerintah daerah (%)	5.8	11.7	23.3	13.33	50
6	Timbulan sampah yang ditangani (ton)	7.420,25	8.515,45	37.000,05	10.220,00	12.045,00
7	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R (%)	4	4.77	13.45	16.68	16,97

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	16	17.14	73	20.26	21,49
9	Operasional TPA/TPST/SPA/di kab/kota (nilai)	75.64	73.43	87	Hasil Tidak diumumkan	Tidak ada penilaian
10	Jumlah limbah B3 yang dikelola (Ton)	N/A	N/A	N/A	N/A	1,6
11	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota (%)	100	100	100	100	60

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan, 2021

2.3.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem yang menjadi tugas negara untuk dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi 3 (tiga) tertib, yaitu :

- 1) Tertib basis data, yang diarahkan pada terbangunnya basis data kependudukan yang akurat
- 2) Tertib Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang diarahkan pada setiap Penduduk wajib mempunyai satu NIK dan tidak ada lagi NIK ganda
- 3) Tertib Dokumen Kependudukan, yang diarahkan pada proses penerbitan Dokumen Kependudukan yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai nilai strategis di bidang perencanaan, pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Hal ini lebih kita kenal sebagai konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Langkah awal dalam mewujudkan konsep pembangunan berwawasan kependudukan adalah melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan. Pemerintah telah memfokuskan pembangunan di sektor kependudukan pada bidang penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan percepatan pembangunan database kependudukan, penertiban administrasi kependudukan serta pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Adapun capaian kinerja urusan kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan dan Pencatatan Sipil pada periode 2016-2020 diperlihatkan oleh Tabel 2.54 berikut:

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	0,76	0,77	0,90	0,96	0,977
2	Rasio Bayi berakte kelahiran	0,97	0,96	0,95	0,97	0,978
3	Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Seumur hidup	Seumur hidup	Seumur hidup	Seumur hidup
5	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	75,75	76,65	90,15	96,43	97,69
6	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	96,61	95,79	94,73	96,65	99

Sumber Data: Dinas Dukcapil Pesisir Selatan, 2021

2.3.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan diberlakukannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa memiliki otonomi desa, sehingga desa mempunyai kesempatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya sendiri, dengan demikian Desa memiliki posisi sangat strategis, untuk itu dibutuhkan perhatian yang memadai dalam penyelenggaraan otonomi desa.

Pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perkembangan pembangunan masyarakat perdesaan tidak hanya semata-mata pada sektor pertanian, distribusi barang dan jasa tetapi lebih kepada spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan segenap anggota masyarakat sehingga mereka lebih bisa mandiri, percaya diri, tidak bergantung, dan terlepas dari belenggu struktural yang membuat hidup mereka terbelakang. Adapun kinerja capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016-2020 Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.55 berikut:

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1,32	1,64	1,79	2,37	2
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	4	5	7	8	7
3.	Persentase PKK Aktif (%)	89,73	89,73	91,06	91,06	100
4.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	7,00	9,90	7,00	6,99	2,6
5.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik (%)	71,43	82,42	91,76	95,60	95,60

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Secara umum, kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sepanjang tahun 2016-2020 menunjukkan perbaikan. Pembangunan pemberdayaan masyarakat bisa berhasil karena dukungan dari berbagai faktor. Untuk melihat keberhasilan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat bisa dilihat dari capaian beberapa indikator yang ada. Keberadaan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik. Capaian persentase PKK aktif meningkat pada tahun 2016 hingga 2020 dari 89,73 % menjadi 100 %, diikuti dengan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga meningkat pada tahun 2016 hingga 2020 dari 4 kelompok menjadi 7 kelompok. Kondisi sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik juga meningkat pada tahun 2016 hingga 2020 dari 71,43 % menjadi 95,60 %. Hal ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan roda pembangunan sangat kuat. Potensi tersebut, jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat dapat meningkatkan kinerja pembangunan daerah dimasa yang akan datang. Meskipun demikian, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat terjadi penurunan, hal ini terlihat dari capaian indikator terjadi penurunan pada tahun 2019 dari 6,99 % menurun pada tahun 2020 menjadi 2,6 %, hal ini terjadi karena dampak dari pandemi Covid - 19 akibatnya ada pengurangan anggaran pelaksanaan kegiatan dengan swadaya pendukung yang didanai oleh Pemerintah dan kurangnya biaya swadaya dari masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan.

2.3.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana, dan pengendalian angka kelahiran. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Capaian kinerja pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Pesisir Selatan pada indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) mengalami peningkatan dari 0,82 % tahun 2019 meningkat menjadi 1,57 % tahun 2020. Rata - Rata jumlah anak per keluarga juga mengalami peningkatan dari 0,25 orang tahun 2019 meningkat 1,72 orang tahun 2020. Hal ini menunjukkan perlunya untuk menekan laju pertumbuhan di Kabupaten Pesisir Selatan, salah satu caranya adalah melalui Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan tujuan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB

Perkembangan Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2016-2020 selengkapnya disajikan pada Tabel 2.56 di bawah ini:

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,81	0,76	0,75	0,82	1,57
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,60	2,59	2,59	2,59	n/a
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (Orang)	1,73	1,92	1,95	0,25	1,72
4.	Rasio Akseptor KB	68,28	75,90	75,92	76,17	76,62
5.	Persentase Perangkat daerah yang dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk (%)	53,57	53,57	53,57	53,57	66,67
6.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan Informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	1	2	2	2
7.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-19 tahun (%)	68,28	75,90	75,92	76,17	76,62
8.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (%)	87,20	77,05	67,28	76,23	35
9.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	13,43	8,89	8,73	7,22	7,03
10.	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (%)	4,13	3,25	3,44	2,64	30,54
11.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	46,46	31,75	31,72	31,28	30,52
12.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	43,24	46,03	48,77	52,26	52,81
13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	30,06	30,06	27,19	42,06	41,82
14.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	27,03	28,18	27,95	39,60	39,70
15.	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (%)	173	173	173	233	340
16.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100
17.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	100
18.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa (%)	100	100	100	100	100
19.	Persentase pembiayaan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes (%)	0,55	0,55	0,50	0,65	n/a

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

2.3.2.9. Urusan Perhubungan

Sektor perhubungan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena transportasi merupakan urat nadi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistem transportasi yang baik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana di sektor perhubungan terus dilakukan untuk menunjang kegiatan sosial dan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun capaian kinerja layanan urusan perhubungan di Kabupaten Pesisir Selatan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah arus penumpang angkutan umum menunjukkan tren penurunan selama periode 2015-2020, hal ini diantaranya disebabkan oleh jasa transportasi. Penumpang umum yang berizin, tidak melakukan aktifitas lagi. Kondisi ini diindikasikan oleh penurunan jumlah uji KIR Angkutan umum pada periode yang sama,

Di sisi lain rasio panjang jalan Per Jumlah kendaraan menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya jumlah kendaraan. Gambaran ini memperlihatkan bahwa peran angkutan umum mulai digantikan oleh angkutan pribadi. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan harus terus dilakukan di masa mendatang, agar arus orang dan barang semakin nyaman dan lancar. Hal ini dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor penghambat sehingga ada indikator yang tidak tercapai, yaitu Indikator Persentase Menurunnya Angka Kecelakaan Tahunan dan Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas, terjadi pada tahun 2017 dan 2018, setelah di evaluasi ini kaitannya dengan semakin banyaknya penggunaan kendaraan roda dua dimasyarakat dikarenakan jarang moda transportasi umum.

Sementara faktor pendorong urusan perhubungan yaitu karena sektor ini sangat diperlukan masyarakat untuk kelancaran mobilitas penduduk untuk berbagai aktifitas. ,

Capaian kinerja layanan urusan pembangunan di kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	930.000	950.000	785.603	790.793	109.724
2.	Jumlah uji KIR angkutan Umum (unit)	7.200	7.400	5.854	5.024	4.169
3.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis (angkutan umum) (unit)	2	2	2	2	2
4.	Persentase layanan angkutan darat (%)	0.33	0.25	0.32	0.31	0,051
5.	Kepemilikan KIR angkutan umum	4.81	15.71	53.80	50.15	36,48
6.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Minit)	30	30	30	30	30
7.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	53.000	53.000	53.000	67.500	67.500
8.	Pemasangan rambu-rambu per tahun (%)	15,12	15,12	16	16,92	0
9.	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,059	0,057	2,51	2,16	2,25
10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga / bandara / terminal pertahun (orang)	88.000	90.512	122.894	94.153	109.724
11.	Jumlah halte (unit)	25	25	25	25	25
12.	Jumlah dermaga/tambatan kapal (unit)	1	1	1	1	2
13.	Jumlah terminal (unit)	2	2	2	2	2

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan, 2021

2.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Peranan Informasi dan Komunikasi telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan pada berbagai aspek kehidupan dewasa ini. Seiring dengan perkembangannya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah diimplementasikan dalam berbagai bentuk dan tujuan yang beragam maka dituntut penyediaan informasi yang tepat, cepat dan akurat. Untuk mewujudkan pelayanan informasi yang baik diperlukan suatu alat bantu dalam mengelola data dan informasi agar dapat lebih efektif dan efisien.

TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) merupakan sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Laporan *World Economic Forum* (2015) mengindikasikan kenaikan 10% akses internet berkorelasi dengan penambahan 1,2% pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk memperluas pembangunan infrastruktur teknologi digital hingga kawasan pedesaan, merupakan wujud keyakinan bahwa TIK menjadi instrumen yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Terutama untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai program pemerintah.

Dalam era keterbukaan dewasa ini, urusan Komunikasi dan Informatika dituntut untuk mampu meningkatkan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan *Good Governance* atau Tata Kelola Pemerintahan yang baik, melalui pembangunan dan peningkatan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten. Perkembangan kinerja layanan urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2016-2020 di kabupaten Pesisir Selatan secara umum memperlihatkan peningkatan di semua aspek indikator. Upaya memperluas pembangunan infrastruktur teknologi digital hingga kawasan pedesaan masih harus terus dilakukan dalam rangka mendorong pembangunan daerah.

Data selengkapnya Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.58 berikut:

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (KIM)	n/a	15	6	15	n/a
2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	n/a	40	65	70	100
3.	Persentase Penduduk yang menggunakan hp / Telepon (%)	n/a	40	65	70	78
4.	Proporsi Rumah Tangga dengan akses Internet (%)	n/a	30	43	50	55
5.	Proporsi Rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%)	n/a	20	30	45	50

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, 2021

2.3.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan Koperasi dan UMK (Usaha Mikro Kecil) dinilai mampu mendukung pencapaian tiga tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kualitas pemerataan, dan stabilitas ekonomi.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan. Dari sisi kuantitas, selama 5 tahun terakhir, UMK memberikan kontribusi sekitar 98 % jumlah badan usaha. Akan tetapi persentase

koperasi aktif dan yang melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) masih belum optimal. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan koperasi dan UMK untuk mendorong kelembagaan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sepanjang tahun 2016-2020 diperlihatkan oleh Tabel berikut:

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Koperasi (unit)	329	349	300	309	315
2.	Persentase koperasi aktif (%)	55	58	59	44	45
3.	Persentase koperasi aktif yang melakukan RAT (%)	37	43	50	83.82	64
4.	Persentase Usaha Mikro dari usaha Kecil (%) (Klasifikasi berdasarkan UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja)	100	99.55	99.61	97.68	99.69

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan, 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa adanya penurunan jumlah koperasi dari tahun 2017-2018, hal ini terjadi karena dilaksanakan revitalisasi koperasi pada periode tersebut, sehingga koperasi yang sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan usaha atau sudah tidak aktif dalam jangka waktu yang cukup lama dicabut badan hukumnya. Hingga tahun 2020, jumlah koperasi di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 315 unit.

Pada tahun 2018 – 2019 terjadi penurunan persentase koperasi aktif. Hal ini juga dikarenakan selama periode tersebut kembali dilaksanakan revitalisasi dan validasi data koperasi sehingga ditetapkan 44% dan meningkat sedikit di akhir periode menjadi 45%.

Dari sisi persentase koperasi aktif, terjadi penurunan yang signifikan terhadap koperasi yang melaksanakan RAT di tahun 2020. Hal ini lebih dikarenakan aspek teknis yaitu adanya pelaksanaan Prokes akibat COVID-19 dan larangan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk berkumpul dan himbauan pelaksanaan RAT secara virtual. Akan tetapi, kondisi di lapangan tidak semua koperasi dan anggotanya mampu melaksanakan RAT secara virtual dengan alasan ketersediaan jaringan internet dan juga kapasitas SDM anggota koperasi.

Berdasarkan Klasifikasi UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hampir 100% UMK di Kabupaten Pesisir Selatan berskala Mikro, meskipun ada penambahan sedikit jumlah usaha kecil, tetapi tidak signifikan. Pada umumnya, masalah permodalan adalah

masalah umum yang dihadapi oleh para pengusaha mikro dalam pengembangan skala usahanya. Penyebab lain namun sangat penting adalah masih kurangnya/rendahnya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha mikro. Pada umumnya pelaku usaha mikro hanya menjalankan usaha seperti biasa tanpa berusaha berinovasi dan mengikuti tren perkembangan. Oleh karena itu pembinaan dan kebijakan dalam hal perkembangan usaha mikro sangat diperlukan agar skala usahanya meningkat.

2.3.2.12. Urusan Penanaman Modal

Setidaknya ada lima masalah utama yang menghambat upaya peningkatan penanaman modal, yaitu:

1. Terlalu banyak aturan yang abu-abu, tidak jelas, tumpang tindih kewenangan, dan seringkali berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan masalah perizinan yang rumit hingga pendaftaran dan syarat yang dijadikan izin.
2. Banyaknya isu-isu perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha
3. Persoalan perizinan lahan di daerah untuk investasi.
4. Kurangnya kualitas SDM dan regulasi tenaga kerja.
5. Kurangnya infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri.

Perkembangan indikator kinerja layanan urusan penanaman modal di Kabupaten Pesisir Selatan memperlihatkan adanya pengurangan investasi selama periode 2019-2020. Hal ini, dapat dilihat dari jumlah investor bersekala nasional (PMDN/PMA) yang menurun pada tahun 2020. Pada Tahun 2019 terealisasi 34 PMDN/PMA sedangkan pada tahun 2020 menurun ke angka 17. Hal ini di akibatkan karena Covid-19 yang sedang mewabah di berbagai negara termasuk Indonesia khususnya Kabupaten Pesisir Selatan. Terkait dengan itu, jumlah Realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA) juga menunjukkan nilai peningkatan dari tahun 2019, untuk PMDN sebesar Rp.525.484.28 dan menurun pada tahun 2020 dengan nilai Rp.345.019.215.304. Hal ini mengakibatkan iklim investasi di kawasan Pesisir Selatan menurun pada tahun tersebut.

Perkembangan dan capaian indikator kinerja Layanan Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Penanaman Modal
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (org)	10	11	30	34	17
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta Rp.)	68	70	442.868,58	525.484,28	345.019,22
3	Rasio daya serap tenaga kerja	34	35	30.72	5.6	1:100,000,000 (data disesuaikan)
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	92	94	105	118.65	34

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2021.

Pencapaian kinerja layanan urusan Penanaman Modal di Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2016-2019 menunjukkan perkembangan yang positif. Hanya saja terjadi penurunan jumlah investasi pada tahun 2020. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga ekonomi. Meskipun demikian, pandemi COVID 19 ternyata tidak membuat investor keluar dari Kabupaten Pesisir Selatan, melainkan hanya terjadi penurunan jumlah investasi baru jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya.

2.3.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dengan tujuan melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan ini, diarahkan untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sedangkan tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, serta menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Hasil capaian kinerja layanan urusan pemuda dan olah raga pada tahun 2016-2020 di Kabupaten Pesisir Selatan memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah seluruh organisasi pemuda (organisasi)	183	183	183	183	183
2	Jumlah wirausaha muda (org)	n/a	5	6	9	8
3	Jumlah seluruh wirausaha (org)	n/a	175	180	192	167
4	Jumlah cabang olahraga yang dibina (unit)	31	34	35	37	39
5	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/ terdaftar (unit)	31	34	37	37	39
6	Jumlah pelatih yang bersertifikat (org)	38	40	47	52	57
7	Jumlah seluruh pelatih (org)	106	112	118	121	126
8	Jumlah atlit pelajar yang dibina (org)	356	349	476	525	547
9	Jumlah seluruh atlit pelajar (org)	356	349	476	525	547
10	Jumlah kegiatan kepemudaan (kgtn)	n/a	3	4	4	0
11	Jumlah kegiatan olahraga (kgtn)	3	3	2	2	0
12	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (unit)	5	8	10	11	17
13	Lapangan olahraga (unit)	214	327	398	401	401
14	Jumlah Klub Olah Raga (unit)	30	42	51	61	68
15	Jumlah Gedung Olah Raga (unit)	13	15	14	14	14

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2021

2.3.2.14. Urusan Statistik

Mengingat pentingnya peranan data, yang akan menjadi basis informasi, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaksana kegiatan pembangunan, untuk itu ketersediaan data statistik sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi bagi perencanaan pembangunan, maupun evaluasi atas pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ketersediaan data yang akurat memberikan dasar dan arahan dalam merumuskan kegiatan dan program pembangunan.

Perkembangan indikator urusan statistik secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan daerah, hal ini tercermin dari tersedianya buku Kabupaten Dalam Angka dan buku PDRB setiap tahunnya. Sejalan dengan perkembangan teknologi maka ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi menjadi kebutuhan yang harus segera diupayakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Capaian kinerja urusan statistik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Statistik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Data Statistik Pembangunan Daerah	ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	ada	ada	ada	ada	ada
3	Buku “PDRB “	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2021

2.3.2.15. Urusan Persandian

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran, perencanaan, keuangan, dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian. Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan indikator kinerja layanan urusan persandian selama tahun 2016-2020 memperlihatkan kondisi yang terus mengalami peningkatan. Dimana persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat

daerah 63 % pada tahun 2017 meningkat menjadi 92 % pada tahun 2020. Capaian kinerja urusan persandian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Persandian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	n/a	63	78	81	92

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2020

2.3.2.16. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan harus menjadi akar pembangunan di segala bidang dalam menghadapi perubahan dunia yang sangat dipengaruhi globalisasi revolusi industri 4.0. Untuk itu, kebudayaan diharapkan lebih memainkan perannya di masa depan untuk menunjukkan jati diri dalam pembangunan.

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekayaan budaya, eksistensi keragaman kebudayaan ini diakui oleh kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui keputusan menteri Nomor 362/M/2019 tentang Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2019. Tujuh budaya tak benda yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ; **Babiola, Tari Benten, Sikambang Manih, Tari Kain, Anak Balam, Patang Balimau dan Badampiang.**

Perkembangan indikator kinerja layanan urusan kebudayaan selama tahun 2016-2019 memperlihatkan kondisi yang cenderung stagnan kecuali untuk jumlah group kesenian dan jumlah gedung kesenian yang mengalami sedikit peningkatan. Namun beberapa indikator seperti Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan serta jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi mempunyai capaian nol. Hal ini terkait dengan adanya *refocusing* anggaran yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja pada urusan kebudayaan. Namun demikian ke depan tentunya perlu ditingkatkan untuk masa yang akan datang agar kebudayaan lokal dapat menjadi aset yang berkontribusi pada pembangunan daerah. Capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Grup Kesenian	66	67	84	89	92
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	2	2	2	2
3	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (jumlah)	1	1	1	1	0
4	Benda, Situs dan kawasan cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	0
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	n/a	1	39	2	0
6	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3	4	4	4	4

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

2.3.2.17. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai informasi untuk masyarakat. Perpustakaan menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik dilingkungan formal maupun non formal.

Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Perpustakaan pun mau tak mau harus beradaptasi serta berevolusi sehingga tidak terlindas perubahan Pergeseran peran perpustakaan dari tempat atau sumber menjadi sistem sangat menekankan pentingnya perpustakaan untuk dapat bertindak lebih atraktif kepada pengguna dalam diseminasi informasi. Perpustakaan pun mulai berinovasi membangun dan memperkuat pelayanan berbasis digitalisasi dengan memanfaatkan konsep artificial intelligence, internet of things dan big data. Perbedaan yang mendasar antara perpustakaan manual dan digital adalah keberadaan koleksinya dimana koleksi digital tidak harus ada di perpustakaan tapi cukup tersimpan didalam sebuah server atau *storage digital*.

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah diantaranya dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Indikator ini menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2018 dan 2019. Jumlah koleksi judul buku meningkat tahun 2020, Hal ini untuk menjamin agar kebutuhan dan minat membaca masyarakat dapat terus ditingkatkan sehingga budaya membaca terwujud dalam upaya mencerdaskan masyarakat daerah.

Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perpustakaan sepanjang tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.65 berikut:

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Perpustakaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun (%)	3,22	7,63	13,32	15,89	0,06
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan umum Daerah	0,50	0,47	0,49	0,43	0,44
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,79	0,77	0,90	0,83	0,24
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/tahun	1.042	2.500	4.167	4.970	1.769
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	7.672	7.873	8.393	8.117	9.565

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Pesisir Selatan, 2021

2.3.2.18. Urusan Kearsipan

Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku maupun digital sampai dengan tahun 2019 belum ada, untuk itu upaya peningkatan SDM pengelola arsip dan pengembangan teknologi pendukungnya perlu segera dilakukan agar sistem kearsipan dapat dilakukan dengan lebih baik dan aman

2.3.3. Urusan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan masih tetap menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan. Bila dikembangkan secara maksimal, maka potensi perikanan tangkap di Kabupaten Pesisir Selatan diyakini bisa mencapai 100.000 ton/tahun.

Besarnya potensi perikanan tersebut dapat diketahui dari data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada tahun 2021, bahwa jumlah pengusaha perikanan laut sebanyak 2.126 orang, dan jumlah nelayan sebanyak 18.773 orang. Selanjutnya diketahui juga bahwa beberapa sarana untuk menangkap ikan, yakni perahu sebanyak 3.303 unit, pukat kantong sebanyak 650 unit, jaring insang sejumlah 1816 unit, Pancing sejumlah 1.206 unit, dan agan 368 unit. Jumlah sarana perikanan nelayan tersebut dapat dikatakan terus mengalami peningkatan kuantitas dari tahun ke tahun.

Disamping perikanan tangkap, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki potensi perairan terbuka, pada tahun 2020 diketahui jumlah rumah tangga yang melakukan budidaya sebanyak 302 rumah tangga, luas area sebesar 6.760 Ha, dan produksi sebanyak 399,65 Ton. Selanjutnya untuk perikanan budidaya, pada tahun 2020 jumlah rumah

tangga yang melakukan budidaya sebanyak 3.292 rumah tangga, luas area sebesar 1.720,6 Ha, dan produksi sebanyak 12.017,70 Ton. Salah satu ikan budidaya potensial di Kabupaten Pesisir Selatan yakni Ikan Nila, pada tahun 2020 produksinya sebesar 35.372,38 Ton.

Produksi perikanan dalam rentang lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari tahun 2016 sampai 2020, produksi perikanan meningkat sebesar 6,51 % per tahun, perikanan budidaya meningkat sebesar 10,53 % per tahun, perikanan tangkap meningkat sebesar 5,29 % per tahun. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya yaitu : pengelolaan pabrik pakan ikan untuk memenuhi pakan ikan masyarakat, pengelolaan benih ikan yang akan dibagikan ke masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya, pencetakan kolam masyarakat, penanganan hama dan penyakit, pembinaan dan dan pengawasan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap yaitu memberikan sarana dan prasarana seperti bantuan Perahu Jukung, Mesin tempel dan long tail, alat tangkap lainnya.

Pemerintah melalui program **“Gerakan Memasyarakat Makan Ikan”** untuk meningkatkan inovasi pengolahan ikan, sehingga meningkatkan minat makan ikan oleh masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah mensosialisasikan ke masyarakat mulai dari usia dini tentang manfaat makan ikan, melombakan inovasi olahan ikan pada masyarakat. Data Konsumsi Ikan tahun 2019 sebesar 44,55 Kg/Kap/Tahun melebihi target sebesar 38 Kg/Kap/Tahun.

Cakupan bina kelompok nelayan adalah jumlah kelompok nelayan yang dibina untuk meningkatkan kapasitas nelayan, kelompok budidaya, kelompok usaha perikanan. Pada tahun 2020, cakupan kelompok nelayan yang dibina sebanyak 234 Kelompok yang terdiri dari 90 KUB (Kelompok Usaha Bersama), 88 Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) 56 Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar). Meningkatnya kapasitas nelayan dan pelaku usaha perikanan diharapkan akan meningkatkan produksi dan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah dengan meningkatnya cakupan bina kelompok nelayan sebanding dengan meningkatnya produksi perikanan.

Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perikanan sepanjang tahun 2016-2020 tersaji pada Tabel 2.66 berikut:

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Perikanan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan (ton)	46.650	50.371	53.945	57.606	61.203
2	Konsumsi Ikan (kg/org/kapita)	35	36	37	38	39
3	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	170	186	203	220	237
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	23.660	24.011	25.636	27.261	28.000

Sumber Data: Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan, 2021

2.3.3.2. Urusan Pariwisata

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi yang besar di sektor pariwisata, baik wisata bahari maupun wisata alam lainnya. Pengembangan sektor pariwisata juga didukung dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Beberapa Strategi dalam mengembangkan pariwisata adalah pengembangan destinasi, meningkatkan Pemasaran, mengembangkan industri dan kelembagaan pariwisata. Berdasarkan sasaran tersebut, maka pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan mulai melengkapi dan membangun sarana dan prasarana di beberapa objek wisata strategis seperti: pantai Carocok Painan, Kawasan Mandeh, Jembatan Akar, Timbulun, pantai Sumedang, Sambungo dan sebagainya. Pengembangan ke objek wisata lainnya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada sampai ketinggian pemerintahan terbawah.

Beberapa pembangunan sarana dan prasarana strategis di pantai carocok adalah : pembangunan tempat pujasera, pembangunan pentas, pembangunan pedestrian, pembangunan gerbang masuk, pembangunan taman, pembangunan lapangan parkir dan pembangunan mesjid terapung yang sedang berlangsung. Pembangunan sapras di kawasan mandeh seperti ; jalan kawasan mandeh tembus kota padang, amplitheater, pusat industri, pasar kawasan mandeh, Mushallah dan WC dan sapras lainnya. Meningkatkan dan menyiapkan Sumber daya Manusia pelaku usaha pariwisata dilakukan kegiatan pelatihan terhadap kelompok sadar wisata (pokdarwis).

Pada tahun 2019, pemerintah indonesia dengan Canada melakukan kerjasama dalam pengembangan sektor wisata di kawasan mandeh, melalui dana Hibah. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal seperti: peningkatan

kapasitas masyarakat dalam pengolahan komoditi unggulan daerah (Perikanan dan beberapa komoditi pertanian).

Kunjungan wisatawan menunjukkan peningkatan selama tahun 2015-2018, sebesar 5,99 persen/tahun. Data kunjungan ini baru mewakili dua objek wisata yaitu pantai carocok dan kawasan mandeh. Kedepannya data kunjungan ini dapat mewakili seluruh objek potensial yang ada.

Peningkatan kunjungan wisata setiap tahunnya tidak terlepas dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah diantaranya ; meningkatkan promosi dengan melaksanakan event daerah serta mengikuti even-even nasional dan internasional, meningkatkan jumlah wahana / atraksi wisata, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung objek wisata.

Dimasa datang pemerintah daerah harus berinovasi dan memenuhi beberapa sarana dan prasarana pendukung wisata seperti; mengembangkan potensi objek wisata lain, membangun hotel berskala bintang 4 ke atas, membangun Mal/pusat perbelanjaan representatif, menyediakan wisata-wisata khusus malam hari, menyediakan oleh-oleh khas daerah. Pengelolaan objek wisata yang lebih profesional, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga/ swasta perlu dilakukan.

Untuk lama tinggal wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 yaitu dari 2 hari menjadi 4 hari, sedangkan untuk wisatawan mancanegara dari 1,25 hari menjadi 2 hari. Meningkatnya lama tinggal wisata ini tidak terlepas dari hal-hal yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah lima tahun terakhir.

Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Pariwisata selama tahun 2016-2020 tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Pariwisata
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisata (orang)	1.981.667	2.351.700	2.481.464	2.069.513	177.283
	- wisatawan mancanegara (orang)	1.667	1.700	1.623	3.650	250
	- wisatawan nusantara (orang)	1.980.000	2.350.000	2.479.841	2.065.863	177.033
2	Lama Tinggal Wisatawan (Hari)					
	- wisatawan mancanegara (Hari)	1,25	1,25	1,5	2	2
	- wisatawan nusantara (Hari)	2	2,5	2,5	4	1,1
3	PAD sektor pariwisata (juta Rp)	1.239,500	1.256,950	1.326,902	1.070,597	1.884,913

Sumber Data: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2021

Perkembangan kinerja Layanan Urusan Pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan secara umum dari tahun 2016-2018 terus membaik. Namun pada tahun 2019 mulai menurun. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisata yang menurun dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2020, dimana jumlah kunjungan wisata hanya berjumlah 177.283 (hanya ada wisatawan pada bulan Januari – Maret). Hal ini terjadi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan pembatasan aktivitas terutama pariwisata yang bahkan sempat harus ditutup terutama pada masa-masa puncak kunjunga (*peak seasons*) seperti hari libur nasional, liburan anak sekolah dan tahun baru. Jumlah kunjungan wisata pada tahun yang sama mulai terjadi lagi di akhir tahun 2020 setelah pemberlakuan adaptasi baru (*new normal*).

Dari sisi PAD sektor pariwisata memang terjadi peningkatan walaupun jumlah wisatawan jauh menurun. Hal ini terjadi karena pengalihan pengelompokan penghitungan beberapa sumber PAD. Seperti pajak restoran dan akomodasi yang sebelumnya belum dihitung sebagai PAD sektor pariwisata, pada tahun 2020 sumber ini dikelompokkan kepada PAD sektor Pariwisata

2.3.3.3. Urusan Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan kabupaten pesisir selatan, dimana sekitar 18,3 % atau 1.052,08 km² dari luas daratan. Penduduk berusia di atas 15 tahun bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan Sekitar 44,63 % atau 90.136 orang. Data BPS Tahun 2019, luas lahan sawah 30.416 Ha yang terdiri dari sawah irigasi 21.890 Ha, tadah hujan 8.308 Ha, pasang surut 70 Ha, dan lebak 148 Ha. Luas panen padi sawah tahun 2019 sebanyak 70.075 Ha dan hampir seluruh kecamatan memproduksi padi kecuali Silaut. Lima kecamatan yang memiliki produksi padi terbanyak yaitu: Kecamatan Lengayang, Linggo Sari Baganti, Sutera, Ranah Pesisir dan Bayang.

Dalam upaya melindungi keberlanjutan lahan pertanian dan kesejahteraan petani, pemerintah daerah sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan (LP2B). Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Rawan Konversi dan Lahan Potensi. Total Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 22.746,10 ha, dengan rincian luas lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 17.944,20 ha; dan luas Lahan Cadangan

Pertanian Pangan Berkelanjutan 4.801,90 ha. Sementara luas Lahan Rawan Konversi 2.473,20 Ha, dan luas Lahan Potensi 524,63 ha.

Upaya lain yang dilakukan memanfaatkan Dana LOAN IPDMIP, kerjasama pemerintah Indonesia dan Luar Negeri untuk meningkatkan dan membangun irigasi, jalan usaha tani, pemberdayaan petani. Tahun 2018 dilaksanakan *Launching* beras premium varietas Sokan Kubang dengan merek “**Beras Rajo Pasisia**”. Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 menetapkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kawasan Pertanian untuk komoditi Padi Sawah, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521. 849-2019.

Kegiatan rutin lain yang dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan bantuan sapras, bibit dan pupuk bersubsidi kepada kelompok-kelompok tani yang memiliki badan hukum untuk meringankan biaya produksi, memberikan pelatihan dan penyuluhan terhadap petani untuk meningkatkan kualitas petani, melakukan pendampingan terhadap petani dengan menepatkan PPL di setiap kecamatan.

Beberapa hal yang perlu di optimumkan kedepannya adalah; penjaminan kestabilan harga komoditi, fokus pengembangan terhadap komoditi unggulan masing-masing nagari, penggunaan pupuk organik, pemberantasan hama dan penyakit menggunakan cara-cara ramah lingkungan, antisipasi yang konkrit untuk serangan hama yang masif, mengoptimalkan fungsi irigasi yang rusak, membuat zonasi kecocokan jenis tanah dengan komoditi yang dikembangkan.

Jagung dan ubi kayu, komoditi palawija lainnya yang dihasilkan, Jagung banyak diproduksi di kecamatan Airpura, Lunang dan Pancung Soal, Ubi kayu banyak di produksi di Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera dan Batang Kapas.

Tahun 2019 terjadi penurunan luas panen komoditi padi dan plawija, hal ini disebabkan oleh Rusaknya beberapa jaringan irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sentra produksi padi seperti Irigasi Batang Jalamu Kecamatan Batang Kapas, Irigasi Koto Kandis Kecamatan Lengayang, DI Koto Nan IV Kecamatan Ranah Pesisir, DI Bataian Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Irigasi Sei Sirah Kecamatan Lunang. Faktor lain adalah terjadinya musim kemarau yang panjang serta meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tahun 2019 yaitu seluas 1.404 Ha, jika dibandingkan pada tahun 2018 seluas 830 Ha. Berikut di tampilkan data-data pertumbuhan luas panen, produksi dan produktivitas padi dan plawija, pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2016	2017	2018	2019	2020*	2016	2017	2018	2019	2020*	
1	Padi	53.093	67.567	72.277	67.983	78.719,80	270.231	376.971	352.942	243.926	382.839	5,10
2	Jagung	19.845	20.828	18.109	15.004	28.094,70	158.160	169.102	135.484	116.031	241.163	7,98
3	Ubu Kayu	253	285	264	188	375,80	9.892	11.204	13.169	3.511	7.020	33,13
4	Ubi Jalar	12	5	4	10	2	410	81	48	120	24	17,27
5	Kedelai	-	-	10	16	-	-	-	17	27	-	1,75
6	Kacang Hijau	30	30	17	33	71,30	35	34	20	43	94,12	1,21
7	Kacang Tanah	182	150	207	338	306,20	335	26	300	321	398,13	1,46

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan juga berpotensi untuk dikembangkan, lima komoditi sayuran yang banyak produksinya yaitu; cabe merah, mentimun, terong, kangkung dan bayam.

Cabe Merah dihasilkan paling banyak di kecamatan Sutera, Nagari IV Bayang Utara dan Batang Kapas berdasarkan data BPS Tahun 2020. Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebagai kawasan komoditi Cabe Merah oleh provinsi sumatera barat, berdasarkan SK Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521. 849-2019. Potensi luas kawasan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ; perkebunan 84.802 Ha, Tanaman Pangan 45.291 Ha dan Hortikultura 33.053 Ha

Buah-buahan unggulan yang dikembangkan yaitu ; semangka, durian, rambutan, pisang, mangga, jeruk dan manggis. Manggis dihasilkan paling banyak di Kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang dan Linggo Sari Baganti. Pengembangan kawasan manggis di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dimulai sejak adanya kegiatan/bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu tahun 2003 sampai sekarang. Di Kabupaten Pesisir Selatan, potensi pengembangan kawasan manggis cukup besar, yaitu dengan memanfaatkan lahan-lahan kering dan lainnya. Kabupaten Pesisir Selatan di tetapkan sebagai kawasan pertanian untuk komoditi manggis, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521. 849-2019. Jumlah populasi manggis di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 120.988 batang, dengan jumlah produksi 1.210 ton dari 7.830 batang yang menghasilkan (Data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Pessel)

Durian merupakan komoditi unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, hampir semua kecamatan memiliki durian dengan produksi rata-rata 1,73 ton/Ha. Berdasarkan data BPS Tahun 2020, Lima kecamatan menghasilkan durian terbanyak yaitu ; Kecamatan Koto XI Tarusan, Batang Kapas, IV Jurai, Lengayang dan Bayang. Sejak tahun 2019, Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu Kawasan Pengembangan Durian.

Jeruk merupakan komoditi unggulan lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan, hampir semua kecamatan memiliki komoditi jeruk dengan produksi rata-rata 3,42 ton/Ha. Berdasarkan data BPS Tahun 2020, lima kecamatan menghasilkan jeruk terbanyak; Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera, Bayang dan Lengayang dan Air Pura. Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2019 dijadikan salah satu Kawasan Sentra Jeruk oleh Provinsi Sumatera Barat.

Berikut di tampilkan data-data pertumbuhan luas panen, produksi dan produktivitas sayur dan buah-buahan, seperti Tabel 2.69 di bawah ini.

Tabel 2.69
Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Buah-Buahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020*	
I	Sayuran											
1	Cabe Merah	350	271	252	602	424,75	4.473	3.768	1.764	4.220	5512,50	10,72
2	Bawang Merah	155	78	11	53	5,60	968	584	79	371	39,20	6,94
3	Terong	156	136	130	254	167,75	2.596	2.149	1.174	2.287	2792,30	13,41
4	Mentimun	153	148	164	146	190,75	2.265	2.442	2.373	2.048	1.717	13,74
5	Bayam	117	102	88	96	109,50	592	510	440	482	547,50	5,01
6	Kangkung	139	131	131	135	153,8	695	655	658	677	769,10	5,00
7	Tomat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Buah – Buahan											
1	Semangka	543	326	167	466	397	10.900	6.520	3.350	9.320	7.940	19,95
2	Rambutan	252	118	152	173	194	3.958	2.903	3.478	2.986	4.320	0,21
3	Mangga	193	229	329	307	289	2.596	2.451	5.469	7.190	4.189	0,16
4	Durian	404	360	411	443	290	5.538	7.269	9.660	7.667	8.231	0,21
5	Pisang	260	257	235	190	184	14.627	15.584	15.178	10.428	10.859	0,10
6	Jeruk	55	92	107	98	119	7.805	11.451	15.509	11.939	16.536	0,34
7	Duku	10	28	14	12	21	161	364	240	132	249,84	0,13

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020*	
8	Manggis	109	57	145	78	173	1.132	649	2.144	1.210	2.376	0,13
9	Salak	1,53	1,93	1,46	1,83	2	185	162	95	149	199,10	0,04
10	Pepaya	4,51	4,88	8,50	8,67	10	649	579	1.184	1.429	1.723	0,10
11	Belimbing	1,32	1,32	1,29	1,72	2	81	89	81	109	109	0,17
12	Alpukat	3,62	3,18	3,57	4,01	3	185	176	150	178	178	0,13

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa komoditi unggulan perkebunan yaitu ; kelapa sawit, karet, gambir, kelapa, kakao dan kopi. Kelapa dihasilkan banyak di kecamatan Sutera, Linggo Sari Baganti dan Batang Kapas. Pengolahan komoditi kelapa masih belum optimal, sehingga nilai tambah dari kelapa tersebut belum dihasilkan. Kedepannya potensi ini harus menjadi skala prioritas untuk dikembangkan mulai dari hulu sampai produk hilirnya.

Luas Tanaman Kelapa Sawit 40.926 Ha dengan Jumlah Produksi 345.403,06 ton pada data BPS tahun 2020. Sentra pengembangan Kelapa Sawit Rakyat terdapat di Kecamatan Silaut, Lunang, Air Pura, Pancung Soal dan Lengayang. Luas Tanam kopi 1.460 Ha, dan jumlah produksi mencapai 1.684,31 ton. Pusat pengembangannya di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Lengayang dengan Luas Tanam 446 Ha dan jumlah produksi 495 ton, Kecamatan IV Jurai dengan Luas Tanam 204,50 Ha dan jumlah produksi 128 ton dan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan Luas Tanam 311 Ha, dengan jumlah produksi 582,35 ton.

Luas Tanaman Gambir 9.204,50 Ha dengan Jumlah Produksi 5.484,98 ton. Tahun 2019, sentra pengembangan Tanaman Gambir terdapat di tiga Kecamatan Yaitu Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera dan Batang Kapas. Kecamatan Koto XI Tarusan Luas Tanam 3.240 Ha dengan Jumlah Produksi 4.198,95 ton. Kecamatan Sutera Luas Tanam 3.845 Ha dengan Jumlah Produksi 754,14 ton dan Kecamatan Batang Kapas Luas Tanam 1.414 Ha dan Jumlah Produksi 448,88 ton.

Berikut pada Tabel 2.70 disajikan data produktivitas dan pertumbuhan produktivitas perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020.

Tabel 2.70
Produktivitas dan Pertumbuhan Produktivitas Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)					Produktivitas (Ton/Ha)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/ Ha)
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020*	
1	Kelapa Sawit	137.802	195.416	236.279	345.526	337.769,15	7,23	7,23	7,86	9,51	8,86	8,138
2	Karet	10.110	10.828	11.093	12.263	10.518	2,35	2,35	1,63	1,56	1,55	1,888
3	Gambir	6.794	4.352	4.352	5.484	5.921,06	1,30	1,30	0,60	0,38	0,39	0,794
4	Pala	182	314	314	540	974,66	0,57	0,57	0,57	0,78	0,73	0,644
5	Kakao	1.133	1.065	1.160	937	1.088,04	1,39	1,39	0,82	0,42	0,43	0,89
6	Kopi	816	1.174	1.257	1.684	2.297	2,43	2,43	1,54	1,58	1,49	1,894
7	Cengkeh	323	399	380	250	321,46	1,04	1,04	0,68	0,35	0,32	0,686
8	Kelapa	3.861	4.203	3.754	2.963	3.445,91	2,26	2,26	1,20	0,95	0,97	1,528
9	Pinang	239	332	236	256	1.341,50	0,94	0,94	0,40	0,35	0,37	0,6
10	Kulit Manis	1.092	1.134	1.052	1.310	1.221,13	2,57	2,57	1,70	1,77	1,41	2,004

Sumber Data: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Komoditi peternakan juga termasuk sektor pertanian, terdapat beberapa komoditi unggulan peternakan yaitu ; Sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik manila. Sapi banyak dihasilkan di Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, Sutera, Linggo Sari Baganti, dan Batang Kapas, berdasarkan data BPS Tahun 2020. Kambing banyak di kecamatan Lengayang, Pancung Soal dan IV Jurai, ayam buras di kecamatan Lengayang, IV Jurai dan Bayang. Ayam ras pedaging di kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera dan Ranah Pesisir, Ayam ras petelur di kecamatan IV Jurai, Silaut dan Sutera, Itik Manila di kecamatan Lengayang, Bayang dan Batang Kapas.

Program/ kegiatan untuk meningkatkan populasi dan kualitas ternak yaitu ; memberikan bibit ternak, melatih cara pengolahan pakan ternak, memberikan IB, dan membentuk kawasan pengembangan ternak di Kecamatan Sutera dan kawasan peternakan sapi terintegrasi sawit di Kecamatan Silaut, memberikan bantuan asuransi ternak, pengolahan hasil ternak seperti pembuatan telur asin dan kegiatan lainnya. Kedepannya perlu dioptimalkan pengembangan komoditi unggulan daerah seperti Sapi Pesisir Selatan, itik bayang dan ayam lokal, serta menjamin kestabilan harga ternak.

Berikut ditampilkan data produksi daging dan telur tahun 2016-2020 pada Tabel 2.71 di bawah ini.

Tabel 2.71
Produksi Daging dan Telur
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Jenis	Produksi Daging (Kg)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	1.340.616	1.319.798	1.367.751	1.599.830	1.602.033
2	Kerbau	40.158	40.520	44.555	64.017	49.550
3	Kambing	44.513	44.958	45.407	44.358	38.358
4	Ayam Buras	955.743	965.301	971.172	1.043.560	927.265
5	Ayam Ras Pedaging	1.818.172	1.886.261	1.868.640	1.971.753	2.712.776
6	Ayam Ras Petelur	70.578	71.162	77.949	70.468	63.352
7	Itik/Itik Manila	90.586	92.477	95.873	102.421	105.514

Sumber Data: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pessel, Tahun 2021

Perkembangan kinerja layanan urusan pertanian tahun 2016-2020, menunjukkan pergeseran ke arah menurun, hal ini disebabkan oleh mulai berkembangnya sektor lain seperti sektor jasa, keuangan, informasi dan komunikasi, jasa real setate, hal ini ditunjukkan pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72
Capaian Kinerja Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (%)	34,17	32,96	31,86	30,52	29,65
2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB (%)	14,39	13,76	13,45	13,60	13,35
3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB (%)	14,00	13,52	13,13	11,64	10,82
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)	50,89	55,79	48,75	50,57	48,63
5	Cakupan Bina Kelompok Pertanian (%)	46,19	42,67	46,60	41,18	47,92
6	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	2,58
7	Cakupan Bina Kelompok Peternak (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	2,13
8	Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%)	n/a	n/a	5,14	29,17	15,37
9	Cakupan Pengawasan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (%)	13,33	13,3	60	26,67	46,15

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pesisir Selatan, 2021

2.3.3.4. Urusan Perdagangan

Selama tahun 2016 – 2020, Sektor perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan terus tumbuh secara konsisten. Berdasarkan data PDRB menurut harga konstan tahun 2010, hingga tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB telah mencapai angka

12,75 % namun sektor ini juga terdampak pandemi Covid 19 yang mengakibatkan sektor ini berkontraksi menurun kontribusinya terhadap PDRB sejak tahun 2019 sehingga menjadi 12,25 % pada tahun 2020.

Namun secara umum, sektor ini tetap tumbuh (kecuali tahun 2020). Hal ini sejalan dengan usaha pemerintah daerah yang terus mengembangkan dan merevitalisasi pasar - pasar Kabupaten sejak tahun 2016 sehingga pada tahun 2020, Persentase Pasar Rakyat menuju kriteria SNI sudah mencapai 36,36 %. Capaian Kinerja Perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Perdagangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor Bersih Perdagangan	0	0	0	0	0
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0,34	0,42	0,75	0	14,12
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,24	12,54	12,75	12,29	12,25
4	Persentase Pasar Rakyat Menuju Kriteria SNI (%)	0	10	18,18	27,27	36,36

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan, 2021

2.3.3.5. Urusan Perindustrian

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2020 harga konstan, terlihat dari tahun ke tahun kontribusi sektor industri terhadap PDRB memiliki tren yang menurun. Namun jika dilihat dari jumlah industri dan persentase tenaga kerja di sektor industri, dari tahun ke tahun terus tumbuh atau dengan kata lain trennya positif seperti terlihat pada Tabel 2.74 di bawah ini.

Penurunan kontribusi sektor industri ini bukan disebabkan penurunan jumlah industri ataupun serapan tenaga kerja di sektor industri, namun jika dibandingkan secara keseluruhan, hal ini lebih disebabkan perubahan porsi kontributor PDRB dimana terjadi peningkatan yang cukup baik dan konsisten terhadap 5 (lima) kontributor PDRB yaitu : (1) Sektor konstruksi, (2) Perdagangan besar dan eceran, (3) Reparasi mobil dan sepeda motor, (4) Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi serta (5) Jasa pendidikan.

Tabel 2.74
Capaian Kinerja Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi Sektor Industri (%) PDRB Berdasarkan Harga Konstan tahun 2010	8,07	8,03	7,73	6,4	6,47
2.	Pertumbuhan Industri Kecil (%)	2,84	6,08	10,12	8,94	1,2
3.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Industri Kecil) (%)	11,76	27,45	27,45	12,50	1,56
4.	Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri (%)	3,93	4,18	4,16	4,49	4,3
5.	Jumlah Sentra IKM (Unit)	1	3	3	3	3
6.	Produk yang berkualitas/ bersertifikat (Jenis produk)	16	2	19	32	16

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan, 2021

Perkembangan kinerja layanan urusan Perindustrian selama 5 tahun terakhir secara umum cukup baik walaupun di tahun 2020 pertumbuhan industri kecil sangat sedikit jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak Covid-19 yang memberikan tekanan besar pada sektor ekonomi. Selama pandemi, ada industri kecil yang tidak mampu bertahan, namun ada juga industri kecil yang justru tumbuh. Seperti industri yang memproduksi masker, industri pangan yang berbasis online dengan memanfaatkan marketplace atau media social dan jasa lainnya. Kondisi tersebut cukup mampu meningkatkan pertumbuhan industri sehingga meskipun Pandemi Covid-19, Industri kecil tetap tumbuh.

Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan industry Kabupaten Tahun 2019-2039. Untuk kedepan, arah pengembangan sector industry di Pesisir Selatan akan diselaraskan dengan Perda Nomor 15 tahun 2019 di atas.

2.3.3.6. Urusan Transmigrasi

Perkembangan urusan pilihan transmigrasi memperlihatkan indikator kemandirian warga transmigrasi pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.75
Capaian Kinerja Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Transmigrasi	n/a	n/a	n/a	n/a	13
2	Persentase Pembangunan Jalan Non Status Desa Strategis di Kawasan Transmigrasi	n/a	n/a	n/a	n/a	3
3	Persentase Penunjang Ekonomi Masyarakat di Kawasan Transmigrasi	n/a	n/a	n/a	n/a	7
4	Persentase Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi	n/a	n/a	n/a	n/a	3

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2021

2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan koordinator terhadap keberlangsungan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat. Kinerja Layanan Sekretariat Daerah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja layanan publik yang rata-rata bernilai baik berdasarkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat.

Perkembangan capaian indikator urusan Sekretariat Daerah dari kurun waktu 2016-2020 dapat kita lihat dari data tabel di bawah ini:

Tabel 2.76
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rata-rata pelayanan publik OPD yang bernilai baik	76 (Baik)	78 (Baik)	77,29 (Baik)	82,301 (Baik)	90 (Baik)
2	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	70
3	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan (%)	80	80	85	100	70
4	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	100	100	100	100
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	C	B	B	B	B
6	Nilai LPPD	3037	3130	3.009	32,090	32,30
7	Peringkat MTQ tingkat provinsi	7 besar	6 besar	6 besar	12 besar	12 besar
8	Persentase TPQ Aktif (%)	80	80	95	95	100

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Indeks Kepuasan masyarakat	C	B	B	B	B
10	Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif (%)	22,30	65,62	95,00	95	100
11	Persentase potensi zakat yang dikelola BAZ (%)	70	75	97	91	100

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2021

2.3.4.2. Sekretariat DPRD

Sekretariat dewan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membantu penyelenggaraan kegiatan legislatif. Indikator kinerja layanan urusan sekretariat dewan setiap tahunnya terpenuhi.

Data tentang capaian indikator urusan Sekretariat Dewan dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2021

2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.5.1. Perencanaan

Perkembangan layanan pada Fungsi Perencanaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda, dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan perda, dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan perkara, dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan perda, pejabaran konnsistensi program RPJMD kedalam RKPD, dan beberapa indikator kinerja lain sebagaimana tecantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Perencanaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	ada	ada	ada	ada	ada
5	Pejabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)	97	97	99,99	100	100
6	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD (%)	99	96	100	100	100
7	kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2021.

2.3.5.2. Keuangan

Perkembangan kinerja pelayanan pemerintah daerah pada fungsi Keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu: Opini BPK terhadap laporan keuangan, Peningkatan PAD, persentase SILPA terhadap APBD, persentase belanja pendidikan, persentase belanja kesehatan, perbandingan antara belanja langsung dengan belanja langsung, persentase bagi hasil kabupaten/ kota dan desa, dan ketepatan penetapan APBD. Untuk lebih jelas, dapat memperhatikan data-data sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.79
Capaian Kinerja Keuangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Jumlah PAD (Rp.000)	116.095.536	127.705.089	123.749.060	153.941.080	133.625.411
3	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	7,85	5,94	16,66	16,66	0,99
4	Persentase belanja pendidikan (20%) (%)	3,35	23,94	24,10	24,10	33
5	Persentase belanja kesehatan (10%) (%)	8,37	4,98	7,62	13,258	13
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	14,476 27,515	14,064 25,930	13,258 25,264	13,258 25,264	-
8	Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa (%)	0,17	0,25	0,2	0,2	0,27
9	Penetapan APBD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

2.3.5.3. Kepegawaian

Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2020 berdasarkan data BPS memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6.506 orang, yang terdiri dari fungsional tertentu sebanyak 4.876 orang, fungsional umum sebanyak 1.297 orang, dan struktural sebanyak 655 orang. Capaian indikator urusan kepegawaian dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah juga meningkat tiap tahunnya, seperti; tenaga auditor, analis, medis dan guru. Namun tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan pensiun atau purna tugas.

Data tentang capaian indikator urusan kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.80 di bawah ini.

Tabel 2.80
Capaian Indikator Urusan Kepegawaian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	28	35	35	35	33
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	132	158	156	158	1.795
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	4.790	4.800	4.865	5.080	4.678

Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2021

2.3.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

Pengelolaan kepegawaian dimulai dari tahap pengadaan sampai penjenjangan karir dan sampai purna tugasnya/ pensiun. Tahap pengadaan bertujuan untuk mengisi kebutuhan ASN pada satu instansi sesuai dengan kebutuhan dan *Background* pendidikan, penjenjangan karir, tahap yang harus dilalui ASN untuk mencapai jabatan tertentu, pensiun masa purna tugas yang diperoleh ASN atas pengadiannya. Peningkatan profesionalitas dan penjenjangan karir SDM ASN dapat dilakukan dengan cara pelatihan dan pendidikan. Capaian indikator urusan pendidikan dan pelatihan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Persentase pejabat struktural eselon II sampai Eselon IV yang mengikuti Diklat PIM terus meningkat, sehingga kapasitas pejabat struktural semakin meningkat.

Data capaian indikator urusan pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada Tabel 2.81 di bawah ini.

Tabel 2.81
Capaian Indikator Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	20	25	44,35	26	29

Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2021

2.3.5.5. Penelitian dan Pengembangan

Perkembangan kinerja pelayanan pemerintah daerah pada fungsi Penelitian dan Pengembangan dalam rentang waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu persentase implementasi rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Data-data capaian fungsi Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2016-2017 tidak tersedia karena Pemerintah Daerah baru mulai melaksanakan fungsi ini pada tahun 2018. Untuk lebih jelas, dapat memperhatikan data-data sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.82
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	n/a	n/a	n/a	n/a	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	n/a	n/a	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	n/a	n/a	100	100	100
4	Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	n/a	n/a	n/a	30	30

Sumber Data : Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.6.1. Inspektorat Daerah

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan kinerja yang signifikan, ini terlihat dari penurunan jumlah temuan dan tindak lanjut temuan dilingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik.

Kinerja fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.83
Capaian Kinerja Pengawasan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tindak lanjut temuan	85	87	82	89	84
2	Jumlah temuan BPK	20	20	17	17	11

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

2.3.7. Unsur Kewilayahan

2.3.7.1. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diamanatkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani unsur kewilayahan.

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan, jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat

2.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

2.3.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan mempunyai kemauan dan kesadaran dalam menjaga ketertiban dan keamanan dari hal-hal yang mempunyai dampak negatif dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Oleh karena itu urusan Kesbangpol yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah adalah koordinator terhadap keberlangsungan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat. Kinerja Layanan Kesbangpol selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya,

Perkembangan capaian indikator urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dari kurun waktu 2016-2020 dapat kita lihat dari data tabel di bawah ini:

Tabel 2.84
Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah struktur sosial aktif dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika (kelompok)	31 kelompok anti narkoba	31 kelompok anti narkoba	31 kelompok anti narkoba	31 kelompok anti narkoba	31 kelompok anti narkoba
2	Persentase ormas yang terdaftar aktif sesuai ketentuan perundang-undangan (%)	80	80	80	85	90
3	Persentase konflik yang tertangani (%)	80	80	80	80	80

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah “Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional”. Dan untuk meningkatkan daya saing daerah ada dua strategi untuk mengembangkan daya saing yaitu :

1. Dengan memproduksi barang dan jasa (*goods and services*) yang dibutuhkan oleh manusia dengan tingkat permintaan yang tinggi (*high demand*), dimana barang dan jasa tersebut sudah diproduksi oleh bangsa-bangsa lain, tetapi dengan sentuhan teknologi dan etos kerja yang lebih baik, maka suatu daerah akan mampu memproduksi barang dan jasa tersebut lebih kompetitif dibandingkan dengan

yang telah dihasilkan oleh produsen terdahulu. Barang dan jasa yang kompetitif adalah yang kualitasnya unggul, harganya relatif murah dan pasokan (*delivery*) nya dapat memenuhi kebutuhan serta selera (*preference*) konsumen baik di pasar domestik maupun global (Porter, 2009).

2. Dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia, tetapi karena kondisi alam atau faktor lainnya, bangsa-bangsa lain tidak bisa menghasilkannya atau hanya sedikit bangsa yang dapat memproduksinya (*blue ocean strategy*).

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

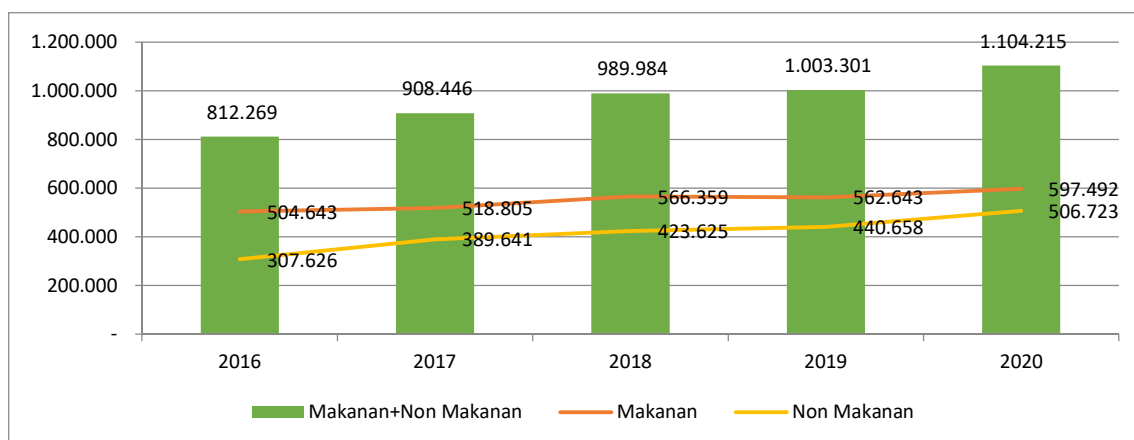
Pengeluaran konsumsi perkapita adalah total biaya konsumsi semua anggota keluarga selama sebulan yang berasal dari pembelian, pemberian, dan produksi sendiri dibagi dengan jumlah semua anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di kelompokkan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan konsumsi non makanan.

Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran konsumsi perkapita mencerminkan standar hidup masyarakat. Sedangkan standar hidup masyarakat mencerminkan kualitas pembangunan manusia.

Pengeluaran konsumsi perkapita Pesisir Selatan terus meningkat selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016 pengeluaran konsumsi perkapita Pesisir Selatan adalah Rp. 812.269,-. Nilai ini naik secara signifikan menjadi Rp. 1.104.215,- pada tahun 2020 atau secara rata-rata naik sebesar 10,67 % pertahun. Secara rata-rata selama periode 2016-2020, proporsi pengeluaran konsumsi perkapita Pesisir Selatan masih didominasi oleh pengeluaran makanan sebesar 57,98 % dan 42,02 % proporsi pengeluaran perkapita kelompok non makanan.

Perkembangan pengeluaran konsumsi perkapita di Pesisir Selatan Tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2.45
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Perkapita di Pesisir Selatan
Tahun 2016 – 2020



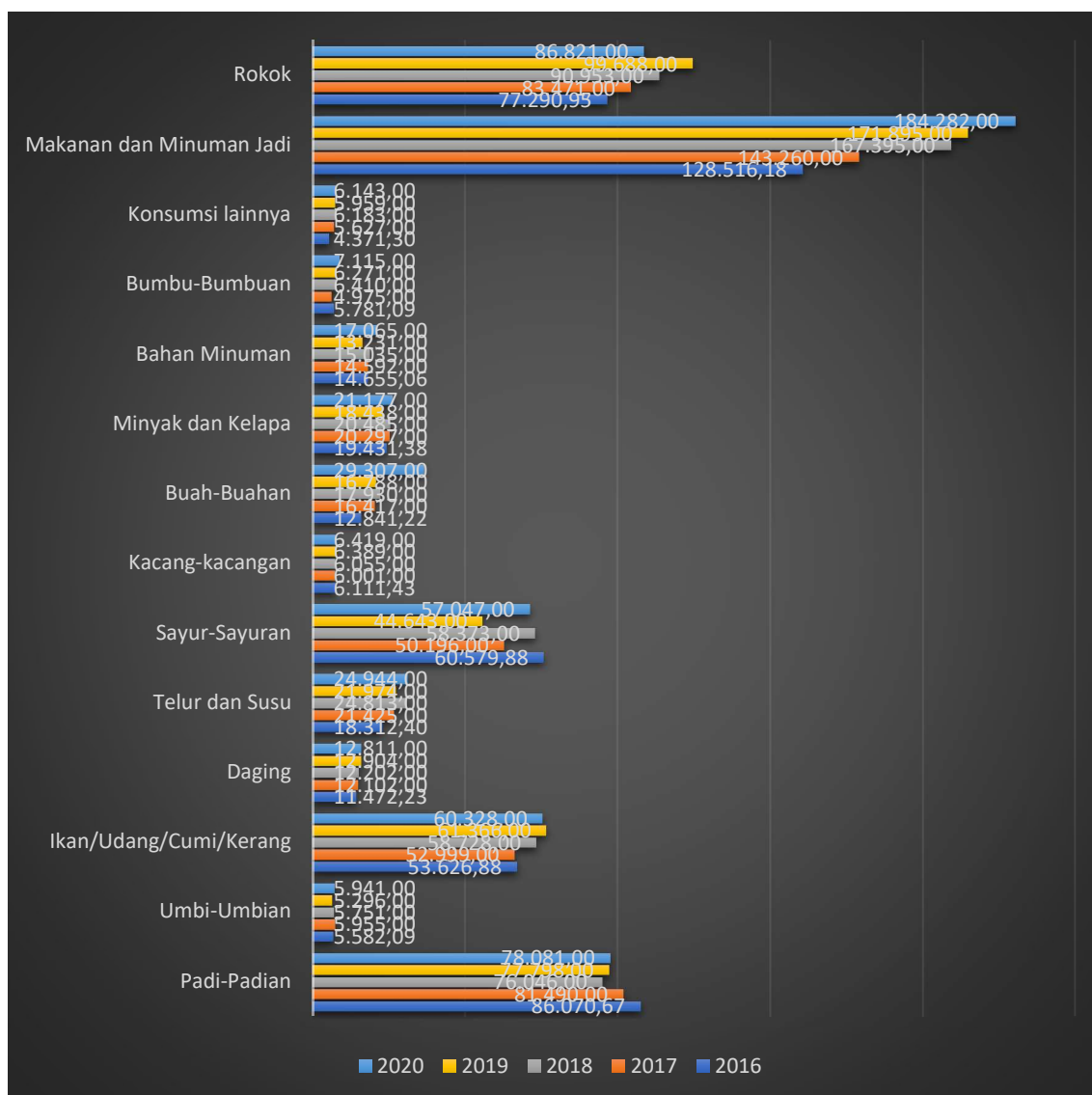
Sumber Data: BPS, Tahun 2020

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok barang Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016 adalah Rp. 812.268,74 yang terdiri dari sektor makanan Rp. 504.642,76 (62,13%) dan sektor non makanan Rp. 307.625,98 (37,87%).

Pengeluaran (dalam rupiah) yang dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan dapat digunakan untuk melihat pola pengeluaran penduduk, pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan.

Rincian pengeluaran perkapita sektor makanan dan sektor non makanan dapat dilihat pada Gambar 2.46 dan Gambar 2.47 di bawah.

Gambar 2.46
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Sektor Makanan
Tahun 2016-2020



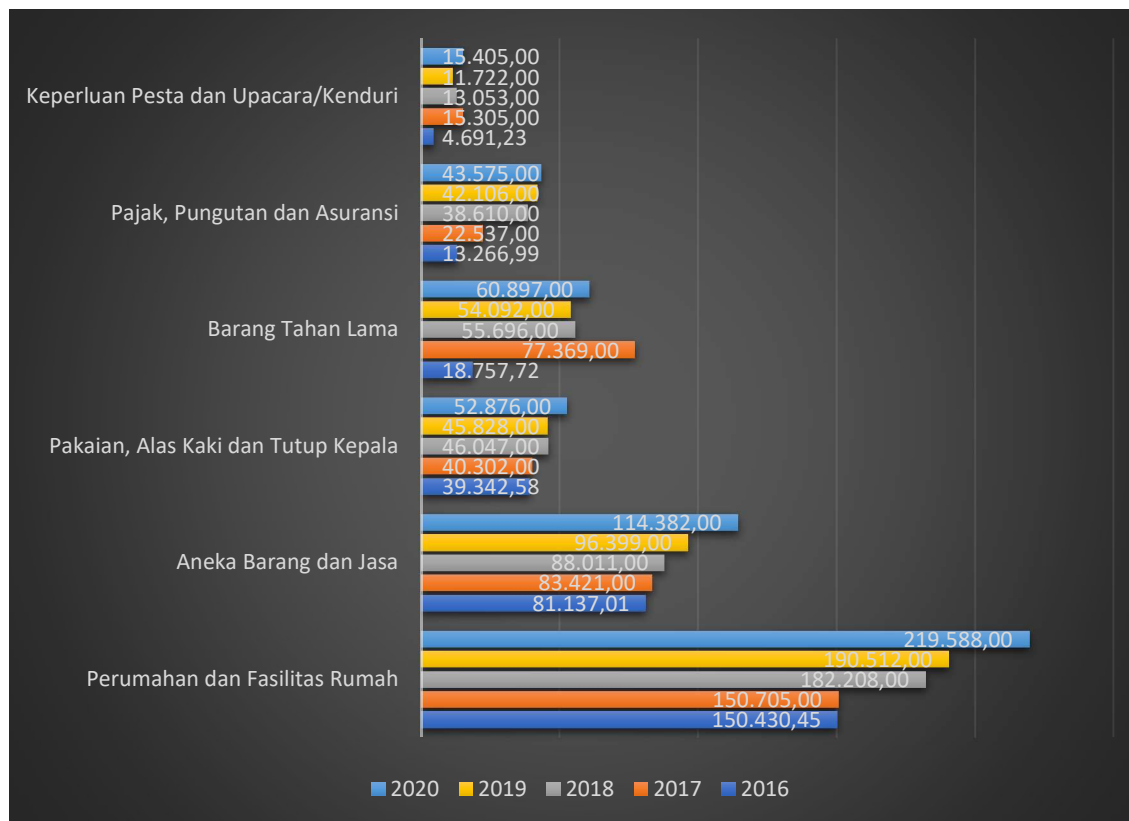
Sumber Data : Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2017-2021

Beras yang merupakan bahan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok padi-padian. Pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditas padi-padian mencapai Rp.78.081,-. Walaupun beras merupakan bahan makanan pokok akan tetapi pengeluaran tertinggi pada kelompok makanan adalah pada pengeluaran makanan dan minuman jadi yaitu Rp 184.282,-. Selain itu pengeluaran beras sedikit lebih rendah dibandingkan pengeluaran untuk rokok Rp.86.821,-

Tingginya pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman jadi dibandingkan komoditi makanan lainnya menggambarkan bahwa pola konsumsi penduduk sudah

beralih dari makan masakan di rumah ke makanan yang dibeli. Keadaan ini dipengaruhi oleh gaya hidup yang serba ingin praktis dan instant.

Gambar 2.47
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan Sektor Non Makanan
Tahun 2016-2020



Sumber Data : Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2017-2021

Untuk pengeluaran per kapita penduduk untuk kelompok bukan makanan pada pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga mencapai Rp.219.588,- merupakan pengeluaran per kapita tertinggi dari semua komoditi makanan maupun bukan makanan, diikuti persentase pengeluaran untuk aneka barang dan jasa mencapai Rp. 114.382,-

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas dalam bentuk fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh pihak-pihak publik untuk menunjang fungsi pembentukan wilayah dan kota, yaitu pemenuhan tenaga listrik, transportasi, penyediaan air, serta pembuangan limbah dalam rangka memfasilitasi kepentingan sosial dan ekonomi. Jadi infrastruktur merupakan konsep fisik yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat umum dalam ranah sosial dan ekonomi.

Apabila dilihat dari segi mikro, infrastruktur berperan dalam penyediaan aset fisik yang direncanakan dan dirancang dalam suatu proses dan sistem yang relevan, sehingga dapat memenuhi pelayanan publik. Sedangkan fasilitas adalah tempat untuk menampung kepentingan masyarakat berupa fisik dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat publik. Fasilitas harus dirancang dengan baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam penyediaan produk dan jasa berkualitas tinggi dengan biaya dan sumber daya yang minimal.

Dalam penyediaan infrastuktur untuk pemenuhan kepentingan masyarakat tidak terlepas dari luas wilayah yang bisa dimanfaatkan dan disesuaikan dengan struktur pola ruang yang di tetapkan dalam RTRW Kabupaten. Dilihat dari kondisi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas Kawasan Lindung mencapai 52,37% dari luas wilayah dan Kawasan Budidaya mencapai 47,63% dari luas wilayah, maka wilayah produktif yang bisa dimanfaatkan sekitar 288.142 Ha, seperti yang terlihat pada tabel 2.85 dibawah ini

Tabel 2.85
Wilayah Produktif Kabupaten Pesisir Selatan

No	Lahan Produktif	Existing (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Produksi Konversi	31.299	5,17
2	Hutan Produksi Terbatas	43.302	7,16
3	Hutan Produksi Tetap	3.993	0,66
4	Hutan Rakyat	20.412	3,37
5	Perkebunan	84.802	14,02
6	Permukiman Perkotaan	2.721	0,45
7	Permukiman Perdesaan	12.674	2,10
8	Tanaman Pangan	45.291	7,49
9	Hortikultura	33.053	5,46
10	Pariwisata	805	0,13
11	Kawasan Pertambangan Batubara	8.490	1,40
12	Kawasan Pertambangan Mineral Logam (Emas)	1.300	0,21
Total		288.142	47,63

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030

Penyediaan Infrastruktur pelayanan dasar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan termasuk akses air minum layak. Pada Tabel 2.86

disajikan data Akses Penyediaan Layanan Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan pada Tabel 2.87 tersaji data Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Tabel 2.86
Akses Penyediaan Layanan Air Minum
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	AKSES PENYEDIAAN AIR MINUM (RT)			
		Jaringan Perpipaan		Non Perpipaan	Total
		PDAM	Non PDAM		
1	Koto XI Tarusan	428	4.123	6.074	10.599
2	Bayang	2.365	1.045	4.434	7.818
3	IV Nagari Bayang Utara	183	803	569	1.530
4	IV Jurai	5.817	2.109	2.342	10.243
5	Batang Kapas	1.977	1.098	3.938	6.987
6	Sutera	3.866	787	6.580	11.207
7	Lengayang	3.215	1.817	7.082	12.088
8	Ranah Pesisir	1.113	1.166	4.438	6.692
9	Linggo Sari Baganti	1.686	850	7.404	9.914
10	Airpura	521	62	2.839	3.397
11	Pancung Soal	1.173	1.015	3.682	5.845
12	Basa Ampek Balai Tapan	72	40	3.132	3.219
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	362	273	2.369	2.979
14	Lunang	-	2.257	2.622	4.854
15	Silaut	-	1.744	1.657	3.376
JUMLAH		22.778	19.189	59.162	101.129

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. Pesisir Selatan, 2020

Tabel 2.87
Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No.	Sumber Air Minum	Jumlah RT (%)
1	Leding	8,01
2	Sumur Bor/Pompa	3,39
3	Air Dalam Kemasan	56,08
4	Sumur Terlindungi	15,02
5	Sumur Tak Terlindungi	3,54
6	Mata Air Terlindungi/Tak Terlindungi	13,10
7	Air Permukaan	0,53
8	Air Hujan	0,33
9	Lainnya	-
JUMLAH		100%

Sumber Data : BPS Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2021

Dilihat dari tabel di atas, terlihat bahwa total rumah tangga yang memiliki akses air minum di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 adalah 101.129 rumah tangga (94,88%) dengan total jaringan perpipaan sebanyak 41.967 rumah tangga atau 39,37%, sedangkan rumah tangga dengan akses air minum layak sebanyak 93.590 rumah tangga atau 87,8%. Walaupun cakupannya tinggi, namun masih banyak yang belum menggunakan jaringan perpipaan atau masih menggunakan sumur gali, penampungan air hujan dan penampungan mata air. Berdasarkan sumber akses pelayanan air minum sebanyak 56,08% Rumah Tangga menggunakan air minum dalam kemasan sebagai sumber air minum.

Indikator lain yang dapat menjelaskan daya saing daerah adalah ketersediaan infrastruktur aksesibilitas seperti jalan, ketersediaan transportasi, terminal baik darat, laut, dan udara. Pembangunan akses jalan di Pesisir Selatan selama tahun 2015 – 2018 menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini tercermin dari nilai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Dengan asumsi terjadinya pertumbuhan jumlah kendaraan setiap tahunnya, maka naiknya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan membuktikan telah terjadi penambahan ruas jalan baru di Pesisir Selatan khususnya selama tahun 2018 dan 2019. Berikut pada Tabel 2.88 di bawah ini menjelaskan data ketersediaan Aksesibilitas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020.

Tabel 2.88
Ketersediaan Aksesibilitas
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Panjang Jalan Per jumlah Kendaraan	0,06	0,06	0,025	0,022	0,022
2	Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum	760.988	994.743	785.603	790.793	109.724
3	Jumlah Orang Melalui Dermaga / Bandara Terminal Pertahun	88.000	90.512	122.894	49.022	41.041

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kab. Pessel, Tahun 2021

Pada tahun 2019 rasio panjang jalan perjumlah kendaraan mengalami sedikit penurunan. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh lebih tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan dibandingkan penambahan ruas jalan baru.

Selanjutnya jumlah orang yang terangkut oleh angkutan umum menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2016, sebanyak 930 ribu orang menggunakan angkutan umum sebagai alat transportasi mereka. Jumlah ini terus menurun hingga menjadi 109 ribu jiwa saja pada tahun 2020. Penurunan intensitas angkutan umum yang digunakan masyarakat

kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi serta terjadinya pandemi Covid-19. Data Ketersediaan Sarana Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.89
Ketersediaan Sarana Perekonomian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan Restoran	46	83	144	144	137
2.	Ketersediaan Penginapan	25	26	66	66	66

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2021

Salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian daerah melalui pembangunan sarana perekonomian seperti jasa pendukung pariwisata seperti hotel dan restoran. Untuk pembangunan sektor pariwisata yang menjadi perhatian pemerintah daerah beberapa tahun terakhir telah memberi dampak pada meningkatnya ketersediaan restoran/rumah makan dan penginapan, terutama pada kawasan destinasi utama pariwisata kabupaten. Data Ketersediaan Fasilitas Listrik dan Komunikasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.90 berikut.

Tabel 2.90
Ketersediaan Fasilitas Listrik dan Komunikasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Ketersediaan Listrik	100	100	100	100	100
2	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik	85,86	91,67	92,67	98,93	98,93
3	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	n/a	40	65	70	79,93

Sumber Data : PLN ULP Painan, Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021.

Rumah tangga pengguna listrik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pertambahan pengguna listrik PLN setiap tahunnya sebesar 3,46 %. Sedangkan rasio ketersediaan listrik pada 5 tahun ke belakang sudah mencapai 100 %. Untuk penggunaan HP/telepon di Pesisir Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang pada tahun 2020 telah mencapai 79,93 %. Hal ini menandakan bahwa cakupan layanan telekomunikasi sudah cukup baik.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi atau penanaman modal merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak pengganda (*multiplier effect*) yang disebabkan oleh investasi relatif lebih besar dibanding faktor lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki peluang investasi yang sangat potensial. Pemerintah daerah menyambut investor baik dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya di Pesisir Selatan.

Selain itu, kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki peluang investasi disektor lain seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Perkembangan investasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:.

Tabel 2.91
Nilai Investasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Kategori	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp.000)	68.000.000	70.000.000	442.686.583	525.484.275	345.019.215

Sumber: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.91 di atas, dapat dilihat bahwa secara rata-rata terjadi peningkatan investasi dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, jumlah investasi PMDN/PMA sebesar Rp. 68.000.000,- meningkat menjadi Rp. 345.019.215.304,- pada tahun 2020 atau meningkat sebesar Rp. 344.951.215.304,- (99,98%).

Pemerintah perlu menyediakan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan berinvestasi kepada investor. Bagian ini menjelaskan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi di Pesisir Selatan. Beberapa regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dalam mendukung iklim investasi dapat dilihat pada Tabel 2.75 di bawah ini.

Kabupaten Pesisir Selatan dari waktu ke waktu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Kualitas pelayanan tersebut dapat dilihat dari durasi waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan, regulasi terkait perizinan dan akses terhadap pelayanan perizinan. Pada tahun 2019, standar pelayanan perizinan di

Kabupaten Pesisir Selatan diatur oleh SK Bupati Nomor 285 Tahun 2017 tentang SOP dimana pelayanan perizinan mencakup 120 jenis pelayanan perizinan. Dari semua jenis pelayanan perizinan tersebut, hanya ada 4 jenis pelayanan perizinan berbayar sesuai dengan peraturan yang disebut sebagai retribusi, sedangkan sisanya bisa didapatkan secara gratis.

Pada tahun 2020, tidak ada dikeluarkan aturan baru terkait perizinan hal ini terkait pada tahun 2020, Pemerintah Daerah tengah menghadapi pandemi Covid-19. Pada akhir 2020, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Di Pesisir Selatan, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja sedang disusun mulai di tahun 2021 ini, dan diharapkan ini dapat mendorong investasi di masa depan.

Tabel 2.92
SOP dan Perda yang Mendukung Iklim Investasi

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Lama Proses Perizinan (hari)	2-7 hari	2-7 hari	2-7 hari	2-7 hari	-
2.	Jumlah Regulasi yang mendukung iklim perizinan	- SK Bupati Nomor 355 Tahun 2015 tentang SOP - Perbup No 29 Tahun 2015 ttg Pendelegasian Wewenang	- SK Bupati Nomor 285 Tahun 2017 tentang SOP - Perbup No 7 Tahun 2017 ttg Pendelegasian wewenang - Perbup No 57 Tahun 2017 ttg Penetapan Indeks Retribusi	- SK Bupati Nomor 285 Tahun 2017 tentang SOP - Perbup No 7 Tahun 2017 ttg Pendelegasian wewenang - Perbup No 57 Tahun 2017 Penetapan Indeks Retribusi - Perda No 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal - Perda No 1 Tahun 2018 Perubahan Retribusi IMB	- SK Bupati Nomor 285 Tahun 2017 tentang SOP - Perbup No 7 Tahun 2017 ttg Pendelegasian wewenang - Perbup No 57 Tahun 2017 Penetapan Indeks Retribusi - Perda No 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal - Perda No 1 Tahun 2018 Perubahan Retribusi IMB	- -

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan, 2021.

Dari sisi waktu yang digunakan untuk mengurus perizinan, standar pelayanan perizinan Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan waktu 2-7 Hari Maksimal. Dengan telah digunakannya sistem pelayanan Perizinan Elektronik yang disebut dengan OSS (Online Single Submission), maka sangat memungkinkan pelayanan perizinan dapat dilakukan dalam waktu 1 hari.

Salah satu yang mempengaruhi iklim investasi adalah keamanan berinvestasi pada tabel dibawah dapat dilihat dari data korban tindak kejahatan :

Tabel 2.93
Data Korban Tindak Kejahatan
Kabupaten pesisir Selatan 2016 - 2020

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Narkoba	-	-	-	-	-
2	Pembunuhan	4	1	1	-	1
3	Kejahatan seksual	42	37	32	30	26
4	Penganiayaan	303	298	244	217	234
5	Pencurian	299	268	290	300	133
6	Penipuan	63	39	27	28	10
7	Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-

Sumber Data : Kepolisian Resor Pesisir Selatan, 2021

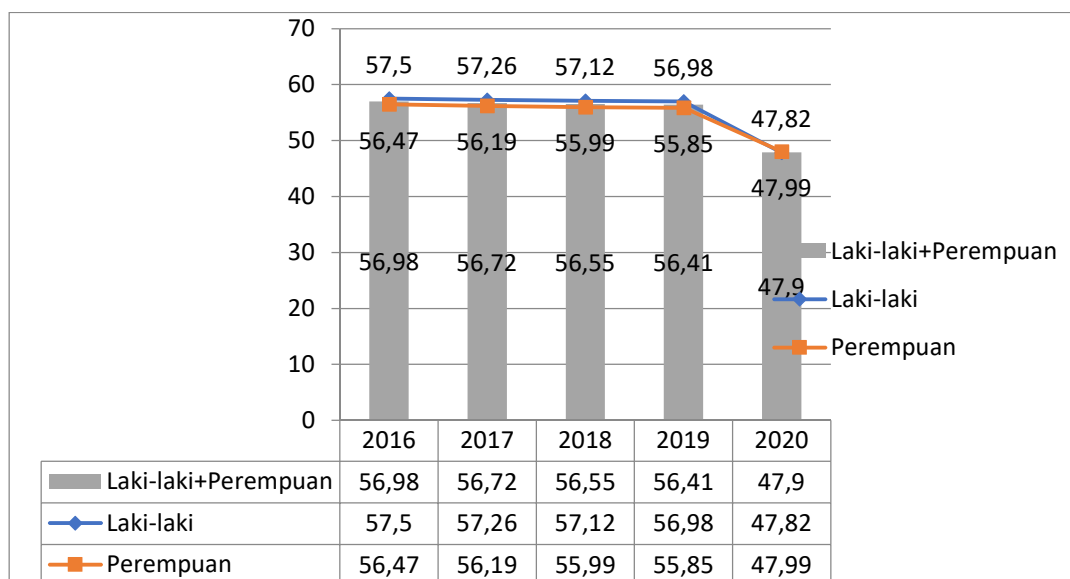
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga berupaya meningkatkan tingkat keamanan berinvestasi dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian Resor Pesisir Selatan, dari tabel 2.93 dapat kita bahwa data korban tindak kejahatan berbanding lurus terhadap jumlah kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat diketahui bahwa tindak kejahatan yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan cenderung menurun walaupun dengan angka yang berfluktuatif, dan hal ini menjadikan salah satu faktor menjamin bagi investor untuk menanamkan investasi di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan potensi daerah yang ada.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator untuk melihat daya saing daerah dari sisi sumber daya manusia. Rasio ini berguna untuk melihat seberapa besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Rasio ini diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk yang berumur kecil dari 15 tahun ditambah jumlah penduduk yang berumur lebih dari 64 tahun dengan jumlah penduduk yang berumur antara 15 sampai 64 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia tidak produktif.

Secara keseluruhan rasio ketergantungan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan tren yang menurun setiap tahunnya. Walaupun tidak signifikan, rasio ketergantungan di Kabupaten Pesisir Selatan turun dari 56,98 % pada tahun 2016 menjadi 47,90 % pada tahun 2020. Hal ini berarti, setiap 100 orang yang berusia produktif di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tanggungan sebesar 48 orang pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Gambar di bawah ini.

Gambar 2.48
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2020



Sumber Data: BPS Pesisir Selatan Dalam Angka, 2021 (data diolah)

Sumber Daya Manusia yang terampil dan berkualitas akan mempengaruhi kemajuan suatu daerah. Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana (S1, S2, dan S3). Di Kabupaten Pesisir Selatan, lulusan S1/S2/S3 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio lulusan S1/S2/S3 mengalami peningkatan sebesar 0,77 % dari tahun 2017 sebesar 3,35 % menjadi 4,12 % pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.94 berikut:

Tabel 2.94
Rasio Lulusan S1/S2/S3

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Lulusan S1	14.674	16.591	18.317	19.920
2.	Jumlah Lulusan S2	647	691	770	836
3.	Jumlah Lulusan S3	20	20	21	23
4.	Total Lulusan S1/S2/S3	15.341	17.302	19.108	20.779
5.	Jumlah Penduduk	457.285	460.716	463.923	504.418
6.	Ratio Lulusan S1/S2/S3	3,35%	3,76%	4,12%	4,12%

Sumber Data :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2020

2.4. Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang

merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang merupakan tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh setiap Pemerintah Daerah pada batas waktu yang ditentukan.

Capaian SPM untuk dibagi pada 1) capaian terhadap sasaran SPM, dan 2) capaian terhadap kualitas pemberi layanan dasar (Tenaga Pendidikan dan Kependidikan untuk Bidang Pendidikan, Tenaga Kesehatan untuk Bidang Kesehatan, SDM Satpol dan Damkar untuk SPM bidang Trantim, dan SDM Sosial/Petugas Kesejahteraan Sosial untuk SPM bidang Sosial)

Urusan wajib yang diamanatkan memiliki SPM adalah yang terkait pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan urusan wajib adalah:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan
- f. Sosial.

SPM merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan layanan publik lainnya. Evaluasi SPM merupakan pemberian gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan oleh daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Adapun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, memiliki nilai capaian sebesar 85% dengan rincian sebagai mana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.95
Pencapaian SPM Tahun 2020

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI 2020	TINGKAT CAPAIAN	DINAS PENANGGUNG JAWAB
I	SPM Bidang Pendidikan					
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD, MI, SMP/ MTs)	99,00%	98,97%	99,97%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI 2020	TINGKAT CAPAIAN	DINAS PENANGGUNG JAWAB
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99,00%	98,77%	99,77%	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	85,00%	80,70%	94,94%	
II	SPM Bidang Kesehatan					
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	90,00%	84,75%	94,17%	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	90,00%	86,78%	96,42%	
3	Pelayanan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	90,00%	99,40%	110,44%	
4	Pelayanan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65,00%	72,26%	111,17%	
5	Pelayanan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100,00%	84,21%	84,21%	
6	Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendatkan skrining kesehatan sesuai standar	20,00%	21,18%	105,90%	
7	Pelayanan warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	70,00%	70,75%	101,07%	
8	Pelayanan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	100,00%	121,7%	121,70%	

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI 2020	TINGKAT CAPAIAN	DINAS PENANGGUNG JAWAB
9	Pelayanan orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, Waria/ Transgender, Pengguna Napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	50,00%	24,7%	49,40%	
III	SPM Bidang Pekerjaan Umum					
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	96,16%	99,27%	103,23%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,16%	75,84%	100,90%	
IV	SPM Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman					
1	Ketersediaan Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni*	0,2178	0,2233	102,53%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan	Rasio Permukiman Layak Huni*	96,76	96,82	100,06%	
V	SPM Bidang Sosial					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	10,00%	3,58 %	35,80%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	25,00%	0,00%	0,00%	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	15,00%	19,00 %	126,67%	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	100,00%	0,00%	0,00%	

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI 2020	TINGKAT CAPAIAN	DINAS PENANGGUNG JAWAB
		dasar tuna sosial diluar panti				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100,00%	100,00%	100,00%	
VI SPM Bidang Trantibum						
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Penegakan Paraturan Daerah dan peraturan kepala daerah	75%	75%	100,00%	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (3 x patroli dalam sehari/)	100%	100%	100,00%	
		Cakupan rasio petugas linmas	100%	100%	100,00%	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Cakupan layanan informasi rawan bencana	100%	60%	60,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	44%	44,00%	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	86,89%	86,89%	
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100,00%	
Rata-Rata tingkat Capaian					89,10%	

Keterangan: * = Indikator SPM belum mengikuti PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM

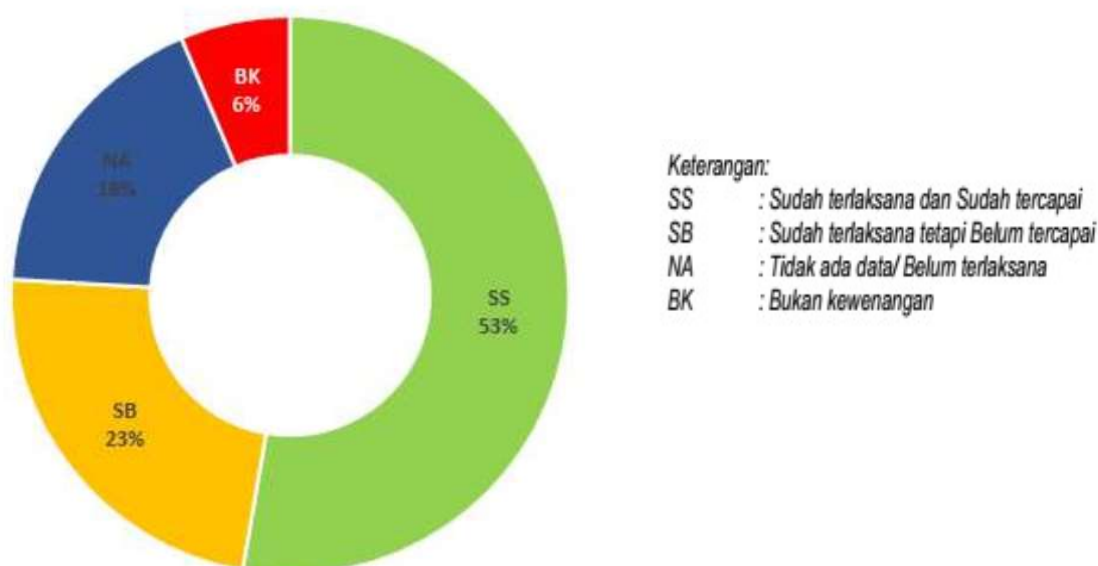
Sumber data: Bagian Pemerintahan Umum, Setda Kab. Pessel, 2021.

2.5. Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) adalah 45%. Bila dilihat dari 4 kategori di atas, proporsi pelaksanaan TPB Kabupaten Pesisir Selatan secara umum masih didominasi dengan kategori SS, sedangkan untuk

kategori SB dan NA berturut-turut adalah 20% dan 29%. Komposisi pelaksanaan TPB Kabupaten Pesisir Selatan seperti terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.47
Pencapaian Indikator TPB Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020



Sumber data: KLHS RPJMD Kab. Pessel, 2021-2026.

Terdapat 116 indikator TPB dengan kategori yang sudah terlaksana dan sudah mencapai target (SS). TPB dengan capaian tertinggi adalah TPB 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera yakni 19 indikator. Sementara itu, terdapat beberapa TPB yang tidak mempunyai capaian SS seperti TPB 7 dan TPB 15. Terdapat 51 indikator yang masuk kategori TPB yang sudah terlaksana namun belum mencapai target (SB). TPB dengan capaian tertinggi untuk kategori SB ini adalah TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera (10 indikator). Untuk lebih jelas dapat memperhatikan data pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95
Pencapaian Indikator Berdasarkan 17 Goal's dari TPB

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	24	16	7	1	0
TPB 2	Tanpa Kelaparan	11	7	1	3	0
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	19	10	5	0
TPB 4	Pendidikan berkualitas	13	9	4	0	0
TPB 5	Kesetaraan gender	14	9	1	4	0
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	18	9	7	1	1
TPB 7	Menjamin akses energi	2	0	0	2	0

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	8	4	7	0
TPB 9	Infrastruktur, industri dan inovasi	13	7	3	0	3
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	11	4	1	2	4
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	13	4	3	1	5
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	3	2	0	0
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	2	2	0	0	0
TPB 15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	0	2	2	0
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	12	3	6	0
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	16	7	3	5	1
Total		220	116	51	39	14
Persentase		100%	53%	23%	18%	6%

Sumber data: KLHS RPJMD Kab. Pessel, 2021-2026.

Menurut pilar, capaian TPB Kabupaten Pesisir Selatan terlihat dalam Tabel 2.85. Pilar yang capaian tertinggi adalah pilar sosial (60 indikator dengan kategori SS), pilar ekonomi (26 indikator dengan kategori SS) dan pilar lingkungan (18 indikator dengan kategori SS). Kategori NA tertinggi adalah pilar ekonomi (26 indikator). Data pencapaian TPB menurut pilar tersaji pada Tabel 2.96 berikut.

Tabel 2.96
Pencapaian Indikator Berdasarkan Pilar TPB

No	Nama Pilar	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Sosial	96	60	23	13	
2	Ekonomi	61	26	11	16	8
3	Lingkungan	42	18	14	4	6
4	Hukum dan Tata Kelola	21	12	3	6	
Total		220	116	51	39	14
Persentase		100%	53%	23%	18%	6%

Sumber data: KLHS RPJMD Kab. Pessel, 2021-2026.

Kategori Urusan Wajib Pelayanan Dasar mempunyai capaian indikator SS sebanyak 71 indikator, diikuti dengan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan capaian kategori SS 37 indikator. Kedua jenis urusan ini juga mempunyai capaian indikator NA terbanyak yaitu masing-masing 12 indikator dan 15 indikator. Capaian

pelaksanaan TPB Kabupaten Pesisir Selatan menurut kategori urusan dapat dilihat pada Tabel 2.97 berikut.

Tabel 2.97
Capaian Pelaksanaan TPB Kabupaten Pesisir Selatan
menurut Kategori Urusan

No	Kategori Jenis Urusan	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Wajib Pelayanan Dasar	114	71	26	12	5
2	Wajib Non Pelayanan Dasar	82	37	21	15	9
3	Pilihan	12	4	1	6	0
4	Penunjang	11	4	3	5	0
5	Absolut	1	0	0	1	0
Total		220	116	51	39	14
Persentase		100%	53%	23%	18%	6%

Sumber data: KLHS RPJMD Kab. Pessel, 2021-2026.

Diantara 114 indikator TPB yang termasuk jenis urusan wajib pelayanan dasar terdapat 61 indikator dengan kategori SPM. Dari 61 indikator SPM tersebut, 43 indikator sudah mempunyai kategori capaian SS (69%) dan 16 indikator dengan kategori SB dan NA. SPM Kesehatan mempunyai jumlah indikator SS tertinggi yaitu 21, seperti terlihat pada Tabel terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.98
Capaian Pelaksanaan TPB Kabupaten Pesisir Selatan Menurut SPM

No	Nama SPM	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian		
			SS	SB	NA
1	Pendidikan	13	10	3	0
2	Kesehatan	26	21	5	0
3	Pekerjaan Umum	7	3	3	1
4	Perumahan Rakyat	1	0	0	1
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7	3	3	0
6	Sosial	4	2	2	0
Jumlah		61	43	16	2
Persentase		100%	62%	26%	11%

Sumber data: KLHS RPJMD Kab. Pessel, 2021-2026.

Sebaran indikator TPB berdasarkan OPD penanggung jawab dapat dilihat pada Tabel-7. Indikator TPB dengan kategori capaian SS terbanyak adalah Dinas Kesehatan yaitu 24 indikator, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan 11 indikator diikuti dengan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10 indikator dengan kategori SS. Untuk lebih jelas dapat melihat Tabel 2.99

Tabel 2.99
Capaian Pelaksanaan TPB Kabupaten Pesisir Selatan Menurut OPD

No	OPD Penanggung Jawab	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
1	Bagian Hukum	2	1	0	1	0
2	Bagian Organisasi	3	2	0	1	0
3	Bagian Pembangunan dan Infrastruktur	1	1	0	0	0
4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2	0	1	1	0
5	Baperlitbang	7	2	4	1	0
6	BKD	5	1	0	4	0
7	BKPSDM	1	1	0	0	0
8	BPBD	12	9	3	0	0
9	BPS	5	4	1	0	0
10	Dinas Kesehatan	37	24	8	5	0
11	Dinas Kesehatan	1	1	0	0	0
12	Dinas Komunikasi dan informatika	10	8	1	0	1
13	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Perindustrian	5	2	1	2	0
14	Dinas Lingkungan Hidup	19	5	4	7	3
15	Dinas Pangan	4	1	1	2	0
16	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4	2	0	2	0
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17	11	5	0	1
18	Dinas Perhubungan	4	1	0	0	3
19	Dinas PUPR	19	7	8	1	2
20	Dinas Sosial, PP dan PA	23	10	7	5	1
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12	8	1	3	0
22	Disdukcapil	5	4	0	1	0
23	DPMDPPKB	14	6	3	2	3
24	DPMPTSP	2	1	0	1	0
25	Inspektorat	1	0	0	1	0
26	Kesbangpol	5	3	0	2	0
Jumlah		220	16	51	39	14
Persentase		100%	53%	23%	29%	6%

Sumber data: KLHS RPJMD Kab. Pessel, 2021-2026.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi dua komponen besar, yakni pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah. Penyelenggaraan pemerintah akan berjalan dengan optimal apabila mampu mengelola kedua komponen tersebut. Dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan keuangan daerah saat ini mengacu kepada peraturan-peraturan pengelolaan keuangan yang terkait, meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Gambaran keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan disajikan dalam kesatuan analisis data yang terukur sehingga dapat menggambarkan kondisi kemampuan keuangan daerah di masa lalu (periode tahun 2016 sampai dengan 2020), masa sekarang dengan pengaruh pandemi Covid-19 yang belum terselesaikan serta gambaran kemampuan keuangan di masa akan datang yang di proyeksikan untuk 5 (lima) tahun ke depan (periode tahun 2021 sampai dengan 2026).

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

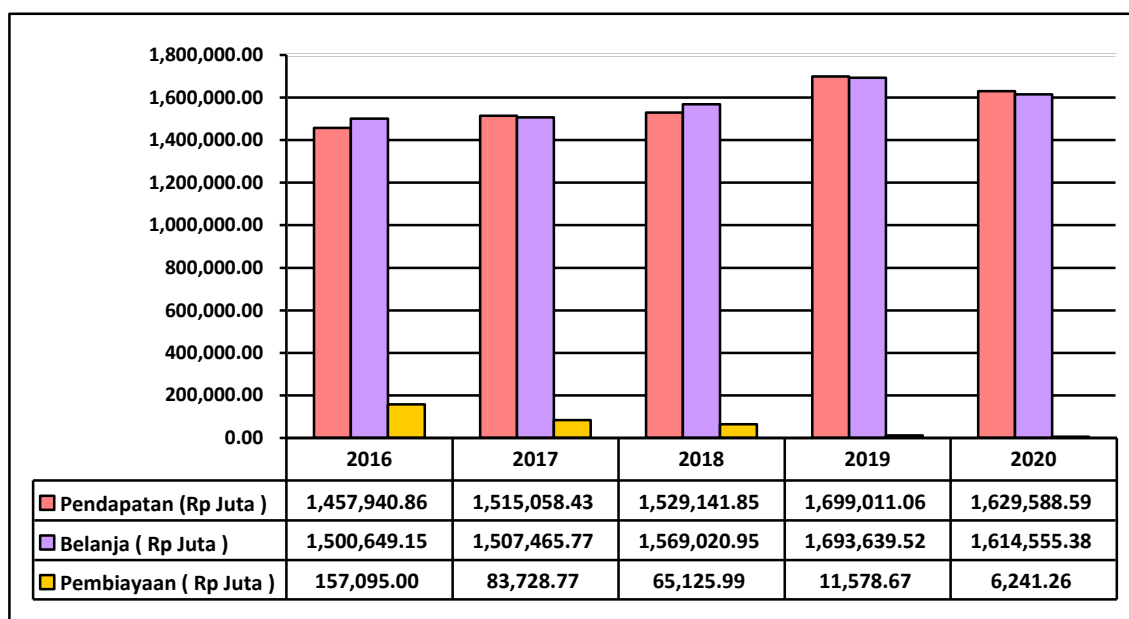
Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan yang diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan saat ini dan kinerja di masa depan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kinerja keuangan masa lalu disajikan berdasarkan data time series lima tahunan pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020 yang di analisis untuk mengukur kinerja pelaksanaan APBD (pendapatan dan belanja) dan Neraca Daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang positif seperti terlihat pada Gambar 3.1. berikut :

Gambar 3.1.
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 – 2020



Sumber Data : BPKD Pesisir Selatan Tahun 2021.

A. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sesuai dengan aturan yang berlaku, komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini :

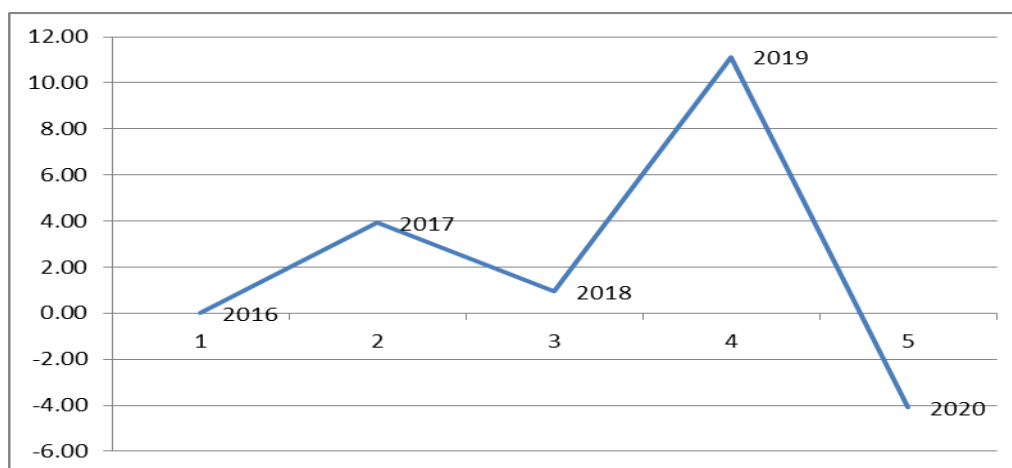
Tabel 3.1.
Realisasi Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2016	1,577,041,581,597.00	1,457,940,857,432.74	92.45	0.00
2	2017	1,539,542,108,506.00	1,515,058,426,871.05	98.41	3.92
3	2018	1,609,033,648,934.00	1,529,141,850,638.36	95.03	0.93
4	2019	1,772,707,595,258.00	1,699,011,062,108.43	95.84	11.11
5	2020	1,698,028,198,430.00	1,629,588,564,634.45	95.97	-4.09

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 - 2020 (data diolah).

Tingkat capaian realisasi pendapatan daerah berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, target pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak tercapai 100% dari yang ditargetkan. Capaian terget tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 98.40% dengan rata-rata pertumbuhan 3.92%. Gambar 3.1. dibawah ini memberikan gambaran pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2006-2020.

Gambar 3.2.
Realisasi Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber Data : BPKD Pesisir Selatan Tahun 2021.

Gambar diatas memperlihatkan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan periode 2016 sampai dengan 2020. Puncak pertumbuhan pendapatan daerah terbaik yang ditunjukkan olah gambar adalah sebesar 0.11% yaitu pada tahun 2019. Tingkat pertumbuhan ini dipicu dengan adanya tambahaanan pendapatan yang berasal dari komponen lain-lain pendapatan yang sah yaitu pendapatan hibah.

Pendapatan hibah yang dimaksud adalah pendapatan Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perkembangan target, realisasi dan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

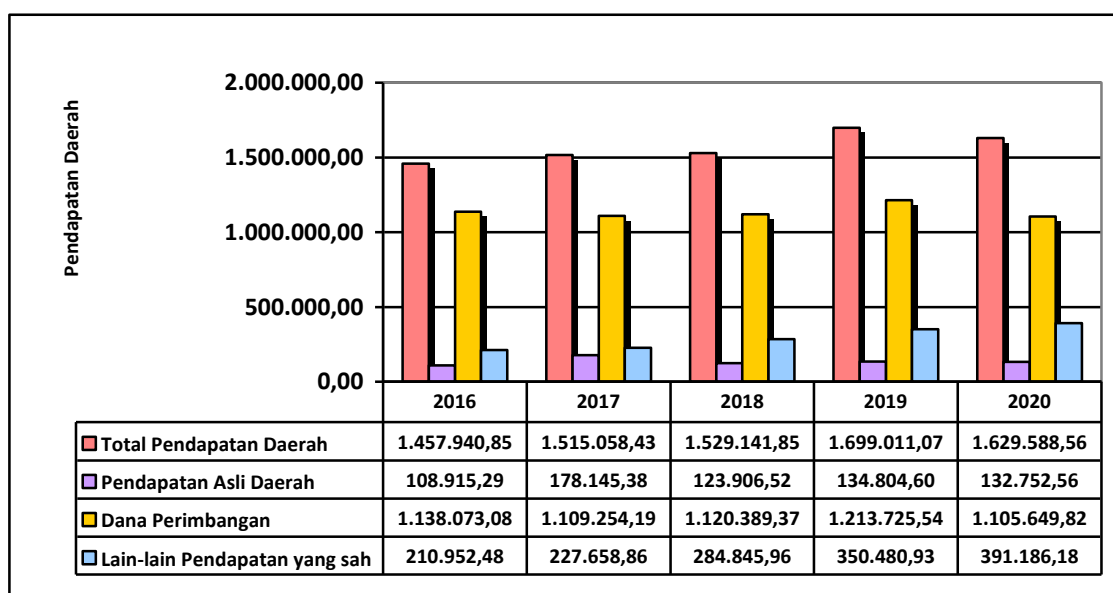
Tabel 3.2.
Rata-Rata Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Rata-Rata Pertumbuhan	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	PENDAPATAN	1,577,041,581,597.00	1,457,940,857,432.74	1,539,542,108,506.00	1,515,058,426,871.05	1,609,033,648,934.00	1,529,141,850,638.36	1,772,707,595,258.00	1,699,011,062,108.43	1,698,028,198,430.00	1,629,588,564,634.45	2.02%	2.97%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	111,662,402,223.00	108,915,294,627.74	186,253,728,401.00	178,145,381,104.05	150,064,411,839.00	123,906,524,443.36	153,941,080,200.00	134,804,594,146.43	152,636,474,688.00	132,752,560,092.45	12.28%	10.10%
a	Pendapatan Pajak Daerah	12,095,285,698.00	13,712,844,614.10	14,548,585,698.00	19,794,773,402.20	26,673,886,943.00	23,751,789,554.97	27,337,210,782.00	23,797,657,254.87	28,949,287,406.00	20,454,008,648.00	28.00%	12.62%
b	Pendapatan Retribusi Daerah	7,053,756,000.00	5,315,801,100.00	6,248,364,000.00	3,739,647,501.00	14,707,948,300.00	4,552,508,117.00	13,505,569,321.00	5,535,119,147.00	10,793,229,391.00	3,096,510,273.00	23.93%	-7.60%
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5,070,336,669.00	5,075,232,597.00	7,557,876,122.00	5,410,693,493.00	5,711,160,313.00	5,711,160,313.00	8,395,930,840.00	8,395,930,840.00	9,632,288,482.00	9,632,288,482.00	21.59%	18.47%
d	Lain-lain PAD yang Sah	87,443,023,856.00	84,811,416,316.64	157,898,902,581.00	149,200,266,707.85	102,971,416,283.00	89,891,066,458.39	104,702,369,257.00	97,075,886,904.56	103,261,669,409.00	99,569,752,689.45	11.52%	11.68%
B	DANA PERIMBANGAN	1,250,969,489,000.00	1,138,073,082,431.00	1,130,054,483,211.00	1,109,254,189,839.00	1,145,399,229,643.00	1,120,389,365,019.00	1,241,343,355,079.00	1,213,725,540,008.00	1,132,202,448,576.00	1,105,649,823,074.00	-2.18%	-0.53%
a	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil bukan pajak	18,277,245,000.00	18,097,698,530.00	24,716,936,211.00	22,703,709,356.00	29,027,148,643.00	17,129,540,309.00	21,787,979,079.00	19,442,960,426.00	22,975,499,938.00	13,289,192,614.00	8.30%	-4.31%
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	853,086,114,000.00	853,086,114,000.00	838,100,134,000.00	838,100,134,000.00	838,100,134,000.00	838,100,134,000.00	862,535,819,000.00	862,608,266,000.00	792,358,743,000.00	784,053,203,000.00	-2.33%	-1.98%
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	379,606,130,000.00	266,889,269,901.00	267,237,413,000.00	248,450,346,483.00	278,271,947,000.00	265,159,690,710.00	357,019,557,000.00	331,674,313,582.00	316,868,205,638.00	308,307,427,460.00	-2.10%	4.46%
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	214,409,690,374.00	210,952,480,374.00	223,233,896,894.00	227,658,855,928.00	313,570,007,452.00	284,845,961,176.00	377,423,159,979.00	350,480,927,954.00	413,189,275,166.00	391,186,181,468.00	18.61%	16.92%
a	Pendapatan Hibah	19,395,000,000.00	19,000,000,000.00	9,932,700,000.00	10,223,786,137.00	76,114,794,960.00	72,865,121,833.00	102,577,559,400.00	86,297,776,271.00	139,113,946,095.00	119,974,392,226.00	171.98%	155.99%
b	Dana Bagi hasil pajak dari Prov Pemerintah daerah lainnya	53,459,000,374.00	52,656,790,374.00	52,679,339,894.00	56,813,212,791.00	63,623,925,492.00	57,274,472,343.00	70,274,416,579.00	67,930,451,683.00	61,724,300,071.00	58,860,760,242.00	4.40%	3.49%
c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	117,965,690,000.00	117,965,690,000.00	154,021,857,000.00	154,021,857,000.00	154,706,367,000.00	154,706,367,000.00	196,252,700,000.00	196,252,700,000.00	212,351,029,000.00	212,351,029,000.00	16.52%	16.52%
d	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	23,590,000,000.00	21,330,000,000.00	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00	19,124,920,000.00	-	8,318,484,000.00	-	-	-		

Sumber Data : BPKD Pesisir Selatan Tahun 2021.

Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Target Pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan per tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan kinerja positif dimana rata-rata pertumbuhan per tahunnya 2,02% atau naik dari tahun 2016 sebesar Rp1.577.041.581.597,00 menjadi Rp1.698.028.198.430,00 pada tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan Target Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah per tahun adalah 12,28% atau naik dari tahun 2016 sebesar Rp111.662.402.223,00 menjadi Rp152.636.474.688,00 pada tahun 2020. Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar 2,18% atau menurun dari tahun 2016 sebesar Rp1.250.969.489.000,00 menjadi sebesar Rp1.105.649.823.074,00 pada tahun 2020 dan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan kinerja positif yaitu sebesar 18,61% atau meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp214.409.690.374,00 menjadi sebesar Rp391.186.181.468,00 pada tahun 2020.

Gambar 3.3.
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020 (Rp Juta)



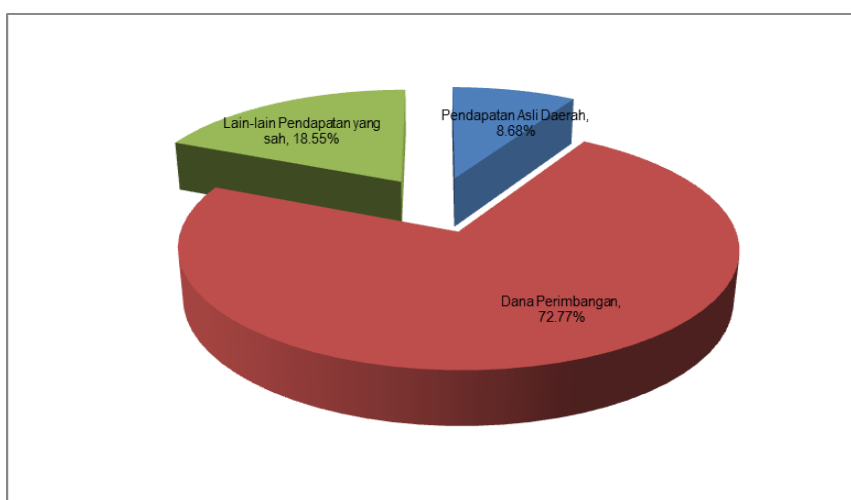
Sumber Data : BPKD Pesisir Selatan Tahun 2021.

Jika dilihat dari sisi realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kenaikan yaitu dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 2,97% atau naik dari tahun 2016 sebesar Rp1.457.940.857.432,74 menjadi sebesar Rp1.629.588.564.634,45 pada tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah per tahun sebesar 10,10% atau naik dari tahun 2016 sebesar Rp108.915.294.627,74 menjadi sebesar Rp132.752.560.092,45 tahun 2020. Rata-rata

pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan per tahun mengalami penurunan sebesar 0,53% atau menurun dari tahun 2016 sebesar Rp1.138.073.082.431,00 menjadi sebesar Rp1.105.649.823.074,00 tahun 2020. Sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah per tahun adalah 16,92% atau meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp210.952.480.374,00 menjadi sebesar Rp391.186.181.468,00 pada tahun 2020.

Adapun dari sisi realisasi pendapatan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat bahwa komposisi komponen pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 8,68%, proporsi Dana Perimbangan sebesar 72,77% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 18,55% dari seluruh realisasi total pendapatan. Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan daerah dalam kurun waktu waktu 2016-2020 dapat kita lihat dari Gambar di bawah ini :

Gambar 3.4.
Rata-rata Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber Data : BPKD Pesisir Selatan Tahun 2021.

Rata-rata proporsi target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari berbagai komponen sumber pendapatannya per tahun dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3.
Rata-Rata Proporsi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Rata-Rata Proporsi	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	PENDAPATAN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.08	7.47	12.10	11.76	9.33	8.10	8.68	7.93	8.99	8.15	9.24	8.68
a	Pendapatan Pajak Daerah	10.83	12.59	7.81	11.11	17.77	19.17	17.76	17.65	18.97	15.41	14.63	15.19
b	Pendapatan Retribusi Daerah	6.32	4.88	3.35	2.10	9.80	3.67	8.77	4.11	7.07	2.33	7.06	3.42
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4.54	4.66	4.06	3.04	3.81	4.61	5.45	6.23	6.31	7.26	4.83	5.16
d	Lain-lain PAD yang Sah	78.31	77.87	84.78	83.75	68.62	72.55	68.01	72.01	67.65	75.00	73.47	76.24
B	DANA PERIMBANGAN	79.32	78.06	73.40	73.22	71.19	73.27	70.03	71.44	66.68	67.85	72.12	72.77
a	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil bukan pajak	1.46	1.59	2.19	2.05	2.53	1.53	1.76	1.60	2.03	1.20	1.99	1.59
b	Dana Alokasi Umum (DAU)	68.19	74.96	74.16	75.56	73.17	74.80	69.48	71.07	69.98	70.91	71.00	73.46
c	Dana Alokasi Khusus (DAK)	30.34	23.45	23.65	22.40	24.29	23.67	28.76	27.33	27.99	27.88	27.01	24.95
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	13.60	14.47	14.50	15.03	19.49	18.63	21.29	20.63	24.33	24.01	18.64	18.55
a	Pendapatan Hibah	9.05	9.01	4.45	4.49	24.27	25.58	27.18	24.62	33.67	30.67	19.72	18.87
b	Dana Bagi hasil pajak dari Prov Pemerintah daerah lainnya	24.93	24.96	23.60	24.96	20.29	20.11	18.62	19.38	14.94	15.05	20.48	20.89
c	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	55.02	55.92	69.00	67.65	49.34	54.31	52.00	56.00	51.39	54.28	55.35	57.63
d	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	11.00	10.11	2.96	2.90	6.10	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	4.45	2.60

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga sumber Pendapatan Daerah tersebut maka pendapatan daerah yang berasal dari dana Perimbangan merupakan penyumbang dana terbesar bagi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini menunjukkan besar ketergantungan Kabupaten Pesisir Selatan terhadap sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, tingkat kemandirian daerah masih rendah dibandingkan dengan tingkat ketergantungan yang terhadap pemerintah pusat. Sumber pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan berikutnya yang berkontribusi besar adalah berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dan kemudian Pendapatan Asli Daerah dengan kontribusi paling kecil.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk lebih memberdayakan daerah dalam menghasilkan sumber pendapatan, maka Kabupaten Pesisir Selatan akan terus berupaya dan mengoptimalkannya agar dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik. Peran Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dari 6,91 persen pada tahun 2016 menjadi 8,42 persen pada tahun 2020. Sebaliknya Kontribusi dana perimbangan menurun dari 78,06 persen pada tahun 2016 menjadi 67,85 persen pada tahun 2020. Penyebab utama penurunannya karena berkurangnya pendapatan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Sedangkan peranan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu sebesar 14,47 persen di tahun 2016 menjadi 18,55 persen di tahun 2020.

Meskipun terjadi kenaikan Pendapatan Daerah secara umum dari berbagai sumber selama periode 2016-2020, namun mampu memenuhi dan menutupi kebutuhan belanja daerah karena adanya kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah. Kinerja pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan agar capaian rata-rata pertumbuhan dapat direalisasikan dengan baik dan maksimal. Terutama terhadap proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah masih relatif kecil sehingga diperlukan kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar tingkat ketergantungan dengan Dana Perimbangan secara berangsur-angsur dapat dikurangi.

Berikut ini dapat dijelaskan perkembangan komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu lima tahun 2016 sampai dengan 2020.

a. Pendapatan Asli Daerah

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

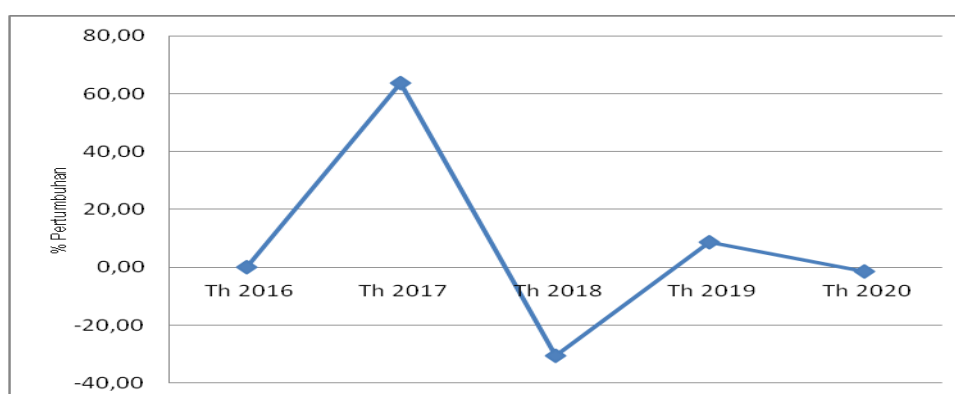
Tabel 3.4.
Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2016	111.662.402.223,00	108.915.294.627,74	97,54	0,00
2	2017	186.253.728.401,00	178.145.381.104,05	95,65	63,56
3	2018	150.064.411.839,00	123.906.524.443,36	82,57	-30,45
4	2019	153.941.080.200,00	134.804.594.146,43	87,57	8,8
5	2020	152.636.474.688,00	132.752.560.092,45	86,97	-1,52

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun yaitu dari 97,54 persen pada tahun 2016 menurun menjadi 86,97 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa target PAD yang telah ditetapkan tidak bisa tercapai secara maksimal. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih serius dalam menangani masalah ini. Kalau dilihat dari sudut pandang pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah juga terjadi kecenderungan penurunan dimana penurunan yang paling drastis terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 30,45 persen. Selanjutnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 dapat digambarkan melalui grafik dibawah ini:

Gambar 3.5.
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Berdasarkan gambar 3.5. tersebut dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2017 yaitu sebesar 63,56 persen dan turun drastis menjadi minus 30,45 persen pada tahun 2018. Tetapi pada tahun 2019 kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,8 persen. Hal ini menunjukkan kinerja Pendapatan Asli Daerah sudah mulai positif. Namun karena terjadinya pandemi covid-19 kinerja Pendapatan Asli Daerah kembali menunjukkan kinerja negatif yaitu sebesar 1,52 persen.

Rata-rata proporsi target dan realisasi Pendapatan asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan per tahun dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut ini :

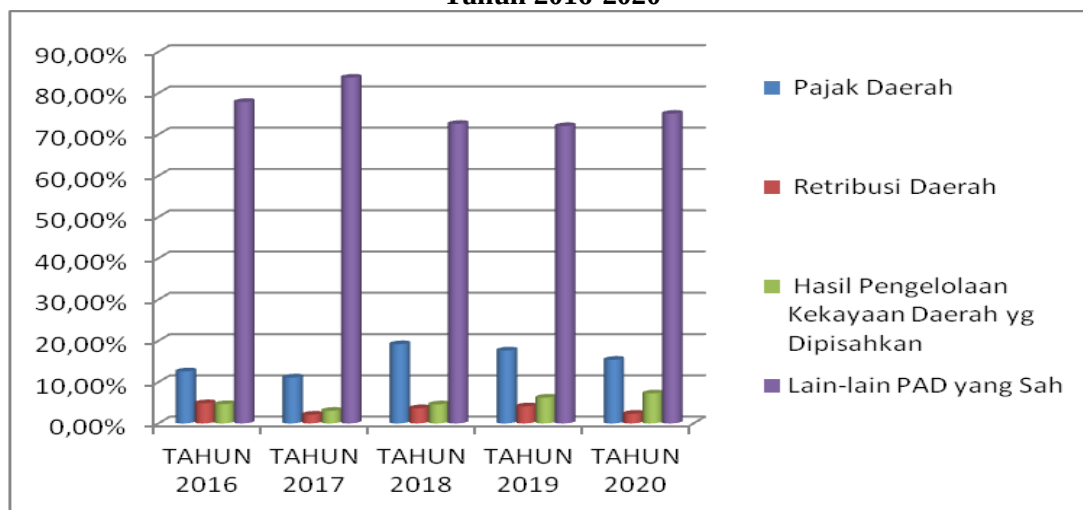
Tabel 3.5.
Rata-Rata Proporsi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Rata-Rata Proporsi	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	PENDAPATAN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.08	7.47	12.10	11.76	9.33	8.10	8.68	7.93	8.99	8.15	9.24	8.68
a	Pendapatan Pajak Daerah	10.83	12.59	7.81	11.11	17.77	19.17	17.76	17.65	18.97	15.41	14.63	15.19
b	Pendapatan Retribusi Daerah	6.32	4.88	3.35	2.10	9.80	3.67	8.77	4.11	7.07	2.33	7.06	3.42
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4.54	4.66	4.06	3.04	3.81	4.61	5.45	6.23	6.31	7.26	4.83	5.16
d	Lain-lain PAD yang Sah	78.31	77.87	84.78	83.75	68.62	72.55	68.01	72.01	67.65	75.00	73.47	76.24

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari tabel 3.5. diatas dapat dilihat bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah meningkat dari 7,47 persen pada tahun 2016 menjadi 8,15 persen pada tahun 2020. Untuk komponen PAD yaitu Pajak Daerah meningkat dari 12,59 persen pada tahun 2016 menjadi 15,41 persen pada tahun 2020 dengan rata-rata proporsi per tahunnya sebesar 15,19 persen. Untuk Retribusi Daerah proporsinya cenderung turun yaitu 4,88 persen pada tahun 2016 menjadi 2,33 persen di tahun 2020 dengan rata-rata proporsi per tahunnya sebesar 3,42 persen. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan cenderung naik dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2016 sebesar 4,66 persen naik menjadi 7,26 persen pada tahun 2020 dengan rata-rata proporsi per tahunnya sebesar 5,16 persen. Kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah ini adalah berasal dari lain-lain PAD yang sah dengan kecenderungan proporsinya berfluktuatif tiap tahunnya dari tahun 2016 sebesar 77,87 persen menjadi 75,00 persen pada tahun 2020 dengan rata-rata proporsi per tahunnya sebesar 76,24 persen.

Gambar 3.6.
Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami kecenderungan meningkat berasal dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan walaupun proporsinya lebih sedikit dari komponen lainnya. Proporsi terbesar pajak daerah berada pada tahun 2018, retribusi daerah pada tahun 2016, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2018 dan Lain-lain PAD yang sah proporsi terbesarnya berada pada tahun 2017.

Target dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.6. dibawah ini :

Tabel 3.6.
Realisasi Target Pajak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020

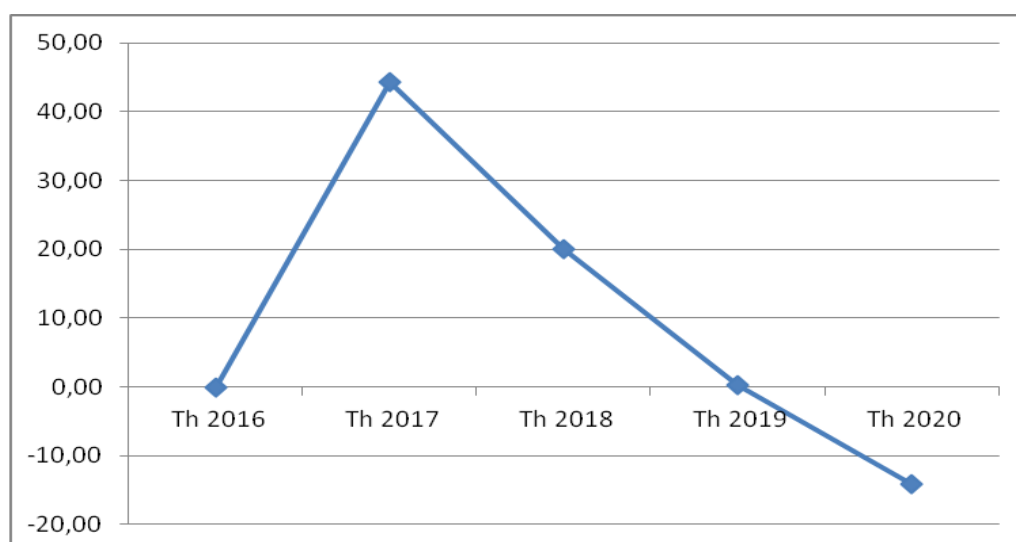
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2016	12.095.285.698,00	13.712.844.614,10	113,37	0,00
2	2017	14.548.585.698,00	19.794.773.402,20	136,06	44,35
3	2018	26.673.886.943,00	23.751.789.554,97	89,05	19,99
4	2019	27.337.210.782,00	23.797.657.254,87	87,05	0,19
5	2020	28.949.287.406,00	20.454.008.648,00	70,65	-14,05

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari tabel 3.6. diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan untuk pendapatan pajak daerah ini cenderung naik tiap tahunnya yaitu sebesar Rp12.095.285.698,00 pada tahun 2016 menjadi Rp28.949.287.406,00 pada tahun 2020, hal ini diharapkan agar capaiannya juga meningkat setiap tahunnya. Tapi nyatanya

hanya pada tahun 2016 dan 2017 saja yang capaiannya melebihi target 100% yaitu 113,37 persen untuk tahun 2016 dan 136,06 persen untuk tahun 2017. Penurunan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2020 dengan capaiannya hanya 70,65 persen dan tingkat pertumbuhannya menurun sebesar 14,05 persen. Penurunan pendapatan pajak pada tahun 2020 terjadi hampir disemua komponen pajak daerah. . Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang mana adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar dengan menutup semua tempat wisata dan membatasi jumlah pengunjung pada rumah makan, pasar dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya yang akan mengakibatkan kerumunan massa. Kebijakan tersebut banyak mempengaruhi sektor pariwisata, perdagangan dan transportasi yang memberikan kontribusi terbesar bagi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah.

Gambar 3.7.
Pertumbuhan Pajak Daerah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari gambar 3.7. di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Pajak Daerah menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 44,35 persen pada tahun 2017 dan 19,99 persen pada tahun 2018 sedangkan untuk tahun 2019 cenderung mendekati dasar yaitu sebesar 0,19 persen. Sedangkan pada tahun 2020 menunjukkan penurunan karena pengaruh adanya pandemi covid-19 dengan pertumbuhan berkurang sebesar 14,05 persen.

Selanjutnya Target dan realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.7. berikut ini :

Tabel 3.7.
Realisasi Target Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020

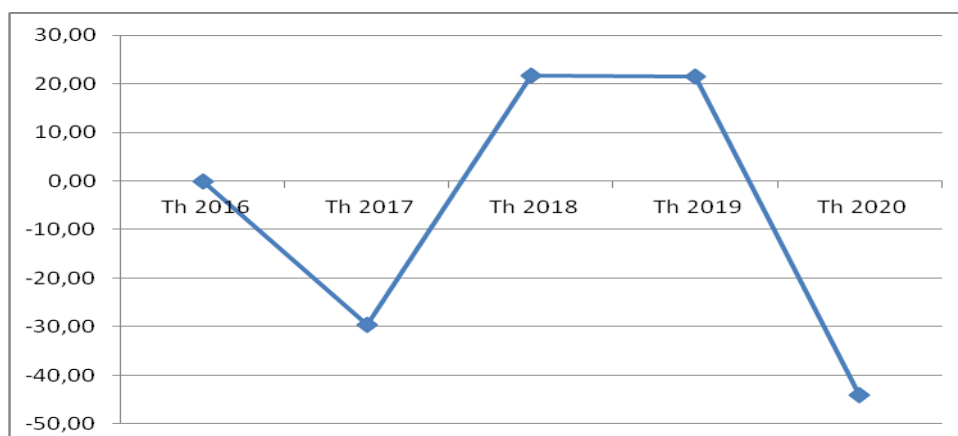
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2016	7.053.756.000,00	5.315.801.100,00	75,36	0,00
2	2017	6.248.364.000,00	3.739.647.501,00	59,85	-29,65
3	2018	14.707.948.300,00	4.552.508.117,00	30,95	21,74
4	2019	13.505.569.321,00	5.535.119.147,00	40,98	21,58
5	2020	10.793.229.391,00	3.096.510.273,00	28,69	-44,06

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa realisasi retribusi daerah berfluktuatif tiap tahunnya dengan capaian tertinggi berada pada tahun 2016 yaitu sebesar 75,36 persen dengan realisasinya sebesar Rp5.315.801.100,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.053.756.000,00. Dan capaian terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 28,69 persen dengan target sebesar Rp10.793.229.391,00 dengan hanya bisa terealisasi sebesar Rp3.096.510.273. Hal ini menunjukkan pertumbuhannya di tahun 2020 tersebut minus 44,06 persen. Penyebabnya utamanya adalah dampak pandemi Covid-19 yang melanda dunia, dimana Pemerintah Pusat mengambil kebijakan dengan meniadakan semua pungutan retribusi daerah untuk mengurangi pengeluaran masyarakat dengan tujuan dapat menjaga stabilitas ekonomi selama pandemi.

Selain Dampak dari Covid-19 pada tahun 2020, rendahnya pertumbuhan retribusi ini juga disebabkan karena komponen retribusi pelayanan kesehatan khususnya yang berasal dari penerimaan retribusi Rumah Sakit Daerah yang dialihkan dari pos penerimaan retribusi daerah menjadi pos penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah. Realisasi pertumbuhan retribusi daerah di tahun 2018 dan 2019 mengalami pertumbuhan yang hampir sama yaitu sebesar 21,74 persen dan 21,58 persen dengan capaian sebesar 30,95 persen dan 40,98 persen.

Gambar 3.8.
Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari gambar 3.8. diatas dapat dianalisa bahwa retribusi daerah menunjukkan kinerja positif pada tahun 2018 dan 2019 dengan pertumbuhan yang hampir sama. Dan pada tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan yang menurun yaitu sebesar 29,65 persen. Pada tahun 2020 menunjukkan penurunan yang drastis yaitu sebesar 44,06 persen.

Target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.8. dibawah ini :

Tabel 3.8.
Realisasi Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

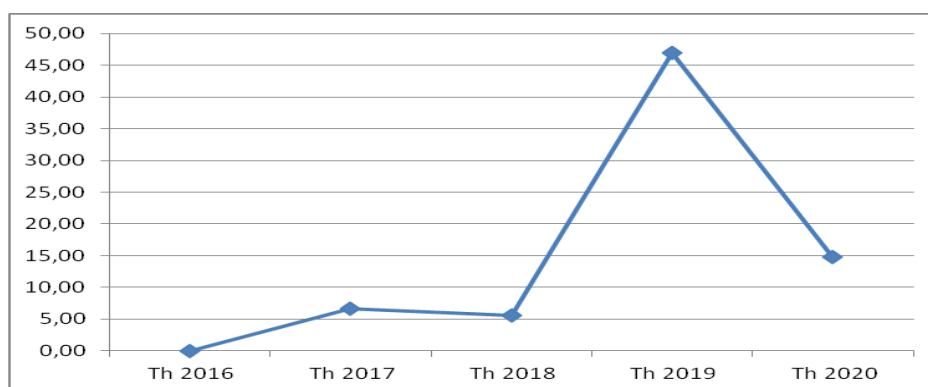
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2016	5.070.336.669,00	5.075.232.597,00	100,1	0,00
2	2017	7.557.876.122,00	5.410.693.493,00	71,59	6,61
3	2018	5.711.160.313,00	5.711.160.313,00	100	5,55
4	2019	8.395.930.840,00	8.395.930.840,00	100	47,01
5	2020	9.632.288.482,00	9.632.288.482,00	100	14,73

Sumber : LKPD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari tabel 3.8. diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020, target dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai kinerja yang positif dan sangat baik, hal ini dibuktikan dengan kenaikan target berbanding lurus dengan kenaikan realisasinya, bahkan pada tahun 2016 capaian realisasi melebihi target yaitu mencapai angka 100,10 persen. Hanya di tahun 2017

capaiannya berada dibawah 100 persen yaitu sebesar 71,59 persen dengan target sebesar Rp7.557.876.122,00 dan realisasinya sebesar Rp5.410.693.493,00. Realisasi untuk tahun 2018 sampai tahun 2020 mempunyai capaian yang sempurna yaitu sebesar 100 persen. Kontribusi PAD yang berasal dari BUMD ini berasal dari Bank Nagari dan BPR Samudra, sementara BUMD lain belum memberi kontribusi yang berarti.

Gambar 3.9.
Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020



Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari gambar 3.9. diatas dapat dijelaskan bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 47,01 persen. Pertumbuhan di tahun 2017 dan tahun 2018 hampir mendekati sama yaitu sebesar 6,61 persen dan 5,55 persen. Setelah mengalami pertumbuhan yang tinggi di tahun 2019, pada tahun 2020 pertumbuhannya kembali turun drastis menjadi 14,73 persen.

Target dan realisasi Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini :

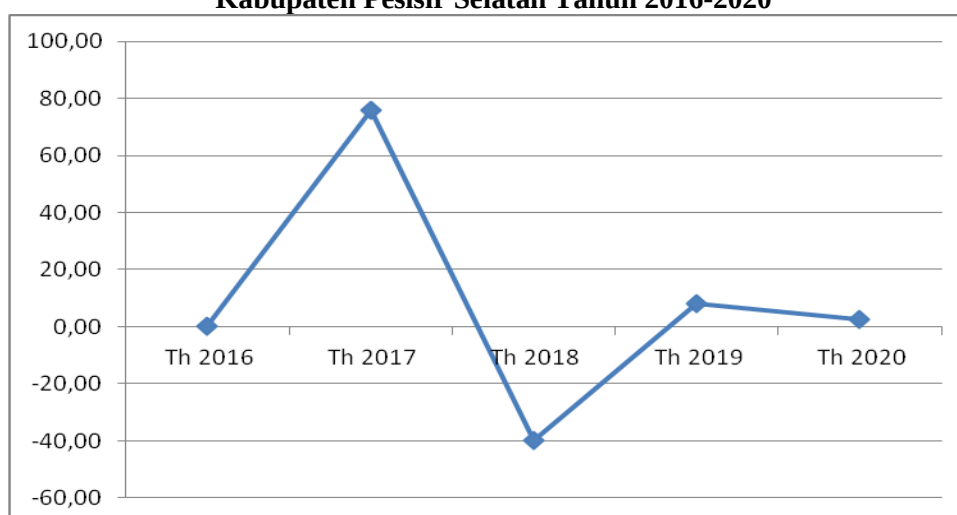
Tabel 3.9
Realisasi Target Lain-lain PAD Yang Sah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2016	87.443.023.856,00	84.811.416.316,64	96,99	0,00
2	2017	157.898.902.581,00	149.200.266.707,85	94,49	75,92
3	2018	102.971.416.283,00	89.891.066.458,39	87,3	-39,75
4	2019	104.702.369.257,00	97.075.886.904,56	92,72	7,99
5	2020	103.261.669.409,00	99.569.752.689,45	96,42	2,57

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2016 sampai tahun 2020, target lain-lain PAD yang Sah mempunyai target tertinggi berada pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp157.898.902.581,00 dengan realisasi yang juga melonjak tinggi dikarenakan pada tahun tersebut terjadi perubahan perlakuan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana awalnya diperlakukan sebagai pendapatan Hibah, tetapi tahun 2017 diberlakukan sebagai lain-lain PAD yang sah. Namun tahun 2019 diubah kembali menjadi pendapatan hibah. Target terendah berada pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp87.443.023.856,00 dengan capaian realisasi sebesar 96,99 persen yaitu realisasinya sebesar Rp84.811.416.316,64. Tetapi capaian terendah berada pada tahun 2018 yaitu sebesar 87,30 persen dengan target sebesar Rp102.971.416.283,00 dan realisasinya sebesar Rp89.891.066.458,39.

Gambar 3.10.
Pertumbuhan Lain-Lain PAD yang Sah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020



Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari gambar 3.10. diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2016 sampai tahun 2020, pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu dengan pertumbuhan 75,92 persen dan pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar minus 39,75 persen. Penyebab tinggi nya pertumbuhan pada tahun 2017 adalah karena pencatatan pendapatan yang berasal dari BOS dicatat pada komponen ini sedangkan pertumbuhan paling rendah di Tahun 2018 adalah disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan pada hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp350.000.000,- serta rendahnya capaian target pada jasa giro kas daerah yang hanya tercapai sebesar 35,08%.

b. Dana Perimbangan

Target dan realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.10.
Realisasi Target Dana Perimbangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

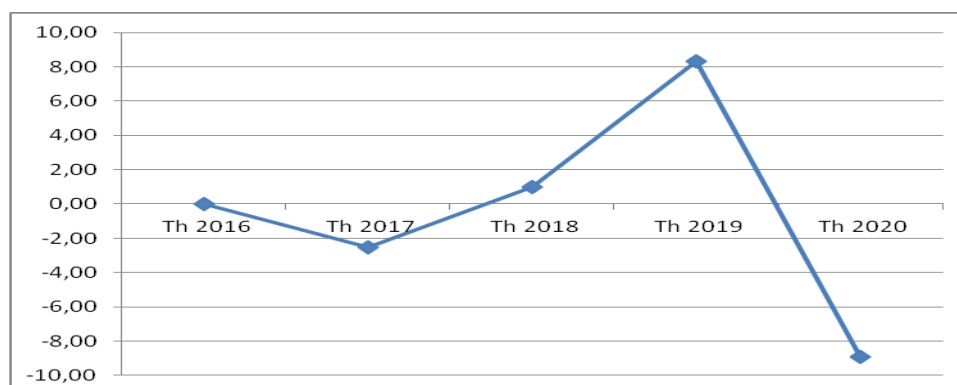
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2016	1.250.969.489.000,00	1.138.073.082.431,00	90,98	0,00
2	2017	1.130.054.483.211,00	1.109.254.189.839,00	98,16	-2,53
3	2018	1.145.399.229.643,00	1.120.389.365.019,00	97,82	1,00
4	2019	1.241.343.355.079,00	1.213.725.540.008,00	97,78	8,33
5	2020	1.132.202.448.576,00	1.105.649.823.074,00	97,65	-8,90

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari tabel 3.10. diatas terlihat bahwa dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2020 capaian Dana Perimbangan tertinggi ada pada tahun 2017 yaitu sebesar 98,16 persen dengan target sebesar Rp1.130.054.483.211,99 dan realisasi sebesar Rp1.109.254.189.839,00. Dan capaian terendah terjadi pada tahun 2016 dengan capaian 90,98 persen dengan target sebesar Rp1.250.969.489.000,00 dan realisasinya sebesar Rp1.138.073.082.431,00. Sedangkan untuk tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 capaian realisasi terhadap target nya hampir sama yaitu 97,82 persen, 97,78 persen dan 97,65 persen untuk tahun 2020. Jika dilihat dari sisi target dan realisasi, maka target dan realisasi dana perimbangan mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya refocusing dana transfer pusat ke daerah akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020.

Dari gambar 3.11. di bawah ini dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2020, Dana perimbangan mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 8,33 persen dan pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 8,90 persen. Hal ini terjadi karena adanya refocusing dana transfer pusat ke daerah akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020.

Gambar 3.11
Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah)

Selanjutnya dapat dilihat rata-rata proporsi target dan realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pesisir Selatan per tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di bawah ini :

Tabel 3.11.
Rata-Rata Proporsi Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020

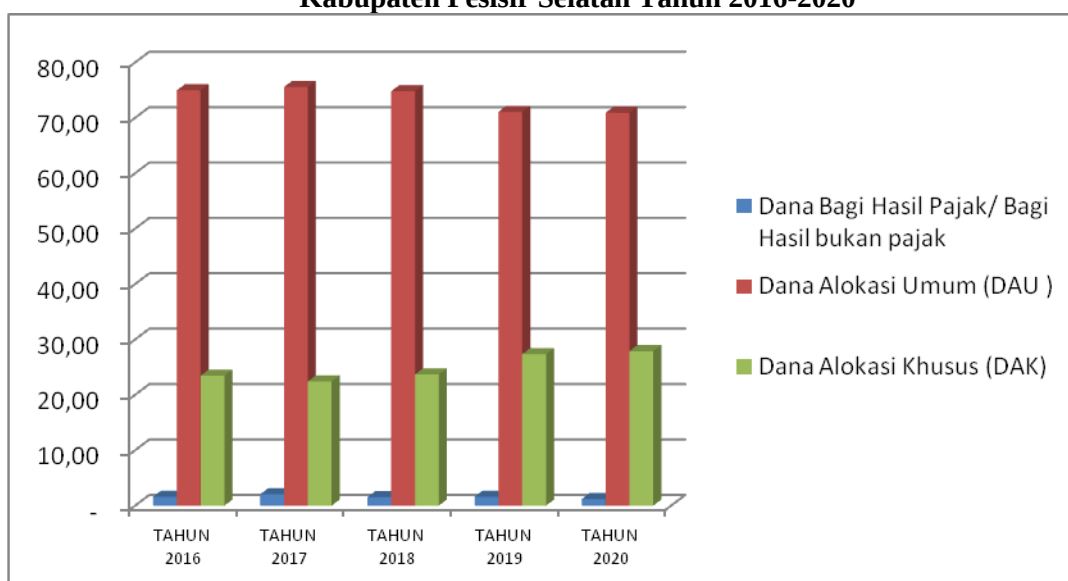
NO	URAIAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Rata-Rata Proporsi	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.2	DANA PERIMBANGAN	79.32	78.06	73.40	73.22	71.19	73.27	70.03	71.44	66.68	67.85	72.12	72.77
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil bukan pajak	1.46	1.59	2.19	2.05	2.53	1.53	1.76	1.60	2.03	1.20	1.99	1.59
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	68.19	74.96	74.16	75.56	73.17	74.80	69.48	71.07	69.98	70.91	71.00	73.46
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	30.34	23.45	23.65	22.40	24.29	23.67	28.76	27.33	27.99	27.88	27.01	24.95

Sumber : LKPD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah)

Dari tabel 3.11 diatas dapat dilihat bahwa proporsi Dana Perimbangan menurun dari 78,06 persen pada tahun 2016 menjadi 67,85 persen pada tahun 2020. Untuk komponen Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Paak/Bagi Hasil Bukan Pajak menurun dari 1,59 persen pada tahun 2016 menjadi 1,20 persen pada tahun 2020 dengan rata-rata proporsi per tahunnya sebesar 1,59 persen. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) proporsinya juga turun yaitu 74,96 persen pada tahun 2016 menjadi 70,91 persen di tahun 2020 dengan rata-rata proporsi per tahunnya sebesar 73,46 persen. Sedangkan untuk Dana alokasi Khusus (DAK) lebih cenderung naik dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2016 sebesar 23,45 persen naik menjadi 27,88 persen pada tahun 2020 dengan rata-rata proporsi per tahunnya sebesar 24,95 persen. Kalau dilihat secara keseluruhan bahwa dana perimbangan ini mengalami penurunan pada tahun 2020 baik

dari target maupun realisasinya. Kecenderungan penurunan ini sangat besar dipengaruhi oleh adanya refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Gambar 3.12.
Proporsi Dana Perimbangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020



Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Berdasarkan gambar 3.12 diatas dapat dilihat bahwa proporsi DAU pada dana perimbangan memberikan kontribusi paling besar setiap tahunnya dalam membiayai belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12.
Realisasi Target Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

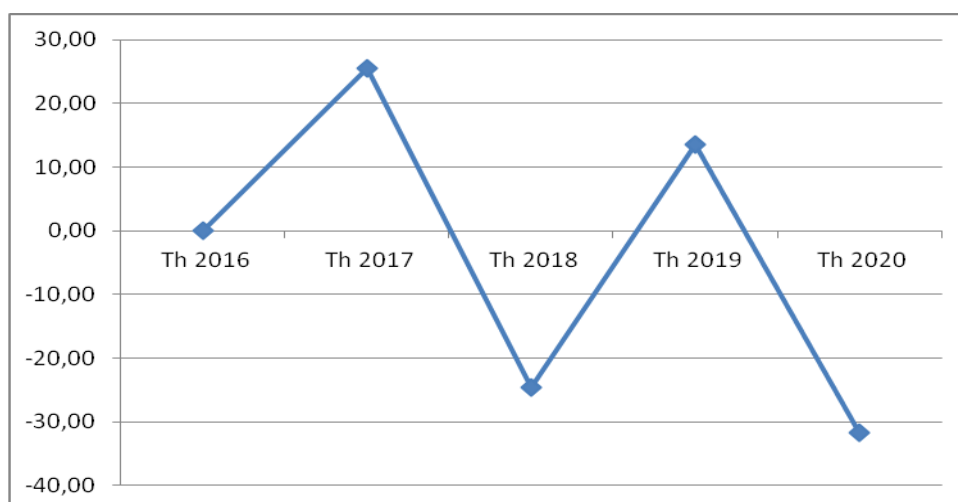
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2016	18.277.245.000,00	18.097.698.530,00	99,02	0,00
2	2017	24.716.936.211,00	22.703.709.356,00	91,85	25,45
3	2018	29.027.148.643,00	17.129.540.309,00	59,01	-24,55
4	2019	21.787.979.079,00	19.442.960.426,00	89,24	13,51
5	2020	22.975.499.938,00	13.289.192.614,00	57,84	-31,65

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Berdasarkan tabel 3.12. diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung berfluktuatif. Yang mana capaian tertinggi yaitu 99,02 persen yang ada di tahun 2016 dan terendahnya berada pada tahun 2020. Hal ini di pengaruhi oleh adanya

pandemi covid-19 yang membuat dana ini sangat jauh realisasinya dari yang diharapkan.

Gambar 3.13
Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020



Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dari kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pertumbuhan yang positif terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2019 yaitu sebesar 25,45 persen pada tahun 2017 dan 13,51 persen pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2018 dan tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar 24,55 persen dan 31,65 persen untuk tahun 2020.

Target dan realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dari tabel dibawah berikut ini :

Tabel 3.13.
Realisasi Target Dana Alokasi Umum
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

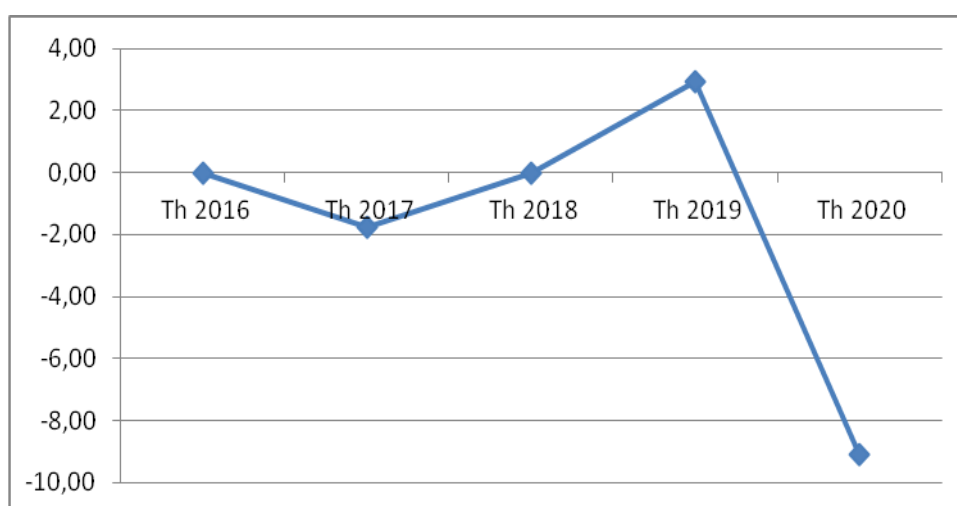
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2016	853.086.114.000,00	853.086.114.000,00	100,00	0,00
2	2017	838.100.134.000,00	838.100.134.000,00	100,00	-1,76
3	2018	838.100.134.000,00	838.100.134.000,00	100,00	0,00
4	2019	862.535.819.000,00	862.608.266.000,00	100,01	2,92
5	2020	792.358.743.000,00	784.053.203.000,00	98,95	-9,11

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari tabel 3.13. diatas dapat dilihat bahwa realisasi Dana Alokasi Umum dari kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu mencapai realisasi yang maksimal yaitu dengan capaian 100 persen dan hanya pada tahun 2020 capaian itu

menurun menjadi 98,95 persen. Realisasi Dana Alokasi Umum mengalami penurunan dari Rp853.086.114.000,00 pada tahun 2016 menjadi Rp784.053.203.000,00 pada tahun 2020. Begitu pula kalau dilihat dari sisi targetnya Dana Alokasi Umum ini mengalami penurunan dari tahun 2016 menuju tahun 2020 yaitu menurun dari Rp853.086.114.000,00 pada tahun 2016 menjadi Rp792.358.743.000,00 pada tahun 2020. Kecenderungan penurunan Dana Alokasi Umum ini lebih dipengaruhi oleh Kebijakan Pemerintah Pusat.

Gambar 3.14.
Pertumbuhan Dana Alokasi Umum
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020



Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah)

Dari gambar 3.14. diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebesar 100,01 persen dan terendah nya berada pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 9,11 persen. Sedangkan untuk tahun 2018 pertumbuhannya 0.00 persen karena target dan realisasi pada tahun 2017 sama dengan tahun 2018.

Target Dana Alokasi Khusus Kabupaten Pesisir Selatan selama periode Tahun 2016-2020 menurun dari Rp.379.606.130.000,00 pada tahun 2016 menjadi Rp.316.868.205.638,00 pada tahun 2020, tapi kalau dilihat dari segi capaiannya maka tahun 2020 mengalami capaian yang paling tinggi yaitu sebesar 97,30 persen dan capaian terendah berada pada tahun 2016. Tapi kalau dilihat dari segi pertumbuhannya pertumbuhan tertinggi. Target dan realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

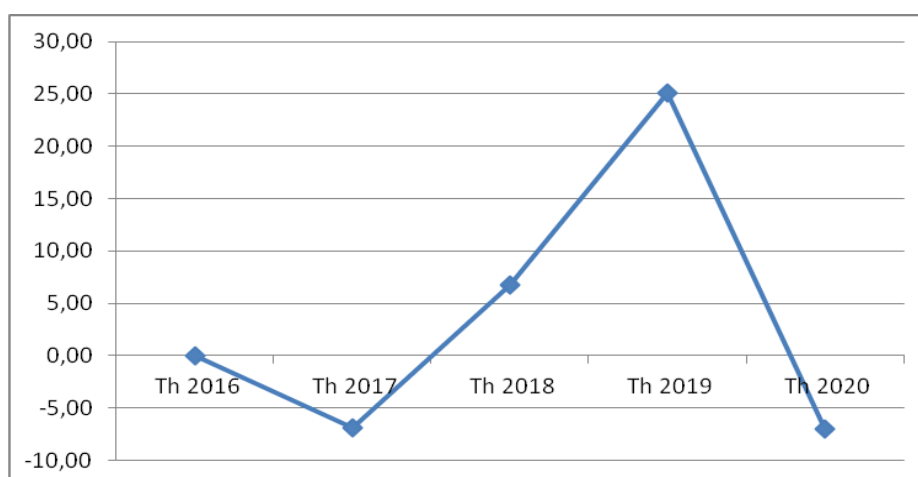
Tabel 3.14
Realisasi Target Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2016	379.606.130.000,00	266.889.269.901,00	70,31	0,00
2	2017	267.237.413.000,00	248.450.346.483,00	92,97	-6,91
3	2018	278.271.947.000,00	265.159.690.710,00	95,29	6,73
4	2019	357.019.557.000,00	331.674.313.582,00	92,90	25,08
5	2020	316.868.205.638,00	308.307.427.460,00	97,30	-7,05

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Selanjutnya dapat dilihat Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada _able 3.15. berikut ini :

Gambar 3.15.
Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020



Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Dana Alokasi Khusus dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 berfluktuatif. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini ditentukan dari formula dan bidang atau urusan pusat yang dilaksanakan oleh daerah. Akibatnya, penerimaan DAK juga berfluktuasi selama periode 2016-2020 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,46 persen per tahun. Pertumbuhan terbesar DAK terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 25,08 persen, karena pada tahun ini sebagian belanja dialihkan dalam bentuk penerimaan DAK dan belanjanya dianggarkan dalam APBD sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementrian/ lembaga terkait.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

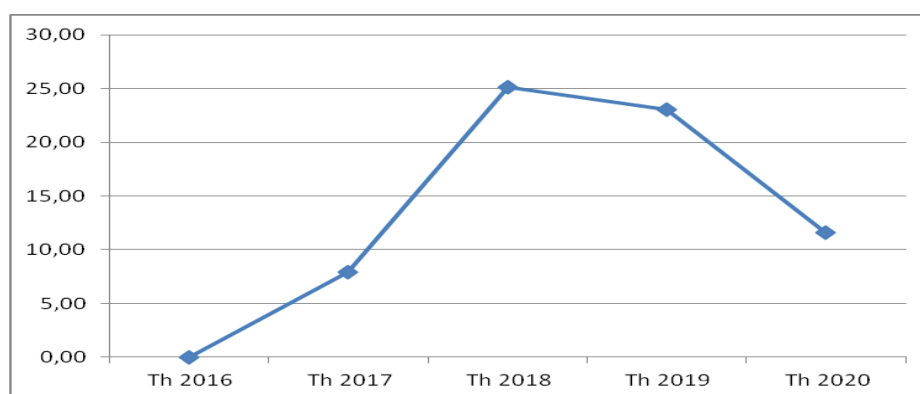
Tabel 3.15.
Realisasi Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2016	214.409.690.374,00	210.952.480.374,00	98.39	0,00
2	2017	223.233.896.894,00	227.658.855.928,00	101.98	7,92
3	2018	313.570.007.452,00	284.845.961.176,00	90.84	25,12
4	2019	377.423.159.979,00	350.480.927.954,00	92.86	23,04
5	2020	413.189.275.166,00	391.186.181.468,00	94.67	11,61

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari tabel 3.15. diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif yaitu dengan capaian terendah berada pada tahun 2018 yaitu sebesar 90,84 persen dengan nilai realisasi sebesar Rp284.845.961.176,00 dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 101,98 persen dengan nilai realisasi sebesar Rp227.658.855.928,00. Kecenderungan tercapainya target dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dipengaruhi oleh besarnya proporsi yang diterima oleh Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan dari Pemerintah Pusat melalui dana penyesuaian dan dari Pemerintah Provinsi melalui Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020 dijelaskan sebagai berikut.

Gambar 3.16.
Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020



Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari gambar 3.16. diatas dapat dilihat bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pesisir Selatan selama periode Tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup baik, yaitu sebesar 16,92 persen per tahun,. Namun jika dilihat pertumbuhan setiap tahunnya terjadi fluktuasi pertumbuhan, yang mana fluktuasi pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2018 yaitu sebesar 25,12 persen dan terendahnya berada pada tahun 2017 yaitu sebesar 7,92 persen. Pertumbuhan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang befluktuatif ini disebabkan oleh proporsi yang didapat berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap Daerah.

B. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, kinerja belanja daerah pada periode 5 tahun kebelakang (2016-2020) dapat diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh sebab itu, pelaksanaan belanja langsung bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Komponen belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Realisasi target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.16. berikut ini :

Tabel 3.16.
Realisasi Target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020

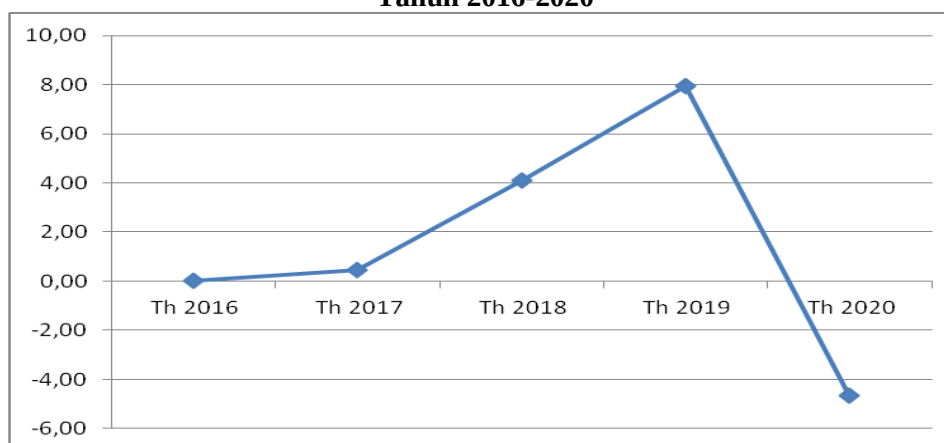
No	Tahun	Target Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
1	2016	1.799.424.409.818,85	1.500.649.148.344,62	83,40	0,00
2	2017	1.683.578.202.919,97	1.507.465.766.623,04	89,54	0,45
3	2018	1.737.442.460.796,00	1.569.020.950.588,95	90,31	4,08
4	2019	1.846.923.981.831,39	1.693.639.523.836,71	91,70	7,94
5	2020	1.704.269.461.248,61	1.614.555.388.580,17	94,74	-4,67

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 - 2020 (data diolah).

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang artinya capaian realisasi dibawah 100%. Kalau dilihat dari segi targetnya maka target Belanja daerah dari kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan yaitu dari Rp1.799.424.409.818,85 menjadi Rp1.704.269.461.248,61 pada tahun 2020. Tapi kalau dilihat dari sisi realisasinya maka Belanja Daerah terjadi kenaikan dari kurun waktu 2016-2020 tersebut yaitu sebesar Rp1.500.649.148.344,62 pada tahun 2016 menjadi Rp1.614.555.388.580,17 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan terjadinya kenaikan pada capaian realisasi Belanja Daerah yaitu 83,40 persen pada tahun 2016 menjadi 94,74 persen di tahun 2020. Capaian kinerja Belanja Daerah dibawah 100% dipengaruhi oleh adanya perubahan regulasi yang menyebabkan ada kegiatan yang tidak terlaksana.

Pada Gambar 3.17. berikut ini dapat dilihat pertumbuhan belanja daerah tahun 2016 – 2020:

Gambar 3.17
Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Berdasarkan gambar 3.17 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung naik dengan kenaikan pertumbuhan terbaik berada pada tahun 2019, yaitu sebesar 7,94 persen dan pada tahun 2020 pertumbuhan Belanja Daerah ini drastis turun sebesar minus 4,67 persen. Berkurangnya pertumbuhan Belanja Daerah pada Tahun 2020 disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang memaksa pemerintah daerah melakukan banyak pembatasan aktivitas masyarakat. Hal ini merupakan penerapakan kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam upaya penanganan wabah agar tidak menyebar. Dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat seperti pemberlakuan bekerja dari rumah dan sekolah dengan system *daring*. Pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak di sepanjang tahun 2020.

Pertumbuhan target Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan kinerja negatif dimana rata-rata pertumbuhan per tahunnya minus 1,17 persen atau menurun dari tahun 2016 sebesar Rp1.799.424.409.818,85 menjadi Rp1.704.269.461.248,61 pada tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan target Belanja yang berasal dari Belanja Tidak Langsung per tahun adalah minus 1,19 persen atau menurun dari tahun 2016 sebesar Rp1.127.730.237.385,85 menjadi Rp1.053.582.361.124,78 pada tahun 2020. Sedangkan rata-rata pertumbuhan untuk Belanja Langsung adalah 0,42 persen atau naik dari tahun 2016 sebesar Rp671.694.172.433,00 menjadi Rp592.058.882.458,37 di tahun 2020

Perkembangan target, realisasi dan pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 3.17
Persentase Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Rata-Rata Pertumbuhan	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	BELANJA	1,799,424,409,818.85	1,500,649,148,344.62	1,683,578,202,919.97	1,507,465,766,623.04	1,737,442,460,796.00	1,569,020,950,588.95	1,846,923,981,831.39	1,693,639,523,836.71	1,704,269,461,248.61	1,614,555,388,580.17	-1.17	1.95
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,127,730,237,385.85	956,030,973,817.62	930,758,530,908.47	894,945,857,802.44	960,102,208,847.04	928,226,678,152.00	985,638,835,120.09	967,438,547,374.71	1,053,582,361,124.78	1,022,496,506,121.80	-1.19	1.81
a	Belanja Pegawai	897,935,220,621.32	731,128,161,449.00	672,330,697,488.27	639,610,768,525.00	693,145,740,228.44	667,419,910,236.00	699,522,842,452.19	686,697,622,113.00	688,220,167,932.52	673,800,435,343.00	-5.68	-1.79
b	Belanja Bunga	4,905,000,000.00	2,810,847,752.00	3,105,000,000.00	3,103,489,064.00	3,160,399,820.00	1,926,710,628.00	1,371,872,644.00	1,019,584,696.00	457,290,882.00	170,241,442.00	-39.54	-39.47
c	Belanja Hibah	13,748,440,000.00	13,461,518,000.00	13,544,100,000.00	12,798,262,600.00	13,695,750,000.00	12,137,850,000.00	17,607,318,502.00	15,945,825,725.00	61,700,181,085.00	60,271,131,085.00	69.65	74.81
d	Belanja Bantuan Sosial	200,000,000.00	113,395,000.00	150,000,000.00	105,830,500.00	1,175,000,000.00	1,123,750,000.00	200,000,000.00	176,500,000.00	950,000,000.00	84,000,000.00	237.59	204.62
e	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3,057,610,058.53	2,036,077,534.00	4,266,008,558.10	3,547,336,617.34	5,246,020,860.00	3,445,112,986.00	5,877,729,951.90	3,153,892,970.77	4,677,359,196.46	886,215,694.00	13.53	-2.25
f	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kpd Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	205,383,966,706.00	205,043,594,582.62	233,862,724,862.10	233,802,724,862.10	238,664,159,105.00	237,956,659,105.00	258,901,553,570.00	258,801,553,569.94	250,965,350,578.80	250,843,286,593.80	5.33	5.37
g	Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000.00	1,437,379,500.00	3,500,000,000.00	1,977,445,634.00	5,015,138,833.60	4,216,685,197.00	2,157,518,000.00	1,643,568,300.00	46,612,011,450.00	36,441,195,964.00	521.69	551.75
II	BELANJA LANGSUNG	671,694,172,433.00	544,618,174,527.00	752,819,672,011.50	612,519,908,820.60	777,340,251,948.96	640,794,272,436.95	861,285,146,711.30	726,200,976,462.00	650,687,100,123.83	592,058,882,458.37	0.42	2.99
a	Belanja Pegawai	62,802,596,372.00	57,284,282,531.00	71,548,382,957.00	64,449,828,378.00	88,892,854,869.00	83,300,948,763.00	107,778,514,195.60	104,349,556,876.00	123,740,907,856.00	119,741,751,392.37	18.56	20.44
b	Belanja Barang dan Jasa	236,118,780,603.00	203,337,560,361.00	325,362,498,304.50	293,060,828,099.60	335,327,143,514.36	300,206,597,078.95	328,108,439,465.70	296,975,843,002.00	237,933,405,106.83	210,382,498,509.00	2.81	4.08
c	Belanja Modal	372,772,795,458.00	283,996,331,635.00	355,908,790,750.00	255,009,252,343.00	353,120,253,565.60	257,286,726,595.00	425,398,193,050.00	324,875,576,584.00	289,012,787,161.00	261,934,632,557.00	-4.22	-0.60

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Analisa terhadap realisasi Belanja Daerah selama tahun 2016-2020 dapat kita jelaskan bahwa belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara total mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, yakni mencapai Rp1693.639.523.836,71,- untuk tahun 2019 dibandingkan sejak tahun 2016 yakni Rp1.500.649.148.344,62- dan mengalami penurunan pengeluaran belanja pada tahun 2020 dengan nilai belanja daerah pada tahun tersebut adalah sebesar Rp1.614.555.388.580,17-. Hal ini mengakibatkan rata-rata pertumbuhan belanja dalam kurun waktu tahun 2016-2020 hanya mencapai 1,95 persen.

Penurunan belanja daerah pada tahun 2020 ini diiringi dengan penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020, karena pada saat ini kita, masyarakat dunia secara keseluruhan dilanda wabah Covid-19 yang berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Hal ini juga mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya. Sungguh pun demikian tapi dari segi persentase tercapainya realisasi terhadap target yang sudah ditetapkan naik yaitu sebesar 83,40 persen pada tahun 2016 naik menjadi 94,74 persen di tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2016-2020 sudah baik.

Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung adalah 1,81 persen, hal ini berarti realisasi Belanja Tidak Langsung naik dari tahun 2016 sebesar Rp956.030.973.817,62 menjadi Rp1.022.496.506.121,80 di tahun 2020. Hal yang sangat mempengaruhi kenaikan belanja ini adalah terdapat belanja yang signifikan kenaikannya, seperti Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020 dan diwajibkannya Daerah untuk memberikan hibah dana dalam penyelenggaraan tersebut merupakan faktor utama meningkatnya Belanja Hibah pada tahun 2020.

Sedangkan untuk Belanja Langsung rata-rata pertumbuhannya juga menunjukkan kinerja yang baik yaitu sebesar 2,99 persen yang berarti realisasi Belanja Langsung naik dari tahun 2016 sebesar Rp544.618.174.527,00 menjadi Rp592.058.882.458,37 pada tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut diatas kecenderungan APBD untuk kinerja belanja daerah dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2016-2020 dalam persentase realisasinya sudah baik dan begitu juga dengan rata-rata pertumbuhannya yang progresif mengalami kenaikan.

Rata-rata proporsi realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta pertumbuhannya per tahun dapat dilihat pada tabel 3.18. berikut ini :

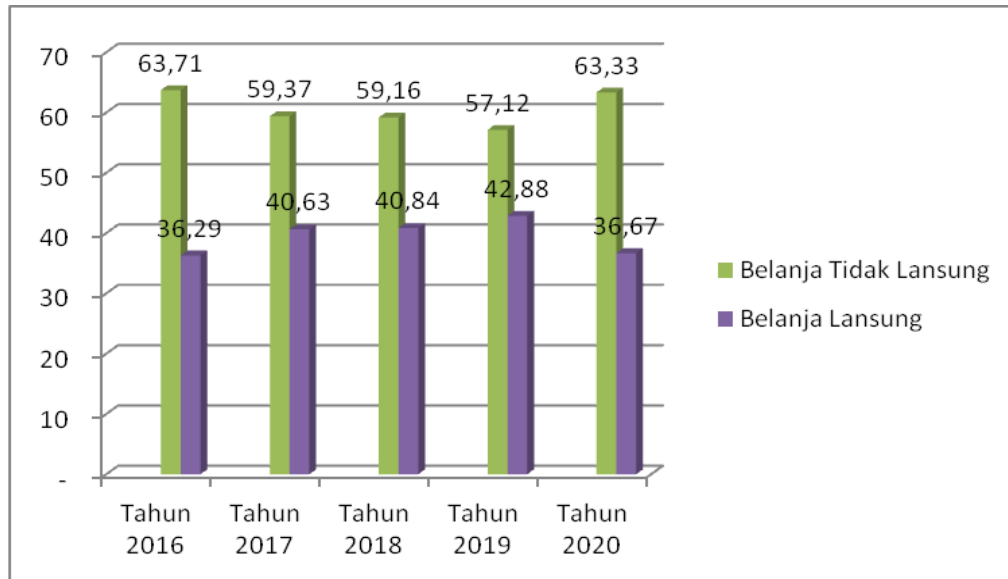
Tabel 3.18.
Rata-Rata Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Rata-Rata Proporsi
	BELANJA						
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	63,71	59,37	59,16	57,12	63,33	60,54
a	Belanja Pegawai	76,48	71,47	71,90	70,98	65,90	71,35
b	Belanja Bunga	0,29	0,35	0,21	0,11	0,02	0,19
c	Belanja Hibah	1,41	1,43	1,31	1,65	5,89	2,34
d	Belanja Bantuan Sosial	0,01	0,01	0,12	0,02	0,01	0,03
e	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,21	0,40	0,37	0,33	0,09	0,28
f	Belanj Bantuan Keuangan kepada Kpd Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	21,45	26,12	25,64	26,75	24,53	24,90
g	Belanja Tidak Terduga	0,15	0,22	0,45	0,17	3,56	0,91
II	BELANJA LANGSUNG	36,29	40,63	40,84	42,88	36,67	39,46
a	Belanja Pegawai	10,52	10,52	13,00	14,37	20,22	13,73
b	Belanja Barang dan Jasa	37,34	47,85	46,85	40,89	35,53	41,69
c	Belanja Modal	52,15	41,63	40,15	44,74	44,24	44,58

Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari tabel 3.18. diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah selalu berada diatas 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi belanja tidak langsung selalu lebih tinggi dari proporsi belanja langsung dengan rata-rata proporsinya 60,54 persen untuk belanja tidak langsung dan 39,46 persen untuk belanja langsung. Kalau dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, ada peningkatan proporsi belanja tidak langsung dan penurunan belanja langsung yaitu dari 57,12 persen naik menjadi 63,33 persen untuk belanja tidak langsung dan 42,88 persen turun menjadi 36,67 persen untuk tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya Kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam penanganan wabah Covid-19 yaitu dengan refocusing anggaran Belanja Langsung ke Belanja Tidak Terduga pada Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 3.18
Proporsi Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2020



Sumber : BPKD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020 (data diolah).

Dari gambar 3.18. diatas dapat dilihat bahwa proporsi belanja daerah dialokasikan lebih besar untuk belanja tidak langsung karena didalamnya ada belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Oleh karena itulah proporsi belanja tidak langsung ini naik dan proporsi belanja langsung turun pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, yaitu karena adanya refocusing anggaran dari belanja langsung menjadi tidak langsung guna menangani masalah covid-19.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan Daerah ini terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Sumber penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan obligasi. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah dan transfer ke dana cadangan.

Kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengatasi defisit yang terjadi dalam 5 tahun terakhir adalah dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

sebelumnya. Pengeluaran Pembiayaan yang ada digunakan hanya untuk menambah penyertaan modal. Adapun realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.1.3 di bawah ini :

Tabel 3.19.
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020 (Rp Juta)

Uraian	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Pertumbuhan Rata-Rata Per tahun (%)
Penerimaan Pembiayaan	177.880,00	114.480,30	91.043,88	25.325,56	16.044,83	-41,14
Penggunaan SILPA	156.389,81	114.386,71	91.043,88	25.246,81	16.044,83	-38,93
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-7,65
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	-	-	-	42,00	-	-
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	18.835,78	-	-	-	-	-
Penerimaan kembali Pinjaman Daerah	1.964,28	93,59	-	36,75	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	690,11	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	20.785,00	30.751,54	25.917,89	13.746,89	10.708,95	-9,21
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.785,00	21.333,65	16.500,00	4.329,00	6.000,00	-13,80
Pembayaran pokok Pinjaman DN lainnya	-	9.417,89	9.417,89	9.417,89	4.708,95	-
Pembayaran pokok Pinjaman DN Obligasi	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Netto	157.095,00	83.728,77	65.125,99	11.578,67	5.335,89	-51,10

Sumber Data : BPKD Pesisir Selatan Tahun 2021,diolah.

Dari tabel 3.19. diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pembiayaan mengalami kinerja yang negatif yaitu dengan rata-rata pertumbuhan menurun sebesar 51,10 persen yaitu dengan nilai pembiayaan di tahun 2016 sebesar Rp157.095.000.325,85 turun menjadi Rp6.241.262.808,61 pada tahun 2020.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam Neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan aset non lancar, serta kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Berdasarkan Neraca Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2016-2020 terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan aset, kewajiban dan ekuitas per tahun adalah sebesar 4,27% untuk aset, dan untuk kewajiban 5,19% serta untuk ekuitas sebesar 4,27%. Jika difokuskan pada aset, maka terlihat bahwa proporsi aset tetap jauh lebih besar dibandingkan aset lancar, investasi jangka panjang dan aset lainnya, yaitu dengan perbandingan 89,60%, 4,71%, dan 4,50% serta 1,19% untuk aset lainnya.

Tabel 3.20
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2020 (RpJuta)

Uraian	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020 (audited)	Pertumbuhan Rata-Rata Per tahun (%)
ASET	2.081.442,25	1.997.168,85	2.119.482,06	2.309.214,74	2.451.096,97	4.29
Aset Lancar	147.034,71	137.008,07	83.897,02	90.644,69	59.694,49	- 17.92
Kas	115.808,97	91.486,74	25.228,63	16.950,83	21.280,02	- 25.17
Piutang	14.074,30	24.072,80	25.765,33	31.451,79	10.749,86	8.58
Persediaan	17.151,41	21.448,53	32.903,06	42.242,07	27.664,61	18.08
Investasi Jangka Panjang	68.161,12	89.919,44	106.658,06	111.021,09	116.522,07	14.90
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	-
Investasi Permanen	68.161,12	89.919,44	106.658,06	111.021,09	116.522,07	14.90
Aset Tetap	1.748.774,57	1.766.535,86	1.924.974,86	2.103.759,91	2.273.667,91	6.84
Tanah	201.809,56	205.745,72	210.370,46	211.630,55	212.967,50	1.36
Peralatan dan Mesin	259.817,99	309.133,00	354.195,01	389.153,07	427.518,45	13.32
Gedung dan Bangunan	666.100,58	713.239,72	788.516,40	928.577,70	1.021.966,30	11.36
Jalan,Irigasi dan Jaringan	1.369.755,86	1.505.809,02	1.641.742,73	1.779.949,74	1.955.453,81	9.31
Aset Tetap lainnya	56.557,61	67.067,71	78.570,26	89.659,58	98.494,40	14.93
Konstruksi dalam Pengerjaan	82.644,13	112.154,69	124.132,67	118.743,49	126.688,10	12.18
Akumulasi Penyusutan	-887.992,15	-1.146.614,02	-1.272.552,68	-1.413.954,21	-1.569.590,89	15.56
Aset Lainnya	117.471,85	3.705,48	3.952,12	3.789,03	1.212,49	- 40.58
KEWAJIBAN	72.218,57	70.862,12	66.837,85	65.150,38	85.250,81	5.19
Kewajiban Jangka Pendek	39.255,95	47.317,39	62.128,90	65.150,38	85.250,81	21.89
Utang Perhitungan Pihak ketiga	8,76	139,87	0,80	-	0,70	-
Utang Bunga	582,79	190,54	131,91	42,89	-	-
Pdptan diterima dimuka	56,99	-	55,11	180,89	112,78	-
Utang kepada pihak ketiga	34.302,64	41.720,03	48.512,34	59.490,71	71.486,79	20,17
Bagian lancar utang jk pjg	-	-	9.417,89	4.708,95	-	-
Utang Beban	-	-	-	-	-	-
Utang Transfer	-	757,16	-	-	-	-
Utang Jk Pendek lainnya	4.304,78	4.509,79	4.011,57	726,94	13.650,53	422,41
Kewajiban Jangka Panjang	32.962,62	23.544,73	4.708,95	-	-	-
Utang Dalam Negeri	32.962,62	23.544,73	4.708,95	-	-	-

Uraian	Thn 2016	Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020 (audited)	Pertumbuhan Rata-Rata Per tahun (%)
Utang Jk Pjg Lainnya	-	-	-	-	-	-
EKUITAS	2.009.223,68	1.926.306,72	2.052.644,21	2.244.064,35	2.365.846,16	4,30
Ekuitas	2.009.223,68	1.926.306,72	2.052.644,21	2.244.064,35	2.365.846,16	4,30
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	2.081.442,25	1.997.168,85	2.119.482,06	2.309.214,74	2.451.096,97	4,29

Sumber Data : BPKD Pesisir Selatan Tahun 2021,diolah

Analisa terhadap pos-pos aset menunjukkan bahwa nilai aset mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni dari tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp2.081.442.252.462,- meningkat menjadi Rp2.451.096.974.899,- untuk tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhannya 4,29% per tahun. Peningkatan aset ini dihasilkan antara lain melalui peningkatan Aset Tetap dan Investasi Jangka Panjang. Sedangkan untuk aset lancar dan aset lainnya mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 17,92% dan sebesar 40,58%.

Untuk aset tetap meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp1.748.774.567.598,- menjadi Rp2.273.667.912.971,- pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan 6,84%. Investasi Jangka Panjang juga meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2020 yakni masing-masing sebesar Rp68.161.123.290 dan Rp116.522.073.810,- dengan rata-rata pertumbuhannya per tahun sebesar 14,90%. Sedangkan untuk aset lancar dan aset lainnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk aset lancar pada tahun 2016 bernilai Rp147.034.707.376,- menurun pada tahun 2020 dengan nilai Rp59.694.492.203,- .

Sesuai dengan konsep keseimbangan, pertumbuhan aset tersebut juga akan sama dengan jumlah pertumbuhan kewajiban dan ekuitas. Rata-rata pertumbuhan ekuitas per tahun adalah 4,29% dan pertumbuhan kewajiban rata-rata per tahunnya 5,19%. Karena komposisi ekuitas jauh lebih besar dibandingkan kewajiban, maka pertumbuhan kewajiban tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap komposisi kewajiban dan ekuitas.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik berpotensi menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi

pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Belanja Aparatur

Dari sisi belanja aparatur, selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, telah terjadi penurunan jumlah Belanja Aparatur Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2016 Belanja Aparatur Kabupaten Pesisir berjumlah Rp825.247,76 juta dan turun menjadi Rp719.022,23 juta pada tahun 2020. Proporsi terbesar dari belanja aparatur ini adalah untuk belanja tidak langsung. Pada tahun 2016, jumlah belanja tidak langsung aparatur adalah sebesar Rp731.128,14 juta dan turun menjadi Rp673.800,43 juta pada tahun 2020. Penurunan Belanja Aparatur ini terutama disebabkan karna adanya pegawai yang pensiun dan atau pindah tugas ke daerah lain yaitu dari sebesar Rp519.766,84 juta pada tahun 2016 menjadi Rp458.632,64 juta pada tahun 2020.

Tabel 3.21. berikut menyajikan perkembangan Realisasi Belanja Aparatur Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2020.

Tabel 3.21.
Realisasi Belanja Aparatur Tahun 2016-2020

No	Keterangan	Tahun (Rp Juta)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Belanja Tidak Langsung	731.128,14	639.610,75	667.419,88	686.697,61	673.800,43
1	Belanja Gaji Tunjangan	519.766.84	449.758.89	446.833.64	463.336.32	458.632.64
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	206.893.71	182.133.93	207.011.28	209.587.86	202.109.14
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD	3.757.90	6.883.50	12.356.32	12.440.00	13.058.65
4	Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0	0	0	0	0
5	Belanja Pemungutan Pajak Daerah**)	500.97	658.73	1.111.84	1.121.00	0
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	208.72	175.70	106.80	212.43	0
B	Belanja Langsung	94.119,62	106.064,23	83.321,50	89.222,59	45.221,80
1	Belanja Honorarium PNS**)	20.412.49	19.014.56	8.948.54	8.960.12	7.428.43
2	Belanja Uang Lembur**)	560.24	856.37	-	11.82	
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	296.75	240.10	100.65	33.35	
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan	3.579.66	3.529.56	1.586.69	1.512.19	663.57
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.571.97	6.120.19	5.042.62	10.065.23	11.140.62
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai***)	1.214.25	1.462.37	2.040.23	2.356.25	2.404.80
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**)	757.70	890.37	949.15	1.097.31	863.40
8	Belanja Pakaian Khusus hari	1.101.84	712.09	1.229.45	553.13	189.60

No	Keterangan	Tahun (Rp Juta)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	tertentu*)					
9	Belanja perjalanan Dinas*)	50.665.51	55.489.08	47.230.18	45.239.35	15.797.67
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0	0	0	0	0
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0	0	0	0	0
12	Belanja Modal Untuk Keperluan Kantor	10.959.21	17.749.54	16.193.99	19.393.84	6.733.71
	Jumlah	825.247,76	745.674,98	750.741,38	775.920,20	719.022,23

Sumber Data : BPKD Kab. Pessel, Tahun 2021.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pada tahun 2016 belanja aparatur memiliki proporsi sebesar 54,99% dari total belanja pemerintah daerah, sedangkan pada tahun 2020 proporsi belanja ini menurun menjadi 44,53% dari total belanja daerah. Data ini memberi penjelasan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan semakin baik dengan semakin meningkatnya belanja untuk keperluan publik.

Tabel 3.22. berikut memperlihatkan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2020.

Tabel 3.22.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab. Pesisir Selatan
Tahun 2006-2020

No	Uraian	Tahun (Rp Juta)		
		Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran	Proporsi (%)
1	Tahun 2016	825.247,76	1.500.649.14	54,99
2	Tahun 2017	745.674,98	1.507.465.76	49,47
3	Tahun 2018	750.741,38	1.569.020.95	47,85
4	Tahun 2019	775.920,20	1.693.639.52	45,81
5	Tahun 2020	719.022,23	1.614.555.38	44,53

Sumber Data : BPKD Kab. Pessel, Tahun 2021(data diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau belanja yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

(SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Sebaliknya pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Sementara penerimaan pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan kebutuhan dana pada masa yang akan datang.

Defisit Riil Anggaran

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan anggaran menggunakan prinsip “anggaran berimbang”. Berdasarkan prinsip ini, maka SiLPA yang terjadi pada tahun sebelumnya diupayakan untuk dibelanjakan pada tahun berikutnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah.

Defisit riil yang terjadi ini bermakna bahwa Kabupaten Pesisir Selatan harus mencari sumber pembiayaan yang lain untuk menutupi pengeluaran tersebut. Pada tahun 2016 terjadi defisit riil anggaran sebesar Rp63.493,29 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp23.158,88 juta. Pada tahun 2018 sebesar Rp65.796,99 juta dan defisit ini menurun menjadi Rp8.127,36 juta pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 terjadi defisit riil anggaran sebesar Rp.4.324.24 juta.

Sumber Dana Penutup Defisit Riil

Untuk menutup defisit yang terjadi, Kabupaten Pesisir Selatan lebih mengandalkan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan juga melakukan pinjaman. Namun selama 5 tahun terakhir, Kabupaten Pesisir Selatan belum pernah mengusahakan pembentukan dana cadangan dan menjual kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penggunaan dana SiLPA selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan di mulai dari tahun pertama yaitu tahun 2016. Pada tahun 2016 dana SiLPA turun dari Rp156.389,81 juta (20,83%) menjadi Rp114.386,71 juta, (26,86%) dan tahun 2018 turun lagi menjadi Rp91.043,88 juta (20,41%). Pada tahun 2019 mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp25.246,54 juta (72,27%) serta tahun 2020 turun lagi menjadi Rp16.950,20 juta (36,45%).

Karena jumlah defisit yang lebih kecil dibandingkan penggunaan dana SiLPA tahun sebelumnya, mengakibatkan SiLPA tahun berjalan masih positif. Namun SiLPA tahun berjalan ini cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2016, jumlah SiLPA tahun berjalan Rp 156.389,81 juta dan turun menjadi Rp 16.950,20 juta pada tahun 2020. Secara tidak langsung, penurunan SiLPA tahun berjalan ini menunjukkan kinerja belanja (dari segi jumlah) yang relatif baik sehingga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat umumnya, dan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya.

Tabel 3.2.3 berikut memperlihatkan sumber dana penutup defisit riil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2020.

Tabel 3.23
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan Kab. Pesisir Selatan
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun (RP Juta)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.457.940.86	1.515.058.43	1.529.141.85	1.699.257.52	1.629.588.56
	dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	1.500.649.15	1.507.465.77	1.569.020.95	1.693.637.98	1.614.555.38
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.785.00	30.751.54	25.917.89	13.746.89	10.708.94
A	Defisit Riil	(63.493.29)	(23.158.88)	(65.796.99)	(8.127.36)	4.324,24
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	156.389.81	114.386.71	91.043.88	25.246.81	16.950.20
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	0
6	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang	-	-	-	42.00	0
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	18.835.78	-	-	-	0
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	66.32	93.60	-	36.74	0
9	Penerimaan Piutang Daerah	2.588.08	-	-	-	0
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	177.880.00	114.480.31	91.043.88	25.325.55	16.950.20
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	114.386.71	91.321.43	25.246.89	16.950.20	21.274.43

Sumber Data : BPKD Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2021.

Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

SiLPA tahun berjalan yang masih positif sebagaimana dijelaskan di atas terutama disebabkan penghematan belanja dan atau adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tertentu. Secara keseluruhan realisasi PAD,

Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah lebih rendah dibanding dengan anggaran yang ditetapkan.

Data kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. Baru pada 4 tahun terakhir dapat terselesaikan dimana pada tahun 2017 kewajiban pada pihak ketiga sebesar Rp104.386,70 juta menjadi sebesar Rp91.043,88 juta pada tahun 2018, dan turun lagi menjadi Rp25.246,81 juta pada tahun 2019, serta pada tahun 2020 menjadi Rp0,- dengan artian tidak ada lagi kewajiban yang dibayarkan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada pihak ketiga.

Tabel berikut memperlihatkan perkembangan realiasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2017 – 2020.

Tabel 3.24.
Perkembangan Realisasi SiLPA Kab. Pesisir Selatan
Tahun 2016 - 2020

NO	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah SILPA	114.386,70	91.321,43	25.246,89	16.950,20	21.274,43
2	Pelampauan Penerimaan PAD	0	0	0	923,18	
3	Pelampauan Penerimaan dana Perimbangan	0	0	0	0	0
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0	0	0	0	0
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	114.386,70	91.321,43	25.246,89	16.027,02	21.274,43
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0
7	Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0

Sumber Data : BPKD Kab. Pessel, Tahun 2021.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai belanja atau pos dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti

pembayaran belanja pegawai. Untuk itu, analisis dilakukan dengan memproyeksikan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kemampuan pendanaan dari Pemerintah Daerah dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah sendiri maupun alokasi pemerintah pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Proyeksi pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dianalisis berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahun 2016-2020 serta mempertimbangkan kondisi saat ini untuk dapat menetapkan asumsi yang akan digunakan. Fluktuasi pertumbuhan pendapatan dimasa lalu, serta terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 memberikan dampak yang mempengaruhi pendapatan daerah di beberapa sektor strategis. Sektor strategis yang berdampak langsung pada ekonomi mempengaruhi bidang pariwisata, perdagangan dan transportasi. Sehingga perlu dipertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah di masa depan. Proyeksi pendapatan daerah Tahun 2021 – 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.25
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Uraian	Tahun						Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	145.952.089.082	158.523.499.750	173.879.353.900	190.377.334.900	208.499.442.360	228.409.836.240	
I.1	Pajak Daerah	26.030.589.152	27.141.310.000	28.889.395.300	30.761.687.200	32.767.903.610	34.918.586.490	6.05%
I.2	Retribusi Daerah	4.457.761.321	4.493.698.750	5.225.118.400	5.658.699.100	6.130.926.000	6.645.411.450	8.42%
I.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.000.000.000	10.595.517.000	11.655.068.700	12.820.575.000	14.102.633.000	15.512.896.400	11.55%
I.4	Lain-lain PAD yang sah	106.463.738.609	116.292.974.000	128.109.771.500	141.136.373.600	155.497.979.750	171.332.941.900	9.98%
II	PENDAPATAN TRANSFER	1.436.130.827.272	1.458.110.869.687	1.470.609.859.031	1.493.390.511.792	1.516.709.609.823	1.540.580.351.949	
II.1	Transfer Pemerintah Pusat							
II.1.1	Dana Perimbangan							
	• Dana Transfer Umum							
	- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	16.682.614.000	16.690.955.307	16.699.300.785	16.707.650.435	16.716.004.260	16.724.362.262	0,05%
	- Dana Alokasi Umum	802.984.691.000	823.059.308.275	833.635.790.982	854.476.685.756	875.838.602.900	897.734.567.973	2.26%
	• Dana Transfer Khusus (DAK)	351.243.877.000	351.419.499.940	351.595.209.689	351.771.007.294	351.946.892.797	352.122.866.244	0.05%
II.1.2	Dana Insentif Daerah	34.744.705.000	34.762.077.353	34.779.458.391	34.796.848.120	34.814.246.544	34.831.653.668	0,05%
II.1.3	Dana Desa	169.802.227.000	171.500.249.270	173.215.251.763	174.947.404.280	176.696.878.323	178.463.847.106	1,00%
II.2	Transfer Antar Daerah							
II.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	60.672.712.272	60.678.779.543	60.684.847.421	60.690.915.906	60.696.984.998	60.703.054.696	0,01%
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	152.314.186.251	153.837.328.114	65.000.000.000	65.650.000.000	66.306.500.000	66.969.565.000	
III.1	Hibah	152.314.186.251	153.837.328.114	65.000.000.000	65.650.000.000	66.306.500.000	66.969.565.000	-10.75%
Jumlah		1.734.397.102.605	1.770.471.697.550	1.709.489.212.931	1.749.417.846.692	1.791.515.552.183	1.835.959.753.189	1.17%

Sumber Data : BPKD Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, diperkirakan target pendapatan daerah untuk tahun 2021-2026 mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.17 persen. Pada tahun 2021 ditargetkan pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp1.734.397.102.605 dan diakhir periode RPJMD pada tahun 2026 menjadi Rp1.835.959.753.189.

Pendapatan daerah yang dimaksud terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari ketiga komponen Pendapatan Daerah tersebut, diproyeksikan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan rata-rata sebesar 9,37 persen dan Pendapatan Transfer mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,41 persen. Sementara komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 57,7 persen dan secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 10,7 persen.

Penurunan pertumbuhan pendapatan pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan pada tahun 2023 disebabkan oleh asumsi pendapatan hibah yang hanya mempertimbangkan penganggaran dari pendapatan Hibah BOS saja. Pendapatan hibah yang berkurang berasal dari Pendapatan hibah Program PHJD, IPDMIP, Hibah Air Bersih dan Sanitasi.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan. Adapun kebijakan keuangan daerah terkait dengan pendapatan daerah adalah berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah dan dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Untuk mendukung dari kebijakan tersebut, maka dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi objek penerimaan dan pemungutan dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Asli Daerah. Intensifikasi dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain;

- a) Meningkatkan Pelayanan dengan cara meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya aparatur,
- b) Melaksanakan pelayanan yang tertib, cepat dan lancar,

- c) Menumbuhkan dan membina kejujuran petugas untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur,
- d) Melakukan perbaikan dan inovasi terhadap sarana dan prasarana operasional untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dari mana saja dan kapan saja, serta perbaikan sarana transportasi bagi petugas yang beroperasi di lapangan,
- e) Melakukan reformasi dan restrukturisasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terkait dengan Pendapatan Daerah dengan melakukan kajian, evaluasi dan perubahan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan kemampuan dan potensi masyarakat,
- f) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak dan masyarakat dengan cara melakukan tatap muka, membuat selebaran, spanduk dan billboard dan sarana lainnya.

Sedangkan untuk kegiatan ekstensifikasi Pendapatan Daerah dilakukan melalui kegiatan antara lain;

- a) Melakukan pendataan dan penyaringan wajib pajak baru,
- b) Melakukan kajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan bekerjasama dengan pihak ketiga,
- c) Melakukan penggalan wajib pajak/wajib retribusi daerah baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d) Melakukan pemetaan terhadap potensi riil penerimaan dari objek pajak/retribusi sehingga terdapat database yang akurat,
- e) Revitalisasi dan pendayagunaan asset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah,
- f) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan unsur lainnya yang terkait dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah.

3.3.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Transfer antar-daerah terdiri atas, pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Berdasarkan tabel proyeksi pendapatan di atas, pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana desa dan pendapatan bagi hasil. Dana perimbangan merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

Pendapatan transfer pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.436.130.827.272 kemudian diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,41 persen dimana pada Tahun 2026 menjadi sebesar Rp1.540.580.351.949. Dana transfer umum yang berasal dari dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak diasumsikan meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,05 persen. Sedangkan dana alokasi umum (DAU) diasumsikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,26 persen. Sedangkan dana transfer khusus yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik diasumsikan mengalami pertumbuhan positif rata-rata sebesar 0,05 persen. Demikian juga dengan dana insentif daerah diasumsikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,05 persen. Dana desa diasumsikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,00 persen. Sementara pendapatan bagi hasil diasumsikan meningkat lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan dana transfer lainnya yaitu sebesar 0,01 persen.

Pengelolaan pendapatan transfer harus dilakukan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada Pemerintah Pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program prioritas yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah, semakin meningkat aktivitas ekonomi daerah, akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil.

Beberapa langkah yang dilaksanakan dalam optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan

yang sah, dan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan.

3.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari hibah, dana darurat dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan proyeksi pendapatan yang telah disampaikan terjadi pengurangan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun 2023 dimana pada tahun 2021 pendapatan hibah yang diperoleh sebesar Rp152.314.186.251 kemudian diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen menjadi sebesar Rp153.837.328.114 pada tahun 2022 kemudian diproyeksikan mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi sebesar Rp65.000.000.000 berkurang sebesar Rp88.837.328.114 atau berkurang sebesar 57,7 persen. Perhitungan pengurangan ini berkaitan dengan belum adanya kepastian hibah dari Pemerintah Pusat.

Perhitungan proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif rata-rata kurang dari 10 persen.
2. Pendapatan transfer juga diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif rata-rata kurang dari 2 persen.
3. Lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan hanya berasal dari pendapatan hibah dan mengalami pertumbuhan negatif rata-rata sebesar 10 persen.

3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja

Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja daerah sebagai perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Pengelolaan belanja daerah dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta azas kepatutan dan kewajaran.

Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah utamanya pada pengelolaan belanja daerah, perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah dalam kerangka ekonomi makro, merupakan stimulant yang baik terhadap perkembangan ekonomi makro karena mampu memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Struktur belanja daerah dalam struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun-tahun sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah desa.

Pada tahun 2021, kondisi ekonomi daerah masih didominasi dampak dari pandemi Covid-19, namun secara umum diasumsikan tetap terjadi pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan rata-rata per tahun diproyeksikan sebesar 1,22 persen. Proyeksi belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.26
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 – 2026

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	BELANJA OPERASI							
	Belanja Pegawai	2,00%	794,191,803,282	810,075,639,348	826,277,152,135	842,802,695,177	859,658,749,081	876,851,924,062
	Hibah	2,36%	57.296.398.633	57.302.128.273	57.307.858.486	80.617.426.796	57.313.589.272	57.319.320.630
	Bantuan Sosial	0,01%	251.000.000	251.025.100	251.050.203	251.075.308	251.100.451	251.125.525
	Belanja Barang dan Jasa	1,04%	349,070,877,021	364,105,784,108	344,142,194,687	344,176,608,906	361,211,026,567	366,258,240,592
	Jumlah		1,200,810,078,936	1,231,734,576,829	1,227,978,255,509	1,267,847,806,187	1,278,434,465,334	1,300,680,610,810
II	BELANJA MODAL							
	Belanja Tanah	0,01%	3.750.000.000	3.750.375.000	3.750.750.038	3.751.125.113	3.751.500.225	3.751.875.375
	Belanja Peralatan dan Mesin	5,57%	56.338.729.723	56.344.363.596	50.349.998.032	50.355.033.032	63.360.068.535	71.366.404.542
	Belanja Gedung dan Bangunan	2,58%	52.617.128.666	52.622.390.379	45.837.139.081	45.841.722.795	53.832.483.370	58.324.608.517
	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	-3,00%	147,090,060,370	157,921,081,419	117,947,950,052	117,970,826,835	128,459,486,855	138,132,488,326
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,01%	5.016.071.001	5.016.572.608	5.017.074.265	5.017.575.973	5.018.077.730	5.018.579.538
	Jumlah		264,811,989,760	275,654,783,002	222,902,911,468	222,936,283,747	254,421,616,715	276,593,956,298
III	BELANJA TAK TERDUGA							
	Belanja Tak Terduga	-15,84%	7.218.401.854	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	Jumlah		7.218.401.854	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
IV	BELANJA TRANSFER							
	Belanja Bagi Hasil	0,01%	4.402.674.555	4.403.114.822	4.403.555.134	4.403.995.489	4.404.435.889	4.404.876.333
	Belanja Bantuan Keuangan	0,01%	252.653.957.500	252.679.222.896	252.704.490.818	252.729.761.267	252.755.034.243	252.780.309.747
	Jumlah		257.056.632.055	257.082.337.718	257.108.045.952	257.133.756.757	257.159.470.132	257.185.186.079
	JUMLAH BELANJA	1,22%	1.729.897.102.605	1.765.971.697.550	1.709.489.212.931	1.749.417.846.692	1.791.515.552.183	1.835.959.753.189

Sumber Data : BPKD Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2021

Hasil proyeksi belanja daerah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp.1.729.897.102.605 meningkat menjadi Rp.1.835.959.753.189 pada tahun 2026. Dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,22 persen diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan belanja daerah yang difokuskan pada pengembangan Sumber Daya Manusia. Penyusunan perencanaan program/kegiatan disusun sesuai dengan prioritas daerah dalam mencapai target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan yang dengan kata lain *money follow program priority* dimana setiap program kegiatan yang dilaksanakan akan dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Perhitungan proyeksi belanja daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 berdasarkan tabel diatas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Proyeksi belanja operasi mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 0,03%, sedangkan untuk tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,003% dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 rata-rata sebesar 0,01%. Hal ini diasumsikan bahwa belanja pegawai yang menjadi bagian dari belanja operasi mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1.62% pada tahun 2022 - 2026.
- b. Proyeksi belanja modal mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 0,04%, sedangkan untuk tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0.19% disebabkan belanja yang bersumber dari hibah jalan dan hibah irigasi berakhir pada tahun 2022. Selanjutnya proyeksi belanja mengalami kenaikan lagi pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 rata-rata sebesar 0,08%.
- c. Proyeksi belanja tidak terduga tidak mengalami kenaikan, pada tahun 2022 Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar 0,79% sedangkan untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 diasumsikan sebesar Rp1.500.000.000 dengan rata-rata sebesar 0.00% atau secara total mengalami penurunan sebesar 15,84%. Kebutuhan akan belanja tidak terduga digunakan untuk keperluan darurat termasuk keadaan mendesak.
- d. Proyeksi belanja transfer selalu mengalami kenaikan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 rata-rata sebesar 0,01%.
- e. Pada tahun 2024 diproyeksikan adanya pertumbuhan belanja hibah yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebesar Rp23.309.568.310 dari tahun sebelumnya atau mengalami kenaikan sebesar 0.41%. Pada tahun berikutnya (2025 dan 2026) mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0.14% dari tahun 2024.

Dalam perencanaan lima tahun ke depan, Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan:

1. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dalam rangka meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Program/kegiatan prioritas untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam *mandatory spending* terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah serta peningkatan infrastruktur.
3. Pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
4. Optimalisasi belanja daerah dengan menyusun belanja yang menggambarkan indikator dan capaian atas dasar kebutuhan nyata masyarakat yang berkaitan dengan target kinerja Perangkat Daerah.
5. Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel dalam mempertanggungjawabkan belanjanya.

3.3.3. Proyeksi Pembiayaan

Pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja sehingga kemungkinan defisit anggaran ditiadakan. Namun jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat diperoleh dari SILPA ataupun pinjaman daerah dan dengan sebisa mungkin menghindari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Apabila terjadi pinjaman daerah, maka besaran pinjaman daerah haruslah pada kemampuan pengembalian pinjaman oleh daerah. Dalam pengelolaan pembiayaan dan perumusan proyeksi pembiayaan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, asumsi dan metode proyeksi yang digunakan adalah linear dengan asumsi dan metode yang digunakan pada pendapatan dan belanja daerah.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Pada periode tahun 2021-

2026, pembiayaan netto diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata negatif sebesar 20,00% sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.27
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 – 2026

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN							
	Penggunaan SiLPA		-	-	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-	-	-	-	-
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-	-	-
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		4.500.000.000	4.500.000.000				
	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pem. Daerah		4.500.000.000	4.500.000.000	-	-	-	-
	Pembay. Pokok Pinj. DN Lainnya		-	-	-	-	-	-
	Pembay. Pokok Pinj. DN Obligasi		-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO		(4.500.000.000)	(4.500.000.000)				
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		0	0	0	0	0	0

Sumber : BPKD Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2021

Asumsi yang digunakan untuk melakukan proyeksi pembiayaan adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan hanya dilakukan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.500.000.000. pengeluaran pembiayaan pada tahun tersebut diberikan kepada BUMD dalam hal ini adalah PDAM Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 diasumsikan tidak ada pengeluaran pembiayaan karena belum adanya konfirmasi dan kejelasan terkait sumber pendanaannya.

3.3.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan 5 (lima) tahun ke depan (2021–2026) dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut ini disajikan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021–2026.

Tabel 3.28
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	888,479,408,145.00	910,424,590,082.27	934,632,894,066.71	959,373,436,777.72	985,029,883,047.71	1,011,657,291,269.24
2	Pencairan dana cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Penerimaan	888,479,408,145.00	910,424,590,082.27	934,632,894,066.71	959,373,436,777.72	985,029,883,047.71	1,011,657,291,269.24
	Dikurangi :						
4	Belanja Operasi	710,876,447,501.50	722,493,930,854.00	738,101,605,847.53	754,099,227,248.57	770,496,543,692.76	787,303,547,531.63
5	Belanja Modal	5,246,781,838.00	5,247,306,516.18	5,247,831,246.84	5,248,356,029.96	,248,880,865.56	5,249,405,753.65
6	Belanja Tidak Terduga	7,218,401,854.00	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
7	Belanja Transfer	83,797,657,655.00	85,742,100,095.66	87,735,122,198.47	89,777,938,443.67	91,871,793,673.51	94,017,963,851.27
8	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Belanja	807,139,288,848.50	814,983,337,465.84	832,584,559,292.83	850,625,521,722.20	869,117,218,231.83	888,070,917,136.55
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	81,340,119,296.50	95,441,252,616.43	102,048,334,773.88	108,747,915,055.52	115,912,664,815.88	123,586,374,132.69

Sumber : BPKD Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2021

Tabel diatas memproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk 5 tahun ke depan hingga berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tahun 2021 sebesar Rp81,340,119,296.50 atau sebesar 9,15% dari total penerimaan.
2. Proyeksi tahun 2022 sebesar Rp95,441,252,616.43 atau sebesar 10,48% dari total penerimaan
3. Proyeksi tahun 2023 sebesar Rp102,048,334,773.88 atau sebesar 10,92% dari total penerimaan
4. Proyeksi tahun 2024 sebesar Rp108,747,915,055.52 atau sebesar 11,34% dari total penerimaan
5. Proyeksi tahun 2025 sebesar Rp115,912,664,815.88 atau sebesar 11,77% dari total penerimaan
6. Proyeksi tahun 2026 sebesar Rp123,586,374,132.69 atau sebesar 12,22% dari total penerimaan

Asumsi yang digunakan dalam memperhitungkan kapasitas riil tahun 2021 sampai dengan 2026 adalah:

1. Pendapatan yang diperhitungkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pendapatan yang berasal dari Dana BLUD, pendapatan transfer yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pusat dan provinsi.
2. Belanja yang diperhitungkan dan menjadi pengurang meliputi Belanja Operasi yang berisi belanja Pegawai dan belanja Barang Jasa dengan mempertimbangkan belanja prioritas daerah.
3. Belanja Modal pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 diasumsikan akan diperoleh dari dana transfer khusus, hibah dan bantuan keuangan lainnya. Namun tetap diberikan alokasi terhadap penganggaran untuk Belanja Modal.
4. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021 diasumsikan sebesar Rp7,218,401,854 dan menjadi Rp1.500.000.000 pada tahun 2023 sampai dengan 2026. Pada tahun 2021, diasumsikan pada Belanja Tidak Terduga terdapat dana penanganan Covid-19.
5. Belanja transfer hanya memperhitungkan Alokasi Dana Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk Nagari.

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Sesuai amanat Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 157 ayat (3), kapasitas riil keuangan Daerah dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga.

Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pengelompokan prioritas kapasitas riil Kabupaten Pesisir Selatan dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3.29
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Uraian	Proyeksi					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas riil	81,340,119,296.50	95,441,252,616.43	102,048,334,773.88	108,747,915,055.52	115,912,664,815.88	123,586,374,132.69
Prioritas I	44,406,869,882.46	52,105,250,435.00	55,712,324,535.78	59,369,897,113.82	63,281,424,575.31	67,470,813,699.58
Prioritas II	32,912,201,116.97	38,617,864,445.43	41,291,251,436.29	44,002,065,429.87	46,901,098,368.41	50,006,068,788.08
Prioritas III	4,021,048,297.07	4,718,137,736.00	5,044,758,801.81	5,375,952,511.82	5,730,141,872.15	6,109,491,645.03

Sumber : BPKD Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2021.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap* atau perbedaan antara kinerja daerah atau kondisi masyarakat dengan kondisi ideal yang diharapkan. Selanjutnya, hasil rumusan permasalahan daerah, dijadikan sebagai bahan analisis untuk merumuskan isu-isu strategis daerah yang merupakan tantangan dan peluang yang akan dihadapi di masa depan. Isu-isu strategis inilah yang akan menjadi pokok perhatian dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ke depan karena pengaruhnya yang sangat kuat terhadap perubahan-perubahan yang ingin diwujudkan.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan penelaahan terhadap kondisi umum daerah yang telah dijabarkan pada Bab sebelumnya. Hasil identifikasi permasalahan yang akan dipaparkan pada bagian ini akan dijelaskan secara sistematis, dimana terlebih dahulu dijabarkan permasalahan lintas sektor yang bersifat makro dan kemudian diikuti oleh permasalahan-permasalahan sesuai dengan aspek pelayanan umum menurut urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah.

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Secara Makro

Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi permasalahan pembangunan secara makro yang bersifat lintas sektoral sebagai berikut:

1. Terjadinya Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi.

PDRB Kabupaten Pesisir Selatan terus meningkat dalam rentang waktu antara tahun 2016-2020, namun peningkatan yang terjadi cenderung memperlihatkan laju pertumbuhan dengan tren melambat antar waktu. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan 2017 yang telah mencapai angka 5,33% dan 5,41%, kemudian mengalami penurunan menjadi 5,35% di tahun 2018 dan 4,81% tahun 2019 dan kemudian terkonsentrasi -1,11% di tahun 2020. Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 tersebut juga sejalan dengan kontraksi ekonomi nasional sebesar -2,07 dan juga Sumatera Barat sebesar -1,16%, yang disebabkan oleh terpukulnya aktifitas ekonomi nasional dan juga

Sumatera Barat akibat pandemi COVID-19.

Rentannya perekonomian daerah terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat seperti gejolak harga komoditi, dinamika perekonomian ditingkat nasional dan hantaman krisis disinyalir menjadi penyebab tren perlambatan laju pertumbuhan ekonomi ini, disamping masih sangat tergantungnya daerah terhadap sektor tradisional. Hal ini perlu disikapi lebih serius di masa depan dengan memperkuat fundamental ekonomi daerah serta mengupayakan terjadinya perubahan struktur perekonomian.

2. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan. Selama 5 (lima) tahun terakhir, kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan relatif berhasil ditekan dengan laju penurunan yang relatif lambat. Pada tahun 2016 angka kemiskinan tercatat 7,92 % dan hanya turun menjadi 7,61 % pada tahun 2020. Selain itu, capaian penurunan penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan masih lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan rata-rata kinerja kabupaten se Sumatera Barat (lihat Gambar 2.21). Pada tahun 2020, pemerintah provinsi Sumatera Barat telah berhasil menekan persentase penduduk miskin hingga 6,28 % lebih rendah dibanding Pesisir Selatan yang baru mencapai 7,61 %. Capaian penurunan penduduk miskin Kabupaten Pesisir Selatan juga masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata penduduk miskin kabupaten lain di Sumatera Barat sebesar 7,42 %.

Selain itu, data Pengeluaran perkapita penduduk Pesisir Selatan masih relatif rendah dibanding rata-rata kabupaten ataupun provinsi. Pengeluaran perkapita pesisir selatan pada tahun 2020 mencapai Rp.9,2 Juta lebih rendah dari rata-rata kabupaten yang mencapai Rp.9,8 Juta. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah kesejahteraan harus menjadi perhatian ke depan.

3. Relatif Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia disuatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pencapaian IPM Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 tahun terakhir, terus mengalami peningkatan meskipun terjadi sedikit penurunan tahun 2020. Peningkatan ini searah dengan peningkatan indikator penyusun IPM seperti angka harapan hidup, harapan lama

sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Namun bila dibandingkan dengan capaian kabupaten/ kota lain dan capai provinsi, terlihat IPM pesisir Selatan relative masih kalah bersaing.

Data tahun 2016-2020 memperlihatkan bahwa IPM Pesisir Selatan selalu berada di bawah capaian IPM Provinsi Sumbar (lihat Gambar 2.19). Bila dilakukan perbandingan terhadap data IPM seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, maka capaian IPM Kabupaten Pesisir Selatan 69,090, masih berada pada peringkat ke 12 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar dan peringkat ke 230 dari 540 kabupaten/kota se Indonesia. Peringkat IPM kabupaten dan kota se Sumatera Barat tersaji pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Capaian dan Peringkat IPM Kabupaten dan Kota
Se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	IPM	Peringkat Level Provinsi	Peringkat Nasional
1	Kabupaten Kep. Mentawai	61,09	19	488
2	Kabupaten Pesisir Selatan	69,90	12	230
3	Kabupaten Solok	69,08	14	270
4	Kabupaten Sijunjung	67,74	17	272
5	Kabupaten Tanah Datar	72,33	9	52
6	Kabupaten Padang Pariaman	70,61	11	200
7	Kabupaten Agam	72,46	8	138
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	69,47	13	247
9	Kabupaten Pasaman	66,64	18	380
10	Kabupaten Solok Selatan	69,04	15	272
11	Kabupaten Dharmasraya	71,51	10	172
12	Kabupaten Pasaman Barat	68,49	16	300
13	Kota Padang	82,82	1	9
14	Kota Solok	78,29	4	52
15	Kota Sawah Lunto	72,64	7	134
16	Kota Padang Panjang	77,93	5	58
17	Kota Bukittinggi	80,58	2	29
18	Kota Payakumbuh	78,90	3	46
19	Kota Pariaman	76,90	6	69

Keterangan:

Peringkat berdasarkan hasil olahan berdasarkan data IPM hasil unduhan pada situs resmi BPS-RI (<https://www.bps.go.id/indicator/26/413/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>. Access Time: August 21, 2021, 12:16 pm).

4. Terjadinya Stagnasi Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Perekonomian

Struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun terakhir

masih didominasi oleh sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Secara rata-rata selama tahun 2016 – 2020 kontribusi sektor ini mencapai 39,27 %. Namun demikian, kontribusi sektor ini mengalami stagnasi bahkan terus menurun setiap tahunnya. Secara rata-rata kontribusi sektor ini menurun sebesar 2,34 % selama lima tahun terakhir.

Untuk kembali mendorong peningkatan perekonomian ke depan perlu dilakukan hilirisasi sehingga komoditi yang dihasilkan pada sector primer (pertanian) terus meningkat nilai tambahnya karena diolah lebih lanjut pada sector sekunder (industri) dan dimanfaatkan sebagai pendukung sector tersier (jasa dan pariwisata).

5. Tantangan Geografis Daerah.

Secara geografis, Kabupaten Pesisir Selatan di satu sisi memiliki banyak potensi baik potensi kelautan, kehutanan dan sumber-sumber air. Namun di sisi lain juga terdapat beberapa potensi permasalahan yang dapat ditimbulkannya, terutama masalah bencana alam. Beberapa bencana alam yang sering mencancam masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain: banjir, longsor, kebakaran hutan, gempa dan tsunami. Tingginya kejadian dan potensi kebencanaan menjadi permasalahan yang setiap tahun terus berulang yang sering menimbulkan kerugian, korban serta membutuhkan biaya besar untuk penanganannya.

Selain masalah bencana, kondisi geografis daerah yang mayoritas merupakan Kawasan lindung juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini akibat terbatasnya lahan yang boleh digunakan untuk kegiatan produktif. Selanjutnya, bentuk daerah yang memanjang lebih dari 200 km, juga menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Konsekwensi wilayah memanjang ini adalah tingginya biaya operasional pelayanan bagi masyarakat dan kecepatan pelayanan publik bagi masyarakatpun relatif lambat akibat adanya konstain jarak antara wilayah.

6. Pandemi COVID-19 yang Belum Berakhir.

Semenjak mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020, hingga sampai pada saat ini, pandemic COVID-19 di Indonesia belum dapat dipredikse secara presisi kapan akan berakhirnya. Pandemi yang menyebabkan berbagai pembatasan aktifitas masyarakat ini telah mengerus perekonomian nasional dan daerah secara masif. Pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan sekaligus peluang. Tantangan terberat adalah penanganan dan pemulihan pandemi yang menyebabkan ekonomi terjun bebas

serta merubah pola hidup masyarakat menjadi lebih peduli terhadap budaya hidup sehat. Sementara peluang yang perlu diraih adalah bagaimana melahirkan inovasi-inovasi di tatanan normal baru seperti inovasi pelayanan publik, budaya kerja, pola komunikasi dan informasi, yang lebih efisien, lebih cepat dan lebih efektif. Upaya pemulihan dan reformasi sosial pasca pandemi ini menjadi salah satu isu penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan formulasi ulang terhadap asumsi-asumsi, target-target dan kebijakan-kebijakan konvensional yang selama ini telah dijalankan.

4.1.2. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pembangunan dari aspek pelayanan umum diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pendidikan

Secara umum indikator pembangunan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan pada periode 2015 – 2020 perkembangannya semakin baik. Namun ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu :

- Masih ada anak putus sekolah baik pada tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK.
- Masih belum terpenuhinya sarana prasarana pendidikan secara optimal.
- Angka Rata-rata Lama Sekolah masih kurang dari 9 tahun.
- masih adanya sekolah yang berakreditasi B dan C.
- Masih relatif rendahnya kualitas tenaga pendidik.
- Belum meratanya distribusi guru.
- Masih rendahnya prestasi siswa SD dan SLTP ditingkat propinsi dan nasional.
- Masih rendahnya akses pendidikan usia dini.

2. Kesehatan

Derajat Kesehatan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan secara umum terus meningkat sebagaimana diperlihatkan oleh Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang juga terus meningkat. Permasalahan Kesehatan yang cukup menonjol dan perlu mendapat perhatian serius di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

- Masih tingginya tingkat Angka Kematian Ibu (AKI).
- Masih tingginya tingkat prevalensi penyakit TBC, HIV dan Covid-19.
- Masih ditemuinyabalita gizi buruk dan gizi kurang serta stunting.

- Belum terpenuhinya target 100 % UHC.
- Masih belum terpenuhinya sarana prasarana kesehatan secara optimal
- Masih adanya kekurangan tenaga kesehatan pada beberapa bidang pelayanan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara umum terjadi perbaikan dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun demikian ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian :

- Belum terpenuhinya capaian pelayanan infrastruktur ekonomi, seperti masih rendahnya proporsi jalan kabupaten kondisi baik yang berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan masih rendahnya persentase irigasi dengan kondisi baik;
- Belum terpenuhinya capaian pelayanan infrastruktur dasar, seperti masih adanya rumah yang belum berakses air minum layak; masih adanya rumah yang belum berakses sanitasi layak; dan belum optimalnya penanganan genangan air;

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami peningkatan, namun masih menyisakan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Sebagian penduduk masih ada yang tinggal di rumah tidak layak huni;
- Belum terpenuhi cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU;
- Masih ditemui proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan;
- Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- Masih rendahnya realisasi penanganan permukiman kumuh;
- Masih ada beberapa kawasan permukiman masyarakat yang berada dalam kawasan hutan.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Beberapa tantangan dan permasalahan yang perlu perhatian terkait urusan iniantara lain :

- Minimnya partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana

- Meningkatnya kejahatan di masyarakat
- Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana,
- Belum optimalnya kapasitas penanggulangan bencana masyarakat
- Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- Belum terpenuhinya sarana prasarana penanggulangan kebakaran.

6. Sosial

Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian terkait urusan sosial yaitu;

- Masih relatif tingginya angka kemiskinan daerah 7,61 %, sehingga membutuhkan keterpaduan penanganan dari berbagai sektor;
- Masih belum validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Belum optimalnya layanan dasar bagi masyarakat miskin;
- Belum tergalinya potensi zakat di luar PNS;

7. Penanaman Modal

Permasalahan yang mendasar terkait penanaman modal antara lain:

- Kurang validnya data potensi investasi pada sektor-sektor strategis.
- Belum dijabarkannya Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam regulasi daerah.
- Sulitnya investor mendapatkan lahan untuk kebutuhan investasi.
- Belum terealisasinya izin prinsip yang telah dikeluarkan.

8. Lingkungan Hidup

Persoalan pembangunan di bidang lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian yaitu :

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah.
- Tingginya potensi kebencanaan.
- Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau.
- Berkurangnya tutupan lahan akibat alih fungsi lahan.
- Kurangnya wawasan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

9. Pangan

Secara umum pembangunan bidang pangan telah cukup berhasil terutama dalam hal tingkat kecukupan ketersediaan, namun masih terdapat persoalan yang perlu jadi perhatian yaitu:

- Rendahnya pengawasan terhadap keamanan pangan.
- Rendahnya keragaman konsumsi pangan masyarakat.
- Masih terjadi fluktuasi harga pangan pada periode tertentu.

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai posisi yang cukup penting karena terkait dengan isu gender dan hak-hak anak, ada beberapa persoalan yang perlu perhatian :

- Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.
- Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung meningkat.
- Rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan.
- Tingginya angka perceraian.
- belum tercapainya prediket kabupaten layak anak.
- masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

11. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sudah berjalan dengan baik, namun beberapa persoalan yang perlu diperhatikan:

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- Fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya.
- Belum optimalnya sinergisitas pembangunan di Nagari dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten.

12. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga secara umum sudah menunjukkan perkembangan yang positif, namun beberapa permasalahan perludiperhatikan ;

- Terjadinya peningkatan laju pertumbuhan penduduk dari 0,92 di tahun 2010 menjadi 1,57 di tahun 2020.
- Masih terjadinya kelahiran pada usia remaja (perempuan usia 15–19 tahun).
- Tingginya Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi.

13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja pembangunan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mengalami peningkatan, namun beberapa persoalan yang perlu diperhatikan:

- Masih ada data kependudukan yang belum dimutakhirkan.
- Belum terintegrasinya data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik seperti perbankan, kesehatan, sosial, pajak dan pendidikan.

14. Perikanan

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang mempunyai potensi besar bidang kelautan dan perikanan karena memiliki garis pantai yang panjang dan banyak pulau-pulau kecil, namun masih terdapat beberapa permasalahan :

- Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan untuk peningkatan nilai tambah produksi.
- Belum optimalnya pemasaran hasil perikanan.
- Masih rendahnya kesejahteraan nelayan dan keluarganya.
- Belum terpenuhinya kebutuhan es untuk penanganan pasca panen hasil perikanan.

15. Pariwisata

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai potensi pariwisata yang besar terutama wisata pantai dan pulau, namun terdapat beberapa permasalahan:

- Belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata.
- Kurangnya inovasi dan atraksi pada daya tarik wisata.
- Rendahnya tingkat amenities pada sejumlah daya tarik wisata.
- Masih rendahnya sumberdaya manusia pelaku usaha pariwisata.
- Belum optimal penggalan potensi budaya yang akan dikembangkan mendukung sektor pariwisata.

- Belum berkembangnya ekonomi kreatif dalam menunjang pengembangan pariwisata.
- PAD sektor pariwisata belum optimal

16. Pertanian

Sektor Pertanian dalam arti luas memiliki peran penting di Kabupaten Pesisir Selatan karena menyumbang lebih dari 1/3 dari PDRB, namun masih terdapat beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian:

- Tingginya penggunaan bibit non bersertifikasi.
- Rendahnya implementasi teknologi budidaya pertanian.
- Belum optimalnya SDM petugas penyuluh pertanian.
- Rendahnya sawah yang beririgasi teknis.
- Masih rendahnya kesejahteraan petani.
- Ketidakstabilan harga komoditi pertanian.
- Masih rendahnya kemandirian petani terutama sektor pemodalan dan tidak berjalannya kelembagaan kelompok tani dengan baik
- Masih belum fokusnya pengembangan komoditi yang sesuai dengan Penetapan zonasi komoditi unggulan
- Masih rendahnya inovasi hilirisasi komoditi pertanian, sehingga tidak menciptakan nilai tambah terhadap komoditi pertanian

17. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sudah berjalan dengan baik hal ini diindikasikan dari capaian indikator kinerja. Namun masih terdapat tantangan ke depan yaitu meningkatkan kepuasan/ kepercayaan publik terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah serta meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik, beberapa yang perlu ditingkatkan terkait hal tersebut yaitu :

- Pelaksanaan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan berbasis e-government
- Penerapan manajemen kinerja pemerintah daerah
- Penyediaan sarana dan prasarana informasi
- Penyediaan SDM terkait penyediaan informasi dan pelayanan publik

18. Perdagangan

Sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Ada beberapa hal yang masih perlumendapat perhatian, yaitu:

- Masih kurangnya sarana dan prasarana perdagangan
- Adanya penolakan sebagian pedagang untuk dilakukan penataan
- Belum optimal penataan sarana dan prasana perdagangan
- Belum adanya pendampingan untuk menuju model distribusi pasar era industri 4.0

19. Perindustrian

Pembangunan perindustrian akan menggerakkan perekonomian, karena besarnya nilai kapitalisasi modal, tingginya daya serap tenaga kerja serta meningkatkan nilai tambah (*valueadded creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Beberapa permasalahan pembangunan sektor industri yaitu:

- Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri
- Belum optimalnya inovasi teknologi industri;
- Rendahnya kualitas produk industri kecil dan menengah sesuai standar
- Terbatasnya jumlah produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi nasional
- Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya
- Belum sinkronisasi program pengembangan IKM yang dilakukan oleh Provinsi dengan program pengembangan di kabupaten/kota

20. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendominasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

- Pendampingan kelembagaan koperasi masih perlu penguatan;

- Skala pembiayaan dan akses sumberdaya koperasi dan UMKM masih terbatas dan rendah;
- Tingkat produktifitas koperasi dan UMKM belum maksimal;
- Rendahnya jumlah produk UMKM yang tersertifikasi, terstandarisasi termasuk hak paten.
- Belum optimalnya pemasaran produk koperasi dan UMKM
- Terbatasnya kemampuan Koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya lokal daerah dalam pengembangan usaha
- Rendahnya kompetensi koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk lokal daerah
- Lemahnya kemampuan dan kualitas manajemen kelembagaan Koperasi dan UMKM
- Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas
- Pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
- sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional

21. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tantangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan pendapatan daerah pada 5 tahun yang akan datang jauh lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menutup kemungkinan daerah untuk menambah jenis pajak daerah baru. Daerah hanya dapat melakukan intensifikasi 11 jenis pajak daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Di samping itu, dengan sistem pemungutan pajak daerah *self assessment* sebagaimana yang diamanatkan dalam uu no. 28 tahun 2009, maka daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap berbagai hal, antara lain penyesuaian stuktur organisasi, sistem pelayanan, kompetensi SDM khusus yang terkait dengan tata cara pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang No 28 tahun 2009 juga menegaskan bahwa daerah dimungkin melakukan penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang membandel, bahkan pada waktunya data ditagih dengan Surat Paksa. Untuk itu, ketentuan tentang penagihan dengan Surat Paksa harus diatur secara khusus dalam

Peraturan Daerah.

Penyerahan kewenangan dalam pemungutan PBB-P2 juga menjadi tantangan lain bagi daerah. Tantangan pertama adalah bagaimana mengatasi jumlah tunggakan PBB-P2 warisan yang diserahkan oleh institusi pemungut sebelumnya (KPP Pratama). Tantangan berikutnya adalah perlunya penyesuaian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang penilaian terakhir telah dilaksanakan lebih dari 10 tahun yang lalu. Untuk penilaian ini dibutuhkan SDM dengan kompetensi khusus yang memahami teknik-teknik penilaian NJOP; massal dan individual.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan dan Permendagri No. 90 tahun 2019 serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka daerah juga perlu melakukan penyesuaian dan atau membuat kebijakan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua perundangan-undangan ini berdampak luas dalam proses perencanaan dan penganggaran, antara lain perlunya penyusunan Analisis Standar Belanja baru yang sesuai dengan kode dan nomenklatur yang baru. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri masih membutuhkan pengembangan kemampuan SDM, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

4.1.3. Permasalahan Aspek Daya Saing

Daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor input, *Output* dan *Outcome* yang ada di suatu daerah, faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian. Inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut.

Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penguatan ekonomi domestik. Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh daerah dan nasional akan menjadi modal utama untuk menjaga momentum pembangunan serta melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju ke arah transformasi ekonomi menjadi negara maju serta berdaya saing. Oleh sebab itu, peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya akan sangat bergantung

pada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saingnya.

Permasalahan daya saing akan dilihat dari aspek: kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, sumber daya manusia dan perkembangan indeks daya saing daerah.

1) Permasalahan kemampuan ekonomi daerah

Pengeluaran konsumsi perkapita Kabupaten Pesisir Selatan cenderung meningkat selama periode 2015-2020, rata-rata naik sebesar 10,67% per tahun. Proporsi pengeluaran konsumsi perkapita didominasi oleh pengeluaran makanan sebesar 57,98 % dan 42,02 % non makanan, hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat membelanjakan uang untuk pemenuhan kebutuhan primer/ pokok. Persentase pengeluaran perkapita untuk makanan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 58,12% di atas provinsi Sumatera Barat sebesar 57,49 %.

Secara ekonomi, pertumbuhan konsumsi memiliki daya dorong yang lebih kecil dan berjangka pendek. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dibutuhkan pertumbuhan investasi. Pada tahun 2017 terjadi penurunan pertumbuhan investasi yang cukup mengkhawatirkan dimana pada tahun 2016 mencapai 6,84%, sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 3,50%, meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2019, tetapi baru mencapai angka 4,52%, nilai yang sama dengan tahun 2017. Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif semakin dibutuhkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi terutama pasca pandemi covid19.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan sektor pertanian yang cenderung menurun harus mendapat perhatian lebih. Hal ini, mengingat lapangan usaha pertanian merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian baik dalam hal produksi maupun lapangan usaha. Oleh sebab itu, upaya peningkatan produktivitas dengan pemanfaatan teknologi tepat guna serta upaya pengolahan menjadi penting agar sektor industri khususnya agro industri mampu tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam perekonomian daerah.

2) Permasalahan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Penyediaan Infrastruktur pelayanan dasar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat. Untuk itu, cakupan layanan harus terus ditingkatkan. Terkait dengan hal

ini, yang perlu mendapat perhatian adalah persentase rumah tinggal bersanitasi layak dimana meskipun sepanjang periode 2016-2020 selalu mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 capaiannya adalah 75,27%, meskipun angka ini diatas rata-rata Sumatera Barat, akan tetapi jika melihat target RPJMN 2020-2024 untuk akses sanitasi rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman adalah 90%, maka Kabupaten Pesisir Selatan tentunya perlu membenahi aspek sanitasi ini agar dapat mewujudkan sanitasi yang layak dan aman bagi kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dilihat dari ketersediaan irigasi, terjadi peningkatan sepanjang periode 2016-2020, akan tetapi sebagai kawasan lumbung pangan dimana laju pertumbuhan sektor pertanian cenderung menurun maka upaya peningkatan kualitas irigasi perlu diperhatikan dimasa mendatang. Pada tahun 2020 capaian kinerja adalah 57,05%, artinya baru separuh dari sistem irigasi di wilayah Pesisir Selatan yang berkualitas baik. Hal ini, harus ditingkatkan untuk dapat meningkatkan produksi pertanian di masa mendatang. Capaian infrastruktur lain antara lain; tahun 2020 cakupan layanan telekomunikasi sudah mencapai 100 % artinya sudah semua nagari sudah dapat layanan, rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 87,08 %, nilai ini di atas beberapa kabupaten lain dan nilai Provinsi Sumatera Barat sebesar 83,37 %. Rumah tangga yang menggunakan listrik dengan rasio ketersediaan listrik mencapai 100 % artinya semua nagari (182) sudah berlistrik.

Dalam hal infrastruktur transportasi, ada indikasi penurunan rasio panjang jalan perjumlah kendaraan, hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kendaraan lebih cepat dari pada pertumbuhan jalan. Dimana kendaraan yang meningkat adalah kendaraan pribadi. Hal ini, terlihat dari penurunan jumlah penumpang yang melalui terminal. Untuk itu, perlu diwaspadai agar pertumbuhan kendaraan ini tidak menimbulkan masalah dalam transportasi seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

3) Permasalahan Iklim Berinvestasi

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, investasi atau penanaman modal merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan oleh investasi relatif lebih besar dibanding faktor lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi baik lokal, nasional maupun investasi asing harus terus dilakukan. Semua aspek pendukung iklim investasi harus terus ditingkatkan,

realisasi pemberian izin yang masih dalam rentang 2 – 7 hari mesti diupayakan agar lebih singkat dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang baik

Keamanan daerah juga satu indikator yang mempengaruhi iklim berinvestasi, jumlah kejahatan yang dilaporkan selama tahun 2020 sebanyak 624, jumlah ini masih di atas kabupaten lain, namun lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat sebesar 9.128

4) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan suatu daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. rasio tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana (S1, S2, dan S3) menunjukkan peningkatan selama periode 2015-2019, dimana pada tahun 2019 nilainya sebesar 4,12%. Angka ini masih berada di bawah rata-rata Sumbar yakni sebesar 5,24%. Untuk itu, perlu upaya untuk mendorong penduduk usia muda agar meningkatkan kualitas guna meraih bonus demografi yang diperkirakan akan memasuki Indonesiapada tahun2020-2030.

4.2. Isu-Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap pembangunan daerah pada masa mendatang. Jika pemerintah memprioritaskan antisipasi dan penanganan isu strategis, maka peluang tercapainya tujuandansasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Sebaliknya, kesalahan dalam mengelola isu strategis menyulitkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Perumusan isu strategis kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui identifikasi berbagai isu global, nasional, regional, tujuan pembangunan berkelanjutan, RTRW, dan KLHS.

4.2.1. Telaah Isu Strategis Lingkungan Global

a. Pandemi COVID-19

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda dunia dan mulai menginfeksi Indonesia di awal Maret 2020 berdampak terhadap segala aspek dan struktur kehidupan. Dampak pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif bagi

perekonomian dunia yang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi dunia. Berbagai upaya telah dilakukan di banyak Negara untuk melawan dampak ekonomi akibat kebijakan *lockdown* dan pembatasan sosial. Perkiraan bahwa output ekonomi global berkontraksi sebesar 4,5 persen tahun 2020. Anjloknya perdagangan global dan pasar tenaga kerja yang dilanda kekacauan akibat pandemi Corona menyebabkan tingginya tingkat pengangguran.

Berbagai kondisi yang melanda dunia ini juga berdampak terhadap perekonomian lokal khususnya Kabupaten Pesisir Selatan. Turunnya perekonomian Sumatera Barat sebesar -1,60 persen dan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan sebesar -1,11 persen menggambarkan dampak negatif pandemic terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini menjadi isu yang penting untuk dimasukkan dalam penyusunan perencanaan daerah ke depannya.

b. Kondisi Perekonomian Global

Kondisi lingkungan global merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun kedepan. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia berada pada -4,3 persen tahun 2020 jauh berkontraksi dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh di angka 2,9 persen. Namun, pada tahun 2021, OECD memprediksi bahwa ekonomi dunia akan kembali tumbuh sebesar 3,3 persen dan akan terus membaik.

Menurut OECD hampir semua negara-negara di dunia mengalami kontraksi seperti Kanada, Australia, kawasan Eropa, Inggris, Jepang, Amerika Serikat, dan Cina. Bahkan Cina yang sebelumnya tumbuh sebesar 6,1 persen pada tahun 2019 diperkirakan turun di tahun 2020. Mengingat kuatnya ketergantungan Indonesia dengan negara-negara di dunia terutama Cina, Jepang, dan Australia, maka fenomena ini harus diantisipasi secara cermat agar tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia khususnya kabupaten Pesisir Selatan.

c. Perang Dagang Amerika Serikat vs Cina

Perang tarif antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya, terutama Cina, telah memperburuk kondisi perdagangan internasional antara negara-negara di Dunia. Bahkan perselisihan telah meluas ke teknologi, sehingga mengganggu rantai pasokan

global selama beberapa tahun belakang. Hingga saat ini, peluang berakhirnya perang tarif antara US dan Cina juga belum terlihat. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka pertumbuhan global akan semakin melambat dan berdampak pada Indonesia bahkan kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian dari Indonesia.

d. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pasar tunggal ASEAN menyebabkan kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Kabupaten Pesisir Selatan secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh. Optimalisasi edukasi masyarakat tentang peluang MEA, peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja kabupaten Pesisir Selatan merupakan modal utama Kabupaten Pesisir Selatan untuk bersaing dalam pasar tunggal ASEAN tersebut.

e. Perubahan Iklim Global

Kualitas lingkungan pada era globalisasi saat ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

f. Revolusi Teknologi Informasi

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan

IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul.

4.2.2. Telaah Isu Strategis Berdasarkan RPJM Nasional tahun 2020 – 2024

Tujuan pembangunan nasional RPJM Nasional tahun 2020-2024 adalah: “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Tema pembangunan yang dipilih untuk RPJMN 2020 – 2024 adalah “Indonesia berpenghasilan Menengah–Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan berkesinambungan”. Tema ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan: transformasi struktural berjalan, produktifitas tenaga kerja meningkat, iklim investasi kondusif dan GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
- b. Sejahtera dapat diwujudkan dengan: kualitas hidup meningkat, Perilaku disiplin dan beradab, SDM berkualitas dan berdaya saing, dan indeks kebahagiaan meningkat
- c. Adil dapat diwujudkan dengan: ketimpangan menurun dan redistribusi berjalan baik
- d. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan: memperhatikan daya dukung dan daya tampung (*Low Carbon Development*) dan selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Isu strategis RPJM Nasional 2020-2024 yang perlu untuk dipedomani dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026 ini adalah sebagai berikut:

- A. Pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang :

1. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, sasaran yang ingin dicapai yaitu : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kemandirian ekonomi agar keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat terjaga sebagaimana tercermin pada sasaran pokok bidang ekonomi dan bidang sosial.
2. Pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik, isu strategis yang dirumuskan adalah peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi public, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Pengarusutamaan gender, dengan isu strategis yaitu : meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
4. Pemerataan dan penanggulangan kemiskinan, isu strategis adalah : penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan penghidupan berkelanjutan.

B. Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Kependudukan dan Keluarga Berencana
2. Kesehatan dan Gizi Masyarakat
3. Pendidikan
4. Perpustakaan
5. Pemuda Olahraga
6. Kebudayaan
7. Agama
8. Kesejahteraan Sosial
9. Kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan
10. Perlindungan anak

C. Ekonomi

1. Perkembangan ekonomi makro
2. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
3. Peningkatan pariwisata

4. Peningkatan ekonomi kreatif
5. Penguatan investasi
6. Mendorong perdagangan dalam daerah
7. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja
8. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
9. Data dan Informasi Statistik

D. Pembangunan wilayah dan tata ruang

1. Informasi geospasial
2. Tata ruang
3. Pertanahan
4. Perkotaan
5. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan
6. Kawasan transmigrasi
7. Kawasan Strategis
8. Daerah tertinggal
9. Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
10. Kapasitas Aparatur Pemerintah daerah
11. Kapasitas keuangan pemerintah daerah

E. Bidang penyediaan sarana dan prasarana

1. Perecepatan pembangunan perumahan
2. Pembangunan prasarana dasar kawasan permukiman serta energy dan ketenagalistrikan
3. Menjamin ketahanan air
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur

F. Bidang Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

1. Pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan
2. Pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani
3. Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasar hasil perikanan.
4. Peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan serta pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati (KEHATI)
6. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana

4.2.3. Telaah Isu Strategis Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat. Adapun visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah: **TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN** dengan misi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Falsafah ABS-SBK
3. Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan
4. Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital
5. Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisata
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel, serta Berkualitas

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Pesisir Selatan menyelaraskan program pembangunan dengan mengupayakan terwujudnya masyarakat yang madani dan sejahtera. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan pembangunan yang mencakup pembangunan ekonomi dan manusia secara bersama-sama.

4.2.4. Telaah Isu Strategis berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) merupakan kelanjutan dari program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Rumusan TPB terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator, dimana pencapaiannya lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia yang lebih baik. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Berikut ditampilkan beberapa isu strategis berdasarkan TPB yang belum tercapai di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan evaluasi TPB, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Isu-Isu Strategis Daerah Sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Bidang	Isu Prioritas
1	Kesehatan	• Belum tercapainya indikator terkait Kesehatan balita yaitu persentase capaian imunisasi lengkap pada bayi • Belum tercapainya prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) pada pasangan usia subur

No	Bidang	Isu Prioritas
		• Belum tercapainya indikator terkait pelayanan kesehatan jiwa pada puskesmas • Belum tercapainya angka insiden tuberkolosis pada penduduk
2	Pendidikan	• Belum tercapainya APK Paud dan APK SMP Sederajat • Belum tercapainya rata-rata lama sekolah penduduk umur $\geq$ 15 Tahun • Belum terlaksananya Pendidikan layanan khusus SMAB (Sekolah/Madrasah Aman Bencana)
3	Sosial	• Belum tercapainya hak dasar penyandang disabilitas yang miskin dan rentan • Belum tercapainya pendampingan psikososial korban bencana sosial
4	Pekerjaan Umum	• Belum tercapainya akses terhadap sumber air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan • Belum tercapainya target proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
5	Perumahan Rakyat	• Belum tercapainya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
6	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	• Belum tercapainya indeks resiko bencana • Belum adanya dokumen strategi pengurangan resiko bencana

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Pesisir Selatan, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

4.2.5. Telaah Isu Strategis berdasarkan RTRW Pesisir Selatan

Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan isu strategis pembangunan daerah Pesisir Selatan untuk lima tahun kedepan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Telaah terhadap tata ruang memberikan gambaran geografis tentang arah pembangunan daerah lima tahun

kedepan.

A. Rencana Struktur Ruang

a. Rencana Sistem Perkotaan

Rencana pengembangan sistem perkotaan dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara berhirarki sesuai potensi yang dimiliki setiap pusat kegiatan atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan. Artinya, penetapan sesuai potensi didasarkan pada kondisi saat ini (eksisting), baik yang menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, sedangkan arah kebijakan pengembangan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai melalui pengembangan suatu pusat kegiatan yang rencana pengembangan kedepan dalam kurun waktu perencanaan.

b. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan kebutuhan dan peningkatan transportasi antar wilayah dan antar kawasan permukiman yang dikembangkan dalam ruang wilayah Kabupaten, serta keterkaitannya dengan sistem jaringan transportasi Provinsi dan Nasional. Selain itu, pengembangannya juga untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antar pusat permukiman dengan sektor kegiatan ekonomi daerah. Pengembangan sistem transportasi dilakukan secara terintegrasi yang meliputi rencana pengembangan transportasi darat dan transportasi laut.

c. Rencana Sistem Jaringan Energi

Pengembangan sistem jaringan energi terutama jaringan energi listrik meliputi prasarana pembangkit dan jaringan. Penyediaan energi listrik di daerah ini untuk jangka pendek, jika dilihat dari jaringan daya yang ada dengan kapasitas 6.294 KW bersumber dari PLN Cabang Padang. Sampai tahun 2030 diperkirakan kebutuhan energi listrik di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 145.941 MW. Kebutuhan tenaga listrik di daerah ini meningkat setiap tahunnya sebesar 2,83 %.

Seyogyanya kapasitas listrik yang sudah ada, diprioritaskan untuk kebutuhan

energi listrik di daerah ini. Sedangkan untuk jangka panjang selain dari jaringan PLN (Perusahaan Listrik Negara) juga dapat dilakukan pengembangan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air yang berlokasi di Bayang Utara dengan kapasitas 43 MW, dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan, mengingat di daerah ini cukup tersedia sumber energi primer, terutama sumber energi terbarukan.

d. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Telekomunikasi merupakan prasarana penting dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, kegiatan pemerintahan serta kegiatan lainnya. Penyediaan telepon sampai saat ini masih didominasi oleh PT. Telkom Tbk melalui penyediaan beberapa sentral telepon otomatis (STO) yang tersebar pada seluruh Kecamatan.

Sistem jaringan telekomunikasi yang dikembangkan, meliputi sistem kabel, sistem seluler dan sistem satelit. Prasarana telekomunikasi dikembangkan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi, sehingga kebutuhan telekomunikasi dapat dipenuhi.

e. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sumber Daya Air di Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari Wilayah Sungai (WS) Lunang – Tarusan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang hari. Sistem jaringan sumberdaya air terdiri dari; sistem jaringan sungai (22 Sungai), sistem jaringan irigasi (278 buah dengan luas 58.849,5 Ha), sistem jaringan air baku (12 kecamatan), sistem pengendalian banjir (sepanjang aliran sungai), dan sistem pengamanan pantai (sepanjang garis pantai).

Kondisi Hidrologi di daerah ini terdiri dari 22 sungai besar dan sungai kecil yang merupakan bagian dari sistem jaringan sungai yang dipengaruhi oleh kondisi topografi dan struktur fisiografi terpapar dari timur ke barat. Seluruh sungai yang berada di daerah ini hulunya berada di Kabupaten Solok Selatan dan kawasan Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) serta Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang debit rata-rata 29,696 M³/dt (tahun 2008) dengan luas 6.232,02 km². Selanjutnya potensi air tanah terdiri dari air tanah yang mengalir di dasar sungai sebagai “base flow” dan air tanah yang saat ini dieksploitasi melalui sumur pompa PDAM, swasta dan Proyek Pengembangan Air Tanah. Potensi air tanah yang mengalir sebagai “base flow” sebesar ± 9.420,44 juta M³.

f. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Prasarana lingkungan digunakan antar wilayah melalui berbagai mekanisme kerjasama. Pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagai upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu di kembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kecamatan dalam pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Prasarana lingkungan terdiri atas; rencana sistim jaringan persampahan dan sistim pengelolaan air limbah; rencana sistim Penyediaan Air Minum (SPAM), Rencana sistim jaringan Evakuasi Bencana.

Lokasi pengembangan TPA terpadu harus didasari oleh kesepakatan dan kerjasama antar wilayah, dan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang persampahan. Sistem prasarana lingkungan sebagaimana yang dimaksud di atas ditetapkan dengan kriteria mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dinamika pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan, berupa disusunnya rencana sektoral seperti Master Plan Pengelolaan Sampah, RISPAM dan Rencana Penanganan Bencana, maka rencana pengembangan sistim prasarana lingkungan perlu disesuaikan dengan mengadopsi rencana-rencana tersebut.

B. Rencana Pola Ruang

a. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Pengelolaan kawasan lindung secara baik dan benar, dapat mengurangi tingkat bahaya bencana alam yang ditimbulkan seperti banjir, longsor, kekeringan, dan sebagainya. Selain bencana alam kerusakan kawasan lindung juga menimbulkan bencana sosial akibat hilangnya aset hidup yang seharusnya diperoleh masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri ATR No 01 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota maka rencana kawasan lindung di Kabupaten Pesisir Selatan hingga tahun 2030 dapat diidentifikasi menjadi (1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang meliputi, kawasan hutan lindung yang ditetapkan pemerintah melalui surat keputusan menteri

yang berwenang di bidang kehutanan, kawasan lindung gambut, dan kawasan resapan air. (2) Kawasan perlindungan setempat yang meliputi, kawasan Sempadan Pantai, Kawasan Sempadan Sungai, dan Ruang Terbuka Hijau. (3) Kawasan Konservasi yang meliputi, Kawasan suaka alam, Kawasan pelestarian alam, dan Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (4) Kawasan lindung geologi berupa kawasan sempadan mata air, (5) Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitasnya ancaman atau dampak yang palinh tinggi, meliputi, Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah termasuk tanah longsor dan Sempadan patahan aktif pada kawasan rawan bencana gempa bumi, (6) Kawasan Cagar Budaya, (7) Kawasan ekosistem mangrove.

b. Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan, dan pemantauan kegiatan termasuk penyediaan prasarana dan sarana maupun penanganan dampak lingkungan akibat kegiatan budidaya. Penetapan kawasan budidaya hingga tahun 2030 didasarkan pada Peraturan Menteri ATR Nomor 01 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasil kesepakatan antar wilayah pada Ditjen Penataan Ruang yang menyangkut klasifikasi pemanfaatan ruang kabupaten. Luas keseluruhan kawasan budidaya mencapai lebih kurang seluas 288.143 Ha atau 47,63% (direncanakan sampai tahun 2030) dari luas wilayah administrasi, yang meliputi :

- i. Kawasan hutan produksi yang meliputi :
 - a) Kawasan hutan produksi terbatas
 - b) Kawasan hutan produksi tetap
 - c) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi
- ii. Kawasan hutan rakyat;
- iii. Kawasan pertanian yang meliputi :
 - a) Kawasan tanaman pangan
 - b) Kawasan hortikultura
 - c) Kawasan perkebunan
 - d) Kawasan peternakan

- iv. Kawasan perikanan;
 - a) Kawasan perikanan Tangkap
 - b) Kawasan perikanan budidaya
- v. Kawasan pertambangan dan energi yang meliputi :
 - a) Kawasan pertambangan mineral
 - b) Kawasan pertambangan mineral bukan logam
 - c) Kawasan pertambangan batubara
- vi. Kawasan industri;
- vii. Kawasan pariwisata;
- viii. Kawasan permukiman yang meliputi :
 - a) Kawasan Permukiman Perkotaan
 - b) Kawasan Permukiman Perdesaan
- ix. Kawasan pertahanan dan keamanan

4.2.6. Telaah Isu Strategis berdasarkan RPJPD Pesisir Selatan

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pesisir Selatan adalah: “Pesisir Selatan Daerah Maju, Sejahtera Dengan Basis Ekonomi Pangan dan Pariwisata”. Upaya untuk mencapai visi tersebut diwujudkan menjadi lima misi pembangunan jangka panjang yaitu:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih yang berorientasi pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Mengembangkan dan memperkuat industri pangan berbasis keunggulan lokal yang dalam perkembangannya bersinergi dengan pertumbuhan pariwisata daerah.
- c. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dalam rangka membangun sumberdaya insani yang memiliki daya saing tinggi
- d. Mengembangkan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.
- e. Pengendalian bencana dan mempertahankan kelestarian lingkungan.

RPJMD tahun 2021 – 2026 merupakan bagian terakhir dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pesisir Selatan tahun 2005 – 2025. Pada tahapan ini pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas

pangan daerah, penumbuhan Industri Pangan Sebagai Pilot Proyek pada beberapa desa tertentu. Meletakkan dasar bagi pengembangan SDM di bidang industri pangan, Penyiapan kelembagaan dan peraturan untuk mendukung industri pangan Peraturan Daerah, SKPD yang mendukung, Internalisasi Riset dan teknologi tepat guna di bidang pangan, Pengembangan Infrastruktur Pedesaan, Peningkatan Infrastruktur Pengairan, Pemeliharaan Hutan, Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Tenaga Listrik, dan pengkajian secara lebih mendalam tentang kemungkinan berdirinya perusahaan daerah yang bergerak pada industri pangan.

Dibidang pariwisata, pembangunan lebih banyak diarahkan pada dua kawasan utama yakni Kawasan Carocok Painan yang terintegrasi dengan kawasan strategi Panasahan-Carocok dan Bukit Langkisau (Pacar Bulan). Berbagi infrastruktur dan SDM yang baik perlu disiapkan di kawasan ini.

Sementara itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menuntaskan secara penuh wajib belajar 9 tahun, penuntasan buta aksara, dan peningkatan pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit. RSUD M. Zein terus di dorong menjadi rumah sakit Tipe B dan di Tapan diharapkan telah dibangun sebuah Rumah Sakit Tipe D, sehingga jaminan akan layanan kesehatan yang baik menjadi semakin merata.

4.2.7. Isu Strategis Pembangunan Sesuai dengan RPJPD dan RPJMD Daerah Bersepadan.

Kota Padang merupakan daerah bersepadan di utara Kabupaten Pesisir Selatan dan juga merupakan pusat pemerintahan provinsi Sumatera Barat, sehingga setiap pembangunan di Kota Padang menjadi daya tarik dan katalis bagi pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kota Padang dengan visi Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Yang Madani, selaras dengan Mewujudkan masyarakat Pesisir Selatan yang Bermartabat dengan mewujudkan Kehidupan masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah). Suatu daerah akan maju jika memiliki masyarakat yang berpendidikan. Demikianpun kesejahteraan, dapat dikembangkan dengan perekonomian dengan memajukan perdagangan dan pariwisata. Maka Kemajuan Perdagangan dan pariwisata di dua daerah yang bersepadan ini akan saling

menguntungkan.

Kota Padang sebagai penghubung dari dan keluar propinsi. Kebijakan yang dibuat Kota Padang dan atau kebijakan pusat terhadap daerah tetangga lainnya akan berpengaruh kepada pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa kebijakan yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan laut antara Pemerintah Kota Padang dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemerintah Pusat akan menjadikan Pelabuhan Penasahan sebagai Pelabuhan Pengumpan bagi Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Logistik bagi Kepulauan Mentawai. Sarana prasarana perhubungan ini dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas orang (penumpang), barang dan jasa untuk mendukung perdagangan, pendidikan dan pariwisata di masing-masing daerah bersepadan.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan secara terpadu sesuai Rencana Tata Ruang masing masing untuk meningkatkan akses transportasi dan perhubungan dengan memperhatikan aspek kebencanaan baik itu terhadap ancaman tsunami, banjir dan tanah longsor.
3. Mengembangkan pariwisata Kawasan Wisata Mandeh sebagai kawasan strategis nasional akan meningkat dengan adanya iklim perekonomian inklusif berbasis sektor perdagangan dan pariwisata, termasuk transportasi di Kota Padang.

Namun dari segi kewilayahan masih perlu didorong kerjasama untuk penyelesaian status kepemilikan pulau-pulau kecil antara Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan yang belum tuntas, masih perlu pemetaan dan tata ruang pulau-pulau kecil dengan fasilitasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.

Disebelah timur, Kabupaten Pesisir Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, sedangkan di bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu. Tiga daerah di sebelah Selatan dan Timur ini, merupakan sama sama penyangga paru paru dunia, hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sehingga kalau kabupaten Muko-Muko dengan salah satu misi dalam RPJP adalah Mewujudkan pemanfaatan dan pemeliharaan kelestarian alam yang bijaksana, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi memiliki misi sebagai berikut: Pertama, pemantapan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar sektor.

Kedua, meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas. Tiga, meningkatkan pendapatan dan daya saing daerah berbasis pertanian, industri dan pariwisata. Empat, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan komoditi lokal berbasis tata ruang. Kelima, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dalam RPJP 2010-2025 bervisi untuk menjadi Kota Pendidikan yang Berdaya Saing, Perdagangan dan Jasa yang Produktif serta Berwawasan Lingkungan, sedangkan di Kabupaten Solok Selatan ada empat sektor prioritas pembangunan yaitu pertanian, koperasi, perdagangan-UKM, dan pariwisata-tenaga kerja yang didukung dengan infrastruktur dan lingkungan hidup, sehingga sinergi dengan misi ketiga RPJMD Pesisir Selatan Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah dengan meletakkan pijakan strategis dalam perencanaan dan pengelolaan (1) komoditi unggulan; (2) mengoptimalkan industri pengolahan; (3) pemetaan potensi (4) pelestarian lingkungan hidup dan kawasan lindung; dan (5) pembangunan infrastruktur.

4.2.8. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil telaah, terdapat 8 (delapan) Isu Strategis Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagian dari isu tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Oleh sebab itu, jika satu isu bisa ditangani dengan baik, maka isu lainnya secara otomatis bisa diatasi dengan baik pula. Namun, jika penanganan satu isu tidak optimal, maka isu yang lain akan semakin memberatkan proses pembangunan. Secara ringkas isu strategis kabupaten Pesisir Selatan untuk lima tahun kedepan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi daerah akibat dampak pandemi COVID-19

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memberikan dampak yang sangat besar pada aspek ekonomi dan harus menjadi perhatian. Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan akibat pengaruh dari luar maupun keadaan di daerah sendiri. Keadaan ini harus segera diatasi agar tidak terpuruk lebih dalam lagi menjadi depresi ekonomi. Karena itu, pemulihan ekonomi harus segera dirancang dan mulai dilaksanakan. Beberapa basis yang dapat dijadikan motor penggerak perbaikan adalah pemanfaatan sumber daya alam melalui strategi inovasi, mengandalkan sektor pertanian dan usaha rakyat pada komoditi yang layak bisnis,

mengembangkan perdagangan dan pasar lokal, penerapan teknologi informasi, serta mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk koperasi, Badan Usaha Milik Nagari (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2. Peningkatan penataan dan kualitas penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik.

Salah satu indikator dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai SAKIP dan LPPD. Secara berturut-turut selama tiga tahun terakhir, Kabupaten Pesisir Selatan mencapai nilai SAKIP sebesar B. Sehingga, target nilai SAKIP sebesar BB pada tahun 2019 belum tercapai. Kedepannya, pemerintah perlu berupaya lebih keras dalam meningkatkan akuntabilitasnya. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perlu didukung oleh penggunaan teknologi secara optimal. Perlu peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-goverment). Dengan penyelenggaraan e-goverment maka pihak-pihak berkepentingan akan dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah dengan mudah, murah, cepat dan transparan. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Selain SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang sangat penting dan menyeluruh yang harus dicapai. Indeks RB menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi yang diharapkan pada tahun 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 adalah Menghasilkan pemerintahan yang berkualitas yang ditandai dengan :

- Tidak ada korupsi
- Tidak ada pelanggaran
- APBN dan APBD baik
- Semua program selesai dengan baik
- Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat

- Komunikasi dengan publik baik
- Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif
- Penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; dan
- Hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, prolaps kerja, dan
- Pengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

3. Pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan dasar

Semangat otonomi daerah tidak hanya dimaknai dengan peningkatan kewenangan daerah dalam mengatur pemerintahannya namun juga terkandung di dalamnya semangat peningkatan layanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu pemerintah kabupaten pesisir selatan berkomitmen untuk lebih meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bagi masyarakat guna terpenuhinya standar pelayanan minimum terutama terkait urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu pelayanan Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sosial. Untuk memberi nilai tambah lebih bagi masyarakat, komitmen pemenuhan layanan juga mencakup terhadap hak-hak sipil masyarakat khususnya terkait dokumen kependudukan dan pencatan sipil.

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah diiringi penataan dan penyediaan infrastruktur

Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun terakhir mengalami penurunan kontribusi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan. Kondisi ini merupakan tantangan utama bagi kabupaten Pesisir Selatan kedepannya di dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi. Untuk mengantisipasi masalah ini, pemerintah harus berupaya keras dalam menata kembali sektor industri manufaktur dan menemukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang potensial.

Seiring dengan hal diatas, RPJMD tahun 2021 – 2026 merupakan tahap akhir dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005 – 2025. Pada tahap ini pemerintah diharapkan untuk mempersiapkan pembangunan industri pangan dengan berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing nasional. Jika hal ini terwujud, maka diharapkan sektor industri khususnya industri pangan akan kembali menjadi motor penggerak ekonomi Pesisir Selatan.

Selain pembenahan sektor industri, sektor pariwisata bisa dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka sektor pariwisata sangat berpotensi untuk dikembangkan di Pesisir Selatan. Pengembangan sektor pariwisata dapat diiringi dengan pengembangan ekonomi kreatif. Sehingga, *multiplier effect* akan semakin besar, dimana perekonomian akan meningkat, pendapatan masyarakat juga meningkat, meningkatkan daya beli masyarakat yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup.

Beriringan dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi, Penataan dan penyediaan infrastruktur baik merupakan aspek utama dalam peningkatan dan pemerataan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan yang utama untuk menggerakkan roda perekonomian. Penyediaan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, drainase dan pengolahan limbah sangat penting sebagai penunjang perekonomian. Penyediaan Infrastruktur sosial seperti prasarana pelayanan sosial juga sangat penting dalam upaya penurunan kemiskinan.

5. Penurunan angka kemiskinan

Selain kualitas sumber daya manusia, keberhasilan pembangunan manusia juga tercermin dari standar hidup layak. Salah satu indikator standar hidup layak adalah pendapatan atau pengeluaran perkapita. Pemerintah menetapkan standar tertentu yang dapat menentukan apakah penduduk telah menikmati standar hidup layak atau belum.

Penduduk yang pendapatan atau pengeluarannya dibawah standar yang ditetapkan disebut dengan miskin. Tingkat kemiskinan di Pesisir Selatan termasuk yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 merupakan ketigatertinggi di Sumatera Barat, setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai (14,35%) dan Kabupaten Solok (7,81%). Selain itu, laju penurunan tingkat kemiskinan di Pesisir Selatan juga mengalami perlambatan setiap tahunnya.

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Pengarusutamaan gender

Pembangunan manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Pembangunan manusia di Pesisir Selatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Selama lima tahun terakhir masih terdapat beberapa masalah dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Di bidang pendidikan terlihat bahwa angka partisipasi sekolah cenderung menurun untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, juga terjadi kenaikan yang cukup tajam pada angka putus sekolah pada tahun 2020. Permasalahan lain seperti ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kualitas pembelajaran masih menjadi isu utama di bidang pendidikan.

Dari sisi lain, perlu ditingkatkan pembinaan pengembangan karakter berdasarkan minat, bakat dan kreatifitas siswa dalam proses pendidikan mengingat hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dimasa yang akan datang dan juga menjadi salah satu indikator mutu kelulusan sekolah.

Pada sisi kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara holistik dan menyeluruh. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk menekan angka kematian, angka kesakitan, penderita gizi buruk, stunting, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara umum.

Pembangunan manusia di Kabupaten Pesisir Selatan akan diarahkan kepada penumbuhan SDM yang memiliki kompetensi, berkarakter, kreatif, inovatif, sehat lahir dan batin serta mampu beradaptasi dengan masyarakat global. Untuk itu, peran dari sektor pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan menjadi sangat strategis.

Di lain sisi dan perlu juga menjadi perhatian, Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan pada tahun 2015 sebesar 8,77 persen dan menurun secara signifikan hingga 6,7 persen pada tahun 2019. Hal yang samaterjadipada IPG (Indeks Pembangunan Gender) Pesisir Selatan yang mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir secara berturut-turut 94,62 (2018), 95,16 (2019) hingga 95,12 (2020). Artinya, capaian Indeks Pembangunan Manusia jenis kelamin perempuan di Pesisir Selatan menurun dibandingkan dengan capaian indeks yang samajenis kelamin laki-laki. Oleh sebab itu, diperlukan program baru dari pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan gender di Pesisir Selatan.

7. Meningkatkan pengamalan agama dan nilai-nilai kearifan lokal

Perubahan sikap mental dan budaya masyarakat, revitalisasi kelembagaan agama dan kelembagaan sosial kemasyarakatan sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya akan dapat dicapai melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini sangat penting dalam mencegah merebaknya kenakalan remaja, penyakit

masyarakat dan penyalahgunaan narkoba terutama dikalangan generasi muda sebagai penerus bangsa.

8. Mitigasi dan penanggulangan bencana serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan

Kabupaten Pesisir Selatan sangat rawan terhadap berbagai bencana, sehingga kondisi ini berpotensi menghambat atau mengganggu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena secara psikologis akan memberikan sentimen negatif terhadap investasi. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut perlu perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat terhadap upaya-upaya mitigasi dan manajemen kebencanaan. Upaya mitigasi dan manajemen bencana lebih berfokus pada penyiapan seluruh stakeholder untuk selalu siaga dan tanggap terhadap bencana disamping juga penguatan terhadap upaya-upaya tangap darurat serta pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana.

Isu pemanasan global seolah menyadarkan kita bahwa pembangunan yang kita lakukan hendaknya memperhatikan proses keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Untuk keperluan pembangunan kita terus mengeksplorasi sumber daya alam dengan membabi buta dan abai akan keberlangsungan hidup anak cucu di masa yang akan datang. Karena itu, tak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam setiap aktifitas yang kita lakukan sehingga kelestarian lingkungan hidup dapat terus dipelihara. Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup harus menjadi isu utama dalam pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan berbasis daya dukung dan daya tampung.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi RPJMD Tahun 2021-2026

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah yang akan diharapkan terwujud pada akhir tahun 2026, yang menggambarkan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2021-2024, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah:

**“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN
BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL
DAN PROFESIONAL”**

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Sejahtera** : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju** : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, ber peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermartabat** : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel** : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

5.2. Misi RPJMD Tahun 2021 - 2026

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermatahat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Penjelasan dan penjabaran masing-masing Misi sebagai berikut:

1. Misi Pertama:

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, (3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari adanya tuntutan kebutuhan

masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Membangun transparansi dan akutabilitas kinerja yang dimaksud dalam misi ini yaitu adanya saluran-saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi dan memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung *open government* pada seluruh instansi pemerintah daerah.

2. Misi Kedua:

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu: (1) peningkatan derajat kesehatan; dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lahir dari adanya cita-cita untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan perlindungan sosial lainnya bagi masyarakat ekonomi lemah.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Karena itu perlu untuk terus mendorong pemenuhan dan peningkatan tenaga kesehatan, sarana pelayanan primer (Puskesmas, klinik dan dokter praktek mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan, obat, dan perbekalan kesehatan lainnya), serta inovasi untuk pelayanan daerah terpencil.

Upaya ini tentu dilakukan dengan terus mendorong upaya-upaya promotif dan preventif secara masif dan terstruktur.

Di sisi lain, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah, akan terus didorong sehingga beban hidup masyarakat dapat dikurangi.

3. Misi Ketiga:**Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.**

Pada misi ini terdapat hal-hal strategis yang perlu menjadi kata kunci antara lain: (1) komoditi unggulan; (2) mengoptimalkan industri pengolahan; (3) pemetaan potensi (4) pelestarian lingkungan hidup dan kawasan lindung; dan (5) pembangunan infrastruktur.

Keberlimpahan potensi daerah, khususnya lahan yang subur untuk pertanian seharusnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk-produk yang mendorong meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu dibutuhkan kebijakan yang benar-benar fokus pada pengembangan komoditi yang sesuai dengan keunggulan kompetitif daerah sehingga sektor pertanian dapat ditingkatkan lagi daya ungkitnya bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya untuk memperbesar nilai produksi komoditi sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan), yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaksimalkan nilai tambah dari komoditi tersebut melalui pengembangan sistem budidaya produksi hulu-hilir yang tertata, terorganisir dan terpadu.

Pada tataran inilah konsep hilirisasi dan industrialisasi harus dijadikan arus utama pengembangan perekonomian daerah. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan mendorong terwujudnya keterpaduan antara upaya peningkatan produksi budidaya dengan peningkatan produk-produk turunannya yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah komoditi, pemerintah daerah juga akan mencoba untuk meminimalkan *production cost* akibat ekonomi berbiaya tinggi yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing produk yang dihasilkan. Pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian di seluruh wilayah seperti, konektivitas, penyediaan sumber air, jalan-jalan produksi dan sarana-prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang lebih penting, untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan kekayaan alam dan potensi yang berlimpah ini maka setiap upaya pembangunan harus dilakukan dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan.

4. Misi Keempat**Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan**

Pada misi keempat ini terdapat dua kata kunci (1) Wisata yang Nyaman berkesan, dan (2) Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi kesejahteraan.

Membangun sektor pariwisata, tidak bisa dilepaskan dengan membangun manusia. Paradigma yang selama ini beranggapan bahwa membangun pariwisata itu lebih terfokus pada pembangunan destinasi dan infrastruktur saja perlu digeser kepada paradigma baru bahwa fokus utama pembangunan pariwisata itu adalah pembangunan manusianya (pelakunya). Oleh karena itu arah pengembangan kepariwisataan ke depan lebih dititikberatkan kepada pembenahan manajemen pengelolaan destinasi, penguatan peran pentahelix dan pemberdayaan masyarakat pelaku wisata.

Ke depan, Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi berfokus pada upaya menjual keindahan alam semata, namun akan ditingkatkan pada upaya menjual keunikan ragam budaya, keramahtamahan masyarakat, kenyamanan destinasi dan kreatifitas masyarakat dan generasi muda. Karena itu kedepannya akan diberikan perhatian yang lebih kepada upaya pemberdayaan masyarakat pelaku wisata, pengembangan potensi kekayaan budaya dan kearifan lokal serta memperkuat peran nagari dalam memanfaatkan peluang daya ungkit pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata ini.

Dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat yang mengamalkan Sapta Pesona, maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan terkesan sehingga dapat tinggal lebih lama dan akan berkunjung kembali ke Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga harapan bahwa Pesisir Selatan menjadi daerah wisata favorit yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dapat terwujud.

5. Misi Kelima**Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing**

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang nilainya sangat strategis, yaitu: (1) pendidikan yang berkualitas; dan (2) sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, menjadi target yang ingin diwujudkan pada misi ini, sehingga keadaan dimana iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatifitas, inovasi, wawasan kebangsaan, kecerdasan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kreatifitas dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicapai.

Dengan menekankan upaya pembenahan pada sisi tenaga pendidik dan sisi peserta didik secara berimbang, maka diharapkan sistem pendidikan yang dibangun dapat melahirkan insan-insan yang religius, cerdas, berakhlak dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Misi ini juga menjadi ikhtiar Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyambut datangnya bonus demografi.

6. Misi Keenam

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tentram dan Dinamis

Pada misi keenam ini terdapat dua kata kunci yaitu (1) masyarakat yang aman dan tentram; dan (2) komunikasi yang harmonis dan dinamis antar lembaga.

Pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan baik dan optimal serta memberikan nilai tambah positif apabila masyarakatnya berada dalam kondisi aman dan tenteram. Kondisi aman dan tentram inilah yang akan coba diwujudkan agar selalu tercipta dalam masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan agar seluruh masyarakat menjadi Bahagia. Karena itu akan diupayakan untuk meminimalkan terjadinya konflik horizontal, perselisihan keluarga/ rumah tangga, kenakalan remaja, kekerasan pada anak dan perempuan.

Untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan kebahagiaan masyarakat tentu perlu sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi kemasyarakatan serta para tokoh agama dan pemangku adat.

5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

5.3.1 Tujuan Umum

Sesuai visi dan misi RPJMD tahun 2021-2026 di atas, Pemerintah Daerah menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus membaik sehingga pada tahun 2026 mencapai angka 71,68 sehingga Pesisir Selatan kembali masuk dalam daerah yang

memiliki IPM berkategori tinggi. IPM ini terdiri dari empat komponen pembentuknya yaitu: (a) Usia Harapan Hidup; (b) Rata-Rata Lama Sekolah; (c) Harapan Lama Sekolah; dan (d) Pengeluaran perkapita.

Perekonomian daerah diharapkan terus membaik dan meningkat secara konsisten dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,92 % pertahun. Hal ini sejalan dengan proyeksi target nilai PDRB yang mengalami peningkatan dari Rp.9,470 triliun di tahun 2020 menjadi Rp.11,923 triliun pada akhir tahun 2026. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan mengalami penurunan dari 7,00% di tahun 2020 menjadi 6,30 % pada tahun 2026. Begitu juga dengan Tingkat Kemiskinan yang diharapkan terus ditekan, dimana semula 7,61% tahun 2020 hingga mencapai 7,16 % pada akhir periode RPJMD. Hal ini sejalan dengan harapan terjadinya pemerataan kesejahteraan yang terus membaik yang ditandai dengan penurunan Indeks Gini dari 0,249 diawal RPJMD menjadi 0,233 diakhir tahun 2026.

Target dan proyeksi indikator makroekonomi dan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Proyeksi Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Awal		Target RPJMD Pertahun				
		Baseline	Outlook					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indek Pembangunan Manusia	69,90	70,06	70,21	70,59	70,98	71,39	71,68
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	7,06	71,04	71,22	71,39	71,57	71,74	71,92
	- Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,260	8,29	8,32	8,35	8,38	8,40	8,43
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,320	13,36	13,40	13,45	13,49	13,53	13,57
	- Pengeluaran Perkapita (ribu Rp/org /thn)	9.212	9.325	9.369	9.534	9.734	9.949	10.182
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,11	2,55	2,89	4,17	4,52	4,62	4,75
3	PDRB harga konstan (Rp.Triliun)	9,470	9,711	9,992	10,409	10,879	11,382	11,923
4	Indek Gini	0,249	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,00	6,93	6,85	6,73	6,61	6,46	6,30
6	Tingkat Kemiskinan (%)	7,61	7,79	7,67	7,55	7,42	7,29	7,16

Sumber Data: Hasil Proyeksi Bappedalitbang Kab. Pessel, dan Bappeda Provinsi Sumbar 2021.

5.3.2 Tujuan Pembangunan Sesuai Misi

Memperhatikan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dijabarkan di atas, maka tujuan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan dalam periode 2021-2026 adalah:

Misi Pertama	: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi pertama adalah:

Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

Penguatan terhadap tata kelola pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan reformasi birokrasi dan semakin tingginya kinerja pemerintahan. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan semakin membaiknya indikator kinerja yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi** Kabupaten Pesisir Selatan yang ditargetkan tahun 2026 bernilai 65 atau katogori (B).

Misi Kedua	: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Terdapat 2 (dua) Tujuan yang hendak dicapai dalam misi kedua ini yaitu:

Tujuan 1:

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tujuan pertama yang ingin dicapai dari misi ini yaitu terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dari waktu-ke waktu. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu, meningkatnya **Usia Harapan Hidup** masyarakat yang ditargetkan tahun 2026 menjadi 71,92 tahun.

Tujuan 2:

Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kedua yang ingin diwujudkan pada misi ini yaitu semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan dua indikator kinerja yaitu, berkurangnya persentase masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan (**Tingkat Kemiskinan**) yang ditargetkan tahun 2026 sebesar 7,16 persen.

Misi Ketiga	: Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ketiga adalah :

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan

Penguatan fundamental dan kemandirian ekonomi daerah, dengan mendorong sektor-sektor potensial dan unggulan daerah diharapkan dapat mampu

meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu:

- Semakin meningkatnya **nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan** (atas dasar harga konstan) yang ditargetkan tahun 2026 sebesar Rp11,923 triliun.
- Semakin menurunnya tingkat ketimpangan dengan mempertahankan **Indeks Gini** di 0,233 pada tahun 2026

Misi Keempat	: Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi keempat adalah :

Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Upaya untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya **Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif** dengan target 7.200 orang, pada tahun 2026.

Misi Kelima	: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Terdapat 2 (dua) Tujuan yang hendak dicapai dalam misi kelima ini yaitu:

Tujuan 1:

Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas

Tujuan pertama yang ingin diwujudkan dari misi ini yaitu untuk mewujudkan dunia Pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Pesisir Selatan. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya **Persentase Pemenuhan 8 (delapan) Standar Mutu Pendidikan** yang ditargetkan tahun 2026 sebesar 21,34 persen.

Tujuan 2:

Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Tujuan kedua yang ingin dicapai pada misi ini yaitu agar terwujudnya sumber daya manusia Pesisir Selatan yang beriman, kreatif dan berdaya

saing. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya skor **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Bidang SDM** yang ditargetkan tahun 2026 memiliki nilai sebesar 3,8 dengan kategori sangat tinggi.

Misi Keenam	: Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi keenam adalah:

Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis

Misi ini dilaksanakan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis dan penuh kerukunan. Keberhasilan dari tujuan ini dicerminkan dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya **Indek Kebahagiaan** Masyarakat Pesisir Selatan yang ditargetkan tahun 2026 mencapai 75,92.

5.3.3 Sasaran Pembangunan

Sasaran strategis atau selanjutnya disebut sasaran, merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka ditetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai untuk setiap misi dan tujuan jangka menengah sebagai berikut:

I. Misi Pertama:

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Transparan

Tujuan:
1.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
Sasaran:
1.1.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja.
Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi diharapkan dapat meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, ditargetkan WTP setiap tahun.
- Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP), diupayakan mengalami perbaikan dengan target skor 65 atau BB.
- Skor Nilai LPPD akan ditingkatkan dengan target nilai mencapai 3,215.
- Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah mengalami perbaikan dan ditargetkan dapat mencapai skor 3,2 pada Level 3.

1.1.2 Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi

Upaya peningkatan kapabilitas birokrasi merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi agar efektifitas dan profesionalitas aparatur dan lembaga pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi diharapkan menjadi *tools* dan *booster* bagi percepatan peningkatan kapasitas birokrasi melalui penyelenggaraan sistem pemerintaahan berbasis elektronik.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Indeks Kelembagaan Pemerintahan Daerah, ditargetkan mencapai P-5 atau katogari sangat efektif.
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditargetkan mencapai nilai 3,90.
- Indeks Profesionalitas ASN terus meningkat dan ditargetkan mencapai nilai 85.
- Indeks Inovasi Daerah ditargetkan mengalami peningkatan hingga mencapai nilai 10.500.

1.1.3 Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

Keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang prima adalah tuntutan zaman di era tekhnologi informasi. Dengan semakin transparannya informasi bagi masyarakat dan semakin berkualitas pelayanan publik maka pengimplementasian reformasi birokrasi akan berjalan lebih baik sesuai harapan.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah daerah terus mengalami perbaikan dan ditargetkan mencapai nilai 85,00.
- Keterbukaan Informasi Publik semakin baik, ditargetkan mencapai nilai 95 dengan kategori sangat informatif.

II. Misi Kedua:

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Tujuan:

2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan

Sasaran:

2.1.1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka Pemerintah Daerah akan berupaya dan fokus pada upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin kecilnya angka kematian bayi, angka kematian ibu, menurunnya angka kesakitan dan prevalensi stunting.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Angka Kematian Bayi ditargetkan dapat dipertahankan tidak lebih dari 8 per-1.000 kelahiran hidup.
- Angka Kematian Ibu mengalami penurunan dan ditargetkan mencapai 75 per 100.000 kelahiran hidup.
- Angka Kesakitan masyarakat terus ditekan dengan target 14,84%.
- Prevalensi stunting terus ditekan dan membaik dengan target 8,88%.

2.1.2 Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Daerah akan mengupayakan pemenuhan cakupan perlindungan kesehatan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani hanya dikarenakan ketidakmampuannya secara ekonomi. Hal ini merupakan salah satu terobosan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan yang ditargetkan mencapai 100 persen.

Tujuan:
2.2 Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan
Sasaran:
2.2.1 Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan jaring pengaman sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD: - Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, ditargetkan sebesar 56,05 persen.
2.2.2 Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin Sasaran lain yang hendak dicapai dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini terutama untuk mencegah ketidakcukupan konsumsi pangan masyarakat. Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD: - Pencapaian skor pola pangan harapan mencapai bernilai 89. - Pengeluaran perkapita, ditargetkan mencapai Rp.10.182.000,- .

III. Misi Ketiga:

Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Tujuan:
3.1 Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan
Sasaran:
3.1.1 Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Dalam rangka mengakselerasi kemajuan, kemandirian dan pemerataan ekonomi, maka Pemerintah Daerah akan menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi baik yang berasal dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Nilai investasi swasta dan masyarakat, ditargetkan meningkat setiap tahun hingga terakumulasi sebesar Rp.2,5 trilyun.

3.1.2 Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki keunggulan kompetitif pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan. Kedepannya Pemerintah Daerah akan memaksimalkan produksi komoditi pada sektor unggulan ini dan lebih jauh akan mengupayakan peningkatan nilai tambahnya melalui hilirisasi komoditi.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Nilai PDRB Sektor Pertanian mengalami peningkatan dan ditargetkan Rp.4,11 trilyun.
- Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan dan ditargetkan menjadi Rp.761,87 milyar.

3.1.3 Menurunnya Pengangguran

Pemerintah Daerah akan memperluas kesempatan kerja guna menekan angka pengangguran. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan menjadi 6,30 persen.

3.1.4 Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan

Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi akan semakin cepat diwujudkan apabila infrastruktur penunjang bagi kegiatan ekonomi masyarakat tersedia secara merata. Infrastruktur yang memadai akan lebih mengefisienkan biaya produksi sehingga nilai tambah ekonomi akan semakin optimal.

Indikator dan target kinerja sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik mengalami peningkatan dengan target mencapai 35,90 persen.
- Rasio Konektivitas ditargetkan mencapai 63 persen.
- Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik ditargetkan menjadi 66,70 persen.

3.1.5 Terjaminnya Kelestarian Lingkungan

Pembangunan di segala bidang harus diimbangi dengan upaya pelestarian

lingkungan hidup. Hal ini untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi masa depan.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup membaik dan ditargetkan menjadi 88,15.

IV. Misi Keempat:

Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Tujuan:

4.1 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran:

4.1.1 Pesisir Selatan Menjadi Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia

Kemajuan pariwisata di suatu daerah ditandai dengan banyaknya kunjungan dan lamanya wisatawan menetap. Semakin banyak dan semakin lama wisatawan berada di Pesisir Selatan, maka akan semakin besar perputaran uang masuk dari sektor pariwisata. Hal ini tentu bisa terwujud apabila Pesisir Selatan mampu menjadi salah satu destinasi wisata favorit.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Jumlah kunjungan wisatawan (nusantara dan asing), ditargetkan mencapai 2.073.600 orang.
- Lama tinggal wisatawan ditargetkan meningkat menjadi 1,5 hari.

4.1.2 Berkembangnya Ekonomi Kreatif

Pada dasarnya ekonomi kreatif adalah bentuk aktivitas ekonomi yang mengutamakan kreatifitas berpikir sebagai modal utama dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang mempunyai nilai serta sifat komersial. Ekonomi kreatif sangat berperan dalam perekonomian suatu daerah terutama dalam menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, menambah kekayaan intelektual dan meningkatkan teknologi.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Nilai omset usaha ekonomi kreatif ditargetkan sebesar Rp. 50 Milyar.

V. Misi Kelima:

Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.

Tujuan:

5.1 Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas.

Sasaran:

5.1.1 Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan

Agar pendidikan berkualitas dapat terwujud, maka Pemerintah Daerah perlu untuk mengupayakan agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan. Pemerintah harus memastikan tidak ada lagi penduduk yang putus sekolah karena terkendala biaya.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Harapan Lama Sekolah, ditargetkan 13,57 tahun.
- Rata-Rata Lama Sekolah, ditargetkan 8,43 tahun.

5.1.2 Meningkatnya daya saing Pendidikan

Kondisi yang ingin diciptakan dengan pendidikan yang berdaya saing adalah meningkatnya prestasi peserta didik di Kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan prestasi peserta didik tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu pendidikan di segala bidang.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi ditargetkan sebanyak 14 orang.
- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengalami perbaikan dan ditargetkan menjadi 10,0682.

Tujuan:

5.2 Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Sasaran:

5.2.1 Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Masyarakat

Untuk mewujudkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing, maka Pemerintah Daerah akan mencoba meningkatkan pengimplementasian nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat revitalisasi falsafah ABS-SBK yang akan di fokuskan pada generasi muda sebagai generasi penerus masa depan.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid dan mushala, ditargetkan mencapai kategori tinggi.
- Persentase masyarakat membayar zakat harta, ditargetkan mencapai 100 persen.

5.2.2 Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kreatif dan Berdaya Saing

Bonus demografi harus disiapkan dari sekarang, agar dimasa depan potensi penduduk berusia produktif dapat membawa kemajuan dan bukan menjadi sumber masalah. Karena itulah perlu untuk mengembangkan kreatifitas dan jiwa kompetitif generasi muda.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Jumlah prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional ditargetkan sebanyak 30 orang.
- Jumlah wirausahawan yang berdaya saing terus berkembang dengan target sebanyak 80 orang.

VI. Misi Keenam:

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis

Tujuan:

6.2 Terciptanya Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis

Sasaran:

6.1.1 Terwujudnya Keluarga Bahagia

Dalam upaya menciptakan kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan dinamis, maka Pemerintah Daerah akan melakukan pendekatan-pendekatan melalui sentuhan terhadap keluarga. Hal ini akan terwujud dengan meningkatkan jumlah keluarga bahagia dan sejahtera yang ditandai dengan menurunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, berkurangnya kasus perceraian dan semakin meningkatnya masyarakat yang tinggal di rumah layak huni.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Proporsi temuan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, ditargetkan 0.0006 persen.
- Cakupan ketersediaan rumah layak huni ditargetkan sebesar 94,0788 persen.

6.1.2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

Upaya lain yang perlu dilakukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis adalah dengan mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat termasuk kaum perempuan dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri.

Indikator dan target kinerja dari sasaran strategis ini pada akhir RPJMD:

- Jumlah Nagari tangguh bencana utama, ditargetkan sebanyak 60 nagari.
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ditargetkan mencapai nilai sebesar 56,93.

Selanjutnya indikator dan target kinerja RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 untuk setiap misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2
Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan

No	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Outlook	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Kunci
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
VISI: MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL													
1	Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan												
		Tujuan 1.1											
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa satuan	55,06 (CC)	56 (CC)	58 (CC)	60 (B)	62 (B)	64 (B)	65 (B)	65 (B)	
		Sasaran 1.1.1											
		Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Seluruh PD
			Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	(66,88) (B)	68,00 (B)	70,00 (BB)	72 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	78 (BB)	78 (BB)	Seluruh PD
			Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3,2090	3209	3,2150	3,2230	3,2290	3,2340	3,2400	3,2150	Seluruh PD
			Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3 (3,0057)	3 (3,0057)	3 (3,0057)	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3 (3,2)	3 (3,2)	Seluruh PD
		Sasaran 1.1.2											
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks Kelembagaan	tanpa satuan	N/A	P-3 (Cukuf Efektif)	P-3 (Cukuf Efektif)	P-4 (Efektif)	P-4 (Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	Seluruh PD
			Indeks SPBE	tanpa satuan	3,34	3,20	3,20	3,35	3,55	3,70	3,90	3,90	Seluruh PD

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

No	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Outlook	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Kunci	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
			Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	4.266	5.150	6.300	7.500	8.500	9.500	10.500	10.500	Seluruh PD	
			Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	56	57	62	71	77	81	85	85	Seluruh PD	
		<u>Sasaran 1.1.3</u>												
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Katergori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	92 (informatif)	93 (informatif)	93 (informatif)	94 (informatif)	94 (informatif)	94 (informatif)	95 (informatif)	95 (informatif)	95 (informatif)	Seluruh PD
			Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	tanpa satuan	N/A	80	82.00	84.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	Seluruh PD
2	Misi 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat													
		<u>Tujuan 2.1</u>												
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	70,86	71,04	71,22	71,39	71,57	71,74	71,92	71,92		
		<u>Sasaran 2.1.1:</u>												
		Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	8	8	8	8	8	8	8	8	- 1.02 - 2.14
			Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	105	100	95	90	85	80	75	75	75	- 1.02 - 2.14
			Prevalensi stunting	persen	11,88	11,6	10,92	10,26	9,65	9,20	8,88	8,88	8,88	- 1.02 - 1.03 - 2.09 - 2.14
			Angka Kesakitan	persen	16,57	16,28	15,95	15,67	15,39	15,12	14,84	14,84	14,84	- 1.02 - 1.03
		<u>Sasaran 2.1.2:</u>												

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

No	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Outlook	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Kunci
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	73,4	75	80	85	90	95	100	100	- 1.02 - 1.06
		Tujuan 2.2											
		Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	persen	7,61	7,55	7,67	7,55	7,42	7,29	7,16	7,16	
		Sasaran 2.2.1											
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	51,90	52,54	53,00	53,56	54,20	55,04	56,05	56,05	- 1.06
		Sasaran 2.2.2											
		Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	86,4	86,5	87	87,5	88	88,58	89	89	- 1.06 - 2.09 - 2.13 - 2.17 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.30 - 3.31
Pengeluaran perkapita	Rp./org/th n		9.212.000	9.325.000	9.369.000	9.534.000	9.734.000	9.949.000	10.182.000	10.182.000			
3	Misi 3: Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah												
		Tujuan 3.1:											
		Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rp.	9,470	9,711	9,992	10,409	10,879	11,382	11,923	11,923	

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

No	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Outlook	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Kunci
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Indeks Gini	tanpa satuan	0,249	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		Sasaran 3.1.1:											
		Meningkatkan Investasi PMA dan PMDN	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	N.A	200.000	310.000	372.000	446.400	536.680	642.816	642.816	- 1.03 - 2.11 - 2.18
		Sasaran 3.1.2:											
		Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	TriliunRp	3,49	3,55	3,61	3,72	3,84	3,97	4,11	4,11	- 1.03 - 2.10 - 2.13 - 2.17 - 2.18
			Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	703,61	703,61	707,32	717,93	730,85	745,47	761,87	761,87	- 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.30 - 3.31 - 7.01
		Sasaran 3.1.3											
		Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,00	6,93	6,85	6,73	6,61	6,46	6,30	6,30	- 2.07
		Sasaran 3.1.4											
		Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	29,55	29,55	31,90	32,90	33,90	34,90	35,90	35,90	- 1.03 - 1.05 - 2.10
			Rasio Konektivitas	persen	54	55	57	58	60	61	63	63	- 2.15 - 3.27 - 3.30
			Proposi lahan sawah beririgasi baik	persen	57,05	59,05	59,20	60,75	62,60	64,60	66,70	66,70	- 3.32

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

No	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Outlook	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Kunci
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Sasaran 3.1.5											
		Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86,74	86,74	86,85	86,94	87,10	87,80	88,15	88,15	- 1.03 - 2.11
4	Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan												
		Tujuan 4.1:											
		Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif *	orang	N/A	4700	5200	5700	6200	6700	7200	7200	
		Sasaran 4.1.1:											
		Pesisir Selatan Menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	Jumlah kunjungan wisatawan	orang*	177.283	1.000.000	1.200.000	1.440.000	1.728.000	2.073.600	2.073.000	2.073.000	- 2.08 - 2.13 - 2.19 - 2.22
			Lama tinggal wisatawan	hari*	1,1	1,25	1,25	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	- 3.26 - 7.01
		Sasaran 4.1.2:											
		Berkembangnya Ekonomi Kreatif	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	Milyar Rp.	N/A	12	18	25	34	42	50	50	- 2.13 - 2.17 - 3.26 - 7.01
5	Misi 5: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing												
		Tujuan 5.1:											
		Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan	persen	8,4	10,56	12,72	14,87	17,03	19,18	21,34	21,34	

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

No	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Outlook	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Kunci
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		<u>Sasaran 5.1.1:</u>											
		Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,32	13,36	13,40	13,45	13,49	13,53	13,57	13,57	- 1.01
			Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,26	8,29	8,32	8,35	8,38	8,40	8,43	8,43	
		<u>Sasaran 5.1.2:</u>											
		Meningkatnya daya saing pendidikan	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang	n/a	4	4	7	9	12	14	14	- 1.01 - 2.13 - 2.22
			Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	tanpa satuan	3,4471	5,9258	6,643	7,2770	7,9741	8,7985	10,0682	10,0682	
		Tujuan 5.2.											
		Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,125)	Tinggi (3,150)	Tinggi (3,200)	Tinggi (3,350)	Tinggi (3,500)	Tinggi (3,650)	Sangat Tinggi (3,800)	Sangat Tinggi (3,800)	
		<u>Sasaran 5.2.1:</u>											
		Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96,38	96,40	96,50	96,60	96,70	96,80	100	100	- 1.01 - 2.13 - 4.01 - 7.01
			Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan	N/A	Rendah (≤10 orang)	Rendah (≤10 orang)	sedang (11 s.d 20 orang)	sedang (11 s.d 20 orang)	tinggi (≥21 orang)	tinggi (≥21 orang)	tinggi (≥21 orang)	
		<u>Sasaran 5.2.2:</u>											
		Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	N/A	10	10	10	10	10	10	50	- 2.19 - 4.01 - 7.01

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

No	Visi dan Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Outlook	Target					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Kunci
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Jumlah wirausahawan yang berdaya saing	orang	N/A	N/A	500	700	900	1100	1300	1300	
6	Misi 6: Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis												
		Tujuan 6.1:											
		Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tentram dan Dinamis	Indeks Kebahagiaan masyarakat	tanpa satuan	N/A	68,42	69,92	71,42	72,92	74,42	75,92	75,92	
		Sasaran 6.1.1:											
		Terwujudnya Keluarga Bahagia	Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0.0009	0.00085	0.0008	0.00075	0.0007	0.00065	0.0006	0.0006	- 1.04 - 2.08 - 2.14
			Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	99,8828	90,5208	91,0944	91,7109	92,4139	93,2033	94,0788	94,0788	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93	- 1.05 - 1.06 - 2.08 - 2.13 - 7.01 - 8.01
			Jumlah nagari tangguh bencana	nagari	N/A	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (162) Madya (20) Utama (0)	Pratama (122) Madya (40) Utama (20)	Pratama (82) Madya (60) Utama (40)	Pratama (62) Madya (80) Utama (60)	Pratama (62) Madya (80) Utama (60)	

Keterangan:

Kodefikasi Perangkat Daerah Kunci

Kode	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Konkuren Pemerintahan
1.01	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang pendidikan
1.02	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang kesehatan
1.03	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

1.04	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
1.05	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
1.06	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang sosial
2.07	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
2.08	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.09	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang pangan
2.10	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang pertanahan
2.11	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup
2.12	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2.13	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
2.14	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2.15	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang perhubungan
2.16	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
2.17	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
2.18	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang penanaman modal
2.19	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
2.20	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang statistik
2.21	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang persandian
2.22	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang kebudayaan
2.23	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang perpustakaan
2.24	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang kearsipan
3.25	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
3.26	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang pariwisata
3.27	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang pertanian
3.30	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang perdagangan
3.31	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang perindustrian
3.32	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan bidang transmigrasi
4.01	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Unsur Sekretariat daerah
4.02	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Unsur Sekretariat DPRD
5.01	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Unsur perencanaan
5.02	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Unsur keuangan
5.03	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Unsur kepegawaian
5.04	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Unsur pendidikan dan pelatihan
5.05	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Unsur penelitian dan pengembangan
6.01	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Unsur pengawasan

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

7.01	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Unsur kewilayahan
8.01	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan pemerintahan umum

5.4. Penyelarasan Visi dan Misi RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Dalam satu kerangka pembangunan nasional yang selaras dan terintegrasi, Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan harus dipaduselaraskan dan diharmonisasikan dengan visi dan misi Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta visi dan misi Gubernur Sumatera Barat dalam Rancangan RPJMD Sumbar Tahun 2021-2026. Hasil penyelarasan yang telah dilakukan, dapat dijelaskan sebagaimana penjelasan di bawah ini.

A. Penyelarasan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahun ke depan akan mempedomani Prioritas Pembangunan Nasional, yang dirumuskan ke dalam 3 Dimensi Pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, terdiri dari :
 - a) Pendidikan,
 - b) Kesehatan,
 - c) Perumahan,
 - d) Mental / Karakter.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan terdiri dari :
 - a) Kedaulatan Pangan,
 - b) Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan,
 - c) Kemaritiman dan Kelautan,
 - d) Pariwisata dan Industri.
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, terdiri dari :
 - a) Antar Kelompok Pendapatan,
 - b) Antar Wilayah, Desa, pembangunan luar jawa dan kawasan timur.

Hal tersebut di atas dilakukan guna mendukung pencapaian Visi Presiden 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, dan 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai **Nawacita Kedua**, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Keselarasan visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dalam rangka mendukung visi dan misi RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai mana tersaji pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Tabel Sanding hasil Penyelarasan dan Dukungan Visi dan Misi RPJMD
Tahun 2021-2026 Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMN TAHUN 2020-2024		RPJMD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026	
VISI			
TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MADIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG		MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL	
MISI			
Misi 1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
		Misi 5	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
Misi 2	Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 3	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
Misi 3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Misi 4	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
Misi 4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Misi 3	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
Misi 5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Misi 5	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
Misi 6	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Misi 1	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
Misi 7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Misi 6	Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

RPJMN TAHUN 2020-2024		RPJMD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026	
Misi 8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Misi 1	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
Misi 9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan		

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, juga disusun dengan mempedomani 5 (lima) arahan utama Presiden dan mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan.

Lima arahan utama Presiden tersebut, yaitu: (1) Pembangunan SDM; (2) Pembangunan Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; dan (5) Transformasi Ekonomi. Sementara 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN tahun 2020-2026 meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya, sebagai bentuk upaya mewujudkan pembangunan yang inovatif dan adaptif, guna mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan maka substansi RPJMD ini memuat dan mendukung pengarusutamaan (*mainstreaming*) 4 (empat) isu utama RPJMN Tahun 2020-2026, yaitu:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan

partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

2. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa

3. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

4. Pengarustamaan Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

Pengarusutamaan tersebut di atas, bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga

adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan *mainstreaming* ini, RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 diharapkan dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif.

B. Penyelarasan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan visi Gubernur terpilih yang telah tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026: **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Visi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, berkelanjutan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Sumatera Barat, maka penyusunan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Keselarasan visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dalam rangka mendukung visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai mana tersaji pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Tabel SANDING hasil Penyelesaian dan Dukungan Visi dan Misi RPJMD
Tahun 2021-2026 Terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

RPJMD SUMBAR TAHUN 2021-2026		RPJMD KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026	
VISI			
TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN		MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL	
MISI			
Misi 1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Misi 2	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
		Misi 5	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
Misi 2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah.	Misi 5	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
Misi 3	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.	Misi 3	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
Misi 4	Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Misi 3	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
Misi 5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Misi 4	Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
Misi 6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.	Misi 3	Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
Misi 7	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.	Misi 1	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Selanjutnya, Kabupaten Pesisir Selatan akan menyeleksi dan berkontribusi aktif dalam mencapai target kinerja pembangunan Nasional dan Sumatera Barat khususnya target perekonomian makro. Tabel 5.5 memperlihatkan penyelesaian target perekonomian makro Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel 5.5
Penyelarasan Target Perekonomian Makro Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021-2026 dengan Target Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
dan Target Nasional 2020-2024

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Nasional		Sumatera Barat		Pesisir Selatan	
		Capaian 2020	Target 2024	Capaian 2020	Target 2026	Capaian 2020	Target 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,07	6,10	-1,6	4,84	-1,11	4,75
2	PDRB ADHK (Rp. Trilyun)	10.772,4		169,458		9,47	11,995
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	4,40	6,88	5,94	7	4,95
4	IPM	71,94	74,60-84,23	72,38	74,42	69,9	71,68
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)			69,47	70,53	7,06	71,92
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)			14,02	14,10	13,32	13,57
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			8,99	9,57	8,26	8,43
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)			10.733	11.863	9.212	10.182
5	Tingkat Kemiskinan (%)		4,55	6,56	5,77	7,61	7,16
7	Gini Rasio		0,360-0,474	0,301	0,284	0,249	0,223

Selanjutnya, tabel sanding tentang Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Program Prioritas Nasional disajikan pada Tabel di bagian Lampiran.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Adapun visi dari Kabupaten Pesisir Selatan adalah **”Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”**. Berikut ini dijabarkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

6.1. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Selanjutnya strategi pada setiap tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi dapat digambarkan sebagai berikut:

Misi I : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan

Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Strategi 1 : Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi

Strategi ini diharapkan dapat menjawab tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator berikut, yaitu:

- a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah,
- b. Nilai SAKIP,
- c. Skor LPPD,
- d. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah

Sasaran 2 : Meningkatnya kapabilitas birokrasi

Strategi : Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Indeks Kelembagaan
- b. Indeks SPBE
- c. Indeks Profesionalitas ASN
- d. Indeks Inovasi

Sasaran 3 : Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik

Strategi 1 : Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan

Strategi 2 : Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat

Kedua strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik.

Strategi 3 : Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Kategori Keterbukaan Informasi Publik.

Misi II : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Tujuan 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Strategi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Angka Kematian Ibu
- b. Angka Kematian Bayi

Strategi 2 : Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator yaitu:

- a. Prevalensi Stunting
- b. Angka Kesakitan

Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat

Strategi : Meningkatkan cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator persentase masyarakat yang terlindungi hak jaminan kesehatan.

Tujuan 2 : Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat

Strategi : Memberikan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Sasaran 2 : Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin

Strategi 1 : Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin

Strategi 2 : Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan

Strategi 3 : Menyediakan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin

Ketiga strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator yaitu:

Pengeluaran Perkapita

Strategi 4 : Memenuhi ketercukupan pangan dan gizi masyarakat

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Misi III : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan

Sasaran 1 : Meningkatnya investasi PMA dan PMDN

Strategi : Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat.

Sasaran 2 : Meningkatnya PDRB sektor unggulan

Strategi : Meningkatkan produk unggulan daerah

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK).
- b. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan.

Sasaran 3 : Menurunnya pengangguran

Strategi 1 : Meningkatkan kesempatan kerja

Strategi 2 : Meningkatkan kualitas tenaga kerja

Kedua strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan

Strategi : Meningkatkan pemenuhan infrastruktur penunjang sektor unggulan

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Persentase jalan kabupaten kondisi baik.
- b. Proporsi lahan sawah beririgasi baik.
- c. Rasio konektivitas.

Sasaran 5 : Terjaminnya kelestarian lingkungan

Strategi : Mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Misi IV : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Tujuan : Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat

Sasaran 1 : Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di Pantai Barat Indonesia

Strategi : Meningkatkan daya saing pariwisata

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator, yaitu :

- a. Jumlah Kunjungan Wisatawan.
- b. Lama Tinggal Wisatawan.

Sasaran 2 : Berkembangnya ekonomi kreatif

Strategi : Mengembangkan sektor ekonomi kreatif pendukung pariwisata

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Nilai omset usaha ekonomi kreatif.

Misi V : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Tujuan 1 : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan

Strategi 1 : Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana layanan pendidikan

Strategi 2 : Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Harapan Lama Sekolah.
- b. Rata-Rata Lama Sekolah.

Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing pendidikan

Strategi 1 : Meningkatkan prestasi pendidikan

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional.

Strategi 2 : Meningkatkan budaya literasi

Strategi 3 : Menjalin kerjasama daerah dengan Perguruan Tinggi

Kedua strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Tujuan 2 : Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing

Sasaran 1 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat

Strategi 1 : Memperkuat peran surau sebagai sentral pendidikan masyarakat

Strategi 2 : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama pada anak usia sekolah
Kedua strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Mesjid/Musholla.

Strategi 3 : Mengoptimalkan peran zakat dan infak dalam mendorong kesejahteraan masyarakat

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Persentase pemenuhan kewajiban membayar zakat harta.

Sasaran 2 : Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing

Strategi 1 : Meningkatkan peran generasi muda dalam pembangunan

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional.

Strategi 2 : Mengembangkan wirausaha muda

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Jumlah Wirausahawan yang Berdaya Saing.

Misi VI : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang aman tenteram dan dinamis

Tujuan : Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tenteram dan dinamis

Sasaran 1 : Terwujudnya keluarga bahagia.

Strategi 1 : Membangun keluarga yang harmonis.

Strategi 2 : Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan untuk keharmonisan dan kesejahteraan keluarga

Kedua Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui beberapa indikator, yaitu :

a. Proporsi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga.

b. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri

Strategi 1 : Meningkatkan penanganan bencana

Strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Jumlah Nagari yang Mandiri Dalam Penanganan Bencana.

Strategi 2 : Meningkatkan peran serta kaum perempuan, disabilitas dalam pembangunan daerah

Strategi 3 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban

Kedua strategi ini diharapkan dapat menjawab sasaran pembangunan daerah melalui indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Strategi yang berkaitan dengan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Visi :			
Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan			
1.1 Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi	1.1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi
		- Nilai SAKIP	
		- Skor LPPD	
		- Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	
	1.1.2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi	- Indeks Kelembagaan	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur
		- Indeks SPBE	
		- Indeks Profesionalitas ASN	
	1.1.3. Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
		- Kategori keterbukaan informasi publik	Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat			
2.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1.1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	- AKI - AKB	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
		- Prevalensi Stunting - Angka kesakitan	Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
	2.1.2. Meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang terlindungi hak jaminan kesehatan	Meningkatkan cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat
2.2 Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat	2.2.1. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Memberikan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
	2.2.2. Meningkatkan ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	Pengeluaran perkapita	Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin
			Mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan hutan
			Menyediakan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
		Pencapaian skor pola pangan harapan	Memenuhi ketercukupan pangan dan gizi masyarakat
Misi 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah			
3.1 Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan	3.1.1. Meningkatkan investasi PMA dan PMDN	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi
	3.1.2. Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan	- Nilai PDRB pertanian (ADHK) - Nilai PDRB industri pengolahan (ADHK)	Meningkatkan produk unggulan daerah
	3.1.3. Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	1. Meningkatkan kesempatan kerja
			2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
	3.1.4. Meningkatkan kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan	- Prosentase Jalan Kabupaten kondisi baik - Proporsi lahan sawah beririgasi baik - Rasio Konektivitas Kabupaten	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur penunjang sektor unggulan
	3.1.5. Terjaminnya kelestarian lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan

Tujuan		Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
Misi : 4 Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan				
4.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi kesejahteraan masyarakat	4.1.1. Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di Pantai Barat Indonesia	- Jumlah kunjungan wisatawan - Lama tinggal wisatawan	Meningkatkan daya saing pariwisata
		4.1.2. Berkembangnya ekonomi kreatif	Nilai omset usaha ekonomi kreatif	Mengembangkan sektor ekonomi kreatif pendukung pariwisata
Misi : 5 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang beriman, Kreatif dan Berdaya Saing				
5.1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	5.1.1. Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	- Harapan lama sekolah - Rata-rata lama sekolah	1. Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana layanan pendidikan
				2. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah
		5.1.2. Meningkatnya daya saing Pendidikan	Jumlah tenaga pendidik dan siswa berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	Meningkatkan prestasi pendidikan
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1. Meningkatkan budaya literasi 2. Menjalin kerjasama daerah dengan Perguruan Tinggi
5.2	Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing	5.2.1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di Mesjid/Musholla	Memperkuat peran tempat ibadah umat Islam sebagai sentral pendidikan masyarakat
			Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama pada anak usia sekolah	
		5.2.2. Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	Persentase pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	Mengoptimalkan peran zakat dan infak dalam mendorong kesejahteraan masyarakat
			Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Meningkatkan peran generasi muda dalam pembangunan
		Jumah wirausahawan yang berdaya saing	Mengembangkan wirausaha muda	
Misi 6 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis				
6.1	Terciptanya kondisi masyarakat pesisir selatan yang aman,	6.1.1. Terwujudnya keluarga bahagia	Proporsi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	Membangun keluarga harmonis

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
tentram dan dinamis		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan untuk keharmonisan dan kesejahteraan keluarga
	6.1.2. Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	Jumlah nagari yang mandiri dalam penanganan bencana	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatkan peran serta kaum perempuan dan disabilitas dalam pembangunan daerah Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan sehingga akan menumbuhkan hasil pembangunan yang lebih optimal.

Arah kebijakan yang berkaitan dengan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 6.2 di bawah ini.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan			
1.1 Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi	1.1.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	- Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>e-government</i>. - Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan - Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan - Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	1.1.2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	1. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur 2. Memperkuat kelembagaan pemerintahan berbasis <i>e-government</i> 3. Meningkatkan budaya inovasi pada aparatur
	1.1.3. Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai
		2. Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat	Mengupayakan pemekaran nagari, kecamatan dan kabupaten
		3. Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	1. Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik 2. Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas
Misi 2 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat			
2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1.1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan 2. Mengoptimalisasi aset dan pemutakhiran serta pemerataan sarana dan prasarana layanan Kesehatan 3. Membangun rumah sakit di wilayah tengah 4. Meningkatkan penanganan dampak pandemi COVID-19
		2. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif dan preventif
	2.1.2. Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat	Meningkatkan cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap jaminan kesehatan 2. Melaksanakan pelayanan gratis pada pasien bermasalah 3. Mempermudah kepengurusan jaminan kesehatan masyarakat
2.2 Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	2.2.1. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	Memberikan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	1. Meningkatkan akses terhadap program bantuan sosial pemerintah 2. Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas 3. Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial 4. Verifikasi dan validasi data DTKS secara reguler

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2.2.2. Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin	1. Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin	1. Memberdayakan kelompok perempuan masyarakat miskin 2. Mendorong program padat karya 3. Meningkatkan pemanfaatan pekarangan lestari (P2L)
		2. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan	1. Memfasilitasi pembukaan transmigrasi lokal di kawasan HPK 2. Memfasilitasi program perhutanan sosial
		3. Menyediakan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin	1. Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat 2. Mengurangi kawasan kumuh
		4. Memenuhi kecukupan pangan dan gizi masyarakat	1. Meningkatkan keterjaminan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kecukupan gizi
Misi 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah			
3.1 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan	3.1.1. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Meningkatkan lingkungan usaha dan iklim investasi	1. Memberikan kepastian hukum terkait kegiatan investasi. 2. Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi yang kondusif
	3.1.2. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Meningkatkan produk unggulan daerah	1. Menzonasi pengembangan komoditi unggulan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan 3. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan 4. Memperluas pangsa pasar produk unggulan
	3.1.3. Menurunnya pengangguran	1. Meningkatkan kesempatan kerja	1. Memperluas lapangan pekerjaan 2. Meningkatkan minat kewirausahaan
		2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Mengoptimalkan peran BLK
	3.1.4. Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur penunjang sektor unggulan	1. Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan 2. Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi 3. Menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum termasuk memfasilitasi pembangunan pelabuhan/dermaga pengangkutan komoditi di wilayah selatan 4. Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Memfasilitasi pemenuhan layanan telekomunikasi
	3.1.5. Terjaminnya kelestarian lingkungan	Mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH, serta meningkatkan koordinasi dengan BKSDA terkait satwa yang dilindungi. 3. Memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya untuk kebutuhan pembangunan
Misi : 4 Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan			
4.1 Meningkatnya perekonomian bidang pariwisata	4.1.1. Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata favorit di Pantai Barat Indonesia	Meningkatkan daya saing pariwisata	1. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata termasuk penyediaan rest-rest area yang nyaman dan bersih. 2. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata 3. Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara profesional 4. Mengembangkan wisata yang aman dari dampak bencana alam 5. Merevitalisasi kekayaan budaya, kearifan lokal dan sejarah seperti kerajaan Kesultanan Inderapura, Mande Rubiah, dan wisata sejarah lainnya. 6. Meningkatkan pelestarian budaya melalui pengembangan kesenian dan budaya lokal
	4.1.2. Berkembangnya ekonomi kreatif	Mengembangkan ekonomi kreatif pendukung pariwisata	1. Meningkatkan penguasaan teknologi informasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam perluasan pasar 2. Meningkatkan konektivitas/kemitraan antara pelaku usaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha 3. Mendorong peningkatan kreatifitas pelaku usaha ekonomi kreatif untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah
Misi : 5 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang beriman, Kreatif dan Berdaya Saing			
5.1 Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	5.1.1. Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan	1. Meningkatkan dan pemerataan sarana dan prasarana layanan pendidikan	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah	1. Menyelenggarakan pendidikan gratis 2. Mengurangi anak putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan
	5.1.2. Meningkatnya daya saing pendidikan	1. Meningkatkan prestasi pendidikan	1. Meningkatkan kompetensi guru 2. Menyelenggarakan pendidikan berkarakter 3. Menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS) 4. Mendistribusikan tenaga pendidik secara merata
		2. Meningkatkan budaya literasi	1. Mendorong komunitas literasi di masyarakat 2. Membudayakan gemar membaca dan menulis
		3. Menjalin Kerjasama daerah dengan Perguruan Tinggi	1. Memfasilitasi keberadaan Perguruan Tinggi Negeri di Pesisir Selatan 2. Memberikan Beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi
5.2 Terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing	5.2.1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	1. Memperkuat peran surau sebagai sentral pendidikan masyarakat	1. Menggalakkan Gerakan keteladanan subuh berjamaah 2. Menggalakkan remaja Masjid dan Majelis Taklim 3. Memperkuat budaya tulis baca Al Quran
		2. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama pada anak usia sekolah	Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di sekolah
		3. Mengoptimalkan peran zakat dan infak dalam mendorong kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatkan peran Baznas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan peran dan fungsi nagari dalam pemungutan zakat harta
	5.2.2. Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing	1. Meningkatkan peran generasi muda dalam pembangunan	Memperkuat peran aktif generasi muda dalam pembangunan
		2. Mengembangkan wirausaha muda	Menciptakan wirausaha muda yang memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif dan mandiri
Misi 6 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis			
6.1 Terciptanya kondisi masyarakat pesisir selatan yang aman, tentram dan dinamis	6.1.1. Terwujudnya keluarga bahagia	1. Membangun keluarga yang harmonis	1. Meningkatkan perlindungan terhadap anak 2. Mengoptimalkan pencegahan KDRT 3. Menyediakan rumah layak huni

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	6.1.2. Meningkatnya partisipasi warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri	2. Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan untuk keharmonisan dan kesejahteraan keluarga	1. Menggalakkan Gerakan KELUARGA RANCAK (Religius, Sejahtera, Cerdas dan Berakhlak) 2. Mendorong terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten dan sarana penunjangnya.
		1. Meningkatkan kapasitas penanganan bencana	1. Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana 2. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana
		2. Menciptakan kesetaraan dan keadilan gender	1. Meningkatkan pemberdayaan komunitas rentan 2. Meningkatkan efektifitas penganggaran responsif gender
		3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	1. Memperkuat peran siskamling 2. Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja

Dari rumusan arah kebijakan tersebut di atas, maka ditentukan arah kebijakan setiap tahunnya yang akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas daerah untuk pembangunan kedepannya. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang dijabarkan setiap tahun, yaitu:

1. Rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun pertama (2022) RPJMD, diarahkan pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Pesisir Selatan lebih bermartabat. Prioritas pembangunan dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penanganan dampak pandemi COVID-19, reformasi birokrasi dan sosial budaya.
2. Rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun kedua (2023) RPJMD, yaitu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyiapan sumberdaya manusia unggul, pengembangan potensi wisata dan pangan serta peningkatan pelayanan publik. Prioritas pembangunan dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemulihan ekonomi di sektor pariwisata, pangan, dan infratraktur serta peningkatan pelayanan publik.
3. Rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun ke tiga (2024) RPJMD diarahkan pada peningkatan daya saing daerah dan produktivitas sektor unggulan. Prioritas pembangunan dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah, dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan.

4. Rencana pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun ke empat (2025) RPJMD diarahkan pada pemantapan industri pangan lokal yang berdaya saing nasional dengan didukung oleh teknologi tepat guna. Prioritas pembangunan dititikberatkan pada peningkatan SDM pengolahan, ekonomi masyarakat, pengembangan riset dan teknologi tepat guna, dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan.
5. Rencana Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun ke lima (2026) RPJMD diarahkan pada kemandirian daerah didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang bermartabat. Prioritas pembangunan dititikberatkan pada kemandirian ekonomi dan sosial budaya, peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan. Kemandirian ini maksudnya, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan telah mampu mengatur ekonomi sendiri dan tidak bergantung dengan daerah lain. Hal ini telah ditunjukkan pada awal tahun perencanaan pembangunan di RPJMD, telah di mulai dari penetapan zonasi produk unggulan masing-masing daerah yang akan melahirkan *one village one product*, pemanfaatan potensi sumberdaya produk unggulan daerah, pengolahan produk unggulan daerah dan penguatan produk industri lokal yang dapat bersaing secara nasional dan pada akhirnya akan membawa Pesisir Selatan menjadi daerah yang mandiri dari segi ekonomi sehingga dapat bersaing dengan daerah lain. Mandiri dari segi sosial budaya yaitu menumbuhkan jiwa mandiri pada masyarakat sehingga tidak tergantung lagi dengan bantuan dari pemerintah atau dengan kata lain masyarakat dapat ikut berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan untuk kemajuan Pesisir Selatan. Proses pemberdayaannya dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang berkompeten dan mampu mencari sumber-sumber atau kesempatan-kesempatan yang ada untuk berpartisipasi dalam membangun daerah.

Berikut pada Tabel 6.3 diuraikan jabaran dari arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang dirinci setiap tahunnya dari Tahun 2022-2026.

Tabel 6.3

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2026

ARAH KEBIJAKAN	
Tahun I (2022)	
“Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Pesisir Selatan lebih bermartabat”	
1	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>e-government</i>
2	Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan
3	Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan
4	Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
5	Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur
6	Meningkatkan budaya inovasi pada aparatur
7	Mengupayakan pemekaran nagari, kecamatan dan kabupaten

ARAH KEBIJAKAN	
8	Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik
9	Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas
10	Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan
11	Mengoptimalkan aset, pemutakhiran dan pemerataan sarana dan prasarana layanan kesehatan
12	Meningkatkan Penanganan dampak pandemi COVID-19
13	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif dan preventif
14	Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap jaminan kesehatan
15	Melaksanakan pelayanan gratis pada pasien bermasalah
16	Mempermudah kepengurusan jaminan kesehatan masyarakat
17	Meningkatkan akses terhadap program bantuan sosial pemerintah
18	Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas
19	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
20	Melakukan verifikasi dan validasi data DTKS secara reguler
21	Memberdayakan kelompok perempuan masyarakat miskin
22	Mendorong program padat karya
23	Meningkatkan pemanfaatan pekarangan lestari (P2L)
24	Memfasilitasi program perhutanan sosial
25	Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat
26	Mengurangi kawasan kumuh
27	Meningkatkan keterjaminan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan
28	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kecukupan gizi
29	Menzonasi pengembangan komoditi unggulan
30	Memperluas lapangan pekerjaan
31	Meningkatkan minat kewirausahaan
32	Mengoptimalkan peran BLK
33	Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan
34	Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi
35	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup
36	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH serta meningkatkan koordinasi dengan BKSDA terkait satwa yang dilindungi.
37	Memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya untuk kebutuhan pembangunan
38	Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata termasuk penyediaan rest-rest area yang nyaman dan bersih.
39	Merevitalisasi kekayaan budaya, kearifan lokal dan sejarah seperti Kerajaan Kesultanan Inderapura, Mand Rubiah dan wisata sejarah lainnya
40	Meningkatkan pelestarian budaya melalui pengembangan kesenian dan budaya lokal
41	Mendorong peningkatan kreatifitas pelaku ekonomi kreatif untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah
42	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak
43	Menyelenggarakan pendidikan gratis
44	Mengurangi anak putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan
45	Meningkatkan kompetensi guru
46	Menyelenggarakan pendidikan berkarakter
47	Mendistribusikan tenaga pendidik secara merata
48	Mendorong komunitas literasi di masyarakat

ARAH KEBIJAKAN	
49	Membudayakan gemar membaca dan menulis
50	Memberikan Beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi
51	Menggalakkan gerakan keteladanan subuh berjamaah
52	Menggalakkan remaja Masjid dan Majelis Taklim
53	Penguatan budaya tulis baca Al Quran
54	Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di sekolah
55	Meningkatkan peran Baznas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
56	Meningkatkan peran dan fungsi nagari dalam pemungutan zakat harta
57	Memperkuat peran aktif generasi muda dalam pembangunan
58	Menciptakan wirausaha muda yang memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif dan mandiri
59	Meningkatkan perlindungan terhadap anak
60	Mengoptimalkan pencegahan KDRT
61	Menyediakan rumah layak huni
62	Menggalakkan Gerakan KELUARGA RANCAK (Religius, Sejahtera, Cerdas dan Berakhlak)
63	Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana
64	Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana
65	Meningkatkan pemberdayaan komunitas rentan
66	Memperkuat peran siskamling
67	Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja
Tahun II (2023)	
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyiapan sumberdaya manusia unggul, pengembangan potensi wisata dan pangan serta peningkatan pelayanan publik”	
1	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>e-government</i>
2	Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan
3	Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan
4	Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
5	Memperkuat kelembagaan pemerintahan berbasis <i>e-government</i>
6	Meningkatkan budaya inovasi pada aparatur
7	Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai
8	Mengupayakan pemekaran nagari, kecamatan dan kabupaten
9	Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik
10	Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas
11	Mengoptimalkan aset, pemutakhiran dan pemerataan sarana dan prasarana layanan kesehatan
12	Meningkatkan Penanganan dampak pandemi COVID-19
13	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif dan preventif
14	Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap jaminan kesehatan
15	Melaksanakan pelayanan gratis pada pasien bermasalah
16	Mempermudah kepengurusan jaminan kesehatan masyarakat
17	Meningkatkan akses terhadap program bantuan sosial pemerintah
18	Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas
19	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
20	Memberdayakan kelompok perempuan masyarakat miskin
21	Mendorong program padat karya
22	Meningkatkan pemanfaatan pekarangan lestari (P2L)
23	Memfasilitasi pembukaan transmigrasi lokal di kawasan HPK

ARAH KEBIJAKAN	
24	Memfasilitasi program perhutanan sosial
25	Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat
26	Mengurangi kawasan kumuh
27	Meningkatkan keterjaminan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan
28	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kecukupan gizi
29	Memberikan kepastian hukum terkait kegiatan investasi.
30	Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi yang kondusif
31	Menzonasi pengembangan komoditi unggulan
32	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan
33	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan
34	Memperluas lapangan pekerjaan
35	Meningkatkan minat kewirausahaan
36	Mengoptimalkan peran BLK
37	Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan
38	Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi
39	Menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum termasuk memfasilitasi pembangunan pelabuhan/ dermaga pengangkutan komoditi di wilayah selatan
40	Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
41	Memfasilitasi pemenuhan layanan telekomunikasi
42	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup
43	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH serta meningkatkan koordiansi dengan BKSDA terkait satwa yang dilindungi.
44	Memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya untuk kebutuhan pembangunan
45	Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata termasuk penyediaan rest-rest area yang nyaman dan bersih.
46	Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
47	Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara professional
48	Mengembangkan wisata yang aman dari dampak bencana alam
49	Merevitalisasi kekayaan budaya, kearifan lokal dan sejarah seperti Kerajaan Kesultanan Inderapura, Mand Rubiah dan wisata sejarah lainnya
50	Meningkatkan pelestarian budaya melalui pengembangan kesenian dan budaya lokal
51	Meningkatkan penguasaan teknologi informasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam perluasan pasar
52	Meningkatkan konektifitas/kemitraan antar pelaku usaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha
53	Mendorong peningkatan kreatifitas pelaku ekonomi kreatif untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah
54	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak
55	Menyelenggarakan pendidikan gratis
56	Mengurangi anak putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan
57	Meningkatkan kompetensi guru
58	Menyelenggarakan pendidikan berkarakter
59	Menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS)
60	Mendistribusikan tenaga pendidik secara merata
61	Mendorong komunitas literasi di masyarakat
62	Membudayakan gemar membaca dan menulis
63	Memfasilitasi keberadaan Perguruan Tinggi Negeri di Pesisir Selatan

ARAH KEBIJAKAN	
64	Memberikan Beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi
65	Menggalakkan gerakan keteladanan subuh berjamaah
66	Menggalakkan remaja Masjid dan Majelis Taklim
67	Penguatan budaya tulis baca Al Quran
68	Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di sekolah
69	Meningkatkan peran Baznas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
70	Meningkatkan peran dan fungsi nagari dalam pemungutan zakat harta
71	Memperkuat peran aktif generasi muda dalam pembangunan
72	Menciptakan wirausaha muda yang memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif dan mandiri
73	Meningkatkan perlindungan terhadap anak
74	Mengoptimalkan pencegahan KDRT
75	Menyediakan rumah layak huni
76	Menggalakkan Gerakan KELUARGA RANCAK (Religius, Sejahtera, Cerdas dan Berakhlak)
77	Mendorong terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten dan sarana penunjangnya
78	Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana
79	Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana
80	Meningkatkan pemberdayaan komunitas rentan
81	Meningkatkan efektifitas penganggaran responsif gender
82	Memperkuat peran siskamling
83	Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja
Tahun III (2024)	
“Peningkatan daya saing daerah dan produktivitas sektor unggulan”	
1	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>e-government</i>
2	Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan
3	Meningkatkan budaya inovasi pada aparatur
4	Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai
5	Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik
6	Mengoptimalkan aset, pemutakhiran dan pemerataan sarana dan prasarana layanan kesehatan
7	Membangun rumah sakit di wilayah tengah
8	Meningkatkan Penanganan dampak pandemi COVID-19
9	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif dan preventif
10	Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap jaminan kesehatan
11	Melaksanakan pelayanan gratis pada pasien bermasalah
12	Mempermudah kepengurusan jaminan kesehatan masyarakat
13	Meningkatkan akses terhadap program bantuan sosial pemerintah
14	Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas
15	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
16	Memberdayakan kelompok perempuan masyarakat miskin
17	Mendorong program padat karya
18	Meningkatkan pemanfaatan pekarangan lestari (P2L)
19	Memfasilitasi pembukaan transmigrasi lokal di kawasan HPK
20	Memfasilitasi program perhutanan sosial
21	Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat
22	Mengurangi kawasan kumuh
23	Meningkatkan keterjaminan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan

ARAH KEBIJAKAN	
24	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kecukupan gizi
25	Memberikan kepastian hukum terkait kegiatan investasi.
26	Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi yang kondusif
27	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan
28	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan
29	Memperluas pangsa pasar produk unggulan
30	Memperluas lapangan pekerjaan
31	Meningkatkan minat kewirausahaan
32	Mengoptimalkan peran BLK
33	Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan
34	Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi
35	Menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum termasuk memfasilitasi pembangunan pelabuhan/ dermaga pengangkutan komoditi di wilayah selatan
36	Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
37	Memfasilitasi pemenuhan layanan telekomunikasi
38	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup
39	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH serta meningkatkan koordinasi dengan BKSDA terkait satwa yang dilindungi.
40	Memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya untuk kebutuhan pembangunan
41	Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata termasuk penyediaan rest-rest area yang nyaman dan bersih.
42	Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
43	Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara profesional
44	Mengembangkan wisata yang aman dari dampak bencana alam
45	Meningkatkan pelestarian budaya melalui pengembangan kesenian dan budaya lokal
46	Meningkatkan penguasaan teknologi informasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam perluasan pasar
47	Meningkatkan konektivitas/kemitraan antar pelaku usaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha
48	Mendorong peningkatan kreatifitas pelaku ekonomi kreatif untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah
49	Menyelenggarakan pendidikan gratis
50	Mengurangi anak putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan
51	Menyelenggarakan pendidikan berkarakter
52	Menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS)
53	Mendistribusikan tenaga pendidik secara merata
54	Mendorong komunitas literasi di masyarakat
55	Membudayakan gemar membaca dan menulis
56	Memberikan Beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi
57	Menggalakkan gerakan keteladanan subuh berjamaah
58	Menggalakkan remaja Masjid dan Majelis Taklim
59	Penguatan budaya tulis baca Al Quran
60	Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di sekolah
61	Meningkatkan peran Baznas dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
62	Meningkatkan peran dan fungsi nagari dalam pemungutan zakat harta
63	Memperkuat peran aktif generasi muda dalam pembangunan
64	Menciptakan wirausaha muda yang memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif dan mandiri

ARAH KEBIJAKAN	
65	Menyediakan rumah layak huni
66	Menggalakkan Gerakan KELUARGA RANCAK (Religius, Sejahtera, Cerdas dan Berakhlak)
67	Mendorong terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten dan sarana penunjangnya
68	Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana
69	Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana
70	Meningkatkan pemberdayaan komunitas rentan
71	Meningkatkan efektifitas penganggaran responsif gender
72	Memperkuat peran siskamling
73	Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja
Tahun – 4 (2025)	
Pemantapan industri pangan lokal yang berdaya saing nasional dengan didukung oleh teknologi tepat guna	
1	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>e-government</i>
2	Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan
3	Meningkatkan budaya inovasi pada aparatur
4	Mengupayakan pemekaran nagari, kecamatan dan kabupaten
5	Mengoptimalkan aset, pemutakhiran dan pemerataan sarana dan prasarana layanan kesehatan
6	Membangun rumah sakit di wilayah tengah
7	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif dan preventif
8	Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap jaminan kesehatan
9	Melaksanakan pelayanan gratis pada pasien bermasalah
10	Mempermudah kepengurusan jaminan kesehatan masyarakat
11	Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas
12	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
13	Memberdayakan kelompok perempuan masyarakat miskin
14	Mendorong program padat karya
15	Meningkatkan pemanfaatan pekarangan lestari (P2L)
16	Memfasilitasi program perhutanan sosial
17	Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat
18	Mengurangi kawasan kumuh
19	Meningkatkan keterjaminan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan
20	Memberikan kepastian hukum terkait kegiatan investasi.
21	Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi yang kondusif
22	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan
23	Memperluas pangsa pasar produk unggulan
24	Memperluas lapangan pekerjaan
25	Meningkatkan minat kewirausahaan
26	Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan
27	Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi
28	Menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum termasuk memfasilitasi pembangunan pelabuhan/ dermaga pengangkutan komoditi di wilayah selatan
29	Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
30	Memfasilitasi pemenuhan layanan telekomunikasi
31	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup

ARAH KEBIJAKAN	
32	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH serta meningkatkan koordinasi dengan BKSDA terkait satwa yang dilindungi.
33	Memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya untuk kebutuhan pembangunan
34	Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata termasuk penyediaan rest-rest area yang nyaman dan bersih.
35	Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
36	Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara profesional
37	Mengembangkan wisata yang aman dari dampak bencana alam
38	Meningkatkan pelestarian budaya melalui pengembangan kesenian dan budaya lokal
39	Meningkatkan penguasaan teknologi informasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam perluasan pasar
40	Meningkatkan konektivitas/kemitraan antar pelaku usaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha
41	Mendorong peningkatan kreatifitas pelaku ekonomi kreatif untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah
42	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak
43	Menyelenggarakan pendidikan gratis
44	Mengurangi anak putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan
45	Menyelenggarakan pendidikan berkarakter
46	Menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS)
47	Mendistribusikan tenaga pendidik secara merata
48	Mendorong komunitas literasi di masyarakat
49	Membudayakan gemar membaca dan menulis
50	Memberikan Beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi
51	Menggalakkan gerakan keteladanan subuh berjamaah
52	Menggalakkan remaja Masjid dan Majelis Taklim
53	Memperkuat budaya tulis baca Al Quran
54	Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di sekolah
55	Meningkatkan peran dan fungsi nagari dalam pemungutan zakat harta
56	Memperkuat peran aktif generasi muda dalam pembangunan
57	Menciptakan wirausaha muda yang memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif dan mandiri
58	Menyediakan rumah layak huni
59	Menggalakkan Gerakan KELUARGA RANCAK (Religius, Sejahtera, Cerdas dan Berakhlak)
60	Mendorong terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten dan sarana penunjangnya
61	Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana
62	Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana
63	Meningkatkan pemberdayaan komunitas rentan
64	Memperkuat peran siskamling
65	Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja
Tahun – 5 (2026)	
Kemandirian daerah didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang bermartabat	
1	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>e-government</i>
2	Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan
3	Meningkatkan budaya inovasi pada aparatur
4	Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik
5	Mengoptimalkan aset, pemutakhiran dan pemerataan sarana dan prasarana layanan kesehatan
6	Membangun rumah sakit di wilayah tengah

ARAH KEBIJAKAN	
7	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif dan preventif
8	Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap jaminan kesehatan
9	Melaksanakan pelayanan gratis pada pasien bermasalah
10	Mempermudah kepengurusan jaminan kesehatan masyarakat
11	Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas
12	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
13	Mendorong program padat karya
14	Meningkatkan pemanfaatan pekarangan lestari (P2L)
15	Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat
16	Mengurangi kawasan kumuh
17	Meningkatkan keterjaminan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan
18	Memberikan kepastian hukum terkait kegiatan investasi.
19	Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi yang kondusif
20	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan
21	Memperluas pangsa pasar produk unggulan
22	Memperluas lapangan pekerjaan
23	Meningkatkan minat kewirausahaan
24	Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan
25	Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi
26	Menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum termasuk memfasilitasi pembangunan pelabuhan/ dermaga pengangkutan komoditi di wilayah selatan
27	Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
28	Memfasilitasi pemenuhan layanan telekomunikasi
29	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup
30	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH serta meningkatkan koordinasi dengan BKSDA terkait satwa yang dilindungi.
31	Memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya untuk kebutuhan pembangunan
32	Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata termasuk penyediaan rest-rest area yang nyaman dan bersih.
33	Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
34	Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara profesional
35	Mengembangkan wisata yang aman dari dampak bencana alam
36	Meningkatkan penguasaan teknologi informasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam perluasan pasar
37	Meningkatkan konektifitas/kemitraan antar pelaku usaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha
38	Mendorong peningkatan kreatifitas pelaku ekonomi kreatif untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah
39	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak
40	Menyelenggarakan pendidikan gratis
41	Mengurangi anak putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan
42	Menyelenggarakan pendidikan berkarakter
43	Menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS)
44	Mendorong komunitas literasi di masyarakat
45	Membudayakan gemar membaca dan menulis
46	Memberikan Beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi
47	Menggalakkan gerakan keteladanan subuh berjamaah

ARAH KEBIJAKAN	
48	Menggalakkan remaja Masjid dan Majelis Taklim
49	Memperkuat budaya tulis baca Al Quran
50	Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di sekolah
51	Memperkuat peran aktif generasi muda dalam pembangunan
52	Menciptakan wirausaha muda yang memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif dan mandiri
53	Menyediakan rumah layak huni
54	Menggalakkan Gerakan KELUARGA RANCAK (Religius, Sejahtera, Cerdas dan Berakhlak)
55	Mendorong terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten dan sarana penunjangnya
56	Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana
57	Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana
58	Meningkatkan pemberdayaan komunitas rentan
59	Memperkuat peran siskamling
60	Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja

6.3. Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

6.3.1. Pengembangan Sistem Perkotaan

Pengembangan sistem perkotaan dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. Pengembangannya dilakukan melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan secara berhirarki sesuai potensi yang dimiliki pusat kegiatan atau didasarkan pada arah kebijakan pengembangan. Artinya, penetapan sesuai potensi didasarkan pada kondisi saat ini (eksisting), baik yang menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, sedangkan arah kebijakan pengembangan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai melalui pengembangan suatu pusat kegiatan yang rencana pengembangan ke depan dalam kurun waktu perencanaan.

Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan yang telah disampaikan maka rencana struktur pusat kegiatan sampai tahun 2030 terdiri dari 3 (tiga) kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai PKL, 4 (empat) kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai PPK, dan 18 (delapan belas) pusat permukiman di nagari dengan fungsi sebagai PPL, seperti pada Tabel 6.4 berikut.

Tabel 6.4.
Sistem Perkotaan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan RTRW 2010-2030

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
1. Painan 2. Kambang 3. Tapan	1. Tarusan (Kecamatan Koto XI Tarusan) 2. Pasar Baru (Kecamatan Bayang) 3. Inderapura (Kecamatan Pancung Soal) 4. Lunang (Kecamatan Lunang)	1. Barung – Barung Belantai (Kecamatan Koto XI Tarusan); 2. Asam Kumbang (Kecamatan IV Nagari Bayang Utara); 3. Lumpo (Kecamatan IV Jurai); 4. Pasar Kuok (Kecamatan Batang Kapas); 5. Surantih (Kecamatan Sutera); 6. Amping Parak (Kecamatan Sutera); 7. Koto Baru (Kecamatan Lengayang); 8. Lubuk Sariak (Kecamatan Lengayang); 9. Lakitan (Kecamatan Lengayang); 10. Balai Salasa (Kecamatan Ranah Pesisir); 11. Air Haji (Kecamatan Linggo Sari Baganti); 12. Punggasan (Kecamatan Linggo Sari Baganti); 13. Muaro Sakai (Kecamatan Pancung Soal); 14. Tamuan (Kecamatan Air Pura) 15. Pasar Beriang (Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan) 16. Sindang (Kecamatan Lunang); 17. Silaut (Kecamatan Silaut); 18. Kumbang (Kecamatan Silaut).

Sumber: Perda Kab. Pesisir Selatan No.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas RTRW Kab. Pesisir Selatan Tahun 2010-2030

6.3.2. Rencana Kawasan Lindung

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 01 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/kota maka rencana kawasan lindung di Kabupaten Pesisir Selatan hingga tahun 2030 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

6.3.2.1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

A. Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Contohnya untuk mengatur tata air dan mencegah banjir. Luas hutan lindung yang direncanakan hingga tahun 2030 seluas 22.674 Ha atau 3,70% dari luas wilayah. Luas tersebut didasarkan pada luas hutan lindung yang ditetapkan Menteri Kehutanan melalui SK No. 35 Tahun 2013 dan tata batas kawasan hutan yang telah disesuaikan dengan peta definitif administrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebaran hutan lindung meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, Air Pura, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal dan Silaut.

B. Kawasan Lindung Gambut

Kawasan lindung gambut di Kecamatan Pesisir Selatan, seluas lebih kurang 44.115 hektar, yang berada pada Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Airpura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.

C. Kawasan Resapan Air

Kawasan Resapan Air seluas 123.382 hektar tersebar di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Airpura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, dan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

6.3.2.2. Kawasan Perlindungan Setempat

A. Kawasan Sempadan Pantai

Rencana penetapan kawasan sempadan pantai hingga tahun 2030 adalah pantai-pantai yang tersebar di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut. Dengan Kategori kawasan sempadan pantai berupa kawasan yang memanjang di pesisir pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah daratan. Pembangunan di sempadan pantai tetap dimungkinkan untuk pengembangan pariwisata. Pemanfaatan sempadan pantai ini tetap memperhatikan fungsi lingkungan sempadan pantai tersebut.

B. Kawasan Sempadan Sungai

Rencana penetapan kawasan sempadan sungai hingga tahun 2030 adalah seluas 9.201 hektar pada seluruh aliran sungai yang ada di kabupaten, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun di luar kawasan perkotaan.

C. Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Luas RTH kawasan perkotaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah lebih kurang 4.416 Hektar, yang tersebar pada perkotaan Painan seluas 1.242 hektar, perkotaan Kambang seluas 2.040 hektar dan perkotaan Tapan seluas 1.134 hektar.

6.3.3. Kawasan Konservasi

A. Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa dan suaka alam wisata, dengan total luas kurang lebih 316.790 hektar.

B. Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan Pelestarian Alam yang terdapat di Kecamatan Pesisir Selatan terdiri dari Taman Nasional, yakni Taman Nasional Kerinci Seblat, dan kawasan Taman Wisata Alam. seluas 259.660 hektar.

C. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau disingkat KKP3K adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan sekitarnya yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. KKP3K terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya sesuai peruntukan kawasan. KKP3K Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Pulau Sironjong, Pulau Ular, Pulau Sibonta dan Pulau Setan dengan luas 15 hektar

6.3.4. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan lindung geologi di Kabupaten Pesisir Selatan berupa kawasan sempadan mata air. Penetapan kawasan sempadan mata air dilakukan untuk melindungi keberadaan mata air sebagai salah satu sumber air permukaan dari kegiatan manusia yang mengganggu dan/atau merusak sumber air dari kegiatan budidaya dan permukiman. Kriteria penetapan sempadan mata air berupa daratan dengan jarak 50-100 meter mengelilingi mata air, dan secara fisik berupa jalur hijau yang ditanami pohon

atau tanaman laut yang memiliki fungsi konservasi. Sebaran sempadan mata air disesuaikan dengan sebaran sumber mata air yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan di daerah ini.

6.3.5. Kawasan Rawan Bencana

A. Kawasan Rawan Longsor

Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluas 181.440 hektar yang tersebar pada Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Beganti, Airpura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, dan Lunang.

B. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Daerah ini berada di pinggiran pantai yang memiliki kecepatan gelombang 10-100 km yang diakibatkan oleh angin, dan grafitasi bulan atau matahari. Daerah ini rawan terhadap gelombang pasang hampir di seluruh Kecamatan yakni Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Airpura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.

C. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan

Kawasan rawan bencana kebakaran hutan tersebar pada seluruh kawasan hutan dengan luas lebih kurang seluas 149.868 hektar yang berada pada kawasan dengan tutupan lahan hutan di seluruh kecamatan.

D. Kawasan Rawan Banjir

Banjir hampir sering terjadi terutama bila musim hujan. Daerah yang memiliki daerah terluas berpotensi terjadinya genangan banjir adalah daerah Barung-Barung Balantai, Duku, Pasar Tarusan, Pasar Baru, Gurun Panjang, Salido, Painan, lumpo, Jalamu, Pasar Kuok, Surantih, Kambang, Air Haji dan Tapan, Lunang dan Silaut.

E. Kawasan Rawan Gempa

Sebagian besar daerah ini rawan terhadap terjadinya gerakan tanah, terkait dengan struktur dan jenis batuan pembentuknya. Kawasan yang memiliki kerawanan gerakan tanah meliputi seluruh kecamatan.

F. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Daerah ini berada pada wilayah pantai barat Sumatera sangat rentan terhadap bencana tsunami. Karena berada pada lempengan asia dan euorasia serta dilewati oleh jalur bukit barisan. Ciri-ciri yang dapat menimbulkan tsunami adalah: gempa besar di dasar laut, kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km, magnitude gempa lebih besar dari 6,0 skala richter, jenis pergeseran gempa tergolong sesar naik atau sesar turun. Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka daerah yang berpotensi untuk terjadi tsunami seluas 43.713 hektar, yang terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yang berada pada zona kerawanan tinggi.

G. Kawasan Abrasi Pantai

Kawasan di pinggiran pantai barat Kabupaten Pesisir Selatan rawan terhadap terjadinya abrasi pantai seperti di Pasar Baru, Sago, Painan, Surantih, Kambang dan Air Haji. Kawasan dengan resiko abrasi tinggi berada di Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Lunang Silaut, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Sutura.

6.3.6. Kawasan Cagar Budaya

Potensi kawasan cagar budaya terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penetapan kawasan cagar budaya, akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

6.3.7. Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan seluas 392 hektar yang terdapat di Pasia Gantiang, Batang Kapas, Teluk Kasai, Sungai Nipah, Bayang, Kapuh, Pulau Karam, Taluk Raya, Mandeh, Sungai Nyalo, Pulau Cubadak, Pasa Kambang, Pasa Gompong, Koto Nan IV, Pasa Aia Haji, Pasia Harapan-Pasia Barapak, Ranah Pesisir, Pantai Cermin, Hamparan Perak, Taluak Limpaso, Taratak, Koto Nan Tigo dan Bukit Tambun Tulang.

6.3.8. Rencana Kawasan Budidaya

A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tersebar di Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut. Kawasan hutan produksi tetap tersebar di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tersebar di Kecamatan Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Airpura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.

B. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Rencana pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluas 20.412 hektar, dengan sebaran kawasan hutan rakyat dikembangkan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Airpura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan Lunang.

C. Kawasan Peruntukan Pertanian

1. Kawasan Tanaman Pangan

Rencana pengembangan kawasan tanaman pangan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluas 45.291 hektar yang diarahkan untuk pemanfaatan secara intensif lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Kawasan tanaman pangan tersebar hampir diseluruh kecamatan, yakni Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Airpura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan Lunang.

2. Kawasan Hortikultura

Rencana pengembangan kawasan pertanian hortikultura di Kabupaten Pesisir Selatan seluas 33.053 hektar yang tersebar di Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Sutera. Selain itu, daerah potensi perkebunan juga dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian hortikultura seperti kecamatan Airpura, pancung soal, BAB Tapan, Lunang dan Silaut. Potensi kawasan agropolitan peternakan yang berlokasi di 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir dan Kecamatan Linggo Sari Baganti.

3. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing yang memiliki prospek ekonomi cepat tumbuh. Menurut jenis komoditasnya, pengembangan perkebunan meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa, pinang, kasiavera, gambir, nilam, dan lain-lain. Rencana pengembangan kawasan perkebunan seluas 84.802 hektar yang tersebar di Kecamatan Airpura, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Lunang, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Silaut; dan Kecamatan Sutera. Pengelolaan perkebunan dapat dilakukan baik oleh perusahaan perkebunan maupun oleh masyarakat/rakyat. Dalam rangka memacu perkembangan perekonomian daerah, tidak tertutup kemungkinan dikembangkan kawasan agropolitan yang berada di Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, dan Kecamatan Ranah Pesisir.

4. Kawasan Peternakan

Pengembangan usaha peternakan dilakukan dengan pendekatan pengembangan kawasan sentra komoditi unggulan ternak dengan pendekatan agribisnis Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sutera,

Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, dan Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan pusat pengembangan di Surantih.

5. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Target luas kawasan KP2B di Kabupaten Pesisir Selatan paling sedikit seluas 15.000 hektar. Pengembangan KP2B merupakan bagian dari peruntukan lahan Pertanian Lahan Basah, Lahan Kering dan Hortikultura yang berada pada kawasan dengan Daya Dukung Penyediaan Pangan Tinggi. Indikasi kawasan KP2B meliputi kawasan pertanian yang meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Airpura, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, dan Ranah Ampek Hulu Tapan.

D. Kawasan Peruntukan Budidaya Perikanan

1. Perikanan Tangkap

Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap dikembangkan pada seluruh kecamatan yang memiliki wilayah pesisir dan laut, yakni Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Lingo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.

2. Perikanan Budidaya

Rencana pengembangan perikanan darat, yaitu tersebar di seluruh kecamatan dengan sentra-sentra di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, Basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut. Kawasan Budidaya Perikanan dipusatkan di kawasan Minapolitan yang berlokasi di Kecamatan Koto XI Tarusan (Kawasan Mandeh). Dengan sarana penunjang berupa Pangkalan Pendaratan Ikan Carocok Tarusan dan tempat pelelangan ikan di Api-api (Kecamatan Bayang, Painan (Kecamatan IV Jurai) serta Amping Parak (Kecamatan Sutera).

E. Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Energi

Rencana pengembangan kawasan pertambangan di kembangkan pada wilayah pertambangan sebagai berikut :

1. Kawasan pertambangan batubara mempunyai luas kurang lebih 8.489 Ha yang berada pada kecamatan IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Ranah Ampek Hulu Tapan dan Lunang;
2. Kawasan pertambangan logam emas dengan luas kurang lebih 1.300 Ha berada pada Kecamatan IV Jurai;
3. Potensi kawasan pertambangan batubara mempunyai luas lebih kurang 215.545 hektar yang berada pada seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Potensi pertambangan bukan logam atau batuan seluas 63.902 hektar tersebar pada Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Pancung Soal, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.

F. Kawasan Peruntukan Industri

Untuk itu rencana pengembangan kawasan peruntukan industri yang direncanakan berupa sentra industri kecil dan menengah yang meliputi:

1. Industri perikanan, galangan kapal dan gambir berada pada Kecamatan Koto XI Tarusan;
2. Industri Kelapa Sawit berada pada Kecamatan Lengayang, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut;
3. Industri rumah tangga dikembangkan pada seluruh kecamatan sesuai dengan potensi yang ada.

G. Kawasan Peruntukan Pariwisata.

Rencana peruntukan kawasan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas lebih kurang 805 hektar, yang dikembangkan melalui pengembangan:

1. Destinasi Wisata, yang meliputi:
 - destinasi utama wisata bahari Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - destinasi utama Kawasan Wisata Carocok di Kecamatan IV Jurai;
 - destinasi utama kawasan wisata Pasir Putih Kambang di Kecamatan Lengayang; dan

- destinasi utama Rumah Gadang Mande Rubiah di Kecamatan Lunang.
2. Kawasan Strategis Pariwisata
- kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang terdapat di Kecamatan Bayang dan Bayang Utara;
 - kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang berada di Kecamatan Batang Kapas dan Sutera;
 - kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang berada di Kecamatan Ranah Pesisir, serta yang menjadi kawasan potensial pariwisata adalah objek wisata yang berada di Kecamatan Linggo Sari Beganti; dan
 - kawasan strategis pariwisata berupa objek wisata yang berada di Kecamatan Airpura, Kecamatan Silaut, Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Basa IV Balai Tapan.
3. Kawasan Potensial Pariwisata berupa objek wisata yang berada pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.

H. Kawasan Permukiman

Rencana pengembangan kawasan permukiman, dikembangkan diseluruh wilayah kabupaten yang dapat memenuhi kriteria sebagai permukiman, yang terdiri dari :

1. Kawasan Permukiman Perkotaan, seluas 2.721 hektar, meliputi :
- a) Perkotaan Painan;
 - b) Perkotaan Tapan;
 - c) Perkotaan Kambang;
 - d) Perkotaan Tarusan (Nanggalo);
 - e) Perkotaan Pasar Baru;
 - f) Perkotaan Asam Kumbang;
 - g) Perkotaan Salido;
 - h) Perkotaan Pasar Kuok;
 - i) Perkotaan Surantih;
 - j) Perkotaan Balai Selasa (Palangai);
 - k) Perkotaan Air Haji;
 - l) Perkotaan Inderapura;

- m) Perkotaan Tamuan (Tanah Bakali Inderapura);
 - n) Perkotaan Pasar Beriang;
 - o) Perkotaan Silaut, dan
 - p) Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lunang.
2. Kawasan Permukiman Perdesaan, dengan luas kurang lebih 12.674 hektar, yang meliputi seluruh nagari yang berada di luar kawasan permukiman perkotaan.

I. Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

- Komando Distrik Militer (KODIM) 0311/Pesisir Selatan di Painan;
- Komando Rayon Militer (KORAMIL) 01 Pancung Soal;
- Komando Rayon Militer (KORAMIL) 02 Ranah Pesisir;
- Komando Rayon Militer (KORAMIL) 03 IV Jurai;
- Komando Rayon Militer (KORAMIL) 04 Lengayang;
- Komando Rayon Militer (KORAMIL) 05 Batang Kapas;
- Komando Rayon Militer (KORAMIL) 06 Bayang;
- Komando Rayon Militer (KORAMIL) 07 Koto XI Tarusan;
- Pos Pantau Angkatan Laut di Carocok Painan;
- Pos Pantau Angkatan Laut di Sungai Nyalo; dan
- Tempat latihan militer Sungai Pinang.

6.4. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tetangga

Meskipun ada beberapa daerah yang bertetangga atau bersepadan, namun terdapat 2 (dua) daerah yang cukup kuat interaksinya dengan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Kota Padang dan Kabupaten Mukomuko. Berikut kebijakan pembangunan pada kedua daerah tersebut.

A. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muko-Muko Tahun 2021-2026

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muko-Muko Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan iklim Investasi dan realisasi investasi
2. Menyiapkan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
3. Meningkatkan kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif
4. Meningkatkan kemampuan teknologi industri dan kapasitas IPTEK dalam proses produksi
5. Meningkatkan jumlah komunitas/pelaku usaha kreatif dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif
6. Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi
7. Pembangunan jalan dan jembatan serta saluran drainase/gorong-gorong
8. Peningkatan rehabilitasi jalan dan jembatan
9. Meningkatkan fasilitas penerangan jalan umum
10. Membangun sarana dan prasarana perhubungan
11. Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi, rawa dan jaringan pangairan
12. Meningkatkan pembangunan turap/talud/bronjong
13. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
14. Memperluas sumber pendapatan alternatif
15. Meningkatkan produktivitas pertaniand an perkebunan
16. Penyediaan bibit, benih yang berkualitas, dan pupuk
17. Peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah
18. Peningkatan kinerja sumberdaya dan kelembagaan pertanian
19. Peningkatan sarana dan prasarana produksi dan teknologi
20. Peningkatan penerapan teknologi pengolahan hasil
21. Peningkatan produksi dan komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya
22. Peningkatan swasembada ikan
23. Peningkatan pengolahan hasil perikanan
24. Pengmebangan sentra perdagangan agro
25. Pengembangan sentra perdagangan komoditas
26. Peningkatan promosi UMK/IKM
27. Penumbuhan IKM
28. Peningkatan teknologi produksi IKM

29. Peningkatan teknologi produksi IKM
30. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku wisata
31. Meningkatkan promosi wisata
32. Meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata
33. Meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata
34. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PMKS
35. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin
36. Pemberdayaan ekonomi kelompok PMKS
37. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja
38. Memeratakan kesempatan kerja dan mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja, terciptanya perluasan kerja
39. Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan sektor usaha jasa dan industri kreatif
40. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja
41. Memperluas kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan
42. Meningkatkan jumlah komunitas/pelaku usaha kreatif dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif
43. Perluasan jaminan akses dan fasilitas pendidikan
44. Peningkatan kualitas SDM bidang pendidikan
45. Meningkatkan minat baca masyarakat
46. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikanMeningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar
47. Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah menengah pertama
48. Meningkatkan kualitas pendidikan non formal
49. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan
50. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan pemerintah daerah
51. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
52. Meningkatkan pemahaman kode etik dan kode perilaku ASN
53. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah

54. Membangun transparansi, akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan penegakan aturan
55. Meningkatkan peran APIP
56. Meningkatkan kinerja birokrasi
57. Meningkatnya kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan publik
58. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
59. Penataan administrasi kependudukan (Dokumen identitas penduduk, pelayanan akta kelahiran, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan)
60. Meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK
61. Meningkatkan kompetensi perempuan
62. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
63. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan
64. Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak
65. Perwujudan kabupaten layak anak
66. Mewujudkan desa wisata
67. Menumbuhkan potensi unggulan kecamatan
68. Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur desa
69. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa
70. Membangun infrastruktur desa yang merata dan berkualitas
71. Memperluas akses cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat
72. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
73. Peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia melalui penjaminan akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan
74. Memperluas akses cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat
75. Mendorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
76. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan sosial
77. Pengembangan infrastruktur sumber daya air
78. Konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air
79. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air
80. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan
81. Peningkatan cakupan layanan bersanitasi

82. Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layah Huni, penataan kawasan permukiman kumuh serta penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum
 83. Memperkuat pelayanan infrastruktur dasar kawasan permukiman di perdesaan
 84. Meningkatkan kualitas hunian bagi keluarga miskin
 85. Meningkatkan pemanfaatan SDA LH dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan SDA dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
 86. Meningkatkan penanganan dan pengurangan sampag secara terpadu
 87. Peningkatan kualitas udara, air dan tanah melalui penguatan pengendalian, survey baku mutu dan penegakan hukum pelaku pencemaran lingkungan
 88. Penguatan kebijakan konservasi
 89. Penguatan manajemen persampahan
 90. Meningkatkan akses layanan untuk sistem pengolahan limbah terpusat dan komunal domestik dan non domestik
 91. Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan
 92. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
 93. Peningkatan sarana dan prasarana pengurangan bencana
 94. Mendorong pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat
 95. Meningkatkan toleransi antar suku, agama, ras dan antar golongan
 96. Meningkatkan dukungan kegiatan pelayanan keagamaan
 97. Akses internet gratis di setiap desa
 98. Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- B. Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024
- Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019 - 2024 yaitu:
1. Peningkatan dan pemerataan kualitas/mutu pendidikan dasar
 2. Peningkatan kualitas/mutu pendidikan karakter
 3. Peningkatan kualitas pendidikan formal
 4. Peningkatan dana operasional guru TPA/MDA/Imam mesjid dan mushalla

5. Pemenuhan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan minimal kesehatan sesuai standarnya
6. Pemenuhan dan peningkatan kualitas standar pelayanan kesehatan minimal
7. Pemenuhan dan peningkatan pelayanan publik yang inklusif
8. Penciptaan kehidupan perkotaan yang tentram, sejahtera dan berdaya saing berbasis kreatifitas dan inovasi
9. Penyediaan sarana dan infrastruktur transportasi umum yang aman, nyaman dan ramah lingkungan
10. Penyediaan, peningkatan dan pemerataan pelayanan transportasi umum yang nyaman dan berkelanjutan
11. Pengelolaan transportasi masal melalui BUMD
12. Penyediaan dan peningkatan drainase dan sanitasi perkotaan yang optimal dan terpadu
13. Peningkatan pelayanan dan pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat
14. Peningkatan dan operasional RT/RW
15. Penyediaan, penataan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman secara berkelanjutan
16. Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pembangunan
17. Optimalisasi usaha ekonomi masyarakat berbasis kemitraan di kawasan sentra produksi dan sentra industri
18. Penguatan kelembagaan sektor perdagangan dan ekonomi kreatif unggulan berbasis inovasi, potensi lokal dan teknologi ramah lingkungan
19. Deregulasi investasi dalam membangun image lembaga perizinan usaha yang ramah dan kemudahan berinvestasi
20. Memperkuat akses UKM sektor informal dalam melakukan usaha produktif melalui pengembangan koperasi dan penyediaan lahan berusaha
21. Pembangunan pusat kreatifitas dan inovasi pemuda (youth centre)
22. Pembinaan pengembangan usaha sektor formal dan infromal

23. Penyediaan dan pemenuhan ketahanan pangan serta mempertahankan pertanian perkotaan yang berkelanjutan
24. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi
25. Peningkatan transaksi perdagangan dalam dan luar negeri
26. Pembangunan pusat-pusat ekonomi kreatif melalui peningkatan kompetensi sumberdaya manusia
27. Penguatan kelembagaan sektor perdagangan dan ekonomi kreatif, unggulan berbasis inovasi, potensi lokal dan teknologi ramah lingkungan
28. Pengembangan manajemen pengetahuan berbasis teknologi informasi dalam pengembangan ekonomi kreatif untuk memperluas jejaring bisnis di tingkat lokal, regional dan internasional
29. Pembangunan kampung tematik dalam pengembangan ekonomi lokal, masyarakat berdasarkan potensi wilayah
30. Penataan dan pengembangan Daerah Tujuan Wisata
31. Pengembangan konsep pariwisata halal berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata
32. Pemetaan potensi kawasan resiko bencana dan penataan kawasan resiko bencana dalam rangka pengembangan cakupan unit wilayah manajemen bencana
33. Peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat sejak usia dini melalui pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan komunitas dan kelembagaan yang sadar dan peduli bencana
34. Penyiapan infrastruktur kota berbasis mitigasi bencana
35. Pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan komunitas dan kelembagaan yang sadar dan peduli bencana
36. Menjalin kemitraan multi pihak dalam kesiapsiagaan bencana melalui penguatan dan penegakan regulasi kebencanaan dalam meningkatkan sarana, prasarana dan infrastruktur kebencanaan
37. Pengembangan sistem informasi kebencanaan kepada masyarakat secara online, cepat dan tepat
38. Peningkatan pengawasan dalam penerbitan izin mendirikan bangunan

39. Peningkatan pengawasan berkala terhadap sistem proteksi kebakaran pada bangunan publik
40. Pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif
41. Pembangunan sistem keamanan informasi dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja individu dalam rangka meningkatkan ketersediaan, kehandalam dan keterkinian data statistik daerah
42. Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang terintegrasi
43. Penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan serta peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan
44. Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas prosedur operasional berstandar.

6.5. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab visi misi kepala daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten.

Berikut penjabaran visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan kedalam program pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 6.5. berikut:

Tabel 6.5
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Pesisir Selatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Stuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
MISI 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan														
Tujuan 1 : Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi				Indeks Reformasi Birokrasi	Tanpa Satuan	55,06 (CC)		58 (CC)	60 (CC)	62 (B)	64 (B)	65 (B)	66 (B)	
Sasaran 1.1.1. : Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja				Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah	Tanpa Satuan	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
				Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tanpa Satuan	66,88 (B)		70 (BB)	72 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)	78 (BB)	
				Skor Nilai LPPD	Tanpa Satuan	3,209		3,215	3,223	3,229	3,234	3,24	3,215	
				Level Maturitas SPII Pemda	Tanpa Satuan	3 (3,0057)		3 (3,0057)	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3 (3,2)	3 (3,2)	
4	01	01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran	Tanpa Satuan	17,03	18,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	24,00	
				Nilai SAKIP pada Komponen Pelaporan Kinerja	Tanpa Satuan	10,97	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	14,00	14,00	
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pencapaian target kinerja lingkup kesejahteraan sosial dan masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase program kerja DPRD yang terealisasi sesuai dengan fungsinya	%	50	55	60	65	70	75	80	80	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja	Tanpa Satuan	21,96	23	25	26	27	27,5	28	28	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja	Tanpa Satuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang tertib dalam pengelolaan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah yang tertib dalam penatausahaan BMD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD		0,02	0,02	1,61	1,74	1,87	2,01	2,16	2,16	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi internal dan Capaian Kinerja	Tanpa Satuan	6,94	7,2	7,8	8,3	8,7	9,1	9,4	9,4	
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase tindak lanjut temuan	%	9,98	11	12,5	14	15,5	17	18,5	18,5	
				jumlah temuan BPK	Khusus	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan	Nagari	90	95	100	100	100	100	100	100	
				Jumlah penetapan kawasan pedesaan yang difasilitasi	Kawasan	1	1	2	2	2	2	2	2	
Sasaran 2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi				Indeks Kelembagaan	Tanpa Satuan	N/A		P-3 (Cukup Efektif)	P-4 (Efektif)	P-4 (Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	
				Indeks SPBE	Tanpa Satuan	3,34		3,2	3,35	3,55	3,7	3,9	3,9	
				Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	4,266		6,300	7,500	8,500	9,500	10,500	10,500	
				Indeks	Tanpa Satuan	56		62	71	77	81	85	85	
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi yang baik	%	n/a	75	80	90	95	100	100	100	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Kompetensi jabatan dengan Anjab	%	50	55	60	65	79	75	80	80	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata rata lamanya PNS mendapatkan pengembangan kompetensi	Orang	10,8	10,8	15	18	20	25	30	30	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kebijakan Pembangunan yang searah dengan Sasaran RPJMD	%	84,5	87	89,5	91,5	93	94	95	95	
Sasaran 3. Meningkatnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik				Kategori Keterbukaan Informasi Publik		92 (informasi)		93 (informasi)	94 (informasi)	94 (informasi)	94 (informasi)	95 (informasi)	95 (informasi)	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Stuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik	Tanpa Satuan	N/A		82	84	85	85	85	85	
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	Penyelesaian kasus tanah negara	Kasus	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN	Persentase masyarakat penerima santunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI	Persentase subjek dan objek yang	%	0	100	100	100	100	100	100	100	
2	10	07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	%	0	100	100	100	100	100	100	100	
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pemanfaatan tanah kosong	%	0	100	100	100	100	100	100	100	
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pemanfaatan tanah negara	%	0	100	100	100	100	100	100	100	
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	%	60,873	64,69	68,31	72,02	75,74	79,46	83,17	83,17	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber KTP Eletronik		0,977	0,978	0,983	0,985	0,989	0,993	0,995	0,995	
				Rasio penduduk yang memiliki KIA		65	66	67	68	69	70	71	71	
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan dokumen pencatatan sipil	dokumen	96	97	97,5	97,7	97,9	98	98,3	98,3	
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah	%	95	95,8	96	96,5	97	97,5	98	98	
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dokumen profil penduduk yang dihasilkan	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan nemerintah daerah kabupaten/kota	%	90	100	100	100	100	100	100	100	
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan	%	90	92	100	100	100	100	100	100	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan data statistik yang valid dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	34,36	39,26	48,19	50,21	54,32	59,89	62,13	62,13	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	0,022	0,044	0,133	0,133	0,178	0,222	0,311	0,311	
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	dokumen	523	523	523	528	533	538	543	543	
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah	Buah	n/a	1	3	5	7	9	11	11	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan		80	81,5	82,5	83,5	84,5	85	85	85	
				Persentase LDS yang aktif	%	60	50	60	65	70	75	80	80	
				persentase mesjid yang melaksanakan subuh berjemaah	%	N/A	N/A	30	35	40	45	50	50	
				Jumlah Remaja Mesjid yang aktif	Mesjid	N/A	N/A	20	25	30	35	40	40	
				Jumlah Masjlis Ta'lim yang aktif	Masjlis Ta'lim	50	60	65	70	75	80	85	85	
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat														
Tujuan 2.1 : Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup	Tahun	70,86		71,22	71,39	71,57	71,74	71,92	71,92	
Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat				Angka Kematian Bayi	(Per 1.000 kelahiran hidup)	8		8	8	8	8	8	8	
				Angka Kematian Ibu	(Per 100.000 kelahiran hidup)	105		95	90	85	80	75	75	
				Prevalensi Stunting	%	11,88		10,92	10,26	9,65	9,2	8,88	8,88	
				Angka Kesakitan	Tanpa Satuan									
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes		72,14	74	78	81	86	90	90	90	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Stuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6		
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	%	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	100	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pukesmas yang mempunyai Tenaga Kesehatan sesuai Standar	%	20	60	70	80	90	100	100	95	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	%	70	75	80	85	90	100	100	80	
				Persentase PIRT yang memenuhi standar	%	60	65	70	80	90	100	100		
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	Nagari	81 Nagari	100	120	140	160	182	182	182	
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Registrasi PSAT (Beras)		0	0	5	6	7	8	9	9	
				Rekomendasi sertifikat prima	Dokumen	0	0	5	7	9	11	12	12	
Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya perlindungan kesehatan masyarakat				Persentase Masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	%	73,4		80	85	90	95	100	100	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes		72,14	74	78	81	86	90	90	90	
				Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	%	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	100	
Tujuan 2.2 : Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat				Tingkat kemiskinan	%	7,61		7,67	7,55	7,42	7,29	7,16	7,16	
				Indeks Gini	Tanpa Satuan	0,249		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
Sasaran 2.2.1 : Meningkatnya perlindungan Sosial Masyarakat				Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	73,4		80	85	90	95	95	95	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	%	80	82	84	86	88	90	92	92	
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah masyarakat yang dipulangkan karena konflik	Orang	N/A	40	45	50	55	60	65	70	
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	51,93	100	100	100	100	100	100	80	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang valid	%	82	84	86	88	90	96	98	98	
Sasaran 2.2.2 : Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin/Rentan Miskin				Pengeluaran Perkapita	Rp/orang/tahun	9.212.000		9.369.000	9.534.000	9.734.000	9.949.000	10.182.000	10.182.000	
				Pencapaian skor pola pangan harapan	%	86,4		87	87,5	88	88,58	89	89	
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras sesuai kebutuhan)		49	45	80	80	80	80	100	100	
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersedian Energi (kilo kalori/kapita/hari)		3.687	3.700	3.710	3.720	3.730	3.740	3.750	3.750	
				Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)		67,64	68	69	70	71	72	73	73	
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Berkurangnya Nagari Rawan Pangan		2	2	2	2	2	2	2	2	
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Maju		545	575	580	590	602	616	620	616	
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase peningkatan omset UMK (%)		n/a	7	7	7	7	7	7	42	
				Persentase pertumbuhan UMKM		5	5	6	7	8	9	10	10	
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap		44.440	35.549	35.727	35.906	36.085	36.266	36.447	36.447	
				Jumlah keluarga perikanan tangkap yang meningkat pendapatannya		14.072	14.110	14.251	14.393	14.553	14.681	14.827	14.827	
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya		16.763	12.618	13.250	13.913	14.608	15.339	16.106	16.106	
				Jumlah keluarga pelaku perikanan yang meningkat pendapatannya		3.292	3.357	3.424	3.492	3.561	3.632	3.704	3.704	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Stuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan		16	17	18	19	20	21	22	22	
				Jumlah keluarga pelaku pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat		2.126	2.680	2.211	2.255	2.300	2.346	2.392	2.392	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur)		47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91	52,91	
				~~persentase kelompok tani yang menerapkan~~ Good Farming Practice, good breeding ~~practice, dan good handling practice~~		47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91	52,91	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap		87,80	88,66	89,37	90,08	90,79	91,50	92,21	92,21	
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase fasilitas pengurangan sampah diperkotaan		0	0	20	30	40	50	60	60	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah		75,27	76,13	76,74	77,48	78,36	79,25	80,18	80,18	
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (%)		1,25	9,92	9,48	8,9	8,29	7,58	6,79	6,79	
MISI 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah														
Tujuan 3.1 : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan				Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun (RP)	9,47		9,99	10,409	10,879	11,382	11,923	11,923	
Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN				Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	Milyar (RP)	NA		210	215	220	225	230	1.300	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukannya		41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	85,00	85,00	
2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Penyelesaian izin lokasi		100	100	100	100	100	100	100	100	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNG N DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang diterbitkan		95	95	95	95	95	95	95	95	
				Persentase ketaatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan		70	70	75	80	85	90	90	90	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang menanamkan modal		17	19	21	23	25	26	28	142	
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah pernyataan minat		1	3	7	12	17	22	26	87	
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang diterbitkan		94,75	95	95	95	95	95	95	95	
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian izin bermasalah yang terselesaikan		60	75	75	75	75	75	75	75	
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi		50	50	50	50	100	100	100	100	
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan/usaha yang memiliki izin WSTP		5	10	15	20	25	30		30	
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Peningkatan Omset IKM		n/a	2	2	2,2	2,5	2,7	3,5	3,5	
				Persentase Peningkatan Jumlah IKM		n/a	2	2,35	2,68	4,85	6,04	6,7	6,7	
Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya PDRB sektor Unggulan				Nilai PDRB Sektor Pertanian Pengolahan (ADHK)	Trilyun (RP)	3,489		3,546	3,604	3,663	3,724	3,785	3,785	
				Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar (RP)	703,61		707,61	708,48	712,63	717,06	722,07	722,07	
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi sehat		5 koperasi	25koperasi	25 koperasi	30 koperasi	35 koperasi	40 koperasi	45 koperasi	45 koperasi	
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi sehat		5 koperasi	25koperasi	25 koperasi	30 koperasi	35 koperasi	40 koperasi	45 koperasi	45 koperasi	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Stuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat		5 koperasi	25koperasi	25 koperasi	30 koperasi	35 koperasi	40 koperasi	45 koperasi	45 koperasi	
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah koperasi sehat		5 koperasi	25koperasi	25 koperasi	30 Koperasi	35 koperasi	40 koperasi	45 koperasi	45 koperasi	
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi sehat		5 koperasi	25koperasi	25 koperasi	30 koperasi	35 koperasi	40 koperasi	45 koperasi	45 koperasi	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase peningkatan omset UMK (%)		n/a	7	7	7	7	7	7	42	
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase peningkatan omset UMK		n/a	7	7	7	7	7	7	42	
				Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya		5	5	10	15	20	25	30	105	
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap		44.440	35.549	35.727	35.906	36.085	36.266	36.447	36.447	
				Jumlah keluarga perikanan tangkap yang meningkat pendapatannya		14.072	14.110	14.251	14.393	14.553	14.681	14.827	14.827	
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya		16.763	12.618	13.250	13.913	14.608	15.339	16.106	16.106	
				Jumlah keluarga pelaku perikanan yang meningkat pendapatannya		3.292	3.357	3.424	3.492	3.561	3.632	3.704	3.704	
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase sumber daya perikanan yang terlindungi		0	0	0	0	0	0	0	0	
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan		16	17	18	19	20	21	22	22	
				Jumlah keluarga pelaku pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat pendapatannya		2.126	2.680	2.211	2.255	2.300	2.346	2.392	2.392	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) budidaya pertanian		47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91	52,91	
				persentase kelompok tani yang menerapkan Good Farming Practice, good breeding practice dan good handling practice		47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91	52,91	
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis		18	150	140	130	120	110	100	100	
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanggulangan bencana Penyakit hewan		100	100	100	100	100	100	100	100	
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah unit usaha yang diberikan rekomendasi izin usaha		30,47	180	190	200	210	220	230	230	
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas		n.a	25	50	75	100	125	150	150	
				Jumlah Kelompok Ternak yang naik kelas		n.a	25	50	75	100	125	150	150	
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan omset perdagangan		1,5	1,5	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	12	
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan omset perdagangan		n/a	n/a	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	12	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan omset perdagangan		1,5	1,5	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	12	
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset perdagangan		n/a	n/a	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	12	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Omset IKM		n/a	2	2	2,2	2,5	2,7	3,5	3,5	
				Persentase Peningkatan Jumlah IKM		n/a	2	2,35	2,68	4,85	6,04	6,7	6,7	
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Omset IKM		n/a	2	2	2,2	2,5	2,7	3,5	3,5	
				Persentase Peningkatan Jumlah IKM		n/a	2	2,35	2,68	4,85	6,04	6,7	6,7	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Stuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan		40	45	50	55	60	65	65	65	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah nagari baru yang terbentuk		n/a	9	9	9	9	9	9	9	
				Jumlah Peningkatan status desa mandiri (nagari)		7	9	11	13	15	17 Nagari	17	17	
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		54	60	65	70	75	80	85	80	
Sasaran 3.1.3 : Menurunnya Pengangguran				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7	6,85		6,85	6,73	6,61	6,46	6,3	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen rencana tenaga kerja		n/a	1	1	1	1	1	1	6	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	65,6	68,5	71,25	73,45	75,5	77,35	77,35	77,35	
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	orang	152	175	185	190	195	198	200	198	
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	%	25,5	30,6	35,45	40,15	45,5	48,75	48,75	48,75	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	% Wira Usaha Muda	%	7,3	7,3	9,8	12,3	14,8	17,3	19,8	19,8	
Sasaran 3.1.4 : Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi unggulan				Persentase Jalan Kabupaten Kondisi baik	%	29,55		31,9	32,9	33,9	34,9	35,9	35,9	
				Rasio Konektivitas	%	54		57	58	60	61	63	63	
				Proposi lahan sawah beririgasi baik	%	57,05		59,2	60,75	62,6	64,6	66,7	66,7	
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan bajir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	28,81	31,29	35,63	36,62	37,97	39,28	40,10	70,00	
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	%	57,05	59,05	59,20	60,75	62,60	64,60	66,70	66,70	
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	11,20	12,73	14,33	15,94	17,75	19,15	20,76	20,76	
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penataan permukiman di kawasan strategis kabupaten	%	n/a	30	32	34	36	38	40	40	
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB	%	80,59	83,43	85,77	87,65	88,96	89,71	90,26	90,26	
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya terhadap dokumen RTBL	%	n/a	38,46	46,15	53,85	61,54	69,23		69,23	
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	%	40,36	41,11	41,86	42,61	43,36	44,11	44,86	44,86	
				Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	42,00	43,11	44,22	45,33	46,44	47,56	48,67	48,67	
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	24,66	34,25	45,66	57,08	68,49	79,91	91,32	91,32	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukannya	%	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	85,00	85,00	
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	37,5	50	60	70,21	79,59	88,24	100	100	
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Perumahan yang memiliki sertifikasi dan teregistrasi	%	n/a	60	60	75	80	85	90	90	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	kinerja lalu lintas kabupaten kota		0,27	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah orang / penumpang yang melalui dermaga pertahun (orang)	orang	41.041	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000	267.000	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Indeks Pertanaman per tahun (kali)		2,3	2,31	2,33	2,36	2,38	2,40	2,43	2,43	
				Persentase ternak unggul	%	6,5	7,0	4,5	5,0	5,5	6,0		6,5	
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan omset perdagangan	%	1,5	1,5	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	12	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Stuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Facilitasi HPK menjadi APL untuk transmigrasi lokal	APL	n/a	1	1	1	1	1	1	1	
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pemungkiman transmigrasi yang di fasilitasi pembangunannya		n/a	2	2	2	2	2	2	2	
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial dikawasan transmigrasi	Lembaga	n/a	10	15	20	25	30	35	35	
Sasaran 3.1.5 : Terjaminnya kelestarian Lingkungan				Indeks Kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86,74		86,94	87,1	87,8	88,15	89	89	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	tanpa satuan	90	90,31	90,84	91,15	91,42	91,8	92,1	92,1	
				Indeks Kualitas Udara	tanpa satuan	91,81	91,82	91,84	91,86	91,9	92,2	92,3	92,3	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	tanpa satuan	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase luasan KEHATI yang dikelola	%	n.a	1	1	1	2	2	2	2	
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan LB3	%	1,6	1,6	1,63	1,7	1,74	1,75	1,76	1,76	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang diterbitkan	%	95	95	95	95	95	95	95	95	
				Persentase ketaatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	%	70	70	75	80	85	90	90	90	
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah MHA yang diakui	MHA	n.a	0	2	2	3	4	4	15	
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kelompok masyarakat/komunitas yang peduli lingkungan hidup	Kelompok	3	3	4	5	6	7	7	32	
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat	buah	n.a	2	5	5	5	5	5	27	
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	Kasus	75	75	80	85	90	95	95	95	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga		16,97%	24%	26%	27%	28%	30%	30%	30%	
				Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga		21,49%	74%	73%	72%	71%	70%	70%	70%	
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan Berkesan														
Tujuan 4.1 : Meningkatnya perekonomian bidang pariwisata				Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomim kreatif	orang	NA		5200	5700	6200	6700	7200	7200	
Sasaran 4.1.1 : Pesisir Selatan Daerah tujuan wisata favorite di Pantai Barat Indonesia				jumlah kunjungan wisatawan	orang	177.283		1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	
				Lama tinggal wisatawan	hari	1,1		1,25	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan di inventarisasi	buah	222	222	230	235	240	245	250	250	
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	buah	7	7	7	7	7	7	7	7	
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah lokal yang dilestarikan	buah	22	22	22	22	22	22	22	22	
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	55,14	60	60	60	60	60	60	60	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Stuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6		
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	tanpa satuan	n/a	3,1	3,15	3,2	3,35	3,3	3,35	3,35	
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata		n/a	0	1	1	1	1	1	5	
Sasaran 4.1.2. Berkembangnya ekonomi kreatif				Jumlah omset ekonomi Kreatif	Milyar	NA		18	25	34	42	50	50	
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi		5	7	10	13	15	17	20	82	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi		5	7	10	13	15	17	20	82	
MISI 5 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya yang beriman, kreatif dan berdaya saing														
Tujuan 5.1 : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas				% pemenuhan 8 standar pendidikan; IDSD bidang SDM	persen	8,4		12,72	14,87	17,03	19,18	21,34	21,34	
Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya akses layanan bidang pendidikan				Rata-rata lama sekolah	tahun	13,32		13,4	13,45	13,49	13,53	13,57	13,57	
				Harapan lama sekolah	tahun	8,26		8,32	8,35	8,38	8,4	8,43	8,43	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	tanpa satuan	62,30	62,30	62,92	63,55	64,19	64,83	65,48	97	
				APK, SD	tanpa satuan	111,64	111,64	110,52	109,42	108,32	107,24	106,17	100	
				APK SMP	tanpa satuan	84,78	85,63	86,48	87,35	88,22	89,10	90,00	99,8	
				APM PAUD	tanpa satuan	53,6	53,65	54,19	54,73	55,28	55,83	56,39	70	
				APM SD	tanpa satuan	99,43	99,48	99,53	99,58	99,63	99,68	99,73	100	
				APM SMP	tanpa satuan	78,85	79,64	80,43	81,24	82,05	82,87	83,70	90	
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap satuan pendidikan	%	85	88	90	91	92	93	94	94	
				Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kompetensi	%	86,76	87	88	89	90	91	92	92	
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah izin sekolah dikelola masyarakat yang diterbitkan	Buah	5	7	8	9	10	11	12	12	
Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya daya saing pendidikan				Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang	n/a		4	7	9	12	14	14	
				Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	tanpa satuan	3,4471		6,643	7,277	7,9741	8,7985	10,0682	10,0682	
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan local yang dikembangkan	kurikulum	1	1	2	2	2	2	2	2	
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap satuan pendidikan	%	85	88	90	91	92	93	94	94	
				Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kompetensi	%	86,76	87	88	89	90	91	92	92	
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks budaya baca masyarakat	tanpa satuan	n/a	0,18	0,2	0,22	0,24	0,26	0,29	71	
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang dikoleksi	naskah	n/a	n/a	1	2	3	4	5	15	
Tujuan 5.2 : Terwujudny SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing					tanpa satuan	Tinggi (3,125)	Tinggi -3,2	Tinggi- 33,35	Tinggi - 35,5	Tinggi - 3,65	Sangat Tinggi -3,8	Sangat Tinggi -3,8		
				Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM										
Sasaran 5.2.1 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat				Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	%	96,38		96,5	96,6	96,7	96,8	100	100	
				Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan	N/A		Rendah (kecil sama dari 10 orang)	sedang (11 s/d 20 orang	sedang (11 s/d 20 orang	tinggi (besar sama dari 21 orang)	tinggi (besar sama dari 21 orang)	tinggi (besar sama dari 21 orang)	
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Maju		545	575	580	590	602	616	620	616	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah				Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Stuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Tahun-6	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				persentase LDS dan subuh berjemaah	%									
				Jumlah Remaja Mesjid yang aktif	Mesjid									
				Jumlah Majelis ta'lim yang aktif	kelompok									
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pencapaian target kinerja lingkup kesejahteraan sosial dan masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Sasaran 5.2.2 : Meningkatnya SDM Kreatif dan berdaya saing				Jumlah wirausahaan muda yang berdaya saing	orang	N/A		10	10	10	10	10	50	
				Jumlah Pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	N/A		500	700	900	1100	1300	1300	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	% Organisasi Pemuda Yang Aktif	%	4,1	4,1	6,6	9,1	11,6	14,1	16,6	16,6	
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlit Berprestasi.	orang	10	10	50	15	70	20	90	90	
				Jumlah Prestasi Olahraga.	prestasi	4	4	15	5	18	6	20	20	
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembina Yang bersertifikasi.	orang	5	5	10	15	20	25	30	30	
				Jumlah Prestasi Kepramukaan	prestasi	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan	tanpa satuan	80	81,5	82,5	83,5	84,5	85	85	85	
				Persentase LDS yang aktif	%	60	50	60	65	70	75	80	80	
				persentase mesjid yang melaksanakan subuh berjemaah	%	N/A	N/A	30	35	40	45	50	50	
				Jumlah Remaja Mesjid yang aktif	Mesjid	N/A	N/A	20	25	30	35	40	40	
				Jumlah Majelis Ta'lim yang aktif	kelompok	50	60	65	70	75	80	85	85	
MISI 6 : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis														
Tujuan 1 : Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tenteram dan dinamis				Indeks Kebahagiaan masyarakat	tanpa satuan	N/A		69,92	71,42	72,92	74,42	75,92	75,92	
Sasaran 6.1.1 : Mewujudkan keluarga bahagia				Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	%	0.0009		0.0008	0.00075	0.0007	0.00065	0.0006	0.0006	
				Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	%	99,8828		91,0944	91,7109	92,4139	93,2033	94,0788	94,0788	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program Pemerintah	%	n/a	n/a	50	60	70	80	90	90	
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani	%	0,0009	0,0214	0,0214	0,0219	0,0224	0,0229	0,0234	0,0234	
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	0,0192	0,01784	0,0156	0,0134	0,011	0,009	0,0062	0,0062	
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT	%	0,0072	0,0069	0,0064	0,0055	0,0045	0,0039	0,0039	0,0039	
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan Dokumen Profil Gender dan Anak	dokumen	2	2	2	2	2	2	2		
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase cakupan pemenuhan hak anak	%	40	45	50	55	60	65	65	65	
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	%	70	75	77	79	82	85	85	85	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk	tanpa satuan	1,57	1,45	1,35	1,25	1,10	0,95	0,90	0,90	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran total	tanpa satuan	2,83	2,81	2,80	2,78	2,76	2,75	2,74	2,74	
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAH TERA (ks)	Persentase organisasi KB yang aktif (persen)	%	37	42,00	47,00	52,00	57,00	62,00	65,00	65,00	
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56,93		56,93	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93	

[illegible]

6.6. Program Prioritas

Dalam Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terdapat Rencana Aksi yang terdiri dari 9 Program Prioritas yang dijabarkan dengan beberapa program yang akan dilaksanakan untuk perencanaan 5(lima) tahun ke depan dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan dan Hukum

- a. Melakukan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan daya guna melalui prinsip efisiensi, efektifitas, dan pemberdayaan menuju profesionalisme.
- b. Mewujudkan budaya “Melayani dengan ikhlas, responsif dan tidak diskriminatif.
- c. Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan keahlian secara optimal.
- d. Menerapkan akuntabilitas publik sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
- e. Mengembangkan sistem rewards and punishment bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah.
- f. Mewujudkan *political will* dalam mencegah budaya dan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- g. Penataan jenjang karir aparatur melalui pendekatan kompetensi teknis, kompetensi etika, dan kompetensi leadership yang berbasis etika publik.
- h. Menegakkan supremasi hukum yang menyentuh aspek keadilan bagi kehidupan bermasyarakat.
- i. Reformasi birokrasi yang bertujuan untuk peningkatan profesionalisme dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menerapkan sistem insentif berdasarkan kinerja dan reformasi birokrasi yang diarahkan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta terbukanya ruang bagi kontrol masyarakat.
- j. Peningkatan kerjasama, tata kelola dan regulasi peran serta masyarakat /swasta /lembaga non pemerintahan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Bidang Pendidikan

- a. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas.
- b. Peningkatan kualitas pembelajaran.
- c. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan dasar dan menengah.
- d. Penyediaan akses dan mutu pelayanan pendidikan.
- e. Pemantapan implementasi penyaluran BOS.
- f. Terciptanya keluasan dan pemerataan akses PAUD dan pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan.
- g. Penerapan sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional.
- h. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- i. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

3. Bidang Kesehatan

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional dan melayani.
- b. Meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat serta pemerataannya agar mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- c. Pengembangan layanan kesehatan masyarakat siaga (On Call) di tingkat nagari.
- d. Peningkatan kesadaran dan berperilaku hidup sehat.
- e. Revitalisasi fungsi dan fasilitas Puskesmas sebagai institusi yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk semua lapisan masyarakat.
- f. Mengoptimalkan program Keluarga Berencana dan program pemberian gizi tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan Balita.
- g. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga pelayanan kesehatan.
- h. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.

4. Bidang Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur

- a. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- b. Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek-proyek prasarana umum, pemukiman, dan prasarana ekonomi menuju efisiensi dan efektivitas.
- c. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Pemeliharaan, pembangunan, dan peningkatan jalan serta jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan guna menjamin kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat.
- e. Pemeliharaan, pembangunan, dan peningkatan sarana, infrastruktur pertanian, perkebunan, dan fasilitas sentra perikanan.
- f. Peningkatan pembangunan jaringan listrik agar dapat menjangkau ke seluruh pelosok Kabupaten Pesisir Selatan.
- g. Mengembangkan sarana telekomunikasi dan media elektronika lainnya agar lebih bermanfaat untuk pengembangan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.
- h. Mengupayakan penyediaan sarana prasarana transportasi umum agar mampu menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Bidang Ekonomi

- a. Pengembangan pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan intensifikasi dan ekstetifikasi, sumber daya air dan irigasi, mekanisme sistem pertanian, peningkatan sumber daya manusia petani dan peternak, serta penyediaan sarana prasarana pemasaran produksi yang lebih baik.
- b. Peningkatan fasilitas pendukung pertanian antara lain: balai pembibitan, balai penangkar, balai penyuluh, rumah potong hewan dan pasar ternak yang representatif.
- c. Peningkatan sarana untuk sektor perikanan lainnya, dengan mengembangkan kawasan serta produksi perikanan dan fasilitas pembibitan, serta pengembangan industri pengolahan perikanan dan pengembangan pasar ke daerah lain.
- d. Memaksimalkan potensi sumber daya hutan dan alam, dengan tetap mempertimbangkan kelestariannya.
- e. Mengembangkan industri kecil, menengah, dan besar yang saling bersinergi dalam satu rantai jaringan terpadu serta menginisiasi pembangunan Kawasan Industri.

- f. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas koperasi Usaha Kecil Menengah agar lebih mampu berkembang.
- g. Memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana perekonomian mikro seperti perbaikan sistem pasar tradisional dan sentral-sentral industri kecil lainnya.
- h. Pengembangan kawasan ekonomi baru serta mendorong peningkatan investasi bagi investor lokal, regional, dan nasional dengan tetap memperhatikan asas kemanfaatan pada lingkungan masyarakat sekitarnya.
- i. Menumbuhkembangkan serta meningkatkan kemampuan manajemen bagi koperasi dan UKM melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- j. Pemberdayaan ekonomi sektor informal dan pasar tradisional.
- k. Revitalisasi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- l. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis perekonomian di nagari.
- m. Meningkatkan peranan perempuan serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan sumber perekonomian keluarga.
- n. Penguatan kegiatan pendampingan, penyuluhan, dan kelembagaan pertanian di tingkat nagari dan pengembangan pertanian organik dan pengembangan komoditas alternatif unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
- o. Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi (Kerjasama Swasta dan Perguruan Tinggi) khususnya untuk sektor pertanian dan industri dalam memacu peningkatan ekonomi masyarakat.
- p. Penguatan peran serta pemerintah dalam menciptakan kepastian pasar dan tata niaga komoditas unggulan daerah.
- q. Mendorong kemudahan investasi dengan menciptakan transparansi dan kepastian hukum.
- r. Optimalisasi Destinasi Utama Pariwisata Kabupaten, pengembangan Kawasan Strategis Wisata Kabupaten dan Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten.

6. Bidang Kesejahteraan, Perempuan, Pemuda, dan Olahraga

- a. Mendorong kesadaran gender dan mengoptimalkan peran perempuan dalam setiap aspek pembangunan kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan sisi kodrati perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga.

- b. Pemberdayaan pemuda dengan menggali kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan serta perlindungan terhadap anak melalui pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan.
- d. Pembinaan kepemudaan melalui peningkatan kompetensi pemuda, baik kompetensi ideologi, kompetensi keilmuan, kompetensi etis, dan kompetensi teknis sebagai bagian dari strategi kaderisi dan regenerasi kepemimpinan.
- e. Kanalisasi kegiatan kemasyarakatan yang positif serta membangun program terpadu antar inter Lembaga Pemerintahan, Perguruan Tinggi, LSM, Ormas, OKP, dalam partisipasinya menangani problem-problem sosial.
- f. Memberikan perhatian yang luas melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
- g. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran pemuda.

7. Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

- a. Penataan sumber daya alam yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan lingkungan hidup untuk kelanjutan pembangunan.
- b. Rehabilitasi kawasan lingkungan hidup yang rusak, daerah aliran sungai, dan daerah rawan longsor.
- c. Penataan ruang dan wilayah yang baik, konsisten, dan terpadu.
- d. Pemberdayaan potensi alam untuk meningkatkan keuntungan ekonomis daerah.
- e. Menyelesaikan konflik tenurial di tengah masyarakat yang berdampingan dengan kawasan hutan lindung dan konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan.
- f. Pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat atas lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.
- g. Momotong laju kerusakan lingkungan, memperbaiki (treatment) lingkungan yang terlanjur rusak, dan membangun lingkungan yang produktif.

8. Bidang Agama dan Kemasyarakatan

- a. Menempatkan agama sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menjalankan amanah.
- b. Pembangunan moral melalui agama dan pendidikan budi pekerti.
- c. Mewujudkan sistem dan kehidupan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang demokratis dan berakhlak mulia.
- d. Pemberdayaan budaya ditujukan kepada penggalian dan pelestarian budaya menuju jati diri Pesisir Selatan.
- e. Meningkatkan peran masjid, mushala, TPA dan TPQ sebagai pusat pendidikan agama masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan marbot.

9. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

- a. Melindungi masyarakat dengan menciptakan rasa aman dalam semua kegiatan masyarakat.
- b. Memelihara dan menjaga komunikasi dengan segenap komponen masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Membangun kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh negatif dari globalisasi.
- d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan instansi vertikal untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
- e. Memaksimalkan potensi aparat hukum, aparat keamanan, dan ketertiban umum dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
- f. Mendorong masyarakat untuk ikut aktif terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.
- g. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang persatuan, kesatuan, dan kesadaran akan berbangsa dan bernegara.
- h. Mendorong dan mengupayakan pelaksanaan demokrasi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.
- i. Penguatan kuantitas dan kapasitas aparat ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemenuhan sarana dan prasarannya.

Rencana aksi tersebut diatas dijabarkan pada beberapa program seperti Tabel 6.6 berikut :

Tabel 6.6
Pemetaan Rencana Aksi Program Pembangunan
Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2020

No	Rencana Aksi	Program yang akan dilaksanakan
1.	Bidang Pemerintahan dan Hukum	
	a. Melakukan revitalisasi dan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan daya guna melalui prinsip efisiensi, efektifitas, dan pemberdayaan menuju profesionalisme. b. Mewujudkan budaya “ Melayani dengan Ikhlas “, responsive dan tidak diskriminatif. c. Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan keahlian secara optimal. d. Menerapkan akuntabilitas publik sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. e. Mengembangkan sistem rewards and punishment bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah. f. Mewujudkan political will dalam mencegah budaya dan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. g. Penataan jenjang karir aparatur melalui pendekatan kompetensi teknis, kompetensi etika, dan kompetensi leadership yang berbasis etika publik. h. Menegakkan supremasi hukum yang menyentuh aspek keadilan bagi kehidupan bermasyarakat. i. Reformasi birokrasi yang bertujuan untuk peningkatan profesionalisme dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menerapkan sistem insentif berdasarkan kinerja dan reformasi birokrasi yang diarahkan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta terbukanya ruang bagi kontrol masyarakat.	a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota b. Program kepegawaian daerah c. Program pengembangan sumber daya manusia
2.	Bidang Pendidikan	
	a. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas. b. Peningkatan kualitas pembelajaran. c. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan dasar dan menengah. d. Penyediaan akses dan mutu pelayanan pendidikan. e. Pemantapan implementasi penyaluran BOS. f. Terciptanya keluasaan dan pemerataan akses PAUD dan pendidikan orang	a. Program pengelolaan pendidikan b. Program pengembangan kurikulum c. Program pendidik dan tenaga kependidikan d. Program pengendalian perizinan pendidikan

No	Rencana Aksi	Program yang akan dilaksanakan
	dewasa bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan. g. Penerapan sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang profesional. h. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. i. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.	
3.	Bidang Kesehatan	
	a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional dan melayani. b. Meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat serta pemerataannya agar mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. c. Pengembangan layanan kesehatan masyarakat siaga (<i>On Call</i>) di tingkat nagari. d. Peningkatan kesadaran dan berperilaku hidup sehat. e. Revitalisasi fungsi dan fasilitas Puskesmas sebagai institusi yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk semua lapisan masyarakat. f. Mengoptimalkan program Keluarga Berencana dan program pemberian gizi tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan Balita. g. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga pelayanan kesehatan. h. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya.	a. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat c. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
4.	Bidang Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur	
	a. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. b. Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek-proyek prasarana umum, pemukiman, dan prasarana ekonomi menuju efisiensi dan efektivitas. c. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi yang menjadi	a. Program pengelolaan sumber daya air (SDA) b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum c. Program pengembangan permukiman d. Program penataan bangunan gedung e. Program penataan bangunan dan lingkungannya f. Program penyelenggaraan jalan g. Program pengembangan jasa konstruksi

No	Rencana Aksi	Program yang akan dilaksanakan
	kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. d. Pemeliharaan, pembangunan, dan peningkatan jalan serta jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan guna menjamin kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat. e. Pemeliharaan, pembangunan, dan peningkatan sarana, infrastruktur pertanian, perkebunan, dan fasilitas sentra perikanan. f. Peningkatan pembangunan jaringan listrik agar dapat menjangkau ke seluruh pelosok Kabupaten Pesisir Selatan. g. Mengembangkan sarana telekomunikasi dan media elektronika lainnya agar lebih bermanfaat untuk pengembangan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. h. Mengupayakan penyediaan sarana prasarana transportasi umum agar mampu menjangkau	h. Program penyelenggaraan penataan ruang i. Program pengembangan perumahan j. Program kawasan permukiman k. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh l. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) m. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman n. Program penanggulangan bencana o. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran p. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj) q. Program pengelolaan pelayaran r. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian s. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian t. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
5.	Bidang Ekonomi	
	a. Pengembangan pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan meningkatkan fasilitas pendukung, intensifikasi dan ekstetifikasi, sumber daya air dan irigasi, mekanisme sistem pertanian, peningkatan sumber daya manusia petani dan peternak, serta pnyediaan sarana prasarana pemasaran produksi yang lebih baik. b. Peningkatan sarana untuk sektor perikanan lainnya, dengan mengembangkan kawasan serta produksi perikanan dan fasilitas pembibitan, serta pengembangan industri pengolahan perikanan dan pengembangan pasar ke daerah lain. c. Memaksimalkan potensi sumber daya hutan dan alam, dengan tetap mempertimbangkan kelestariannya. d. Mengembangkan industri kecil, menengah, dan besar yang saling bersinergi dalam satu rantai jaringan terpadu. e. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas koperasi Usaha Kecil Menengah agar lebih mampu berkembang. f. Memperbaiki dan meningkatkan sarana prasarana perekonomian mikro seperti	a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat c. Program penanganan kerawanan pangan d. Program pengawasan keamanan pangan e. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam f. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi g. Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi h. Program pendidikan dan latihan perkoperasian i. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi j. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) k. Program pengembangan umkm l. Program pengelolaan perikanan tangkap m. Program pengelolaan perikanan budidaya n. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

No	Rencana Aksi	Program yang akan dilaksanakan
	perbaikan sistem pasar tradisional dan sentral-sentral industri kecil lainnya. g. Pengembangan kawasan ekonomi baru serta mendorong peningkatan investasi bagi investor lokal, regional, dan nasional dengan tetap memperhatikan asas kemanfaatan pada lingkungan masyarakat sekitarnya. h. Menumbuhkembangkan serta meningkatkan kemampuan manajemen bagi koperasi dan UKM melalui pelatihan dan bimbingan teknis. i. Pemberdayaan ekonomi sektor informal dan pasar tradisional. j. Revitalisasi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. k. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis perekonomian di nagari. l. Meningkatkan peranan perempuan serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan sumber perekonomian keluarga. m. Penguatan kegiatan pendampingan, penyuluhan, dan kelembagaan pertanian di tingkat nagari dan pengembangan pertanian organik dan pengembangan komoditas alternatif unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. n. Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi (Kerjasama Swasta dan Perguruan Tinggi) khususnya untuk sektor pertanian dan industri dalam memacu peningkatan ekonomi masyarakat.	o. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan p. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual q. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner r. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian s. Program perizinan usaha pertanian t. Program penyuluhan pertanian u. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting v. Program pengembangan ekspor w. Program standardisasi dan perlindungan konsumen x. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri y. Program perencanaan dan pembangunan industri z. Program pengendalian izin usaha industri aa. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional ab. Program perencanaan kawasan transmigrasi ac. Program pembangunan kawasan transmigrasi ad. Program pengembangan kawasan transmigrasi
6.	Bidang Kesejahteraan, Perempuan, Pemuda, dan Olahraga	
	a. Mendorong kesadaran gender dan mengoptimalkan peran perempuan dalam setiap aspek pembangunan kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan sisi kodrati perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga. b. Pemberdayaan pemuda dengan menggali kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja. c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan serta perlindungan terhadap anak melalui pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan. d. Pembinaan kepemudaan melalui peningkatan kompetensi pemuda, baik kompetensi ideologi, kompetensi	a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan b. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan d. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

No	Rencana Aksi	Program yang akan dilaksanakan
	keilmuan, kompetensi etis, dan kompetensi teknis sebagai bagian dari strategi kaderisi dan regenerasi kepemimpinan. e. Kanalisasi kegiatan kemasyarakatan yang positif serta membangun program terpadu antar inter Lembaga Pemerintahan, Perguruan Tinggi, LSM, Ormas, OKP, dalam partisipasinya menangani problem-problem sosial. f. Memberikan perhatian yang luas melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran pemuda.	
7.	Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	
	a. Penataan sumber daya alam yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan lingkungan hidup untuk kelanjutan pembangunan. b. Rehabilitasi kawasan lingkungan hidup yang rusak, daerah aliran sungai, dan daerah rawan longsor. c. Penataan ruang dan wilayah yang baik, konsisten, dan terpadu. d. Pemberdayaan potensi alam untuk meningkatkan keuntungan ekonomis daerah. e. Menyelesaikan konflik tenurial di tengah masyarakat yang berdampak dengan kawasan hutan lindung. f. Pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat atas lingkungan hidup. g. Momotong laju kerusakan lingkungan, memperbaiki (treatment) lingkungan yang terlanjur rusak, dan membangun lingkungan yang produktif.	a. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase d. Program perencanaan lingkungan hidup e. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup f. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) g. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) h. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) i. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh j. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat k. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat l. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup m. Program pengelolaan persampahan n. Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

No	Rencana Aksi	Program yang akan dilaksanakan
8.	Bidang Agama dan Kemasyarakatan	
	a. Menempatkan agama sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam menjalankan amanah. b. Pembangunan moral melalui agama dan pendidikan budi pekerti. c. Mewujudkan sistem dan kehidupan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang demokratis dan berakhlak mulia. d. Pemberdayaan budaya ditujukan kepada penggalan dan pelestarian budaya menuju jati diri Pesisir Selatan.	a. Program koordinasi ketentraman dan Ketertiban umum (Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)
9	Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	
	a. Melindungi masyarakat dengan menciptakan rasa aman dalam semua kegiatan masyarakat. b. Memelihara dan menjaga komunikasi dengan segenap komponen masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. c. Membangun kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh negatif dari globalisasi. d. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan instansi vertikal untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. e. Memaksimalkan potensi aparat hukum, aparat keamanan, dan ketertiban umum dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. f. Mendorong masyarakat untuk ikut aktif terlibat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. g. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang persatuan, kesatuan, dan kesadaran akan berbangsa dan bernegara. h. Mendorong dan mengupayakan pelaksanaan demokrasi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.	a. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum b. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum c. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab-bab terdahulu, telah dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah secara hirarkhis ke dalam strategi, dan arah kebijakan pembangunan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Program-program tersebut, yang diklasifikasikan menurut bidang pembangunan, merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam implementasinya, secara operasional program-program tersebut harus dijabarkan sesuai urusan-urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan yang langsung pengaruhnya terhadap pencapaian visi, misi Bupati/Wakil Bupati.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama Perangkat Daerah. Pada target kinerja diperkirakan *outcome* yang akan dihasilkan dari program-program, sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta Perangkat Daerah penanggungjawab. Rincian program berdasarkan urusan dengan indikator dan target kinerja secara rinci serta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 7.1. dan Tabel 7.2. sebagai berikut.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021-2026
Kabupaten Pesisir Selatan

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN						
5	BELANJA	1.729.897.102.605,00	1.765.971.697.548,44	1.709.489.212.929,62	1.749.417.846.689,82	1.791.515.552.182,27	1.835.959.753.188,16
5 1	BELANJA OPERASI	1.200.810.078.936,00	1.231.734.576.828,50	1.227.978.255.509,79	1.267.847.806.186,85	1.278.434.465.334,43	1.300.680.610.810,02
5 1 01	Belanja Pegawai	794.191.803.282,00	810.075.639.347,64	826.277.152.134,59	842.802.695.177,29	859.658.749.080,83	876.851.924.062,45
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	349.070.877.021,00	364.105.784.108,00	344.142.194.687,00	344.176.608.906,00	361.211.026.567,00	366.258.240.592,00
5 1 03	Bunga	-	-	-	-	-	-
5 1 04	Subsidi	-	-	-	-	-	-
5 1 05	Hibah	57.296.398.633,00	57.302.128.272,86	57.307.858.485,69	80.617.426.796,04	57.313.589.271,54	57.319.320.630,47
5 1 06	Bantuan Sosial	251.000.000,00	251.025.100,00	251.050.202,51	251.075.307,53	251.100.415,06	251.125.525,10
5 2	BELANJA MODAL	264.811.989.760,00	275.654.783.001,94	222.902.911.467,83	222.936.283.746,97	254.421.616.715,84	276.593.956.298,15
5 2 01	Belanja Tanah	3.750.000.000,00	3.750.375.000,00	3.750.750.037,50	3.751.125.112,50	3.751.500.225,02	3.751.875.375,04
5 2 02	Belanja Peralatan dan Mesin	56.338.729.723,00	56.344.363.595,97	50.349.998.032,33	50.355.033.032,14	63.360.068.535,44	71.366.404.542,29
5 2 03	Belanja Gedung dan Bangunan	52.617.128.666,00	52.622.390.378,87	45.837.139.080,63	45.841.722.794,54	53.832.483.370,00	58.324.608.516,66
5 2 04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.090.060.370,00	157.921.081.419,00	117.947.950.052,00	117.970.826.835,00	128.459.486.855,00	138.132.488.326,00
5 2 05	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.016.071.001,00	5.016.572.608,10	5.017.074.265,36	5.017.575.972,79	5.018.077.730,38	5.018.579.538,16
5 3	BELANJA TAK TERDUGA	7.218.401.854,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
5 3 01	Belanja Tak Terduga	7.218.401.854,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
5 4	BELANJA TRANSFER	257.056.632.055,00	257.082.337.718,00	257.108.045.952,00	257.133.756.756,00	257.159.470.132,00	257.185.186.080,00
5 4 01	Belanja Bagi hasil	4.402.674.555,00	4.403.114.822,00	4.403.555.134,00	4.403.995.489,00	4.404.435.889,00	4.404.876.333,00
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	252.653.957.500,00	252.679.222.896,00	252.704.490.818,00	252.729.761.267,00	252.755.034.243,00	252.780.309.747,00

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Pesisir Selatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
(1)			(2)	(3)	(4)	target (5)	Rp.000 (6)	target (7)	Rp.000 (8)	target (9)	Rp.000 (10)	target (11)	Rp.000 (12)	target (13)	Rp.000 (14)	target (15)	Rp.000 (16)	target (17)	Rp.000 (18)	(19)
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100	100	794.191.803	100	810.075.639	100	826.277.152	100	842.802.695	100	859.658.749	100	876.851.924	100	5.009.857.963	Semua OPD
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							635.366.399		635.674.411		662.388.803		689.392.833		700.397.148		738.587.126		4.061.806.719	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					119.593.155		131.547.471		144.697.218		159.161.940		175.073.134		192.575.447		922.648.365	OPD yang melaksanakan urusan pendidikan
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	62,30	62,30	108.500.500	62,92	119.350.550	63,55	131.285.605	64,19	144.414.166	64,83	158.855.582	65,48	174.741.140	97	837.147.543	
				APK SD	111,64	111,64		110,52		109,42		108,32		107,24		106,17		100		
				APK SMP	84,78	85,63		86,48		87,35		88,22		89,10		90,00		99,8		
				APM PAUD	53,6	53,65		54,19		54,73		55,28		55,83		56,39		70		
				APM SD	99,43	99,48		99,53		99,58		99,63		99,68		99,73		100		
				APM SMP	78,85	79,64		80,43		81,24		82,05		82,87		83,70		90		
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan local yang dikembangkan	1	1	121.855	2	134.041	2	147.445	2	162.190	2	178.408	2	196.249	2	940.189	
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap satuan pendidikan	85	88	10.920.800	90	12.012.880	91	13.214.168	92	14.535.585	93	15.989.143	94	17.588.058	94	84.260.634	
				Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kompetensi	86,76	87		88		89		90		91		92		92	-	
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah izin sekolah dikelola masyarakat yang	5	7	50.000	8	50.000	9	50.000	10	50.000	11	50.000	12	50.000	12	300.000	
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					316.650.000		317.550.000		318.450.000		319.350.000		320.250.000		321.150.000		1.913.400.000	OPD yang melaksanakan urusan kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	295.000.000	78	295.500.000	81	296.000.000	86	296.500.000	90	297.000.000	90	297.500.000	90	1.777.500.000	
				Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	20.000.000	82,5	20.250.000	87,5	20.500.000	92,50	20.750.000	100	21.000.000	100	21.250.000	100	123.750.000	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang mempunyai Tenaga Kesehatan sesuai Standar	20	60	500.000	70	550.000	80	600.000	90	650.000	100	700.000	100	750.000	95	3.750.000	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	70	75	750.000	80	800.000	85	850.000	90	900.000	100	950.000	100	1.000.000	80	5.250.000	
				Persentase PIRT yang memenuhi standar	60	65		70		80		90		100		100				
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81 Nagari	100	400.000	120	450.000	140	500.000	160	550.000	182	600.000	182	650.000	182	3.150.000	
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					174.722.166		150.390.571		159.605.578		169.091.536		159.598.639		175.558.503		988.966.994	OPD yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	28,81	31,29	2.500.000	35,63	7.949.338	36,62	8.744.272	37,97	9.618.699	39,28	10.580.569	40,10	11.638.626	70,00	51.031.503	
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dileyani jaringan irigasi	57,05	59,05	20.000.000	59,20	11.245.733	60,75	12.370.306	62,60	13.607.337	64,60	14.968.071	66,70	16.464.878	66,70	88.666.325	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	87,80	88,66	21.585.190	89,37	23.633.000	90,08	23.744.000	90,79	23.023.000	91,50	21.658.000	92,21	23.823.800	92,21	137.466.990	
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase fasilitas pengurangan sampah perkotaan	0	0	650.000	20	2.250.000	30	1.300.000	40	2.000.000	50	2.050.000	60	2.255.000	60	10.505.000	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	75,27	76,13	14.921.943	76,74	13.855.000	77,48	13.140.000	78,36	13.540.000	79,25	13.840.000	80,18	15.224.000	80,18	84.520.943	
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	11,20	12,73	2.870.232	14,33	2.700.000	15,94	2.500.000	17,75	2.150.000	19,15	2.325.000	20,76	2.557.500	20,76	15.102.732	
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penataan pemukiman di kawasan strategis kabupaten	n/a	30	313.000	32	600.000	34	400.000	36	400.000	38	600.000	40	660.000	40	2.973.000	
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB	80,59	83,43	10.049.452	85,77	3.685.000	87,65	5.685.000	88,96	5.685.000	89,71	5.885.000	90,26	6.473.500	90,26	37.462.952	
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kesesuaian bangunan dan	n/a	38,46	6.003.365	46,15	2.890.000	53,85	3.140.000	61,54	1.640.000	69,23	3.640.000		4.004.000	69,23	21.317.365	
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	40,36	41,11	95.084.877	41,86	80.767.500	42,61	87.622.000	43,36	96.472.500	44,11	83.187.000	44,86	91.505.700	44,86	534.639.577	
				Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	42,00	43,11	-	44,22	-	45,33	-	46,44	-	47,56	-	48,67	-	48,67	-	
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	24,66	34,25	243.000	45,66	205.000	57,08	200.000	68,49	195.000	79,91	205.000	91,32	225.500	91,32	1.273.500	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukannya	41,67	50,00	501.107	58,33	610.000	66,67	760.000	75,00	760.000	83,33	660.000	85,00	726.000	85,00	4.017.107	
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					13.998.281		23.950.000		24.815.000		27.132.500		29.505.750		32.079.000		151.480.531	OPD yang melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program Pemerintah	n/a	n/a	-	50	1.250.000	60	1.500.000	70	1.750.000	80	2.000.000	90	2.250.000	90	8.750.000	
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani	0,0009	0,0214	-	0,0214	6.850.000	0,0219	5.620.000	0,0224	5.710.000	0,0229	5.710.000	0,0234	5.910.000	0,0234	29.800.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (%)	1,25	9,92	11.925.000	9,48	13.250.000	8,9	14.575.000	8,29	16.032.500	7,58	17.635.750	6,79	19.239.000	6,79	92.657.250	OPD yang melaksanakan urusan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	37,5	50	2.073.281	60	2.500.000	70,21	3.000.000	79,59	3.500.000	88,24	4.000.000	100	4.500.000	100	19.573.281		
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG	Persentase Pengembangan Perumahan yang memiliki sertifikasi dan teregistrasi	n/a	60	-	60	100.000	75	120.000	80	140.000	85	160.000	90	180.000	90	700.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					4.804.787		6.033.348		7.997.683		7.151.501		7.713.403		8.142.334		41.843.056		
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda yang ditegakkan	67	70	1.032.522	75	1.135.774	79	1.249.351	85	1.374.286	89	1.511.715	90	1.662.886	90	7.966.534	OPD yang melaksanakan urusan ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	1.847.198	100	2.780.000	100	2.919.000	100	3.064.950	100	3.218.198	100	3.379.107	100	17.208.453		
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	33	35	1.925.067	37	2.117.574	40	3.829.332	45	2.712.265	50	2.983.491	60	3.100.340	60	16.668.069		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.598.010		6.203.021		6.823.324		7.505.356		8.256.221		9.081.842		43.467.774	OPD yang melaksanakan urusan sosial	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	80	82	413.200	84	499.730	86	549.703	88	604.373	90	665.140	92	731.654	92	3.463.800		
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN	Jumlah masyarakat yang dipulangkan karena	N/A	40	300.000	45	330.000	50	363.000	55	399.300	60	439.230	65	483.153	70	2.314.683		
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlanjar, anak	51,93	100	1.714.810	100	1.886.291	100	2.074.921	100	2.282.413	100	2.510.654	100	2.761.719	80	13.230.808		
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang valid	82	84	2.000.000	86	2.200.000	88	2.420.000	90	2.662.000	96	2.928.200	98	3.221.020	98	15.431.220		
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapatkan	100	100	870.000	100	957.000	100	1.052.700	100	1.157.970	100	1.273.767	100	1.401.143	100	6.712.580		
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang	100	100	600.000	100	660.000	100	726.000	100	798.600	100	878.460	100	966.306	100	4.629.366		
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					35.429.584		39.891.976		43.596.832		48.350.120		51.798.548		56.376.107		275.443.167		
2 07 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				775.000		900.000		1.025.000		1.150.000		1.275.000		1.300.000		6.425.000	OPD yang melaksanakan urusan tenaga kerja	
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen rencana tenaga kerja	n/a	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	6	600.000		
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	65,6	68,5	225.000	71,25	275.000	73,45	325.000	75,5	375.000	77,35	425.000	77,35	425.000	77,35	2.050.000		
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	152	175	250.000	185	300.000	190	350.000	195	400.000	198	450.000	200	450.000	198	2.200.000		
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	25,5	30,6	200.000	35,45	225.000	40,15	250.000	45,5	275.000	48,75	300.000	48,75	325.000	48,75	1.575.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2.330.000		2.563.000		2.819.300		3.101.230		3.411.352		3.752.487		17.977.369	OPD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
2 08 02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang telah menerapkan kebijakan dan penganggaran responsif gender	66,67	73,33	600.000	80	660.000	87	726.000	93,33	798.600	100	878.460	100	966.306	100	4.629.366		
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0192	0,01784	610.000	0,0156	671.000	0,0134	738.100	0,011	811.910	0,009	893.101	0,0062	982.411	0,0062	4.706.522		
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT	0,0072	0,0069	200.000	0,0064	220.000	0,0055	242.000	0,0045	266.200	0,0039	292.820	0,0039	322.102	0,0039	1.543.122		
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan Dokumen Profil Gender dan Anak	2	2	50.000	2	55.000	2	60.500	2	66.550	2	73.205	2	80.525.000		385.780		
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase cakupan pemenuhan hak anak	40	45	545.000	50	599.500	55	659.450	60	725.395	65	797.934	65	877.727	65	4.205.006		
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	70	75	375.000	77	412.500	79	453.750	82	499.125	85	549.037	85	603.941	85	2.893.353		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.169.351		3.930.000		4.210.000		5.410.000		5.600.000		5.850.000		28.169.351	OPD yang melaksanakan urusan pangan	
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya	49	45	534.351	80	550.000	80	550.000	80	550.000	80	550.000	100	600.000	100	3.334.351		
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Ketersediaan Energi (kilo kalori/kapita/hari)	3.687	3.700	2.500.000	3.710	2.850.000	3.720	3.100.000	3.730	4.250.000	3.740	4.400.000	3.750	4.500.000	3.750	21.600.000		
		Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	67,64	68		69		70		71		72		73		73	-		
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Berkurangnya Nagari Rawan Pangan	2	2	135.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	885.000		
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Registrasi PSAT (Beras)	0	0	0	5	380.000	6	410.000	7	460.000	8	500.000	9	600.000	9	2.350.000		
		Rekomendasi sertifikat prima	0	0	0	5		7		9		11		12		12			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					782.299		1.545.000		1.680.000		1.810.000		1.940.000		2.090.000		9.847.299	OPD yang melaksanakan urusan pertanahan	
2 10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Penyelesaian izin lokasi	100	100	44.000	100	75.000	100	80.000	100	90.000	100	100.000	100	100.000	100	489.000		
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian kasus tanah negara	100	100	-	100	150.000	100	160.000	100	180.000	100	200.000	100	240.000	100	930.000		
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masyarakat penerima santunan tanah	100	100	57.000	100	150.000	100	160.000	100	170.000	100	180.000	100	190.000	100	907.000		
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase subjek dan objek yang teredistribusi	0	100	121.100	100	370.000	100	400.000	100	410.000	100	420.000	100	430.000	100	2.151.100		
2 10 07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	0	100	74.400	100	150.000	100	160.000	100	170.000	100	180.000	100	190.000	100	924.400		
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pemanfaatan tanah kosong	0	100	83.200	100	150.000	100	160.000	100	170.000	100	180.000	100	190.000	100	933.200		
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pemanfaatan tanah negara	0	100	49.200	100	100.000	100	110.000	100	120.000	100	130.000	100	150.000	100	659.200		
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	60,873	64,69	353.400	68,31	400.000	72,02	450.000	75,74	500.000	79,46	550.000	83,17	600.000	83,17	2.853.400		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					7.015.000		7.617.000		8.145.000		8.676.000		8.765.000		9.347.000		49.565.000	OPD yang melaksanakan urusan lingkungan hidup	
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang dihasilkan	2	2	375.000	2	420.000	2	440.000	2	460.000	2	48.000	2	50.000	12	1.793.000		
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	90	90,31	90.000	90,84	120.000	91,15	140.000	91,42	160.000	91,80	180.000	92,10	200.000	92,10	890.000		
		Indeks Kualitas tutupan lahan	71,78	71,78	-	71,78	-	71,78	-	71,78	-	71,78	-	71,78	-	71,78	-		
		Indek kualitas udara	91,81	91,82	-	91,82	-	91,86	-	91,90	-	92,20	-	91,30	-	91,30	-		
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase luasan KEHATI yang dikelola	n.a	1	1.000.000	1	1.250.000	1	1.500.000	2	1.750.000	2	2.000.000	2	2.200.000	9	9.700.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp.000			
				target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan LB3	1,6	1,6	5.000	1,63	55.000	1,7	60.000	1,74	65.000	1,75	70.000	1,76	72.000	10,18	327.000	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang diterbitkan	95	95	75.000	95	80.000	95	85.000	95	90.000	95	100.000		120.000	95	550.000	
				Persentase ketaatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	70	70	-	75	-	80	-	85	-	90	-	90		90	-	
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah MHA yang diakui	n.a	0	10.000	2	12.000	2	15.000	3	16.000	4	17.000	4	120.000	15	190.000	
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kelompok masyarakat/komunitas yang peduli lingkungan hidup	3	3	355.000	4	360.000	5	365.000	6	370.000	7	375.000	7	400.000	32	2.225.000	
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat	n.a	2	75.000	5	85.000	5	100.000	5	120.000	5	125.000	5	130.000	27	635.000	
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	75	75	30.000	80	35.000	85	40.000	90	45.000	95	50.000	95	55.000	95	255.000	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kualitas Pengolahan Sampah	42,43	42,45	5.000.000	42,47	5.200.000	42,50	5.400.000	42,57	5.600.000	42,60	5.800.000	42,60	6.000.000	42,60	33.000.000	
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		7.200.000	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber KTP Eletronik	0,977	0,978	450.000	0,983	450.000	0,985	450.000	0,989	450.000	0,993	450.000	0,995	450.000	0,995	2.700.000	
				Rasio penduduk yang memiliki KIA	65	66	200.000	67	200.000	68	200.000	69	200.000	70	200.000	71	200.000	71	1.200.000	
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan dokumen pencatatan sipil	96	97	300.000	97,5	300.000	97,7	300.000	97,9	300.000	98	300.000	98,3	300.000	98,3	1.800.000	
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah	95	95,8	150.000	96	150.000	96,5	150.000	97	150.000	97,5	150.000	98	150.000	98	900.000	
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dokumen profil penduduk yang dihasilkan	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	600.000	
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				12.250.000		12.275.000		12.325.000		12.375.000		12.425.000		12.475.000		74.125.000	OPD yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah nagari baru yang terbentuk	n/a	9	6.225.000	9	6.225.000	9	6.250.000	9	6.275.000	9	6.300.000	9	6.325.000	9	37.600.000	
				Jumlah Peningkatan status desa mandiri (nagari)	7	9		11		13		15		17	Nagari	17		17		
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	54	60	375.000	65	400.000	70	425.000	75	450.000	80	475.000	85	500.000	80	2.625.000	
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang memiliki pengelolaan administrasi yang baik	n/a	75	3.800.000	80	3.800.000	90	3.800.000	95	3.800.000	100	3.800.000	100	3.800.000	100	22.800.000	
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Maju	545	575	1.850.000	580	1.850.000	590	1.850.000	602	1.850.000	616	1.850.000	620	1.850.000	616	11.100.000	
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.550.000		7.550.000		7.550.000		7.550.000		7.550.000		7.550.000		45.300.000	OPD yang melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk	1,57	1,45	200.000	1,35	200.000	1,25	200.000	1,10	200.000	0,95	200.000	0,90	200.000	0,90	1.200.000	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran total	2,83	2,81	6.500.000	2,80	6.500.000	2,78	6.500.000	2,76	6.500.000	2,75	6.500.000	2,74	6.500.000	2,74	39.000.000	
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase organisasi KB yang aktif (persen)	37	42,00	850.000	47,00	850.000	52,00	850.000	57,00	850.000	62,00	850.000	65,00	850.000	65,00	5.100.000	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				11.500.000		13.000.000		14.500.000		16.000.000		17.500.000		19.000.000		91.500.000	OPD yang melaksanakan urusan perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	kinerja lalu lintas kabupaten kota	0,27	0,27	11.000.000	0,26	12.500.000	0,25	14.000.000	0,24	15.500.000	0,23	17.000.000	0,22	18.500.000	0,22	88.500.000	
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah orang / penumpang yang melalui dermaga perahun (orang)	41.041	42.000	500.000	43.000	500.000	44.000	500.000	45.000	500.000	46.000	500.000	47.000	500.000	267.000	3.000.000	
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.544.812		4.999.293		5.499.222		6.049.145		6.654.059		7.725.000		35.471.531	OPD yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	90	100	782.664	100	860.931	100	947.024	100	1.041.726	100	1.145.899	100	1.225.000	100	6.003.244	
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	90	92	3.762.148	100	4.138.362	100	4.552.199	100	5.007.418	100	5.508.160	100	6.500.000	100	29.468.287	
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				979.615		850.000		892.500		937.125		983.978		1.033.176		5.676.394	OPD yang melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi sehat	5 koperasi	25koperasi	-	25 koperasi	30.000	30 koperasi	31.500	35 koperasi	33.075	40 koperasi	34.728	45 koperasi	36.465	45 koperasi	165.768	
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	5 koperasi	25koperasi	388.525	25 koperasi	150.000	30 koperasi	157.500	35 koperasi	165.375	40 koperasi	173.643	45 koperasi	182.325	45 koperasi	1.217.368	
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	5 koperasi	25koperasi	-	25 koperasi	50.000	30 koperasi	52.500	35 koperasi	55.125	40 koperasi	57.881	45 koperasi	60.775	45 koperasi	276.281	
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah koperasi sehat	5 koperasi	25koperasi	390.304	25 koperasi	100.000	30 Koperasi	105.000	35 koperasi	110.250	40 koperasi	115.762	45 koperasi	121.550	45 koperasi	942.866	
2	17	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	5 koperasi	25koperasi	43.006	25 koperasi	100.000	30 koperasi	105.000	35 koperasi	110.250	40 koperasi	115.762	45 koperasi	121.550	45 koperasi	595.568	
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase peningkatan omset UMK (%)	n/a	7	57.780	7	120.000	7	126.000	7	132.300	7	138.915	7	145.860	42	720.855	
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase peningkatan omset UMK	n/a	7	100.000	7	300.000	7	315.000	7	330.750	7	347.287	7	364.651	42	1.757.688	
				Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	5	5	50.000	10	100.000	15	200.000	20	300.000	25	400.000	30	500.000	105	1.450.000	
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				530.000		550.000		550.000		550.000		550.000		550.000		3.280.000	OPD yang melaksanakan urusan penanaman modal
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang menanamkan modal	17	19	100.000	21	100.000	23	100.000	25	100.000	26	100.000	28	100.000	142	600.000	
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah pernyataan minat	1	3	100.000	7	100.000	12	100.000	17	100.000	22	100.000	26	100.000	87	600.000	
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang diterbitkan	94,75	95	100.000	95	100.000	95	100.000	95	100.000	95	100.000	95	100.000	95	600.000	
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian izin bermasalah yang terselesaikan	60	75	80.000	75	100.000	75	100.000	75	100.000	75	100.000	75	100.000	75	580.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	50	50	150.000	50	150.000	50	150.000	100	150.000	100	150.000	100	150.000	100	900.000		
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				100.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		1.600.000		
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	% Organisasi Pemuda Yang Aktif % Wira Usaha Muda	4,1 7,3	4,1 7,3	50.000	6,6 9,8	100.000	9,1 12,3	100.000	11,6 14,8	100.000	14,1 17,3	100.000	16,6 19,8	100.000	16,6 19,8	550.000	OPD yang melaksanakan urusan kepemudaan dan olah raga	
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet Berprestasi. Jumlah Prestasi Olahraga.	10 4	10 4	0 15	50 15	150.000	15 5	150.000	70 18	150.000	20 6	150.000	90 20	150.000	90 20	750.000		
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembina Yang bersertifikasi. Jumlah Prestasi Kepramukaan	5 1	5 1	50.000	10 1	50.000	15 1	50.000	20 1	50.000	25 1	50.000	30 1	50.000	30 1	300.000		
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					112.270		123.497		135.847		149.431		164.375		221.000		906.420	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan data statistik yang valid dan handal	100	100	112.270	100	123.497	100	135.847	100	149.431	100	164.375	100	221.000	100	906.420	OPD yang melaksanakan urusan Statistik	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					68.842		75.726		83.299		91.629		100.791		155.000		575.287	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	34,36	39,26	68.842	48,19	75.726	50,21	83.299	54,32	91.629	59,89	100.791	62,13	155.000	62,13	575.287	OPD yang melaksanakan urusan persandian	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.152.158		1.267.374		1.394.111		1.533.522		1.686.874		1.855.562		8.889.601	
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan di inventarisasi	222	222	758.984	230	834.882	235	918.371	240	1.010.208	245	1.111.228	250	1.222.351	250	5.856.025	OPD yang melaksanakan urusan kebudayaan	
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	7	7	120.000	7	132.000	7	145.200	7	159.720	7	175.692	7	193.261	7	925.873		
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah lokal yang dilestarikan	22	22	60.000	22	66.000	22	72.600	22	79.860	22	87.846	22	96.631	22	462.937		
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	55,14	60	213.174	60	234.491	60	257.940	60	283.734	60	312.108	60	343.319	60	1.644.767		
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					800.583		527.500		630.250		753.275		900.603		1.077.063		4.689.273	
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks budaya baca masyarakat	n/a	0,18	775.583	0,2	500.000	0,22	600.000	0,24	720.000	0,26	864.000	0,29	1.036.800	71	4.496.383	OPD yang melaksanakan urusan perpustakaan	
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang dikoleksi	n/a	n/a	25.000	1	27.500	2	30.250	3	33.275	4	36.603	5	40.263	15	192.890		
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					369.655		443.586		532.303		638.764		766.516		919.819		3.670.643	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	0,022	0,044	334.655	0,133	401.586	0,133	481.903	0,178	578.284	0,222	693.940	0,311	832.728	0,311	3.323.096	OPD yang melaksanakan urusan kearsipan	
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	523	523	20.000	523	24.000	528	28.800	533	34.560	538	41.472	543	49.766	543	198.598		
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah	n/a	1	15.000	3	18.000	5	21.600	7	25.920	9	31.104	11	37.325	11	148.949		
	Urusan Pemerintahan Pilihan					49.019.838		41.779.833		39.882.699		45.243.560		43.331.619		46.457.415		217.044.292	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					6.620.583		7.444.023		7.854.349		11.510.226		7.898.602		8.898.729		50.226.512	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah keluarga perikanan tangkap yang meningkat pendapatannya	44.440 14.072	35.549 14.110	4.369.898 14.251	35.727 14.251	4.477.325	35.906 14.393	4.789.667	36.085 14.553	8.345.953	36.266 14.681	5.324.602	36.447 14.827	5.546.896	36.447 14.827	32.844.341	OPD yang melaksanakan urusan bidang kelautan dan perikanan	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya Jumlah keluarga pelaku perikanan yang meningkat pendapatannya	16.763 3.292	12.618 3.357	1.415.685 3.424	13.250 3.424	2.070.698	13.913 3.492	2.129.912	14.608 3.561	2.189.411	15.339 3.632	1.560.420	16.106 3.704	2.299.283	16.106 3.704	11.665.409		
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase sumber daya perikanan yang terlindungi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 25 06	PROGRAM PENGOLOHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan Jumlah keluarga pelaku pengolahan dan pemasar hasil perikanan yang meningkat pendapatannya	16 2.126	17 2.680	845.000 2.126	18 2.211	896.000	19 2.255	934.770	20 2.300	974.862	21 2.346	1.013.580	22 2.392	1.052.550	22 2.392	5.716.762		
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					2.500.000		3.700.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		3.800.000		21.400.000	
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	n/a	3,1	1.000.000	3,15	1.000.000	3,2	1.000.000	3,35	1.000.000	3,3	1.000.000	3,35	1.000.000	3,35	6.000.000	OPD yang melaksanakan urusan pariwisata	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a	0	500.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	5	5.500.000		
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi	5	7	500.000	10	700.000	13	800.000	15	800.000	17	800.000	20	800.000	82	4.400.000		
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi	5	7	500.000	10	1.000.000	13	1.000.000	15	1.000.000	17	1.000.000	20	1.000.000	82	5.500.000		
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					12.720.671		15.500.000		17.200.000		19.050.000		20.900.000		23.150.000		59.850.000	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) budidaya pertanian persentase kelompok tani yang menerapkan Good Farming Practice, good breeding practice dan good handling practice	47,92 47,92	47,92 47,92	1.200.000	48,88 48,88	2.000.000	49,86 49,86	2.500.000	50,85 50,85	3.000.000	51,87 51,87	3.500.000	52,91 52,91	4.000.000	52,91 52,91	16.200.000	OPD yang melaksanakan urusan pertanian	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Indeks Pertanian per tahun (kali) Persentase ternak unggul	2,3 6,5	2,31 7,0	5.000.000	2,33 4,5	5.500.000	2,36 5,0	6.000.000	2,38 5,5	6.500.000	2,40 6,0	7.000.000	2,43	7.500.000	2,43	7.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp.000			
				target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	18	150	1.500.000	140	1.700.000	130	2.000.000	120	2.500.000	110	2.750.000	100	3.750.000	100	3.750.000			
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanggulangan bencana Penyakit hewan	100	100	170.671	100	1.150.000	100	1.250.000	100	1.300.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000			
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah unit usaha yang diberikan rekomendasi izin usaha	30,47	180	350.000	190	400.000	200	450.000	210	500.000	220	650.000	230	650.000	230	650.000			
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	n.a	25	4.500.000	50	4.750.000	75	5.000.000	100	5.250.000	125	5.500.000	150	5.750.000	150	30.750.000			
		Jumlah Kelompok Ternak yang naik kelas	n.a	25		50		75		100		125		150		150				
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				9.832.759		11.098.050		6.593.702		6.090.886		5.692.930		5.300.077		44.608.404	OPD yang melaksanakan urusan perdagangan		
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan/usaha yang memiliki izin WSTP	5	10	50.000	15	50.000	20	50.000	25	50.000	30	50.000		50.000	30	300.000			
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan omset perdagangan	1,5	1,5	9.402.196	2,3	10.037.800	2,5	5.479.690	2,6	4.923.674	2,7	4.469.858	2,8	4.018.351	12	38.331.569			
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan omset perdagangan	1,5	1,5	147.064	2,3	235.250	2,5	250.262	2,6	262.775	2,7	275.914	2,8	289.710	12	1.460.975			
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan omset perdagangan	n/a	n/a		2,3	50.000	2,5	52.500	2,6	55.125	2,7	57.881	2,8	60.775	12	276.281			
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan omset perdagangan	1,5	1,5	233.499	2,3	450.000	2,5	472.500	2,6	496.125	2,7	520.931	2,8	546.977	12	2.720.032			
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset perdagangan	n/a	n/a	-	2,3	275.000	2,5	288.750	2,6	303.187	2,7	318.346	2,8	334.264	12	1.519.547			
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				15.545.824		1.937.760		2.034.648		2.092.448		2.040.087		2.058.609		25.709.376	OPD yang melaksanakan urusan perindustrian		
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Omset IKM	n/a	2	15.545.824	2	1.617.760	2,2	1.698.648	2,5	1.739.648	2,7	1.669.648	3,5	1.669.648	3,5	23.941.176			
		Persentase Peningkatan Jumlah IKM	n/a	2		2,35		2,68	4,85			6,04		6,7		6,7	-			
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Peningkatan Omset IKM	n/a	2		2	110.000	2,2	115.500	2,5	121.275	2,7	127.338	3,5	133.705	3,5	607.818			
		Persentase Peningkatan Jumlah IKM	n/a	2		2,35		2,68	4,85			6,04		6,7		6,7	-			
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Omset IKM	n/a	2		2	210.000	2,2	220.500	2,5	231.525	2,7	243.101	3,5	255.256	3,5	1.160.382			
		Persentase Peningkatan Jumlah IKM	n/a	2		2,35		2,68		4,85		6,04		6,7		6,7	0			
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				1.800.000		2.100.000		2.400.000		2.700.000		3.000.000		3.250.000		15.250.000	OPD yang melaksanakan urusan transmigrasi		
3 32 02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Facilitasi HPK menjadi APL untuk transmigrasi lokal	n/a	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	600.000			
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pemukiman transmigrasi yang di fasilitasi pembangunannya	n/a	2	200.000	2	250.000	2	300.000	2	350.000	2	400.000	2	400.000	2	1.900.000			
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi	n/a	10	1.500.000	15	1.750.000	20	2.000.000	25	2.250.000	30	2.500.000	35	2.750.000	35	12.750.000			
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					57.318.633		64.954.685		73.735.181		83.850.731		95.526.243		61.645.073		484.412.866			
4 01	SEKRETARIAT DAERAH				38.276.741		42.104.415		46.314.856		50.946.342		56.040.976		61.645.073		295.328.402	OPD yang melaksanakan unsur sekretariat daerah		
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran	17,03	18,00	24.526.331	20,00	26.978.964	21,00	29.676.860	22,00	32.644.547	23,00	35.909.001	24,00	39.499.901	24,00	189.235.605			
		Nilai SAKIP pada Komponen Pelaporan Kinerja	10,97	11,50		12,00		12,50		13,00		13,50		14,00		14,00				
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pencapaian target kinerja lingkup kesejahteraan sosial dan masyarakat			12.844.122		14.128.535		15.541.388		17.095.527		18.805.080		20.685.588		99.100.239			
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindak lanjuti			906.287		996.916		1.096.607		1.206.268		1.326.895		1.459.585		6.992.558	OPD yang melaksanakan unsur sekretariat DPRD		
4 02	SEKRETARIAT DPRD				19.041.892		22.850.270		27.420.324		32.904.389		39.485.267				189.084.464			
4 02 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA																			
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase program kerja DPRD yang terealisasi sesuai dengan fungsinya	50	55	19.041.892	60	22.850.270	65	27.420.324	70	32.904.389	75	39.485.267	80	47.382.321	80	189.084.464			
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					280.441.392		311.111.721		342.667.194		374.899.974		407.931.702		408.133.365		459.419.527			
5 01	PERENCANAAN				1.437.544		1.280.944		1.378.369		1.483.696		1.697.606		1.797.606		9.875.765	OPD yang melaksanakan unsur perencanaan		
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja	21,96	23	714.211	25	514.211	26	565.632,60	27	622.195,86	27,5	784.415,45	28	884.415,45	28	4.085.082			
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan Perangkat daerah yang selaras dengan Perencanaan Daerah	100	100	723.332	100	766.732	100	812.736	100	861.500	100	913.190,51	100	913.191	100	4.990.683			
5 02	KEUANGAN				277.122.712		307.824.330		339.169.554		371.177.290		403.868.032		403.868.032		437.264.128	OPD yang melaksanakan unsur keuangan		
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang tertib dalam pengelolaan keuangan	100	100	275.199.303	100	305.703.289	100	336.817.355	100	368.553.702	100	400.924.776	100	400.924.776	100	433.943.271			
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah yang tertib dalam penatausahaan BMD	100	100	1.085.251	100	1.115.251	100	1.145.251	100	1.175.251	100	1.205.251	100	1.205.251	100	1.235.251			
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	0,02	0,02	838.158	1,61	1.005.790	1,74	1.206.947	1,87	1.448.337	2,01	1.738.004	2,16	1.738.004	2,16	2.085.605			
5 03	KEPEGAWAIAN				1.672.771		1.756.410		1.844.231		1.936.442		2.033.264		2.134.927		11.378.046	OPD yang melaksanakan unsur kepegawaian		
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Kompetensi jabatan dengan Anjab	50	55	1.672.771	60	1.756.410	65	1.844.231	79	1.936.442	75	2.033.264	80	2.134.927	80	11.378.046			
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.920.481		2.016.505		2.117.330		2.223.197		2.334.357		2.451.075		13.062.945			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata rata lamanya PNS mendapatkan pengembangan kompetensi	10,8	10,8	1.920.481	15	2.016.505	18	2.117.330	20	2.223.197	25	2.334.357	30	2.451.075	30	13.062.945	OPD yang melaksanakan unsur pendidikan dan pelatihan
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				208.365		250.038		275.041		302.545		332.800		332.800		1.701.589	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kebijakan Pembangunan yang searah dengan Sasaran RPJMD	84,5	87	208.365	89,5	250.038	91,5	275.041	93	302.545	94	332.800	95	332.800	95	1.701.589	OPD yang melaksanakan unsur penelitian dan pengembangan
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					1.566.723		1.820.068		1.950.000		1.950.000		1.950.000		1.950.000		11.186.791	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH				1.566.723		1.820.068		1.950.000		1.950.000		1.950.000		1.950.000		11.186.791	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai SAKIP pada komponen Evaluasi internal dan Capaian Kinerja	6,94	7,2	1.266.723	7,8	1.520.068	8,3	1.650.000	8,7	1.650.000	9,1	1.650.000	9,4	1.650.000	9,4	9.386.791	Inspektorat Daerah
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase tindak lanjut temuan jumlah temuan BPK	9,98	11	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	300.000	100	1.800.000	
Unsur Kewilayahan					2.037.000		2.152.000		2.312.000		2.472.000		2.672.000		2.672.000		14.317.000	
7 01	KECAMATAN				2.037.000		2.152.000		2.312.000		2.472.000		2.672.000		2.672.000		14.317.000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan	80	81,5	382.000	82,5	412.000	83,5	442.000	84,5	472.000	85	502.000	85	502.000	85	2.712.000	Kecamatan
		Persentase LDS yang aktif	60	50		60		65		70		75		80		80		
		persentase mesjid yang melaksanakan subuh berjemaah	N/A	N/A		30		35		40		45		50		50		
		Jumlah Remaja Mesjid yang aktif	N/A	N/A		20		25		30		35		40		40		
		Jumlah Majelis Ta'lim yang aktif	50	60		65		70		75		80		85		85		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan	40	45	650.000	50	665.000	55	695.000	60	740.000	65	785.000	65	785.000	65	4.320.000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	80	85	212.000	90	227.000	95	242.000	100	257.000	100	272.000	100	272.000	100	1.482.000	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan terkait pemerintahn umum yang dilaksanakan	70	75	463.000	80	478.000	95	508.000	100	538.000	100	568.000	100	568.000	100	3.123.000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah nagari lingkup kecamatan yang memiliki pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik	90	95	325.000	100	340.000	100	390.000	100	425.000	100	500.000	100	500.000	100	2.480.000	
		Jumlah penetapan kawasan pedesaan yang di fasilitasi	1	1	5.000	2	30.000	2	35.000	2	40.000	2	45.000	2	45.000	2	200.000	
Unsur Pemerintahan Umum					4.110.000		4.235.000		4.385.000		4.445.000		4.480.000		4.480.000		26.135.000	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.110.000		4.235.000		4.385.000		4.445.000		4.480.000		4.480.000		26.135.000	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah masyarakat yang meningkat wawasan kebangsaannya	0	500 org	525.000	500 org	535.000	500 org	545.000	500 org	545.000	500 org	545.000	500 org	545.000	500 org	3.240.000	OPD yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemahaman politik dikalangan masyarakat/aparatut daerah serta teroptinya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	75%	85%	1.535.000	85%	1.605.000	85%	1.675.000	85%	1.680.000	85%	1.680.000	85%	1.680.000	85%	9.855.000	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	42 ormas	46 ormas	300.000	53 ormas	330.000	63 ormas	345.000	73 ormas	360.000	83 ormas	360.000	83 ormas	360.000	83 ormas	2.055.000	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75%	85%	1.160.000	85%	1.175.000	85%	1.175.000	85%	1.185.000	85%	1.190.000	85%	1.190.000	85%	7.075.000	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang ditangani	100%	100%	590.000	100%	590.000	100%	645.000	100%	675.000	100%	705.000	100%	705.000	100%	3.910.000	
TOTAL					1.859.481.372		1.911.695.333		1.997.194.861		2.093.406.913		2.167.746.008		2.197.153.011		10.559.623.326	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2021-2026 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan, maka Pemerintah Daerah menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama dengan target kinerja yang diharapkan terwujud selama lima tahun ke depan, sebagaimana tersaji dalam Tabel 8.1.

Tabel. 8.1
Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	OUTLOOK	TARGET SETIAP TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	70,06	70,21	70,59	70,98	71,39	71,68
2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	2,55	2,89	4,17	4,52	4,62	4,75
3	Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	56 (CC)	58 (CC)	60 (B)	62 (B)	64 (B)	65 (B)
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tanpa satuan	68,00 (B)	70,00 (BB)	72 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	78 (BB)
6	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	3209	3215	3223	3229	3234	3240
7	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	3 (3,0057)	3 (3,0057)	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3 (3,2)
8	Indeks Kelembagaan	tanpa satuan	P-3 (Cukuf Efektif)	P-3 (Cukuf Efektif)	P-4 (Efektif)	P-4 (Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)
9	Indeks SPBE	tanpa satuan	3,20	3,35	3,55	3,70	3,90	3,90
10	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	57	62	71	77	81	85
11	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	93 (informatif)	93 (informatif)	94 (informatif)	94 (informatif)	94 (informatif)	95 (informatif)
12	Indeks Inovasi Daerah	tanpa satuan	5.150	6.300	7.500	8.500	9.500	10.500
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	tanpa satuan	80.00	82.00	84.00	85.00	85.00	85.00
14	Usia Harapan Hidup	tahun	71,04	71,22	71,39	71,57	71,74	71,92

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	OUTLOOK	TARGET SETIAP TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
15	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	8	8	8	8	8	8
16	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	100	95	90	85	80	75
17	Prevalensi stunting	persen	11,6	11,4	11,2	11	10,9	10,8
18	Angka Kesakitan	persen	16,28	15,95	15,67	15,39	15,12	14,84
19	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	persen	75	80	85	90	95	100
20	Tingkat Kemiskinan	persen	7,55	7,2	6,9	6,65	6,45	6,25
21	Indeks Gini	tanpa satuan	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
22	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	52,54	53,00	53,56	54,20	55,04	56,05
23	Pencapaian skor pola pangan harapan	persen	86,5	87	87,5	88	88,58	89
24	Pengeluaran perkapita	Rp./org/thn	9.212.000	9.325.000	9.369.000	9.534.000	9.734.000	9.949.000
25	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rp.	9,711	9,992	10,409	10,879	11,382	11,923
26	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	200.000	310.000	372.000	446.400	536.680	642.816
27	Nilai PDRB pertanian (ADHK)	Rp. Triliun	3,55	3,61	3,72	3,84	3,97	4,11
28	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	703,61	707,32	717,93	730,85	745,47	761,87
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,93	6,85	6,4	5,8	5,2	4,95
30	Rasio Konektivitas	persen	55	57	58	60	61	63
31	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	persen	29,55	31,90	32,90	33,90	34,90	35,90
32	Proporsi lahan sawah beririgasi baik	persen	59,05	59,2	60,75	62,6	64,6	66,7
34	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86,74	86,85	86,94	87,10	87,80	88,15
35	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	orang	4700	5200	5700	6200	6700	7200
36	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1.000.000	1.200.000	1.440.000	1.728.000	2.073.600	2.073.000
37	Lama tinggal wisatawan	hari	1,25	1,25	1,25	1,25	1,5	1,5
38	Jumlah omset usaha ekonomi kreatif	milyar Rp	12	18	25	34	42	50
39	Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan	persen	10,56	12,72	14,87	17,03	19,18	21,34
40	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,36	13,40	13,45	13,49	13,53	13,57

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	OUTLOOK	TARGET SETIAP TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
41	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,29	8,32	8,35	8,38	8,40	8,43
42	Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	orang	4	4	7	9	12	14
43	Indeks Daya Saing Daerah bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,150)	Tinggi (3,200)	Tinggi (3,350)	Tinggi (3,500)	Tinggi (3,650)	Sangat Tinggi (3,800)
44	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	tanpa satuan	5,9258	6,643	7,2770	7,9741	8,7985	10,0682
45	Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	persen	96,40	96,50	96,60	96,70	96,80	100
46	Tingkat partisipasi subuh berjamaah di mesjid / mushola	tanpa satuan	Rendah (≤10 orang)	Rendah (≤10 orang)	sedang (11 s.d 20 orang)	sedang (11 s.d 20 orang)	tinggi (≥21 orang)	tinggi (≥21 orang)
47	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	10	10	10	10	10	10
48	Jumlah wirasahawan yang berdaya saing	orang	n/a	500	700	900	1100	1300
49	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	68,42	69,92	71,42	72,92	74,42	75,92
50	Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	0.00085	0.0008	0.00075	0.0007	0.00065	0.0006
51	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	persen	90,5208	91,0944	91,7109	92,4139	93,2033	94,0788
52	Jumlah nagari Tangguh bencana	nagari	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (182) Madya (0) Utama (0)	Pratama (162) Madya (20) Utama (0)	Pratama (122) Madya (40) Utama (20)	Pratama (82) Madya (60) Utama (40)	Pratama (62) Madya (80) Utama (60)
53	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93	56,93

Selanjutnya, penjelasan rinci terkait definisi operasional, formulasi dan penetapan perangkat daerah penanggungjawab terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama akan ditetapkan dengan Peratutan Bupati.

8.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah indikator kinerja berbentuk *outcome*, yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, Indikator Kinerja Daerah lebih menggambarkan tujuan akhir otonomi daerah yang digunakan untuk mengevaluasi apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan target kinerja masing-masing Indikator Kinerja Daerah, selain mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemampuan SDM, dan tingkat kinerja

efektif, juga memasukkan semangat sinergi dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang mendukung berbagai program guna tercapainya target kinerja sasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa tidaklah cukup upaya pencapaian target kinerja sasaran hanya disandarkan pada ketersediaan anggaran yang nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan banyaknya kegiatan yang perlu didanai dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memaknai dan mengimplementasikan nilai-nilai gotong-royong dalam pencapaian target kinerja selama lima tahun mendatang.

Indikator Kinerja Daerah atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, direncanakan dan ditargetkan sebagaimana tersaji dalam Tabel 8.2 berikut.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	OUTLOOK 2021	TARGET STIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
A	INDIKATOR KINERJA MAKRO								
1	Indek Pembangunan Manusia	69,90	70,06	70,21	70,59	70,98	71,39	71,68	71,68
	a. Usia Harapan Hidup (Tahun)	7,06	71,04	71,22	71,39	71,57	71,74	71,92	71,92
	b. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,260	8,29	8,32	8,35	8,38	8,40	8,43	8,43
	c. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,320	13,36	13,40	13,45	13,49	13,53	13,57	13,57
	d. Pengeluaran Perkapita (ribu Rp/org /thn)	9.212	9.325	9.369	9.534	9.734	9.949	10.182	10.182
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,11	2,55	2,89	4,17	4,52	4,62	4,75	4,75
3	PDRB ADHK (Rp.Triliun)	9,470	9,711	9,992	10,409	10,879	11,382	11,923	11,923
4	PRDB Perkapita ADHK (Rp. Juta)	20,28	19,69	20,05	20,66	21,37	22,12	22,94	22,94
5	Indek Gini	0,249	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,00	6,93	6,85	6,73	6,61	6,46	6,30	6,30
7	Tingkat Kemiskinan (%)	7,61	7,79	7,67	7,55	7,42	7,29	7,16	7,16
8	Indek Pembangunan Manusia	69,90	70,06	70,21	70,59	70,98	71,39	71,68	71,68
9	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	40,10	38,43	38,25	38,03	37,78	37,51	37,21	37,21
B	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
I	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR								
1	Urusan Pendidikan								
a	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD (APK PAUD)	62,30	62,35	62,40	62,45	62,50	62,55	62,60	62,60
b	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SD	99,66	99,70	99,73	99,76	99,79	99,82	99,85	99,85

Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	OUTLOOK 2021	TARGET STIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
c	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	91,95	92,05	92,15	92,25	92,35	92,45	92,55	92,55
d	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	7,74	11,24	14,74	18,24	21,74	25,24	28,74	28,74
2	Urusan Kesehatan								
a	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,0079	0,0079	0,0079	0,0099	0,0099	0,0099	0,0099	0,0099
b	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang Terakreditasi	50	50	100	100	100	100	100	100
c	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	84,80	100	100	100	100	100	100	100
d	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan	91,6	100	100	100	100	100	100	100
e	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	88,8	100	100	100	100	100	100	100
f	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	71,2	100	100	100	100	100	100	100
g	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	58,1	100	100	100	100	100	100	100
h	Persentase Orang Usia 15-29 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	21,2	100	100	100	100	100	100	100
i	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	70,8	100	100	100	100	100	100	100
j	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	5,9	100	100	100	100	100	100	100
k	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	114,1	100	100	100	100	100	100	100
l	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	97,7	100	100	100	100	100	100	100
m	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100

Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	OUTLOOK 2021	TARGET STIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
n	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	22,2	100	100	100	100	100	100	100
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
a	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab / Kota	32,97	37,29	42,74	43,44	44,85	46,17	46,53	46,53
b	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi,Erosi,dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Penanganan Pantai di WS Kewenangan Kab / Kota	24,65	25,29	28,51	29,80	31,09	32,38	33,66	33,66
c	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab / Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	57,05	59,05	60,75	62,60	64,60	66,70	68,30	68,30
d	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di seluruh Kab / Kota	95,59	96,45	97,16	97,87	98,58	99,29	100	100
e	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	75,27	76,13	76,74	77,48	78,36	79,25	80,18	80,18
f	Rasio Kepatuhan IMB Kab / Kota	80,59	83,43	85,77	87,65	88,96	89,71	90,26	90,26
g	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	40,36	41,11	41,86	42,61	43,36	44,11	44,86	44,86
h	Rasio Tenaga Operator / Teknisi / Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	24,66	34,25	45,66	57,08	68,49	79,91	91,32	91,32
i	Rasio Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Urusan Perumahan Rakyat								
a	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	-	-	20,00	25,00	30,00	40,00	150,00	150,00

Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	OUTLOOK 2021	TARGET STIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
b	Persentase Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten / Kota	-	-	-	50,00	50,00	50,00	200,00	200,00
c	Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang Ditangani	140,21 (0%)	140,21% (0%)	138,21 (1,43%)	136,21 (2,86%)	134,2 (4,28%)	132,2 (5,71%)	130,2 (7,13%)	130,2 (7,13%)
d	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	11.345.	500	650	700	800	900	1.000	1.000
e	Jumlah Perumahan yang sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	40,00	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	78,00	78,00
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
a	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	83.33%	84.34%	85.23%	87.95%	91.11%	92.00%	93.02%	93.02%
b	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	0,67	0,70	0,75	0,79	0,85	0,89	0,91	0,91
c	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
d	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	66%	70%	75%	84%	90%	95%	100%	100
e	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	77,6%	79%	87%	90%	95%	100%	100%	100%
f	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	33,00	35,00	37,00	40,00	45,00	50,00	50,00	50,00
g	Persentase Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
6	Urusan Sosial								
a	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan, Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	7,21	100	100	100	100	100	100	100

Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	OUTLOOK 2021	TARGET STIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
b	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	100	100	100	100	100	100	100	100
II	LAYANAN URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	Urusan Tenaga Kerja								
a	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	13,06	14,05	14,45	14,85	15,15	15,75	16,25	16,25
b	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	65,60	68,50	71,25	73,45	75,50	77,35	80,50	80,50
c	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	45,85	46,01	46,20	46,38	46,57	46,76	46,95	46,95
d	Persentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP / PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	25,50	30,60	35,45	40,15	45,50	48,75	50,75	50,75
e	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten / Kota	152	175	185	190	195	198	220	220
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
a	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	8,56	8,62	8,68	8,74	8,80	8,86	8,92	8,92
b	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten / Kota	3,00	2,995	2,990	2,94	2,89	2,84	2,79	2,79
c	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,02	0,017	0,015	0,013	0,012	0,011	0,010	0,010
3	Urusan Pangan								
a	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras / Jagung sesuai Kebutuhan)	45%	49%	80%	80%	80%	80%	100%	100%
4	Urusan Pertanahan								
a	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	OUTLOOK 2021	TARGET STIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
	Peruntukan Tanahnya diatas Izin Lokasi dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan								
b	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c	Persentase Ketersediaan Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	100	100	100	100	100	100	100	100
d	Persentase Ketersediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Direistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	100	100	100	100	100	100	100
e	Persentase Ketersediaan Tanah untuk Masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100
f	Jumlah Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui Mediasi	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	11,00
5	Urusan Lingkungan Hidup								
a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab / Kota	86,74	86,85	86,94	87,10	87,80	88,15	89,00	89,00
	Indeks Kualitas Air	90	90	90,31	90,84	91,15	91,42	91,80	91,80
	Indeks Kualitas Udara	91,81	91,82	91,82	91,86	91,90	92,20	91,30	91,30
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78
b	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab / Kota	38,46 %	98%	99%	99%	99%	100%	100%	100%
c	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab / Kota	66,67%	66,75%	67%	68%	68,43	68,50%	70%	70%
d	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	16,97%	24%	26%	27%	28%	30%	30%	30%
e	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	21,49%	74%	73%	72%	71%	70%	70%	70%

Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	OUTLOOK 2021	TARGET STIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
a	Cakupan Perekaman KTP Elektronik	353.268 (98,02%)	354.406 (98,2%)	355.243 (98,6%)	356.964 (98,08%)	357.085 (99,0%)	368.045 (99,02%)	368.406 (99,3%)	368.406 (99,3%)
b	Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	29%	30%	35%	45%	50%	55%	60%	60%
c	Kepemilikan Akta Kelahiran	260.742 (50,6%)	267.510 (52%)	282.944 (55%)	293.233 (57%)	308.666 (60%)	321.527 (62,5%)	334.388 (65%)	334.388 (65%)
d	Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	3	4	5	6	8	10	12	12
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
a	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	69,64%	88,23%	94,11%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	5,60%	6,97	8,57	10,85	11,62%	13,18%	13,95%	13,95%
8	Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana								
a	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,83%	2,81%	2,80%	2,78%	2,76%	2,75%	2,73%	2,73%
b	Perentase Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)	76,62%	76,70%	76,74%	76,77%	76,79%	76,80%	76,82%	76,82%
c	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	7,03%	7%	6,98%	6,96%	6,94%	6,93%	6,91%	6,91%
9	Urusan Perhubungan								
a	Rasio Konektivitas Kabupaten / Kota	54	55	57	58	60	61	63	63
b	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	0,27	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22
10	Urusan Komunikasi dan Informatika								
a	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100	100	100	100

Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	OUTLOOK 2021	TARGET STIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
b	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	80	80	85	88	90	95	100	100
c	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik , Mengetahui Kebijakan, dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	52	57	62	67	72	77	82	82
16	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
a	Persentase Koperasi yang Berkualitas	14,47%	15%	18%	20%	23%	27%	30%	30%
b	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	68,02%	70%	72%	75%	78%	80%	85%	85%
17	Urusan Penanaman Modal								
a	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten / Kota	34,34	38,00	42,00	47,00	50,00	55,00	62,00	62,00
18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
a	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	5%	5%	10%	20%	30%	40%	50%	50%
b	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,85%	0,85%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
c	Peningkatan Prestasi Olahraga	5	6	8	10	13	15	20	20
19	Urusan Statistik								
a	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
b	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Urusan Persandian								
a	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	30,96%	35,74%	40,16%	51,62%	53,16%	56,82%	59,02%	59,02%

Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	OUTLOOK 2021	TARGET STIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
21	Urusan Kebudayaan								
a	Terlestarikannya Cagar Budaya	15%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	60%
22	Urusan Perpustakaan								
a	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	31,75%	41,23%	47,38%	56,87%	58,25%	67,74%	69,13	69,13
b	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	3,4471	5,9258	6,643	7,2770	7,9741	8,7985	10,0682	10,0682
c	Indeks Budaya Baca Masyarakat	67,963	67,963	74,897	82,378	90,479	99,293	109,150	109,150
23	Urusan Kearsipan								
a	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	7,4	9,5	12,1	13,6	16,7	20,5	2,5	2,5
b	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	25,8	51,7	77,5	93,0	99,2	99,2
III	LAYANAN URUSAN PILIHAN								
1	Urusan Kelautan dan Perikanan								
a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten / Kota	46.713	48.168	48.977	5,694	51,64	52,553	53,945	53,945
2	Urusan Pariwisata								
a	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	0,93%	1%	3%	5%	6%	7%	8%	8%
b	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota	0,91%	1%	10%	15%	15%	15%	15%	15%
c	Tingkat Hunian Akomodasi	7%	8%	10%	20%	30%	40%	50%	50%

Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	OUTLOOK 2021	TARGET STIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
d	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
e	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	1,4%	1,5%	2%	3%	4%	5%	6%	6%
3	Urusan Pertanian								
a	Produktivitas Pertanian Per Hectare Per Tahun	48,63	49,00	50,47	50,72	50,98	51,23	51,49	51,49
b	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	51,18	52	60	70	80	90	95	95
4	Urusan Perdagangan								
a	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	50%	52%	55%	57%	60%	62%	65%	65%
b	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	15,41%	16%	16,2%	16,5%	16,7%	17%	17,2%	17,2%
c	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	0,37%	0,4%	0,45%	0,48%	0,5%	0,53%	0,55%	0,55%
5	Urusan Perindustrian								
a	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Provinsi	1,2	1,96	2,3	2,61	4,62	5,7	6,28	6,28
b	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0	0	14,2%	18,5%	22%	25,2%	30%	30%
c	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	0	0	10%	15%	20%	25%	30%	30%

Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	OUTLOOK 2021	TARGET STIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
e	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten / Kota	0	0	5%	8%	10%	12%	15%	15%
f	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Urusan Transmigrasi								
a	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial dikawasan transmigrasi	N/A	10	15	20	25	30	35	35
IV	FUNGSI PENGAWASAN								
1	Inspektorat								
a	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	3 (3,0057)	3 (3,0057)	3 (3,0057)	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3 (3,2)	3 (3,0057)
b	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,15)	3 (3,2)	3
c	Manajemen Resiko Indeks	-	-	-	2	2 (2,25)	2 (2,5)	3	3
d	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	-	-	-	2	2 (2,25)	2 (2,25)	3	3
V	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	Perencanaan								
a	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
b	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
c	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
d	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
e	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100

Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	OUTLOOK 2021	TARGET STIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
f	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Keuangan								
a	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-0,06	-0,06	-0,06	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
b	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	-0,13	-0,13	-0,13	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09	-0,09
c	Manajemen Aset	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
d	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%
e	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,17	0,17
f	Rasio PAD	0,02	0,02	1,61	1,74	1,87	2,01	2,16	2,16
g	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditure)	0,29	0,31	0,41	0,44	0,45	0,46	0,47	0,47
h	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kepegawaian								
a	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	70,11 %	79,31 %	82,50 %	85,75 %	90 %	92 %	95 %	95 %
b	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	4,49 %	8,56 %	12,64 %	16,71 %	20,79 %	24,86 %	28,94 %	28,94 %
c	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	38,37 %	40 %	55 %	60 %	70 %	75 %	100 %	100 %
4	Penelitian dan Pengembangan								
a	Persentase inovasi daerah yang diterapkan (%)	35	45	50	55	60	65	70	70
b	Persentase hasil kelitbangan dalam RKPD (%)	35	45	50	55	60	65	70	70

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	OUTLOOK 2021	TARGET STIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
VI	FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	Sekretariat daerah								
a	Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
c	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
d	Informasi tentang Sumber Daya yang tersedia unuk Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Kunci setiap urusan pemerintahan tersebut di atas, menjadi target kinerja setiap perangkat daerah pemangku bidang urusan pemerintahan terkait. Perangkat Daerah tersebut sekaligus menjadi wali data dari indikator kinerja tersebut.

BAB IX

PENUTUP

Demikian RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Pesisir Selatan dan menjabarkannya ke dalam dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan lima tahun ke depan. Proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ini sampai ditetapkan menjadi Peraturan Daerah telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR



LAMPIRAN I

**TABEL PENYELARASAN TARGET INDIKATOR MAKRO
KABUPATEN/KOTA, PROVINSI DAN NASIONAL**

Kabupaten Pesisir Selatan

[illegible]



LAMPIRAN II

**TABEL PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL**

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
											2020	2021	2022	2023	2024	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021
1		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan																								
		Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33,3	35,7	51,7	51,8									
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68	68	68,8	69,2	70,3	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33,3	35,7	51,7	51,8									
									PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9									
		Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m ³)	4	4,4	4,7	5,1	5,4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	28,81	31,29	35,63	36,62	37,97	39,28	40,10
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6									
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	28,81	31,29	35,63	36,62	37,97	39,28	40,10
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)		61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26									
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20									
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)		1	3	3	3	3	3									
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94	95,2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291,79	292,98	294,15	295,31		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersedian Energi (kilo kalori/kapita/hari)	3.687	3.700	3.710	3.720	3.730	3.740	3.750
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82,5	83	84	84,5		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	67,64	68	69	70	71	72	73
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)	2100	2100	2100	2100	2100	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291,79	292,98	294,15	295,31		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersedian Energi (kilo kalori/kapita/hari)	3.687	3.700	3.710	3.720	3.730	3.740	3.750

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)				82,5	83	84	84,5		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	67,64	68	69	70	71	72	73
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57	57	57	57	57	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)				291,79	292,98	294,15	295,31		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersedian Energi (kilo kalori/kapita/hari)	3.687	3.700	3.710	3.720	3.730	3.740	3.750
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)				82,5	83	84	84,5		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	67,64	68	69	70	71	72	73
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under nourishme nt(PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)				291,79	292,98	294,15	295,31		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersedian Energi (kilo kalori/kapita/hari)	3.687	3.700	3.710	3.720	3.730	3.740	3.750
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)				82,5	83	84	84,5		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	67,64	68	69	70	71	72	73
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)				291,79	292,98	294,15	295,31		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersedian Energi (kilo kalori/kapita/hari)	3.687	3.700	3.710	3.720	3.730	3.740	3.750
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)				82,5	83	84	84,5		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	67,64	68	69	70	71	72	73
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)				22	24	27	28		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Berkurangnya Nagari Rawan Pangan	2	2	2	2	2	2	2
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)				83	83,5	84	84,5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Registrasi PSAT (Beras)	0	0	5	6	7	8	9
										Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rekomendasi sertifikat prima	0	0	5	6	9	11	12
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	16	17	18	19	20	21	22	
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah keluarga pelaku pengolahan dan pemasar hasil perikanan yang meningkat pendapatannya	2.126	2.680	2.211	2.255	2.300	2.346	2.392	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39,27	40	40,5	41,6	42,4	44									
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Petani dan Petugas Pertanian (%)			45	50	55	60		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	n.a	25	50	75	100	125	150
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Ternak yang naik kelas	n.a	25	50	75	100	125	150
		Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26	26,9	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)		41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)		7	7	7	7	7	7									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)		20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)		250	250	300	350	350	350									
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Persen)	<64	<64	<72	<76	780	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)		41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)		7	7	7	7	7	7									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)		20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	30.000									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)		250	250	300	350	350	350									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)		3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	16.763	12.618	13.250	13.913	14.608	15.339	16.106

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
											2020	2021	2022	2023	2024	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)		256.747	262.256	274.280	284.467	295.226	306.934	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah keluarga pelaku perikanan yang meningkat pendapatannya	3.292	3.357	3.424	3.492	3.561	3.632	3.704	
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit)		5	20	40	60	80	100										
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)		17	17	17	19	19	19										
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)		52	67	72	79	85	93										
									PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		80	82	84	86	90	92	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase sumber daya perikanan yang teridungi	0	0	0	0	0	0	0	0
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	16	17	18	19	20	21	22	
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah keluarga pelaku pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat pendapatannya	2.126	2.680	2.211	2.255	2.300	2.346	2.392	
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39,27	40	40,5	41,6	42,4	44										
		Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)		60	60	63	65	67	69	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	5 koperasi	25kopera si	25 koperasi	30 koperasi	35 koperasi	40 koperasi	45 koperasi	
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)		60	60	63	65	67	69										
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern (koperasi)		50	50	60	70	80	90	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi sehat	5 koperasi	25kopera si	25 koperasi	30 koperasi	35 koperasi	40 koperasi	45 koperasi	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi (produk)		45	100	120	125	130	615	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase peningkatan omset UMK (%)	n/a	7	7	7	7	7	7	
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor ril, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4	4,1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)			83	83,5	84	84,5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Registrasi PSAT (Beras)	0	0	5	6	7	8	9	
																		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rekomendasi sertifikat prima	0	0	5	7	9	11	12	
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)			5	5	5	5		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) budidaya pertanian	47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
											2020	2021	2022	2023	2024	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)			1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani yang menerapkan Good Farming Practice, good breeding practice dan good handling practice	47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)				5	5	5	5										
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)			20	20	20	20	20	100									
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)				0,63	0,6	0,57	0,54		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani yang menerapkan Good Farming Practice, good breeding practice dan good handling practice	47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)			0,93	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	44.440	35.549	35.727	35.906	36.085	36.266	36.447
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya sarana prasaranan penangkapan ikan (unit)			1.400	1.423	1.590	1.739	1.768	1.800	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah keluarga perikanan tangkap yang meningkat pendapatannya	14.072	14.110	14.251	14.393	14.553	14.681	14.827
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya sarpras UPTD Pelabuhan Perikanan (unit)			3	3	3	3	3	3									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (dokumen)			100	100	100	100	100	100									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Pro duksi Perikanan Tangkap (ton)			220.615	222.693	225.081	227.546	230.081	232.762									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)			3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	16.763	12.618	13.250	13.913	14.608	15.339	16.106
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)			256.747	262.256	274.280	284.467	295.226	306.934	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah keluarga pelaku perikanan yang meningkat pendapatannya	3.292	3.357	3.424	3.492	3.561	3.632	3.704
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Pemfaatan Teknologi tepat guna (unit)			5	20	40	60	80	100									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)			17	17	17	19	19	19									

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)		52	67	72	79	85	93	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	16	17	18	19	20	21	22
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah keluarga pelaku pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat pendapatannya	2.126	2.680	2.211	2.255	2.300	2.346	2.392
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah keluarga pelaku pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat pendapatannya	2.126	2.680	2.211	2.255	2.300	2.346	2.392
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39,27	40	40,5	41,6	42,4	44	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah keluarga pelaku pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat pendapatannya	2.126	2.680	2.211	2.255	2.300	2.346	2.392
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (Persen)	5	5,5	6,5	7,5	8,1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)				20	20	25	25	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Omset IKM	n/a	2	2	2,2	2,5	2,7	3,5
																		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	n/a	2	2,35	2,68	4,85	6,04	6,7
									PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI (%)			72	74	76	78		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Peningkatan Omset IKM	n/a	2	2	2,2	2,5	2,7	6,7
																		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	n/a	2	2,35	2,68	4,85	6,04	6,7
									PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri (unit usaha)			41.373	43.263	45.363	47.673		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Omset IKM	n/a	2	2	2,2	2,5	2,7	3,5
																		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	n/a	2	2,35	2,68	4,85	6,04	6,7
			Kontribusi PDB pariwisata (Persen)	4,8	5	5,2	5,3	5,5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	n/a	3,1	3,15	3,2	3,35	3,3	3,35
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	n/a	3,1	3,15	3,2	3,35	3,35	3,35
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a	0	1	1	1	1	1
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a	0	1	1	1	1	1
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a	0	1	1	1	1	1

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA															
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target													
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)			1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a		0	1		1		1		1		1
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439 - 1.452	1.564-1.570	1.689	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)			0	50	100	150	200	250	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi	5	7	10		13	15	17		20			
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)			196	296	396	496	596	696	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi	5	7	10		13	15	17		20			
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)			2	4	6	8	10	12	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi	5	7	10		13	15	17		20			
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal (%)			100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang menanamkan modal	17	19	21		23	25	26		28			
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat (dokumen pernyataan minat)			4	4	4	5	5	23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah pernyataan minat	1	3	7		12	17	26		26			
									PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (Rp (triliun))			4,8	5,1	5,6	6,1	6,7	7,5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian izin bermasalah yang terselesaikan	75	75	75		75	75	75		75			
									PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi (%)			15	20	40	60	80	100	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	50	50	50		50	100	100		100			
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro (dokumen)			0	2	1	1	1	1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dokumen rencana tenaga kerja	n/a		1	1		1	1	1		1		
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)			28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	65,6	68,5	71,25		73,45	75,5	77,35		77,35			
									PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja (%)			31,77	35,52	36,01	36,5	36,99	37,97	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	152	175	185		190	195	198		200			
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)			28,62	31,4	35,72	36,04	36,34	36,68	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten	65,6	68,5	71,25		73,45	75,5	77,35		77,35			

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Kontribusi tenaga kerja industri (Persen)	14,2	14,6	15	15,2	15,7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan (Sentra)				20	20	25	25	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	n/a		2	2	2,2	2,5	6,04	3,5	
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi kekuatan (Sentra)				20	20	25	25	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah IKM	n/a		2	2,35	2,68	4,85	2,7	6,7	
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (Juta orang)	13	13,5	14	14,5	15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)			4	6	10	12	15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	n/a	3,1	3,15	3,2	3,35	3,35	3,35		
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)			11	19	19	19	19	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	n/a	3,1	3,15	3,2	3,35	3,3	3,35		
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)			1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a		0	1	1	1	1	
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)			1,5	3	4,5	6	7,5	9	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a		0	1	1	1	1	
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)			3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a		0	1	1	1	1	
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)			1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a		0	1	1	1	1	
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19	20	20	21	21	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Peningkatan Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI (produk)			0	50	100	150	200	250	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi	5	7	10	13	15	17	20	
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)			196	296	396	496	596	696	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi	5	7	10	13	15	17	20	
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)			2	4	6	8	10	12	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif Berstandarisasi	5	7	10	13	15	17	20	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI												RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (juta US\$)				1.420,99	1.449,41	1.478,40	1.507,97		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan omset perdagangan	n/a	n/a	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1	3	7,5	15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi (%)				5,5	5,8	6,2	6,5		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan omset perdagangan	1,5	1,5	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	
									PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)				6	6	6	6		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan omset perdagangan	1,5	1,5	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	
			Nilai devisa pariwisata (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27,5	30	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	n/a	3,1	3,15	3,2	3,35	3,3	3,35		
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	n/a	3,1	3,15	3,2	3,35	3,3	3,35		
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a	0	1	1	1	1	1		
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a	0	1	1	1	1	1		
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a	0	1	1	1	1	1		
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)		1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,86	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a	0	1	1	1	1	1		
		Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4																				
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18																				
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	n/a	3,1	3,15	3,2	3,35	3,3	3,35		
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	n/a	3,1	3,15	3,2	3,35	3,3	3,35		
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2,5	4	5,5	7	8,5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a	0	1	1	1	1	1		
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1,5	3	4,5	6	7,5	9	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a	0	1	1	1	1	1		

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3,19	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a	0	1	1	1	1	1	1
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)		1,58	1,64	1,7	1,76	1,82	1,88	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Investasi Sektor Pariwisata	n/a	0	1	1	1	1	1	1
2		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan																									
		Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah	0			0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)				5	5	5	5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani yang menerapkan Good Farming Practice, good breeding practice dan good handling practice	47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91	
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)		1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani yang menerapkan Good Farming Practice, good breeding practice dan good handling practice	47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91	
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)				5	5	5	5										
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100										
		Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	0			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan (%)		73,92	75	77	79	81	82	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	40,36	41,11	41,86	42,61	43,36	44,11	44,86	
		Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	0			0													Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	42,00	43,11	44,22	45,33	46,44	47,56	48,67	
		Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah	0			0			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)		42,85	50	50	62,5	62,5	62,5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kebijakan Pembangunan yang searah dengan Sasaran RPJMD	84,5	87	89,5	91,5	93	94	95	
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang terinovatif (%)		20	30	30	40	40	50										
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)		2	10	10	10	12	12										
		Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.	0			0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	62,30	62,30	62,92	63,55	64,19	64,83	65,48	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK, SD	111,64	111,64	110,52	109,42	108,32	107,24	106,17	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP	84,78	85,63	86,48	87,35	88,22	89,10	90,00
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD	53,6	53,65	54,19	54,73	55,28	55,83	56,39
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	99,43	99,48	99,53	99,58	99,63	99,68	99,73
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SMP	78,85	79,64	80,43	81,24	82,05	82,87	83,70
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38									
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27									
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57									
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)		69,07	71,07	74,07	77,07	80	83,02	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap satuan pendidikan	85	88	90	91	92	93	94
																		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kompetensi	86,76	87	88	89	90	91	92
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI		34,4	35	37	38	39	40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)			82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	87,80	88,66	89,37	90,08	90,79	91,50	92,21
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)			81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	75,27	76,13	76,74	77,48	78,36	79,25	80,18
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)			0	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program Pemerintah	n/a	n/a	50	60	70	80	90
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti (%)			77	79	81	83	85	87	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda yang ditegakkan	67	70	75	79	85	89	90
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)			75	77	79	81	83	85	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda yang ditegakkan	67	70	75	79	85	89	90
									PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)			70	71	72	73	74	75	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)				100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	51,93	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)				100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	51,93	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)				100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	51,93	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Penentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)				100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	51,93	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)				100	100	100	100	100	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	100
		Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	0			0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)		26,66	40	50	60	70	80	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber KTP Eletronik	0,977	0,978	0,983	0,985	0,989	0,993	0,993	
									PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)		97,16	97,75	98	98,25	98,5	99	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk yang memiliki KIA	65	66	67	68	69	70	70	
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%)		91,47	94	95	96	97	98	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan dokumen pencatatan sipil	96	97	97,5	97,7	97,9	98	98	
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan dokumen pencatatan sipil	96	97	97,5	97,7	97,9	98	98	
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawin pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan dokumen pencatatan sipil	96	97	97,5	97,7	97,9	98	98	
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan dokumen pencatatan sipil	96	97	97,5	97,7	97,9	98	98	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA																							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target																					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026														
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data (inovasi)				3		6		9		12		15		18	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah		95		95,8		96		96,5		97		97,5		98
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah (%)				1,5		1,4		1,3		1,2		1,1		1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah		95		95,8		96		96,5		97		97,5		98
									PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun (dokumen)				3		3		3		3		3		3	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dokumen profil penduduk yang dihasilkan		1		1		1		1		1		1		1
									PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya (%)				80		80		85		90		90		90	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk		1,57		1,45		1,35		1,25		1,10		0,95		0,90
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)				54,44		55,12		55,46		55,89		56,32		56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran tota		2,83		2,81		2,80		2,78		2,76		2,75		2,74
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)				51,74		59,3		61,38		63,46		65,54		67,62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase organisasi KB yang aktif (persen)		37,00		42,00		47,00		52,00		57,00		62,00		65,00
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7			0		98 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)				0,687		0,687		0,687		0,687		0,687		0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif		80		82		84		86		88		90		92
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2			0		80 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)				0,687		0,687		0,687		0,687		0,687		0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif		80		82		84		86		88		90		92
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkat an Anak (orang)				25		25		25		25		25		25	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang valid		82		84		86		88		90		96		98
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Tersedianya Data Fakir Miskin yang valid (%)				100		100		100		100		100		100	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang valid		82		84		86		88		90		96		98
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif (persen)				30		35		40		50		50		50	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS yang valid		82		84		86		88		90		96		98
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230		217		205	194	183 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73,8		74,8		76		78		80		82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes		72,14		74		78		81		86		90		90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)				91		92		93		94		95		96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan		73,4		77,5		82,5		87,5		92,50		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)				85		86		87		88		89		90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes		72,14		74		78		81		86		90		90

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA								
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
											2020	2021	2022	2023	2024	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021			2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kesepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34,4	35	37	38	39	40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI									RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
											2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34,4	35	37	38	39	40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78,6	79,6	81	83	85	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)			54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran total	2,83	2,81	2,80	2,78	2,76	2,75	2,74
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,6	8,3	8	7,7	7,4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)			54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran total	2,83	2,81	2,80	2,78	2,76	2,75	2,74
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)			54,44	55,12	55,46	55,89	56,32	56,75	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran total	2,83	2,81	2,80	2,78	2,76	2,75	2,74
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)			51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase organisasi KB yang aktif (persen)	37	42,00	47,00	52,00	57,00	62,00	65,00
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16	14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85	86	87	88	89	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34,4	35	37	38	39	40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78,6	79,6	81	83	85	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gemas hidup sehat (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)				82	82	84	86	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	87,80	88,66	89,37	90,08	90,79	91,50	92,21
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)				81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	75,27	76,13	76,74	77,48	78,36	79,25	80,18
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)			1	20	20	20	20	20	20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	37,5	50	60	70,21	79,59	88,24	100
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)					100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	51,93	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)					100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	51,93	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)					100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	51,93	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)					100	100	100	100	100	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	51,93	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
								PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)				291,79	292,98	294,15	295,31		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersedian Energi (kilo kalori/kapita/hari)	3.687	3.700	3.710	3.720	3.730	3.740	3.750
								PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)				82,5	83	84	84,5		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	67,64	68	69	70	71	72	73
								PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)				22	24	27	28		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Registrasi PSAT (Beras)	0	0	5	6	7	8	9
								PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)				83	83,5	84	84,5		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rekomendasi sertifikat prima	0	0	5	6	9	11	12
								PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Mandiri (Dasawisma)		10.800	11.300	11.800	12.300	12.800	13.300		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Maju	545	575	580	590	602	616	620
								PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah KAN yang aktif (lembaga adat)		299	350	400	450	500	544		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Maju	545	575	580	590	602	616	620
								PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah LPM Mandiri (LPM)		0	7	15	25	37	50		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Maju	545	575	580	590	602	616	620
								PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Posyandu Mandiri (Posyandu)		2.319	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Maju	545	575	580	590	602	616	620
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)		51,74	59,3	61,38	63,46	65,54	67,62		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase organisasi KB yang aktif (persen)	37,00	42,00	47,00	52,00	57,00	62,00	65,00
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)		5	10	20	30	40	50		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	90	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11										
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15.633	16.652	17.861	19.280	20.832	22.742		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	16	17	18	19	20	21	22

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)			39,27	40	40,5	41,6	42,4	44	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah keluarga pelaku pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meningkat pendapatannya	2.126	2.680	2.211	2.255	2.300	2.346	2.392
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)				5	5	5	5		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani yang menerapkan Good Farming Practice, good breeding practice dan good handling practice	47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)			1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani yang menerapkan Good Farming Practice, good breeding practice dan good handling practice	47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)				0,63	0,6	0,57	0,54		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani yang menerapkan Good Farming Practice, good breeding practice dan good handling practice	47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91
									PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)				4	8	12	16										
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi (%)				100	100	100	100		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan Perangkat daerah yang selaras dengan Perencanaan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
											2020	2021	2022	2023	2024	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85	86	87	88	89	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA																
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target													
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan keseseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)								40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan													
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)								90	92	94	96	98	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)								9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)								78,6	79,6	81	83	85	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)								100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)								85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)								100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)								21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan								
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)								73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)								91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)								85	86	87	88	89	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)								81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)								92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan								

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA												
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										
											2020	2021	2022	2023	2024	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)				252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan		73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes		72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan		73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan		73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan		73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40	40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan		73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan		73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan		73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan		73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan		73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	92,11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes		72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan		73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	10,6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan		73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100		

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
			Persentase merokok penduduk usia 10- 18 tahun	9,1	9	8,9	8,8	8,7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
																									2020	2021
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
																									2020	2021	2022	2023
					2021	2022	2023	2024	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan		73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS		81	100	120	140	160	182	182
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gemas hidup sehat (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS		81	100	120	140	160	182	182
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS		81	100	120	140	160	182	182
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100		

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182	
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI										RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kurjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)					8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat (kabupaten/kota)					8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)					8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73,8	74,8	76	78	80	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85	86	87	88	89	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																									2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
											2020	2021	2022	2023	2024	2020			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeserelaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021			2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57										
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38										
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31,27	32,27	34,27	34,27	37,27	37,27										
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52,87	53,8	54,72	54,72	56,57	56,57										
									PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (dokumen)		27	33	39	45	51	57	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan local yang dikembangkan	1	1	2	2	2	2	2	2
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)		69,07	71,07	74,07	77,07	80	83,02	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan pada setiap satuan pendidikan	85	88	90	91	92	93	94	
																		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi	86,76	87	88	89	90	91	92	
									PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi (%)		6	21	36	51	66	81	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah izin sekolah dikelola masyarakat yang diterbitkan	5	7	8	9	10	11	12	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)				2	3	4	5	6	7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase cakupan pemenuhan hak anak	40	45	50	55	60	65	65
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)			83,5	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	70	75	77	79	82	85	85	
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)				2	3	4	5	6	7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase cakupan pemenuhan hak anak	40	45	50	55	60	65	65
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)			83,5	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	70	75	77	79	82	85	85	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,211648	91,277943	91,278962	91,334696	91,38627	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)			11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang telah menerapkan kebijakan dan penganggaran responsif gender	66,67	73,33	80	87	93,33	100	100	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24481	73,5005	73,740519	73,96592	74,177476	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)			11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang telah menerapkan kebijakan dan penganggaran responsif gender	66,67	73,33	80	87	93,33	100	100	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)			11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang telah menerapkan kebijakan dan penganggaran responsif gender	66,67	73,33	80	87	93,33	100	100	
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)			84	84	88	92	96	100	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0192	0,01784	0,0156	0,0134	0,011	0,009	0,0062	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga (indeks)			69,5	70	70,5	71	71,5	72	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT	0,0072	0,0069	0,0064	0,0055	0,0045	0,0039	0,0039
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan (%)			14	15	16	17	18	20	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	% Organisasi Pemuda Yang Aktif	4,1	4,1	6,6	9,1	11,6	14,1	16,6
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah wirausaha muda baru (orang)			230	268	348	348	348	1890	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	% Wira Usaha Muda	7,3	7,3	9,8	12,3	14,8	17,3	19,8
		Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan)	27,9		0		40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)				0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	80	82	84	86	88	90	92
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif	25,6		0		50	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)				0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	80	82	84	86	88	90	92
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	1600000	1850000	1350000	1100000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)			61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26									
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)			20	20	20	20	20	20									
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar)			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000									
			Bidang tanah yang diredistribusi	750000		0		7750000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti (%)			65	70	75	80	85	90	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase subjek dan objek yang teredistribusi	0	100	100	100	100	100	100
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6286087		0		56286087	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)			80	85	90	95	95	95	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masyarakat penerima santunan tanah	100	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	0			0			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi (nilai)			2,7	2,71	2,72	2,73	2,74	2,75	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah masyarakat yang meningkat wawasan kebangsaannya		0	500 org	500 org	500 org	500 org	500 org	500 org
		Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan	0			0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan (Karya Budaya)				8	8	8	8		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan di inventarisasi		222	222	230	235	240	245	250
									PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan (Kesenian Tradisional)				21	23	23	23		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan		7	7	7	7	7	7	7
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan (Cagar Budaya)				11	16	21	26		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan		55,14	60	60	60	60	60	60
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (Cagar Budaya)				15	15	15	15		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan		55,14	60	60	60	60	60	60
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum (kali)				15	15	15	15											
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum (orang)				30000	35000	40000	45000											
		Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama			0			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)				4	8	12	16											
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)			3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		75%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter	0			0			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun (dokumen)			N/A	3	6	9	12	15										
									PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah (Orang)			N/A	6	12	18	24	30										
									PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP (%)				1,41	1,52	1,62	1,72		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks budaya baca masyarakat	n/a		0,18	0,2	0,22	0,24	0,26	0,29

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)		42,85	50	50	62,5	62,5	62,5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kebijakan Pembangunan yang searah dengan Sasaran RPJMD	84,5	87	89,5	91,5	93	94	95
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang teninovatif (%)		20	30	30	40	40	50									
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)		2	10	10	10	12	12									
5		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar																								
		Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program Pemerintah	n/a	n/a	50	60	70	80	90
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program Pemerintah	n/a	n/a	50	60	70	80	90
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)		75	80	85	90	95	95	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat	0	100	100	100	100	100	100
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,1	3,3	3,6	4																		
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman)	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	75,27	76,13	76,74	77,48	78,36	79,25	80,18
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	37,5	50	60	70,21	79,59	88,24	100
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat		8	11	14	17	19	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI												RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
											2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182	
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik (%)	72.92% penanganan; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)			1	20	20	20	20	20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	37,5	50	60	70,21	79,59	88,24	100	
									PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)			75	75	75	75	75	75	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kelompok masyarakat/komunitas yang peduli lingkungan hidup	3	3	4	5	6	7	7	
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9% BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73,8	74,8	76	78	80	82	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	90	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
																									2020	2021	2022
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34,4	35	37	38	39	40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun		9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78,6	79,6	81	83	85	87	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85,53	86,84	88,16	89,47	90,79	92,11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Kepuasan Pelayanan pada Faskes	72,14	74	78	81	86	90	90	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21,1	18,44	15,43	14	12,5	10,6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan kesehatan	73,4	77,5	82,5	87,5	92,50	100	100	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gemas hidup sehat (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Nagari PHBS	81	100	120	140	160	182	182

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA																					
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target																			
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026												
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pemukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)			1		20		20		20		20		20		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	37,5	50	60	70,21	79,59	88,24	100					
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)			82		82		84		86		88		90		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	87,80	88,66	89,37	90,08	90,79	91,50	92,21					
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)			0		3		3		3		3		3		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program Pemerintah	n/a	n/a		50		60		70		80		90
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,501896	55,181463	57,059998	58,104983	58,498632	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber- sumber air (%)			52,28		53,78		55,28		56,78		58,28		59,78		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	28,81	31,29	35,63	36,62	37,97	39,28	40,10					
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemuenuhan kebutuhan air irigasi (%)			68,8		70,36		71,92		73,48		75,04		76,6		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	57,05	59,05	59,20	60,75	62,60	64,60	66,70					
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)			64,75		66,51		68,27		70,03		71,79		73,5		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	28,81	31,29	35,63	36,62	37,97	39,28	40,10					
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber- sumber air (%)			52,28		53,78		55,28		56,78		58,28		59,78		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	28,81	31,29	35,63	36,62	37,97	39,28	40,10					
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemuenuhan kebutuhan air irigasi (%)			68,8		70,36		71,92		73,48		75,04		76,6		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	57,05	59,05	59,20	60,75	62,60	64,60	66,70					
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)			64,75		66,51		68,27		70,03		71,79		73,5		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	28,81	31,29	35,63	36,62	37,97	39,28	40,10					

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Luas lahan pertanian padi dan non padi yang beringasi meningkat (Hektare)	45229,167	115942,71	116142,71	116342,71	116342,71	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber- sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	28,81	31,29	35,63	36,62	37,97	39,28	40,10
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	57,05	59,05	59,20	60,75	62,60	64,60	66,70
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	28,81	31,29	35,63	36,62	37,97	39,28	40,10
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	57,05	59,05	59,20	60,75	62,60	64,60	66,70
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber- sumber air (%)		52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	28,81	31,29	35,63	36,62	37,97	39,28	40,10
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68,8	70,36	71,92	73,48	75,04	76,6	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi	57,05	59,05	59,20	60,75	62,60	64,60	66,70
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan pemungkiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	28,81	31,29	35,63	36,62	37,97	39,28	40,10
									PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Fasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi (lokasi)		1	10	10	10	10	10	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase luasan KEHATI yang dikelola	n.a	1	1	1	2	2	2
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	kinerja lalu lintas kabupaten kota	0,27	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas (%)		1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	kinerja lalu lintas kabupaten kota	0,27	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22
		Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)			0			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)		80	85	90	95	95	95	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase masyarakat penerima santunan tanah	100	100	100	100	100	100	100

[illegible]

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim																								
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	90	90,31	90,84	91,15	91,42	91,80	92,10
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas tutupan lahan	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78	71,78
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,5	59	59,5	60	60,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indek kualitas udara	91,81	91,82	91,82	91,86	91,90	92,20	92,3
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indek kualitas udara	91,81	91,82	91,82	91,86	91,90	92,20	92,3
									PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya (Kabupaten/Kota)		19	19	19	19	19	19	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase luasan KEHATI yang dikelola	n.a	1	1	1	2	2	2
		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1																		
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak	0,34	0,59	0,81	1	1,15																		
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4,5	4	3,5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	100	100
		Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,8	12,5	12,8	12,8	13,2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33,3	35,7	51,7	51,8									
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,8	50,7	53,1	57,2	58,3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)			5	5	5	5		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani yang menerapkan Good Farming Practice, good breeding practice dan good handling practice	47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)			1,4	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani yang menerapkan Good Farming Practice, good breeding practice dan good handling practice	47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91	
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)				5	5	5	5		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) budidaya pertanian	47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91	
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)			20	20	20	20	20	100	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) budidaya pertanian	47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91	
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (%)			3	1,08	1,28	1,44	1,65	5,48	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) budidaya pertanian	47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91	
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)				0,63	0,6	0,57	0,54		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani yang menerapkan Good Farming Practice, good breeding practice dan good handling practice	47,92	47,92	48,88	49,86	50,85	51,87	52,91	
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian (%)				5	7	8	10		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah unit usaha yang diberikan rekomendasi izin usaha	30,47		180	190	200	210	220	230
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian (%)			3	3	3	3	3	15	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah unit usaha yang diberikan rekomendasi izin usaha	30,47		180	190	200	210	220	230
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)			61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26										
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)			20	20	20	20	20	20										
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)			1	3	3	3	3	3										
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,5	9	9,3	9,4	9,4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terlaksananya pembangunan TPA Regional (lokasi)			2	2	3	3	3	3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase fasilitas pengurangan sampah diperkotaan		0	0	20	30	40	50	60
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)			81	83	85	87	88	90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	75,27	76,13	76,74	77,48	78,36	79,25	80,18	

[illegible]

No	KODE (PN/PP)		Indikator	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN/KOTA									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas	70	75	80	85	85																		
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas	50	60	70	80	85	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk (%)		100	100	100	100	100	100									
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Penataan Jabatan Perangkat Daerah (%)		100	100	100	100	100	100									
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat Daerah yang menyusun SOP dan Proses Bisnis (Perangkat Daerah)		8	12	16	18	20	22									
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01) (Perangkat Daerah)		7	8	10	12	14	16									
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik (Perangkat Daerah)		5	7	9	11	13	15									
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas	30	35	45	55	70	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai (%)		65	70	75	80	85	90	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase tindak lanjut temuan	9,98	11	12,5	14	15,5	17	18,5
																		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	jumlah temuan BPK	100	100	100	100	100	100	100
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,2																		
			Global Terrorism Index	4,44	4,39	4,34	4,29	4,24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75%	85%	85%	85%	85%	85%	85%

[illegible]